



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2023**

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang :

- bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
- bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Diktum KETIGA huruf a Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dimaksud, Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Batasan Pengertian dan Definisi
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Unsur Penunjang/Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan dan penelitian di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan nasional untuk 20 (dua puluh) tahunan periode tahun 2005-2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk 5 (lima) tahunan periode tahun 2020-2024.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah dokumen perencanaan daerah untuk 20 (dua puluh) tahunan periode tahun 2005-2025.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah periode tahun 2024-2026.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode tahun 2024-2026.
14. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
18. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).
20. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. RPD;
- b. pelaksanaan RPD; dan
- c. pengendalian dan evaluasi.

BAB II
RPD
Pasal 3

- (1) RPD memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program pembangunan Daerah selama periode tahun 2024-2026.
- (2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan Dan Isu Strategis;
 - e. BAB V : Tujuan Dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. BAB IX : Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PELAKSANAAN RPD
Pasal 4

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilaksanakan oleh penjabat Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah tahun 2024-2026.

Pasal 5

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renstra PD dan Renja PD;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBD; dan
- c. acuan bagi seluruh Pemangku Kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2024-2026.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program RPD dalam kebijakan pengalokasian anggaran.
- (2) Kepala PD melaksanakan program RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Renstra PD.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Penjabat Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi RPD.
- (2) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Februari 2023



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 27 Februari 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
SETDA
JOHANNA E. LISAPALY



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 007

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 7 TAHUN 2023

TANGGAL : 27 FEBRUARI 2023

**RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026**



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN		I-1
1.1 Latar Belakang		I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....		I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen		I-6
1.4 Maksud dan Tujuan.....		I-8
1.5 Sistematika Penulisan		I-8
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH ...		II-1
2.1 Geografi dan Demografi.....		II-1
2.1.1 Geografis dan Wilayah Administratif.....		II-1
2.1.1.1 Wilayah Rawan Bencana		II-2
2.1.1.2 Demografi Wilayah		II-4
2.1.2 Potensi Perkembangan Wilayah		II-5
2.1.2.1 Pola Ruang Eksisting dan Aspek Pertanahan...		II-5
2.1.2.2 Kawasan Ekosistem Mangrove.....		II-11
2.1.2.3 Hutan Produksi(termasuk APL dan HGU)		II-11
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat		II-15
2.2.1 Pertumbuhan PDRB		II-15
2.2.2 Laju Inflasi		II-18
2.2.3 PDRB Per Kapita.....		II-19
2.2.4 Indeks Gini (Gini Ratio).....		II-20
2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia.....		II-21
2.2.5.1 Pengeluaran per Kapita.....		II-23
2.2.5.2 Umur Harapan Hidup.....		II-25
2.2.6 Angka Kemiskinan		II-27
2.2.7 Status Kesehatan.....		II-32
2.2.7.1 Status Gizi.....		II-32
2.2.7.2 Angka Kematian Ibu dan Bayi		II-34
2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....		II-35
2.2.9 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah.....		II-36
2.2.10 Skor Pola Pangan Harapan.....		II-36
2.3 Aspek Pelayanan Umum		II-37
2.3.1 Pendidikan.....		II-37
2.3.1.1 Angka Partisipasi Sekolah		II-37

2.3.1.2 Rasio Murid/Guru	II-39
2.3.2 Kesehatan	II-40
2.3.2.1 Sarana Kesehatan	II-40
2.3.2.2 Tenaga Kesehatan	II-41
2.3.3 Pekerjaan Umum	II-42
2.3.3.1 Jalan dan Jembatan	II-42
2.3.3.2 Sumber Daya Air (Jaringan Irigasi, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya)	II-44
2.3.3.3 Sanitasi Lingkungan	II-47
2.3.4 Perhubungan	II-52
2.3.5 Listrik	II-53
2.3.6 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	II-54
2.3.6.1 Koperasi	II-54
2.3.6.2 Digitalisasi Koperasi	II-56
2.3.6.3 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	II-57
2.3.7 Penanaman Modal	II-58
2.3.8 Sosial	II-60
2.3.9 Petanian	II-63
2.3.9.1 Tanaman Pangan	II-64
2.3.9.2 Hortikultura	II-67
2.3.10 Kehutanan	II-72
2.3.11 Kelautan dan Perikanan	II-73
2.3.11.1 Perikanan Tangkap	II-73
2.3.11.2 Budidaya Laut	II-73
2.3.11.3 Budidaya Air Payau	II-75
2.3.12 Peternakan	II-75
2.3.13 Pariwisata	II-78
2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-80
2.4.1 Ekonomi Makro Regional	II-80
2.4.2 Keuangan Pemerintahan Daerah	II-80
2.4.3 Perkembangan Inflasi	II-81
2.4.4 Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah	II-83
2.4.5 Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan	II-83
2.4.6 Prospek Perekonomian Daerah	II-84
2.5 Penerapan Dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal	II-84

2.5.1 Urusan Pendidikan	II-84
2.5.2 Urusan Kesehatan	II-85
2.5.3 Urusan Pekerjaan Umum	II-86
2.5.4 Urusan Perumahan Rakyat.....	II-87
2.5.5 Urusan Penyelenggaran Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	II-88
2.5.5.1 Satuan Polisi Pamong Praja	II-88
2.5.5.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	II-88
2.5.6 Urusan Sosial	II-89
2.6 Capaian SDGS Provinsi NTT Tahun 2021	II-90
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu (2019-2021)	III-1
3.1.1 Kinerja Peklaksanaan APBD.....	III-1
3.1.2 Kinerja Pendapatan Daerah	III-3
3.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	III-5
3.1.3 Neraca Daerah.....	III-8
3.1.3.1 Aset	III-11
3.1.3.2 Kewajiban.....	III-12
3.1.3.3 Ekuitas Dana	III-13
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-13
3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran.....	III-14
3.2.2 Analisis Pembiayaan	III-20
3.3 Kerangka Pendanaan	III-24
3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja	III-24
3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan	III-24
3.3.1.2 Proyeksi Pendapatan Daerah	III-25
3.3.1.3 Proyeksi Belanja.....	III-31
3.3.1.4 Proyeksi Pembiayaan Daerah.....	III-34
3.3.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan.....	III-37
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan.....	IV-1
4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.....	IV-8
4.1.2 PDRB Perkapita.....	IV-9
4.1.3 Indeks Pembangunan Manusia.....	IV-10
4.1.4 Penduduk dibawah Garis Kemiskinan	IV-10
4.1.5 Inflasi	IV-11

4.1.6 Indeks Gini	IV-12
4.1.7 Indeks Pembangunan Gender	IV-13
4.2 Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan ..	IV-13
4.2.1 Urusan Wajib Pemerintah Pelayanan Dasar	IV-14
4.2.1.1 Urusan Wajib Yang Berhubungan Dengan Pelayanan Dasar	IV-14
4.2.1.2 Urusan Wajib Tidak Berhubungan Dengan Pelayanan Dasar	IV-16
4.2.1.3 Urusan Pilihan	IV-20
4.2.1.4 Pendukung Urusan	IV-21
4.2.1.5 Penunjang Urusan	IV-21
4.3 Analisis Lingkungan Strategis	IV-23
4.3.1 Lingkungan Global	IV-23
4.3.1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) TPB / SDGS	IV-23
4.3.1.2 Perekonomian Global dan Perdagangan Global	IV-24
4.3.1.3 Revolusi Industri 4.0	IV-25
4.3.1.4 Keterbukaan Pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang Telah Diimplementasikan Sejak Tahun 2016	IV-25
4.3.1.5 Pariwisata Dunia	IV-26
4.3.1.6 Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo	IV-26
4.3.2 Lingkungan Nasional	IV-34
4.3.2.1 Kebhinekaan Indonesia dari Sisi Etnis, Ras, Suku, Sosial, Budaya, dan Agama	IV-34
4.3.2.2 Kebijakan Pembangunan Nasional di Wilayah NTT	IV-34
4.3.2.3 Proyek Prioritas Strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur	IV-41
4.3.2.4 Penelaahan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025	IV-41
4.3.3 Isu Strategis Provinsi	IV-44
4.3.3.1 Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Yang Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan	IV-44
4.3.3.2 Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan	IV-45
4.3.3.3 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan	

Masalah Sosial	IV-47
4.3.3.4 Penanggulangan Bencana Alam dan Adaptasi Perubahan Iklim	IV-47
4.3.3.5 Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT	IV-47
4.3.3.6 Refomarsi Birokrasi.....	IV-48
4.3.3.7 Dampak Covid 19.....	IV-50
BAB V TUJAN DAN SASARAN	V-1
5.1 Penyelarasan Target Indikator Makro Dan Program Prioritas Nasional Dalam RPJMN 2020-2024	V-1
5.2 Kesesuaian Sasaran Pokok Dan Arah Kebijakan RPJPD NTT Tahun 2005-2025.....	V-2
5.3 Tujuan Dan Sasaran.....	V-4
5.4 Cascading Kinerja.....	V-9
BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PROIRITAS.....	VI-1
6.1 Strategi.....	VI-1
6.2 Arah Kebijakan.....	VI-14
6.3 Program Pembangunan Daerah	VI-15
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
BAB IX PENUTUP.....	IX-1
9.1 Kaidah Pelaksanaan	IX-1
9.2 Pedoman Transisi	IX-2
9.3 Pengembangan Pembiayaan Pembangunan.....	IX-3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2018-2021	II-4
Tabel 2.2	Sebaran Luasan Hutan Lindung Tahun 2020	II-6
Tabel 2.3	Kawasan Konservasi Provinsi NTT	II-7
Tabel 2.4	Tabel Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota	II-12
Tabel 2.5	Luas Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Hektar) di Provinsi NTT	II-14
Tabel 2.6	PDRB ADHB-ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT Tahun 2018-2021	II-15
Tabel 2.7	Presentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT Tahun 2018-2021	II-16
Tabel 2.8	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen) Tahun 2018-2021	II-17
Tabel 2.9	Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Nusa Tenggara Timur Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100), (2018=100) Tahun 2018-2021	II-18
Tabel 2.10	PDRB dan PDRB Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2020	II-20
Tabel 2.11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi NTT Menurut Komponen, Tahun 2015-2021	II-23
Tabel 2.12	Jumlah Pengeluaran Per Kapita di Provinsi NTT Tahun 2019-2021	II-24
Tabel 2.13	Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2015-2021	II-25
Tabel 2.14	Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2016-2021	II-27
Tabel 2.15	Estimasi Kemiskinan Ekstrem di NTT Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2022	II-30
Tabel 2.16	Status Gizi Balita di NTT Tahun 2018-2022	II-33
Tabel 2.17	Kasus Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten/Kota di Wilayah NTT Tahun 2018-2022	II-35
Tabel 2.18	Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah di provinsi NTT Tahun 2013-2021	II-36

Tabel 2.19	Skor Pola Pangan Harapan di Provinsi NTT Tahun 2013-2020	II-36
Tabel 2.20	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur 15-18 Tahun Per Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2019-2021	II-37
Tabel 2.21	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)	II-39
Tabel 2.22	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2021.....	II-40
Tabel 2.23	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa) di Provinsi NTT Tahun 2017-2021	II-41
Tabel 2.24	Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km) Tahun 2018-2020.....	II-42
Tabel 2.25	Rekapitulasi Jembatan Provinsi Pada Ruas Jalan Provinsi Tahun 2020	II-43
Tabel 2.26	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi di Nusa Tenggara Timur	II-44
Tabel 2.27	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Tempat Buang Air Besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021	II-48
Tabel 2.28	Data Akses Sanitasi Layak, BABS, dan STBM Provinsi NTT	II-51
Tabel 2.29	Arus Penumpang Yang Datang dan Berangkat pada Pelabuhan Udara Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2021	II-52
Tabel 2.30	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (Persen) Tahun 2019-2021	II-53
Tabel 2.31	Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di NTT Tahun 2022	II-54
Tabel 2.32	Realisasi Proyek dan Investasi PMDKM Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021.....	II-58
Tabel 2.33	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017	II-62
Tabel 2.34	Sektor Pertanian Dalam Pembentukan PDRB Tahun	

2019-2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	II-64
Tabel 2.35 Produksi Padi di Provinsi NTT Tahun 2019-2021	II-65
Tabel 2.36 Produksi Jagung Menurut Kabupaten/Kota (Ton), 2019-2021	II-66
Tabel 2.37 Produksi Buah-Buahan Tahunan (Kwintal) Tahun 2019-2021	II-68
Tabel 2.38 Produksi Tanaman Biofarmaka (kg), 2019-2021	II-69
Tabel 2.39 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota (Kwintal) Tahun 2019-2021	II-70
Tabel 2.40 Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar) di Provinsi NTT Tahun 2017-2020	II-72
Tabel 2.41 Populasi Ternak Besar Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 (Ribu ekor)	II-75
Tabel 2.42 Populasi Ternak Kecil Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di Provinsi NTT Tahun 2019-2021 (Ribu ekor)	II-76
Tabel 2.43 Banyaknya Rumah Potong Hewan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2019-2021	II-77
Tabel 2.44 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021	II-79
Tabel 2.45 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi Urusan Pendidikan	II-85
Tabel 2.46 Target dan Realisasi Menurut Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan	II-86
Tabel 3.1 Kinerja Pendapatan Daerah 2019-2021	III-4
Tabel 3.2 Proporsi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021	III-7
Tabel 3.3 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021	III-7
Tabel 3.4 Neraca Provinsi NTT 2019-2021	III-9
Tabel 3.5 Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2021	III-10
Tabel 3.6 Proporsi Kinerja Belanja Daerah 2019 – 2021	III-15

Tabel 3.7	Rata-rata Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2019-2021	III-17
Tabel 3.8	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur	III-18
Tabel 3.9	Struktur Pembiayaan Daerah Provinsi Tahun 2019-2021	III-20
Tabel 3.10	Defisi Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019-2021	III-22
Tabel 3.11	Komposisi Penutup Defisi Riil ABPD Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019-2021	III-22
Tabel 3.12	Rata-Rata Pertumbuhan dan Proyeksi Pendapatan Daerah	III-27
Tabel 3.13	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026	III-30
Tabel 3.14	Rata-Rata Pertumbuhan dan Proyeksi Pertumbuhan Belanja	III-33
Tabel 3.15	Proyeksi Belanja Daerah 2021-2023	III-34
Tabel 3.16	Proyeksi Pembiayaan Daerah	III-35
Tabel 3.17	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024-2026	III-36
Tabel 3.18	Kapasitas Riil Keuangan Daerah	III-37
Tabel 3.19	Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah.....	III-38
Tabel 4.1	Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	IV-2
Tabel 4.2	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan RPJMN untuk Provinsi NTT Tahun 2020-2024	IV-34
Tabel 4.3	Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan di Provinsi Nusa Tenggara Timur	IV-35
Tabel 5.1	Target Indikator Makro Dalam RPJMN 2020-2024 dengan RPD Provnsi NTT Tahun 2024-2026	V-2
Tabel 5.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah	V-6
Tabel 6.1	Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Nusa Tenggara Timur	VI-3
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur	VI-14
Tabel 6.3	Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026.....	VI-16
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Provinsi NTT Tahun 2024-2026	VII-1



Tabel 7.2	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.....	VII-4
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Utama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026	VIII-1
Tabel 8.2	Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	VIII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Hubungan RPD dengan Dokumen Lainnya .	I-7
Gambar 1.2	Hubungan RPD dengan Dokumen RTRWP dan RZWP3K ..	I-7
Gambar 2.1	Peta Provinsi NTT	II-1
Gambar 2.2	Peta dan Data Bencana di NTT Tahun 2021	II-3
Gambar 2.3	Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Provinsi NTT Tahun 2021	II-8
Gambar 2.4	Peta Risiko Bencana Banjir Provinsi NTT Tahun 2021	II-8
Gambar 2.5	Peta Risiko Rawan Gunung Berapi Provinsi NTT Tahun 2021	II-9
Gambar 2.6	Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTT Tahun 2021	II-10
Gambar 2.7	Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTT Tahun 2021	II-10
Gambar 2.8	Grafik Gini Rasio Provinsi NTT Tahun 2016-2021	II-21
Gambar 2.9	IPM NTT Tahun 2011-2021.....	II-22
Gambar 2.10	Peta Sebaran Desil 1 Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi NTT, Menurut Kabupaten/Kota, 2022	II-32
Gambar 2.11	Kasus Kematian Ibu dan Bayi di NTT Tahun 2018-2022	II-34
Gambar 2.12	Capaian Desa/Kelurahan STOP BABS Tahun 2022	II-49
Gambar 2.13	Capaian Desa/Kelurahan Melaksanakan STBM Tahun 2022	II-50
Gambar 2.14	Perkembangan Digitalisasi Koperasi Menurut Kabupaten/ Kota Di NTT	II-56
Gambar 2.15	Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Menurut Jenis Usaha	II-57
Grafik 2.16	Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya Di NTT Tahun 2021	II-74
Gambar 3.1	Persentase Perbandingan Belanja Pegawai Dengan Total Belanja	III-19
Gambar 4.1	Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2019 dan 2020	IV-9
Gambar 4.2	Perbandingan Target dan PDR Per Kapita	

	Tahun 2019 dan 2020	IV-9
Gambar 4.3	Target dan Capaian IPM NTT Tahun 2019 dan 2020.....	IV-10
Gambar 4.4	Target dan Capaian Penduduk dibawah Garis Kemiskinan Tahun 2019 dan 2020	IV-11
Gambar 4.5	Target dan Capaian Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2019 dan 2020	IV-12
Gambar 4.6	Target dan Capaian Indeks Gini Tahun 2019 dan 2020....	IV-13
Gambar 4.7	Destinasi Wisata Prioritas	IV-27
Gambar 4.8	Lokasi DPP Labuan Bajo dan Sebaran Major Project RPJMN 2020 – 2024 di Kepulauan Nusa Tenggara	IV-28
Gambar 5.1	Cascading Kinerja Pemerintah Provinsi NTT	V-9
Gambar 6.1	Arah Kebijakan Provinsi NTT Tahun 2024-2025	VI-14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun daerah itu sendiri secara berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan masyarakatnya dapat terus meningkat, sehingga mampu memenuhi atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dilakukan dengan mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk melaksanakan pembangunan daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sistematik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018-2023 telah berakhir pada tahun 2023, sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menyusun dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang baru. Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada Tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan diperlukan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dimana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang tujuannya untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah dan dalam rangka memastikan RPJPD Tahun 2005-2025 dilaksanakan terutama dalam pencapaian sasaran pokok dan arah kebijakan daerah tahap terakhir.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
22. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
23. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0117);

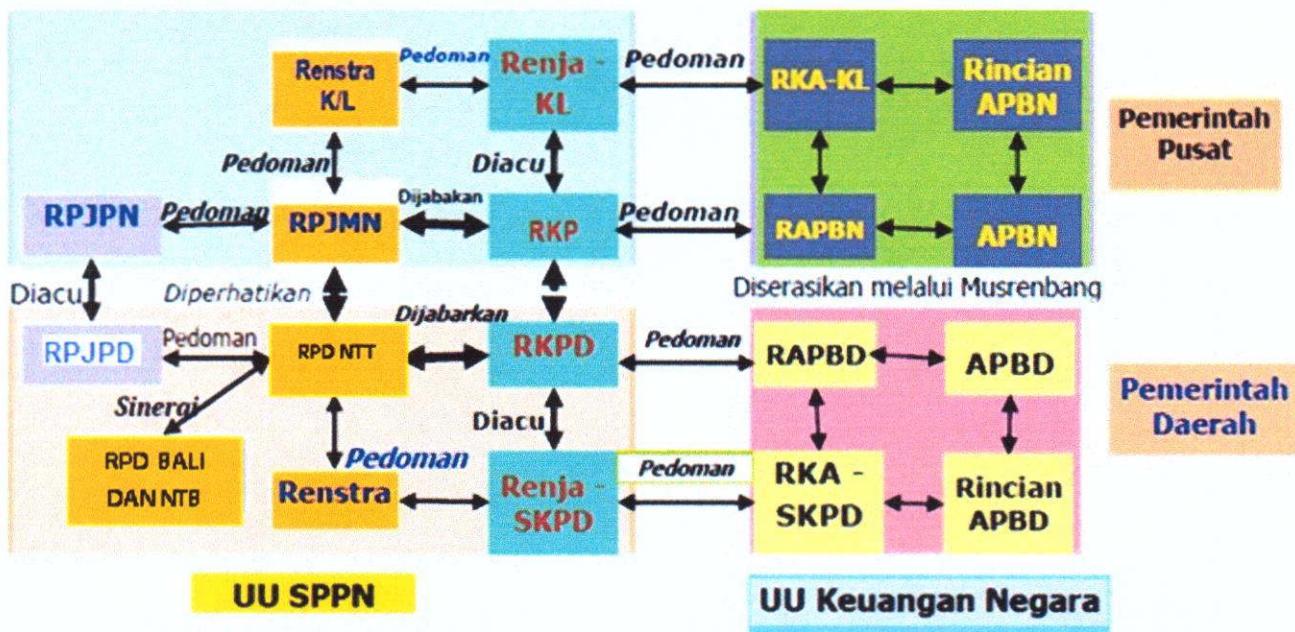
37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
38. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 001).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 memiliki keterkaitan vertikal dan horizontal dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu:

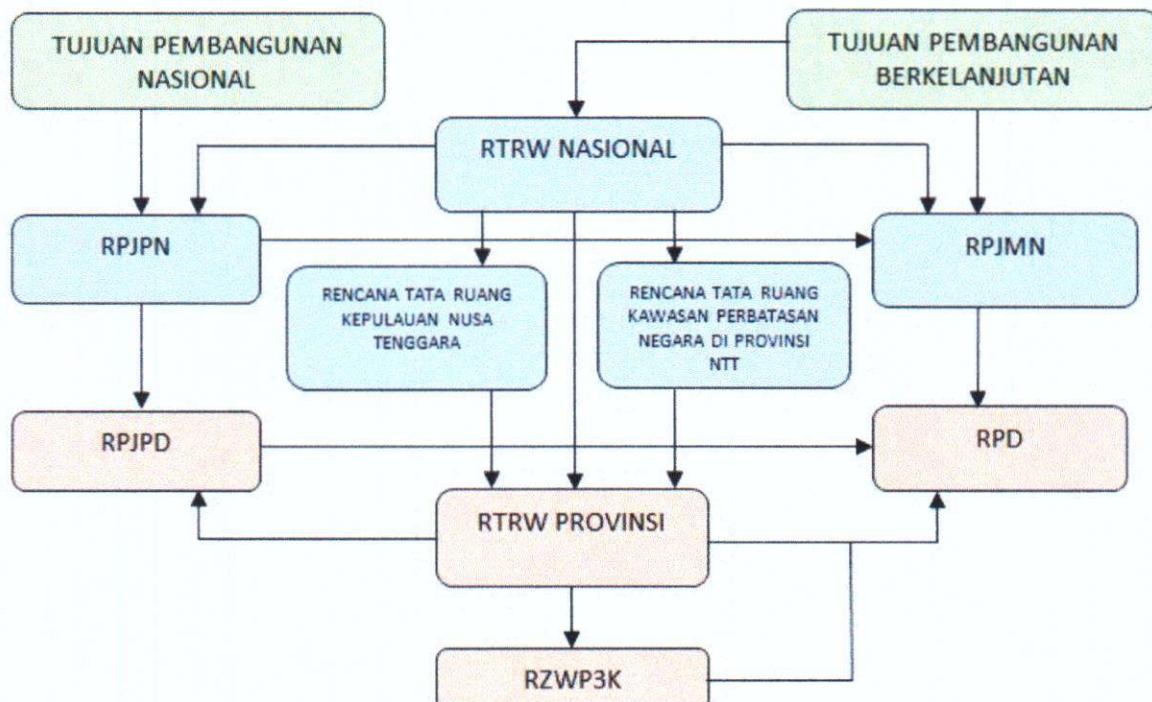
39. Merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga dalam penyusunannya mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, Rencana Tata Ruang Kawasan Pembatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, RPJPD Provinsi Tahun 2005-2025 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2010-2030;
40. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
41. Menjadi acuan sinergi pembangunan pusat dan daerah, sinergi dengan kabupaten/kota, investasi swasta, lembaga internasional dan partisipasi masyarakat.

Alur hubungan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2023 dengan dokumen perencanaan lainnya disampaikan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1
Bagan Alur Hubungan RPD dengan Dokumen Rencana Lainnya

Keterkaitan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara, Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP3K) -sebagaimana Gambar 1.2.



Gambar 1.2
Hubungan RPD dengan Dokumen RTRWP dan RZWP3K

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026 adalah:

1. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan daerah;
2. Mewujudkan pembangunan yang terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan;
3. Sebagai pedoman penyusunan RKPD;
4. Menjadi pedoman DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka pengendalian pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai prioritas dan sasaran program pembangunan.

Tujuan penyusunan RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Sebagai tolak ukur penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
2. Sebagai tolak ukur penilaian pimpinan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tujuan dan sasaran Daerah;
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Umum, menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah dan analisis yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah dan aspek pelayanan umum serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III. Gambaran Keuangan Daerah, menggambarkan hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar memproyeksi, fiskal daerah untuk penetapan pagu indikatif.

BAB IV. Permasalahan dan Isu Strategis, memuat permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 3 (tiga) tahun mendatang.

BAB V. Tujuan dan Sasaran, memuat Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja Pembangunan Daerah berdasarkan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025, Analisa sasaran pokok dan/atau analisa arah kebijakan RPJPD Provinsi Tahap Keempat dan Isu strategis aktual.

BAB VI. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas, menguraikan Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan Penentuan program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

BAB VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah, memuat Kerangka Pendanaan seluruh program Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 beserta daftar program Perangkat Daerah Tahun 2024-2026, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif Target, Perangkat Daerah penanggungjawab berdasarkan Bidang Urusan.

BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menjelaskan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IX. Penutup.

BAB II

GAMBARAN UMUM

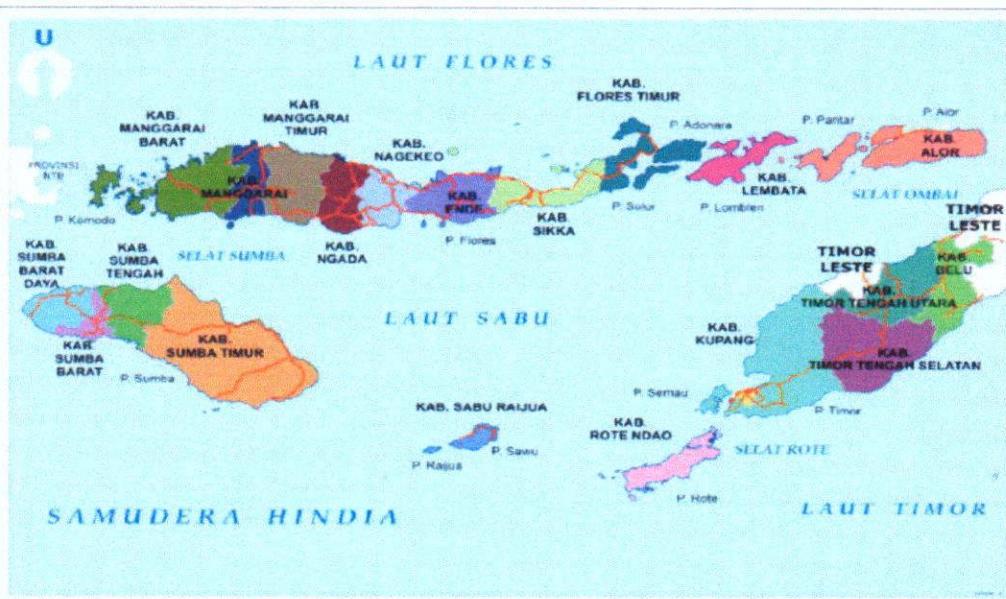
2.1 GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1 Geografis dan Wilayah Administratif

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan Provinsi kepulauan yang mempunyai 1.192 pulau, di mana 600 pulau mempunyai nama, 9 pulau masih diusulkan namanya dan 44 pulau berpenghuni. Luas wilayah 2.47.931,54 km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 47.931,54 km² dan wilayah lautan seluas 200.000 km². Secara geografis terletak di sebelah Selatan Khatulistiwa pada posisi 8°–12° Lintang Selatan dan 118° – 125° Bujur Timur.

NTT merupakan wilayah kepulauan yang disatukan Laut Sawu sebagai wilayah terdepan di Selatan Indonesia, posisinya sangat strategis karena berbatasan darat dengan Negara Timor Leste (sebelah Timur) dan berbatasan laut dengan Negara Australia (sebelah Selatan, Samudera Hindia/Lautan Indonesia). Sementara di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sebelah Utara dengan Laut Flores.

Wilayah administratif NTT terbagi atas 1 Kota dan 21 Kabupaten dengan sebaran wilayah administratif seperti disampaikan pada gambar berikut.



Sumber: Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022

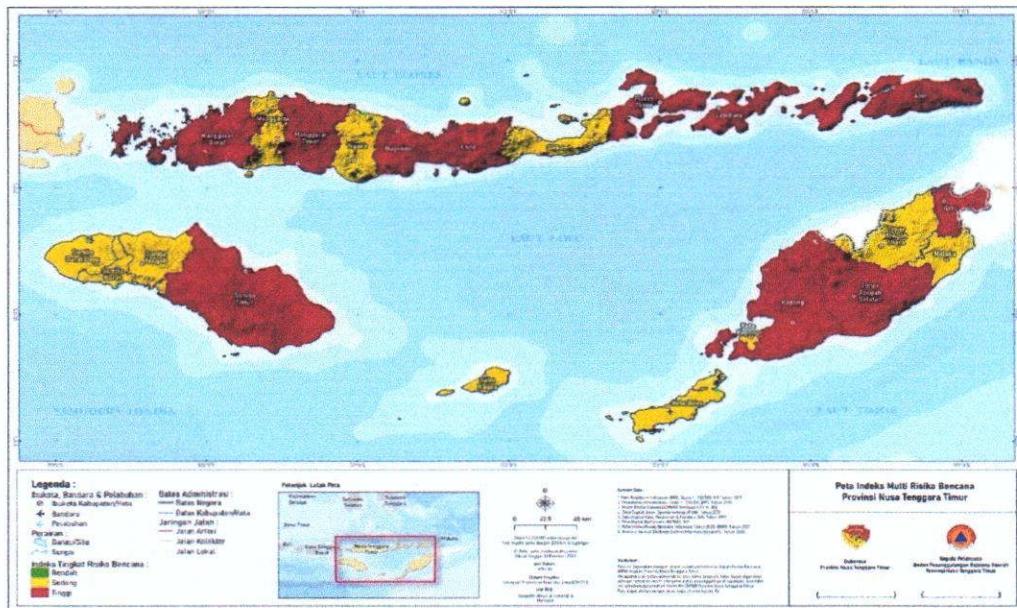
Gambar 2.1
Peta Provinsi NTT

Wilayah administratif terluas adalah Kabupaten Sumba Timur 7.005 km² (14,61 persen) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 km² (11,53 persen), sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 km² (0,38 persen) dan Kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,47 km² (0,96 persen).

2.1.1.1 Wilayah Rawan Bencana

Nusa Tenggara Timur memiliki risiko bencana yang tinggi untuk jenis-jenis bencana geologis (gempa, tsunami, letusan gunung api dan longsor) serta hidrometeorologis (kekeringan, banjir, kebakaran lahan dan hutan). Risiko bencana geologis yang tinggi terutama terdapat di daerah dengan patahan aktif, seperti Flores, Lembata, Kepulauan Alor, dan bagian barat Pulau Sumba. Terdapat 13 gunung berapi aktif di pulau Flores dan Lembata, dan satu di Pulau Pantar, Kabupaten Alor. Tsunami di Sikka tahun 1992 masih tercatat sebagai bencana geologis yang paling banyak korban jiwa, yakni lebih dari 2.000 orang meninggal.

Sementara risiko bencana hidrometeorologis secara merata dialami oleh seluruh wilayah di NTT, terutama di daerah-daerah lereng curam, sekitar sungai dan juga daerah dengan curah hujan rendah seperti di Sabu Raijua, bagian selatan TTS, dan sebagainya. Dalam 50 tahun terakhir, 75% dari bencana di NTT adalah bencana hidrometeorologis, dengan kejadian yang paling banyak menimbulkan korban jiwa adalah banjir di Sungai Benanain (Kabupaten Malaka, dulu Belu) pada tahun 2000 yang menyebabkan lebih dari 150 orang meninggal dunia. Salah satu dari bencana hidrometeorologis yang melanda Provinsi pada awal bulan April 2021 adalah Badai Siklon Tropis Seroja, dimana terdapat 12 daerah Kabupaten/Kota yang mengalami dampak paling parah dari bencana tersebut. Total korban jiwa di beberapa kabupaten dan kota terdampak berjumlah 138 jiwa. Rincian korban meninggal dunia tersebut, yaitu Kabupaten Flores Timur 67 jiwa. Kemudian, Lembata 32, Alor 25, Kupang 5, Malaka 4, Sabu 2, Ngada 1, Ende 1 dan Kota Kupang 1. Sedangkan hilang, total dari laporan pertemuan koordinasi berjumlah 61 jiwa. Rincian sebagai berikut Kabupaten Lembata 35, Alor 20 dan Flores Timur 6. Sementara itu, kerugian material di sektor perumahan berjumlah 1.114 unit. Dengan rincian rusak berat 688 unit, rusak sedang 272 dan rusak ringan 154.



Sumber : BPBD, 2022

Gambar 2.2
Peta dan data Bencana di NTT Tahun 2021

Bencana hidrometeorologis merupakan jenis bencana yang dipengaruhi oleh kondisi iklim. Oleh karena itu, perubahan iklim, selain membawa akibat-akibat langsung seperti kenaikan muka dan suhu air laut, juga menyebabkan perubahan pola bencana hidrometeorologis. Ini bisa berdampak pada makin panjangnya kekeringan ataupun makin seringnya terjadi banjir maupun kebakaran hutan dan lahan.

Salah satu penyebab terjadinya perubahan iklim adalah naiknya suhu udara, dimana panas matahari yang diserap bumi tidak dapat dilepaskan kembali ke atmosfer sehingga terpantul kembali ke bumi. Peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) disebabkan oleh kegiatan manusia (anthropogenic) yang menghasilkan emisi terlalu banyak seperti CO₂, N₂O dan CH₄. Adapun sektor – sektor yang berkontribusi di dalam peningkatan emisi GRK berasal dari 4 sektor, yaitu :

1. Sektor Berbasis Lahan, seperti : Illegal logging, kebakaran hutan, pupuk organik, kotoran hewan (*manure*) dan pestisida.
2. Sektor Energi, seperti : Penggunaan bahan bakar fosil untuk energi pembangkit, transportasi dan industri.
3. Sektor Limbah, seperti : Pembakaran sampah padat, timbulan air limbah dan pembuangan limbah B3.
4. Sektor Kelautan dan Perikanan, seperti : Penebangan mangrove dan kerusakan padang lamun.

Selain berdampak pada kekerapan dan intensitas bencana-bencana hidrometeorologis, menghangatnya suhu juga mengubah habitat serangga, seperti nyamuk, sehingga terjadi perubahan pola insiden dan penyebaran penyakit malaria dan dengue. Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan pulau-pulau kecil terancam hilang karena naiknya muka air laut, serta terjadi pemutihan terumbu karang karena kenaikan suhu air laut. Ini mengganggu keanekaragaman hayati laut dan pesisir, serta produktivitas hasil-hasil laut.

Pembangunan di NTT perlu memperhatikan dampak perubahan iklim, terutama pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan kemaritiman yang merupakan sektor yang rentan pada perubahan iklim. Mengingat mata pencaharian utama di NTT adalah bertani terutama pertanian lahan kering yang tergantung pada variabel iklim seperti hujan, angin dan suhu udara untuk memproduksi pangan. Untuk itu perlu dikembangkan inovasi-inovasi pertanian dan perikanan yang memiliki daya adaptasi terhadap perubahan iklim termasuk di dalamnya adalah upaya rehabilitasi dan konservasi lahan.

2.1.1.2 Demografi Wilayah

Berdasarkan Data kependudukan dari BPS tahun 2021, Kependudukan Penduduk Provinsi NTT berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2021 adalah sebanyak 5.387.738 jiwa yang terdiri atas 2.694.297 laki-laki dan 2.693.441 perempuan. Rasio jenis kelamin Tahun 2021 adalah 100 yang berarti dari 100 perempuan hanya terdapat 100 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk tahun hasil SP 2020 (September 2020) adalah 1,25 persen pada tahun di prediksi sebesar 0,87%. Kepadatan penduduk Tahun 2020 sebesar 111 Jiwa/Km² menurun dibandingkan dengan kepadatan penduduk tahun 2018 dan 2019 (BPS Nusa Tenggara Timur dalam Angka, 2022).

Penduduk terpadat terdapat di Kota Kupang dengan 2.511 jiwa per km². Kepadatan penduduk yang paling rendah adalah Sumba Timur dengan 35 jiwa per km² dan Sumba Tengah dengan 48 jiwa per km².

Tabel 2.1
Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi NTT
tahun 2018-2021

Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)			
	2018	2019	2020	2021
Kota Kupang	2.351	2.413	2.456	2.511
Sumba Barat Daya	234	239	210	212
Sumba Barat	173	176	197	201
Sabu Raijua	205	211	194	197

Wilayah	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)			
	2018	2019	2020	2021
Sikka	184	185	186	187
Belu	174	176	175	177
Manggarai	174	177	163	164
Flores Timur	145	146	158	160
Malaka	163	165	158	160
Ende	132	132	131	132
Timor Tengah Selatan	118	119	115	116
Nagekeo	102	103	113	115
Rote Ndao	129	134	112	114
Manggarai Timur	113	115	110	111
Lembata	111	113	107	109
Timor Tengah Utara	94	95	97	98
Ngada	94	95	96	97
Manggarai Barat	86	87	82	83
Alor	70	70	72	73
Kupang	70	73	66	67
Sumba Tengah	39	40	47	48
Sumba Timur	36	37	35	35
Nusa Tenggara Timur	112	114	111	112

Sumber : BPS NTT, 2022

2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah terlihat dari arahan pola penggunaan lahan. Rencana pola ruang wilayah Provinsi NTT merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

2.1.2.1 Pola Ruang Eksisting dan Aspek Pertanahan

2.1.2.1.1 Hutan Lindung

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Sebaran hutan lindung di Provinsi Nusa Tenggara Timur seluas 670.487, 57 Ha dimana terbesar berada di Kabupaten Kupang dengan luas wilayah hutan lindung 104.949,53 Ha dan terkecil seluas 1144,25 Ha di Kabupaten Sumba Barat.

Tabel. 2.2. Sebaran Luasan Hutan Lindung Tahun 2020

No	Wilayah	Hutan lindung (Hektar)
1	Sumba Barat	1.144,25
2	Sumba Timur	75.373,13
3	Kupang	104.949,53
4	Timor Tengah Selatan	35.243,32
5	Timor Tengah Utara	41.683,22
6	Belu	37.015,28
7	Alor	51.347,62
8	Lembata	46.630,71
9	Flores Timur	36.253,13
10	Sikka	33.647,82
11	Ende	24.089,00
12	Ngada	29.185,05
13	Manggarai	17.427,15
14	Rote Ndao	7.510,44
15	Manggarai Barat	54.345,93
16	Sumba Tengah	6.242,03
17	Sumba Barat Daya	11.041,24
18	Nagekeo	9.626,49
19	Manggarai Timur	32.783,05
20	Sabu Raijua	9.966,24
21	Malaka	3.855,17
22	Kota Kupang	1127,76
Nusa Tenggara Timur		670.487,57

Sumber : Revisi RTRW NTT 2010-2030 tahun 2021

2.1.2.1.2 Kawasan Konservasi

Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 1 ayat 2, pengertian konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Cagar alam dan suaka margasatwa merupakan Kawasan Suaka Alam (KSA), sementara taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam merupakan Kawasan Pelestarian Alam (KPA). Di Indonesia, kebijakan konservasi diatur ketentuannya dalam UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. UU ini memiliki beberapa turunan Peraturan Pemerintah (PP), diantaranya:

- a. PP 68/1998 tentang pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
- b. PP 7/1999 tentang pengawetan/perlindungan tumbuhan dan satwa
- c. PP 8/1999 tentang pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar/TSL
- d. PP 36/2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa (SM), Taman nasional (TN), taman hutan raya (Tahura) dan taman wisata alam (TWA). Berikut merupakan luas Kawasan Konservasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur:

Tabel 2.3. Kawasan Konservasi Provinsi NTT

No	Kabupaten	Kawasan Konservasi								
		CA	SM	SML	TAHURA	TB	TN	TNL	TWA	TWAL
1	Alor								7.676,15	
2	Belu	3.181,39	4.548,16							
3	Ende	1.942,81					5.323,62			
4	Flores Timur									
5	Kupang		1.399,99		1.942,72	0,10			3.352,82	96,27
6	Lembata									
7	Manggarai								9.426,09	
8	Manggarai Barat	1.485,76					57.746,46	1.044,26		
9	Manggarai Timur								23.667,28	
10	Nagekeo									
11	Ngada	8.992,21							425,35	148,62
12	Rote Ndao		1.542,09	90,71		1.405,87				
13	Sabu Raijua									
14	Sikka		1.694,23						7.194,53	253,06
15	Sumba Barat						1.829,83			
16	Sumba Barat Daya									
17	Sumba Tengah						32.555,25			
18	Sumba Timur						61.961,37			
19	Timor Tengah Selatan	9.913,98	5.432,08			1.801,21				
20	Timor Tengah Utara	2.401,28								
21	Kota Kupang									3,23
	Jumlah	27.917,42	14.616,56	90,71	1.942,72	3.207,18	159.416,54	1.044,26	51.742,22	501,19

Sumber :Revisi RTRW NTT 2010-2030 tahun 2021

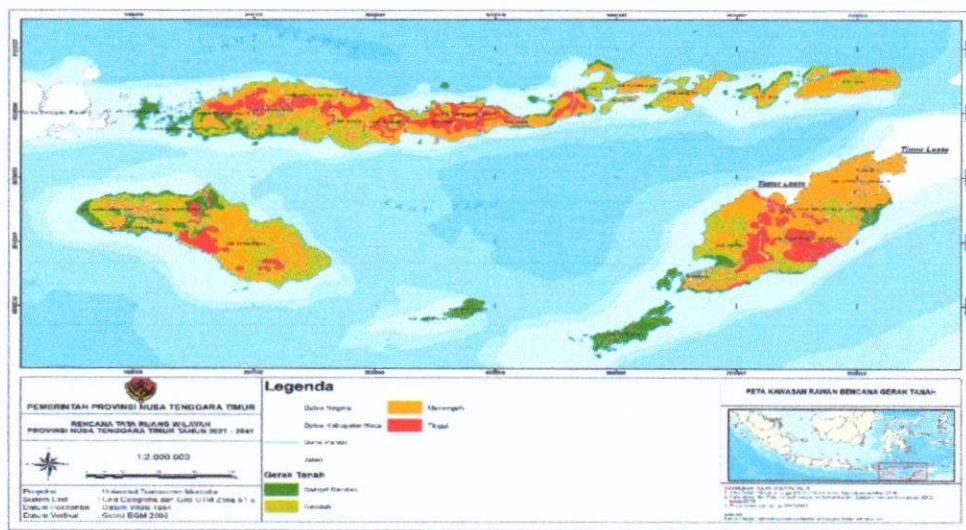
2.1.2.1.3 Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana di Provinsi NTT, terdiri atas: kawasan rawan longsor dan gerakan tanah kawasan rawan banjir. Kawasan rawan bencana Geologi

AO

a. Longsor

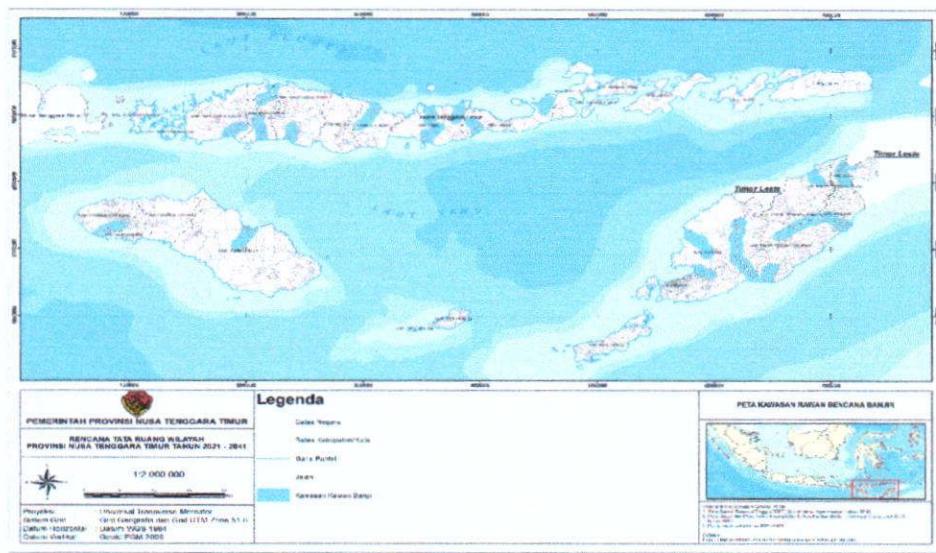
Kawasan rawan longsor dan gerakan tanah terdapat di Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat



Gambar 2.3
Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Provinsi NTT Tahun 2021

b. Banjir

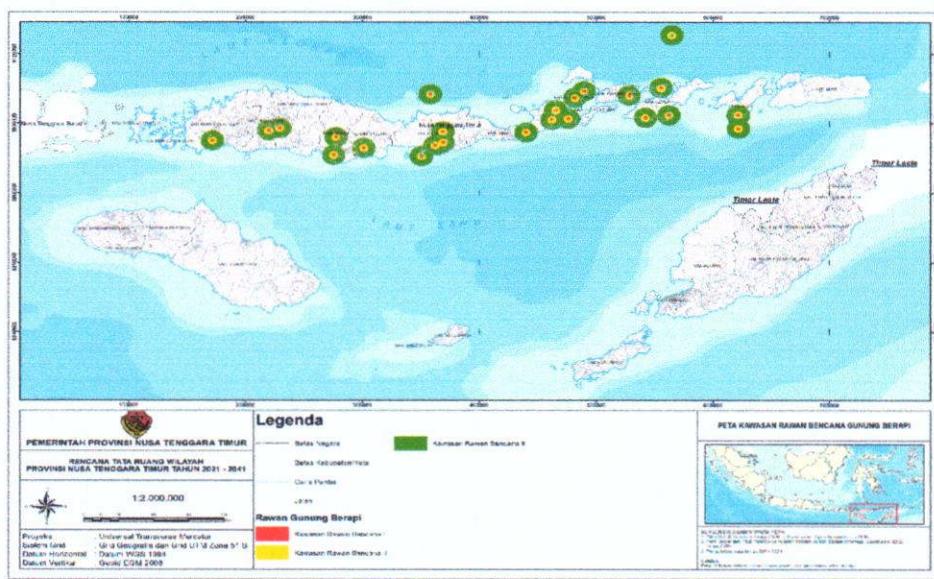
Kawasan rawan banjir terdapat di Takari dan Noelmina di Kabupaten Kupang, Benanain di Kabupaten Belu, Dataran Bena dan Naemeto di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Ndona di Kabupaten Ende.



Gambar 2.4
Peta Risiko Bencana Banjir Provinsi NTT Tahun 2021

c. Gunung Berapi

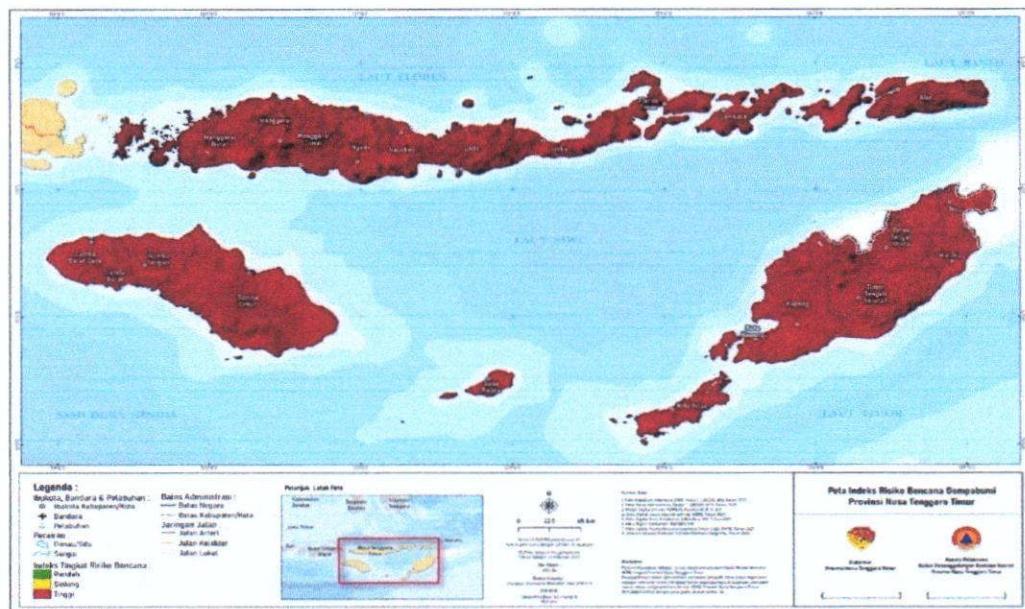
Kawasan rawan bencana gunung berapi meliputi : Kawasan Gunung Inelika, Gunung Illi Lewotolo, Gunung Illi Boleng, Gunung Lereboleng, Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung Lewotobi Perempuan di ~~SEP~~ Kabupaten Flores Timur; Kawasan Gunung Anak Ranakah di Kabupaten Manggarai; Kawasan Gunung Iya dan Gunung Kelimutu di Kabupaten Ende; Kawasan Gunung Inerie di Kabupaten Ngada; Kawasan Gunung Ebulobo di Kabupaten Nagekeo; Kawasan Gunung Rokatenda dan Gunung Egon di Kabupaten Sikka; Kawasan Gunung Sirung di Kabupaten Alor; dan Kawasan Gunung Batutara dan Gunung Ile Ape di Kabupaten Lembata.



Gambar 2.5
Peta Risiko Rawan Gunung Berapi Provinsi NTT Tahun 2021

d. Bencana Alam Geologi

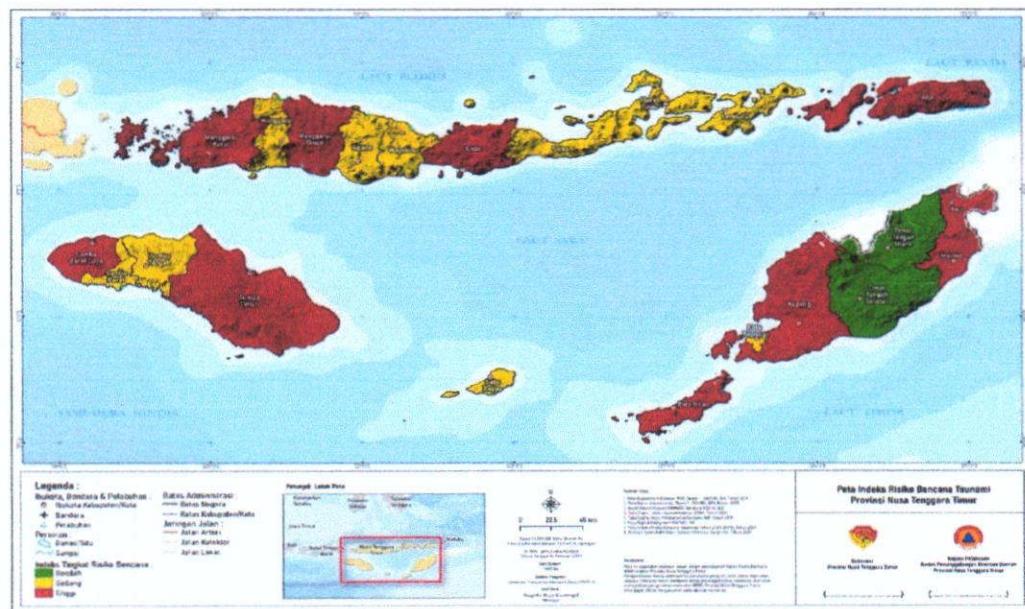
Kawasan rawan bencana alam geologi, terdiri atas : a) **Kawasan Rawan bencana gempa** terdapat di Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, dan Kabupaten Alor; Pulau Timor, Pantai Selatan Pulau Sabu dan Pantai Selatan Pulau Rote;



Sumber : BPBP 2022

Gambar 2.5
Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTT Tahun 2021

b). Kawasan rawan bencana gelombang pasang dan tsunami terdapat di Maumere Kabupaten Sikka, Daerah Atapupu/Pantai Utara Belu, Pantai Selatan Pulau Sumba, Pantai Utara Ende, Pantai Utara Flores Timur, Pantai Selatan Lembata, dan Pantai Selatan



Sumber : BPBP 2022

Gambar 2.6
Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTT Tahun 2021

2.1.2.2 Kawasan Ekosistem Mangrove

Pada wilayah NTT, belum ada data pasti tentang keragaman jenis dan berapa jumlah jenis mangrove yang dapat ditemui. Namun demikian dari beberapa penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa NTT juga memiliki keragaman jenis yang cukup tinggi. Seno, A (2012) mengatakan bahwa keragaman jenis mangrove di kawasan Taman Nasional (TN) Komodo mencapai 24 jenis yang terdiri dari 22 jenis mangrove sejati dan 2 jenis mangrove asosiasi. Hidayatullah, M. dkk (2012) melaporkan bahwa di desa Golo Sepang kecamatan Boleng-Manggarai Barat ditemukan sebanyak 10 jenis mangrove (9 jenis mangrove sejati dan 1 jenis mangrove asosiasi). Sementara itu Talib, M. F (2008) mengatakan bahwa di desa Tanah Merah dan Oebelo kecamatan Kupang Tengah memiliki 11 jenis mangrove yang kesemuanya merupakan mangrove sejati. Jafar, dkk (2007) mengatakan bahwa pada wilayah Teluk Kupang-Kota Kupang memiliki 6 jenis mangrove yang kesemuanya merupakan mangrove sejati. Hidayatullah, M. dkk (2013) menyebutkan bahwa di kawasan Cagar Alam Maubesi-Kabupaten Belu ditemukan sebanyak 23 jenis mangrove yang terdiri dari 16 jenis mangrove sejati dan 7 jenis mangrove asosiasi.(revisi RTRW 2010-2030)

2.1.2.3 Hutan Produksi (termasuk APL dan HGU)

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

Tabel 2.4. Tabel Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar)											
		Terbatas			Tetap			Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus			Dapat dikonversi		
		2017	2018	2020	2017	2018	2020	2017	2018	2020	2017	2018	2020
1	Sumba Barat	1.191.93	922.10	922.10	5106.68	4787.65	4787.65	-	-	-	-	-	-
2	Sumba Timur	19.158.65	19.084.76	19.084.76	19694.98	25418.21	25418.21	486.83	-	-	72549.75	61366.03	61366.03
3	Kupang	41.756.84	43.478.21	43.478.21	61240.99	60863.45	60863.45	3082.35	-	-	-	531.73	531.73
4	Timor Tengah Selatan	3.506.89	2923.41	2923.41	43628.19	40566.57	40566.57	-	1807.23	-	-	-	-
5	Timor Tengah Utara	54.614.16	53.909.34	53.909.34	14021.95	12981.91	12981.91	-	-	-	298.12	300.78	300.78
6	Belu	618.59	-	-	953.28	961.80	961.80	-	-	-	-	-	-
7	Alor	26625.08	26699.70	26699.70	20084.08	19341.02	19341.02	-	-	-	-	-	-
8	Lembata	-	-	-	599.77	605.12	605.12	-	-	-	-	-	-
9	Flores Timur	12571.28	11123.86	11123.86	4528.59	4410.55	4410.55	-	-	-	516.42	521.03	521.03
10	Sikka	843.96	734.53	734.53	902.56	1037.12	1037.12	-	-	-	-	-	-
11	Ende	405.60	177.75	177.75	35686.74	29653.86	29653.86	-	-	-	1083.83	932.88	932.88
12	Ngada	-	-	-	5355.88	6330.41	6330.41	-	-	-	30332.03	13438.30	13438.30
13	Manggarai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1155.14	1136.25	1136.25
14	Rote Ndao	-	-	-	9234.74	9352.55	9352.55	-	1418.35	-	-	-	-
15	Manggarai Barat	-	-	-	18067.00	18174.15	18174.15	-	-	-	-	-	-
16	Sumba Tengah	16045.22	15189.18	15189.18	5111.39	5157.06	5157.06	-	-	-	-	-	-
17	Sumba Barat Daya	-	-	-	8420.48	8853.18	8853.18	-	-	-	-	-	-
18	Nagekeo	9166.37	9176.56	9176.56	9657.06	9871.63	9871.63	-	-	-	-	-	-
19	Manggarai Timur	-	-	-	16159.45	15583.62	15583.62	-	-	-	3138.85	971.67	971.67

AR

No	Kabupaten/Kota	Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar)											
		Terbatas			Tetap			Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus			Dapat dikonversi		
		2017	2018	2020	2017	2018	2020	2017	2018	2020	2017	2018	2020
20	Sabu Raijua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Malaka	3056.49	2984.45	2984.45	2539.38	2547.40	2547.40	-	-	-	-	-	-
22	Kota Kupang	-	-	-	-	58.98	58.98	-	-	-	5633.27	1604.80	1604.80
NTT		189561.06	186403.84	186403.84	280993.19	276556.23	276556.23	3569.18	3225.58	-	114707.41	80803.47	80803.47
													1604.80

Sumber: Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SKA.8105/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/!!/2018, Tanggal 23 November 2018.

AR

Tabel 2.5.
Luas Suaka Alam Dan Pelestarian Alam (Hektar) di Provinsi NTT

No	Kabupaten/Kota	Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Hektar)		
		2017	2018	2020
1	Sumba Barat	1772.22	1820.77	1820.77
2	Sumba Timur	56931.61	62062.60	62062.60
3	Kupang	69978.16	69878.19	69878.19
4	Timor Tengah Selatan	16991.04	15320.52	15320.52
5	Timor Tengah Utara	2405.33	2426.82	2426.82
6	Belu	-	-	-
7	Alor	7637.67	7705.69	7705.69
8	Lembata	-	-	-
9	Flores Timur	-	-	-
10	Sikka	72998.68	73705.82	73705.82
11	Ende	7065.57	7128.69	7128.69
12	Ngada	16714.07	16317.54	16317.54
13	Manggarai	8943.69	9426.09	9426.09
14	Rote Ndao	3648.07	2229.22	2229.22
15	Manggarai Barat	179107.31	180722.42	180722.42
16	Sumba Tengah	32382.82	32635.70	32635.70
17	Sumba Barat Daya	-	-	-
18	Nagekeo	-	-	-
19	Manggarai Timur	23856.58	23667.30	23667.30
20	Sabu Raijua	-	-	-
21	Malaka	7661.08	7729.55	7729.55
22	Kota Kupang	-	-	-
Nusa Tenggara Timur		508093.90	512776.92	512776.92

Sumber: Revisi RTRW NTT 2010-2030 tahun 2021

2.2 ASPEK KSEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Pertumbuhan PDRB

Berdasarkan harga konstan Tahun 2010, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT terus mengalami peningkatan dan terjadi di seluruh lapangan usaha. Pada Tahun 2021 nilai PDRB NTT mencapai Rp.70,538 miliar dibanding tahun 2018 sebesar Rp. 65,929 miliar rupiah. Demikian halnya dengan pertumbuhan nilai PDRB berdasarkan harga berlaku juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, nilai PDRB NTT berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha sebesar Rp 110,886 miliar meningkat dibanding tahun 2018 sebesar Rp. 98,930 miliar.

Tabel 2.6
PDRB ADHB-ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT
Tahun 2018-2021

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga (ADHB) Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT (Miliar Rupiah)				Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT (Miliar Rupiah)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28.035	29.804	30,369	32,343	17.837	18.496	18.680	19.599
Pertambangan dan Penggalian	1.201	1.249	1.154	1,189	908	939	813	829
Industri Pengolahan	1.252	1.405	1.367	1,312	841	916	867	823
Pengadaan Listrik dan Gas	75,07	75,75	85,25	0,091	51	52	58	61
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	53,57	56,57	60,34	0,068	43	45	48	53
Konstruksi	10.744	11.606	10.454	11,485	7.254	7.576	6.832	7.311
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.025	12.266	11.888	12,724	7.785	8.382	7.880	8.216
Transportasi dan Pergudangan	5.459	5.834	4.917	5,058	3.528	3.646	3.203	3.282
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	756,61	805,79	593	0,613	492	524	381	399
Informasi dan Komunikasi	6,569	7,077	7,923	8,222	5,794	6,118	6,849	7,040
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,072	4,306	4,639	4,947	2,589	2,672	2,901	2,975
Real Estate	2,475	2,479	2,426	2,467	1,657	1,658	1,632	1,680
Jasa Perusahaan	0,292	0,306	0,191	0,164	0,174	0,181	0,110	0,094
Administrasi Pemerintahan,	13,232	14,573	15,183	14,866	8,482	9,175	9,598	9,267

Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga (ADHB) Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT (Miliar Rupiah)				Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT (Miliar Rupiah)			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib								
Jasa Pendidikan	9,436	10,286	10,737	10,598	5,572	5,913	6,024	5,889
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,150	2,327	2,559	2,864	1,480	1,564	1,632	1,779
Jasa lainnya	2,098	2,266	1,946	1,870	1,434	1,528	1,294	1,232
PDRB	98,930	106,731	106,480	110,886	65,929	69,389	69,389	70,538

Sumber : BPS NTT, 2022; * Angka Sementara, ** Angka Sangat Sementara.

Tabel 2.7
Persentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT
Tahun 2018 – 2021

Lapangan Usaha [Seri 2013]	PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha (%)			
	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28,34	27,93	28,51	29,17
Pertambangan dan Penggalian	1,21	1,17	1,08	1,07
Industri Pengolahan	1,27	1,32	1,28	1,18
Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,07	0,08	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	0,05	0,06	0,06
Konstruksi	10,86	10,87	9,82	10,36
Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,14	11,49	11,16	11,48
Transportasi dan Pergudangan	5,52	5,47	4,62	4,56
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,76	0,75	0,56	0,55
Informasi dan Komunikasi	6,64	6,63	7,44	7,41
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,12	4,04	4,36	4,46
Real Estate	2,50	2,32	2,28	2,23
Jasa Perusahaan	0,30	0,29	0,18	0,15
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,38	13,65	14,26	13,41
Jasa Pendidikan	9,54	9,64	10,08	9,56
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,17	2,18	2,40	2,58
Jasa lainnya	2,12	2,12	1,83	1,69
PDRB	100	100	100	100

Sumber : BPS NTT, 2022

Dari Tabel 2.7 di atas, dapat dilihat bahwa Tahun 2018 hingga Tahun 2021, sektor pertanian merupakan sektor terbesar dalam ekonomi Nusa Tenggara Timur yang mana pada tahun 2018 mengkomposisi 28,34 %, tahun 2019 sebesar 27,93 %, 2020 sebesar 28,51 %, dan pada tahun 2021 sebesar 29,17 %. Sedangkan untuk sektor yang paling kecil dari tahun 2018 sampai Tahun 2021 adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang. Pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 sebesar 0,05 %, tahun 2020 dan 2021 sebesar 0,06 %.

Tabel 2.8
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen)
Tahun 2018 – 2021

Lapangan Usaha [Seri 2010]	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen), 2018-2021			
	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,94	3,69	1,00	4,92
Pertambangan dan Penggalian	1,94	3,32	-13,33	1,90
Industri Pengolahan	5,16	9,01	-5,42	-5,10
Pengadaan Listrik dan Gas	9,57	0,82	12,29	4,88
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,47	5,44	6,04	11,34
Konstruksi	6,39	4,43	-9,82	7,01
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,33	7,66	-5,98	4,27
Transportasi dan Pergudangan	7,93	3,34	-12,16	2,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,16	6,43	-27,22	4,79
Informasi dan Komunikasi	4,89	5,59	11,96	2,79
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,50	3,22	8,57	2,56
Real Estate	4,85	0,00	-1,54	2,97
Jasa Perusahaan	1,67	3,86	-39,27	-14,67
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,56	8,17	4,61	-3,45
Jasa Pendidikan	2,41	6,12	1,89	-2,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,11	5,67	4,38	9,02
Jasa lainnya	6,47	6,55	-15,30	-4,74
PDRB	5,11	5,25	-0,84	2,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, 2022

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, terus mengalami peningkatan secara nominal yaitu pada Tahun 2018 sebesar Rp. 65,929 miliar naik menjadi Rp. 70,538 miliar pada Tahun 2021, yang berdasarkan laju pertumbuhan tahun dasar 2010 PDRB Provinsi NTT mengalami perlambatan pada Tahun 2021 sebesar 2,60 persen dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 5,11 persen.

2.2.2 Laju Inflasi

Inflasi Provinsi NTT pada triwulan IV 2021 tercatat sebesar 1,67% (yo), melandai dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 1,74% (yo). Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional sebesar 1,87% (yo). Penurunan tekanan inflasi terutama didorong oleh penurunan inflasi dari harga kelompok komoditas makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 1,73% (yo). Secara keseluruhan Tahun 2021, inflasi Provinsi NTT tercatat meningkat dibandingkan dengan inflasi Tahun 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh kelompok komoditas transportasi yang mengalami inflasi sebesar 4,16% (yo) setelah pada tahun sebelumnya mengalami deflasi sebesar 4,66% (yo). Meningkatnya tekanan inflasi mengindikasikan mulai pulihnya perekonomian seiring dengan kondisi Pandemi C-19 yang lebih terkendali dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.9
Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Nusa Tenggara Timur
Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100) , (2018=100)
Tahun 2018-2021

Kelompok Pengeluaran	IHK	IHK	IHK	IHK	Inflasi (%)		
	Desember 2018	Desember 2019	Desember 2020	Desember 2021	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2019	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2020	Tingkat Inflasi tahun Kalender 2021
Makanan, Minuman, dan Tembakau	152,79	104,21	104,15	108,21	1,03	0,72	1,73
Pakaian dan Alas Kaki	-	104,32	104,12	103,39	-	-0,14	-0,39
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	130,36	102,48	100,33	101,63	-0,06	-0,26	1,30
Sandang	130,32	104,73	105,81	-	2,01	0,58	-
Kesehatan	119,05	104,86	108,20	110,43	1,60	0,02	1,77
Transportasi	-	103,89	103,50	105,10	-	-0,19	4,16
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	-	100,42	100,41	100,99	-	0,02	0,45
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	-	103,15	102,52	103,45	-	-0,39	0,63
Pendidikan	-	106,21	104,01	104,71	-	0,62	0,67
Pendidikan, Rekreasi dan Olah raga	134,72	-	107,60	-	2,18	-	-
Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan	143,59	-	112,08	108,59	-1,74	-	-
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	-	105,22	101,22	103,22	-	1,53	1,91
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	-	105,94	108,44	109,26	-	4,23	0,92
Nusa Tenggara Timur	134,7	135,59	103,22	105,76	-0,14	0,78	1,67
Nasional	135,39	131.28	105,68	107,66	2,72	1,68	0,13

Sumber : BPS NTT-Berita Resmi Statistik 2019, 2020, 2021

Dari Tabel 2.9. di atas, terlihat bahwa selama tahun 2019, kecenderungan inflasi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur masih mengikuti pola inflasi nasional, artinya bahwa inflasi yang terjadi di Nusa Tenggara Timur tidak semata-mata diakibatkan oleh tekanan ekonomi internal di Nusa Tenggara Timur sendiri tetapi banyak juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang terjadi secara Nasional, dan jika dilihat dari trend inflasi tahun 2020 hanya 2021 terlihat bahwa angka inflasi mengalami penurunan. Perubahan terjadi pada Kelompok Pengeluaran dimana terdapat penambahan, penghilangan ataupun pemisahan nomenklatur, sehingga angka IHK pada Tahun 2019 dan Inflasi pada November Tahun 2020 semakin terinci, begitu juga yang terjadi pada Tahun 2021. Dimana, Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,93 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar -0,44 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,09 persen; kelompok Kesehatan sebesar 0,60 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,43 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,48 persen. Sedangkan inflasi NTT pada Tahun 2019 sebesar -0,14 % jika dibandingkan pada Tahun 2020 hanya sebesar 0,78 % dan tahun 2021 sebesar 0,77 %.

2.2.3 PDRB Per Kapita

PDRB Per kapita atas dasar berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku. PDRB Perkapita ADHB Provinsi NTT pada Tahun 2018 tercatat sebesar Rp. 18,45 juta meningkat menjadi Rp. 19,59 juta pada Tahun 2019. Peningkatan ini dipengaruhi oleh produk-produk yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dan disertai dengan perubahan harga-harga di pasar yang dari tahun ke tahun juga cenderung mengalami peningkatan (inflasi). Sedangkan berdasarkan PDRB per kapita ADHK pada Tahun 2018 sebesar Rp. 12,27 juta meningkat menjadi Rp. 12,71 juta pada Tahun 2019. PDRB per kapita ADHB mengalami penurunan dari Rp. 19,59 juta pada Tahun 2019 menjadi Rp. 19,22 juta di Tahun 2020, sementara PDRB Per kapita ADHK juga mengalami penurunan dari Rp. 12,71 juta pada tahun 2019 menjadi Rp. 12,41 juta di Tahun 2020 yang disebabkan oleh kontraksi ekonomi yang melanda dunia khususnya NTT akibat Pandemi Covid 19. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 2.10
PDRB dan PDRB Per Kapita Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2017 – 2020

Uraian	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (Miliar Rp)				
- ADHB	90.758,93	98.930,19	106.728,07	106.506,13
- ADHK 2010	62.725,41	65.929,19	69.385,99	68.806,67
PDRB perkapita (Ribu Rp)				
- ADHB	17.165,45	18.448,13	19.591,07	19.220.097
- ADHK 2010	11.863,41	12.276,77	12.714,42	12.416.851
Pertumbuhan				
PDRB perkapita ADHK 2010	-1,6	3,48	3,56	-2,34
Jumlah penduduk (000 org)	5.287,30	5.371,52	5.456,20	5.541.394

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT, olahan, 2021

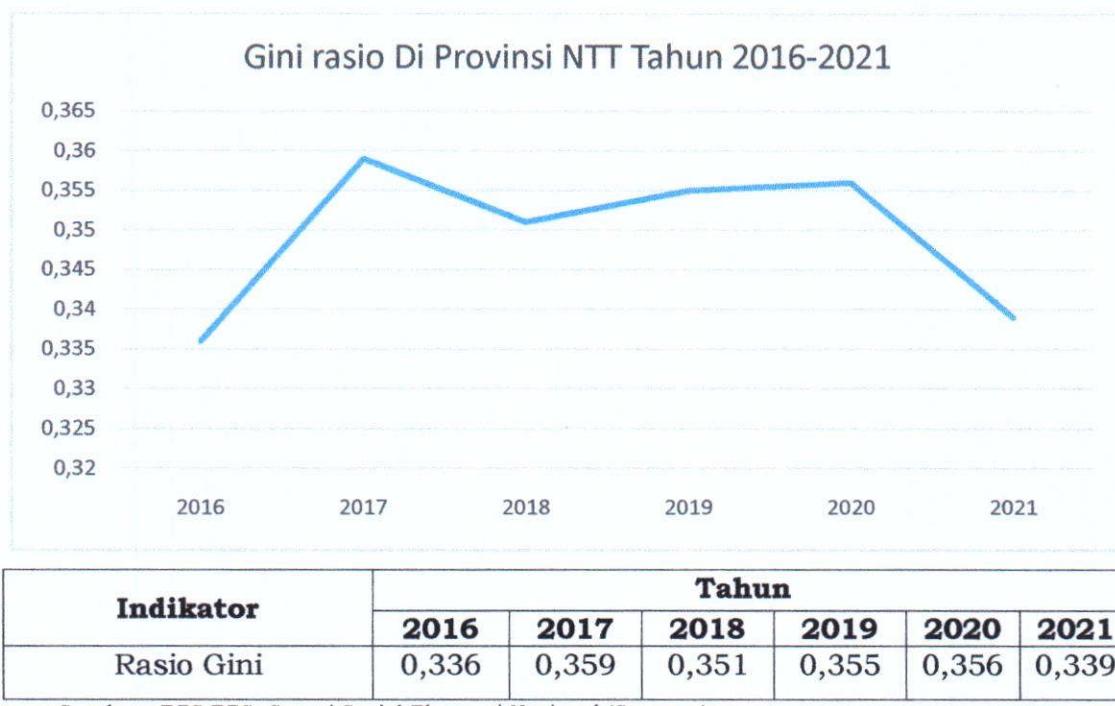
2.2.4 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Ketimpangan pendapatan berkaitan erat dengan distribusi pendapatan yang tidak merata.

Secara umum, sejak Maret 2016, angka Gini Ratio terus mengalami fluktuasi sampai dengan September 2018. Gini Ratio mengalami peningkatan tertinggi pada September 2016 yaitu sebesar 0,026 poin dibanding Maret 2016. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin memburuk. Selanjutnya, selama periode September 2018 – Maret 2020, angka Gini Ratio mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran rumah tangga di Provinsi NTT. Namun

demikian, pada masa pandemi Covid-19, angka Gini Ratio mengalami kenaikan pada September 2020.

Selanjutnya, Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 sebesar 0,339, yang menunjukkan bahwa “kecenderungan ketimpangan pendapatan” tidak mengalami perubahan atau dapat dikatakan ketimpangan di NTT tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan gini rasio nasional sebesar 0,39, maka indeks Gini NTT lebih rendah yang mengindikasikan ketimpangan di NTT tidak sedalam ketimpangan yang terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini disebabkan karena gap pendapatan antara penduduk golongan pendapatan tinggi dengan yang rendah di NTT tidak sedalam gap pendapatan antara golongan pendapatan tinggi dan rendah di daerah lain.

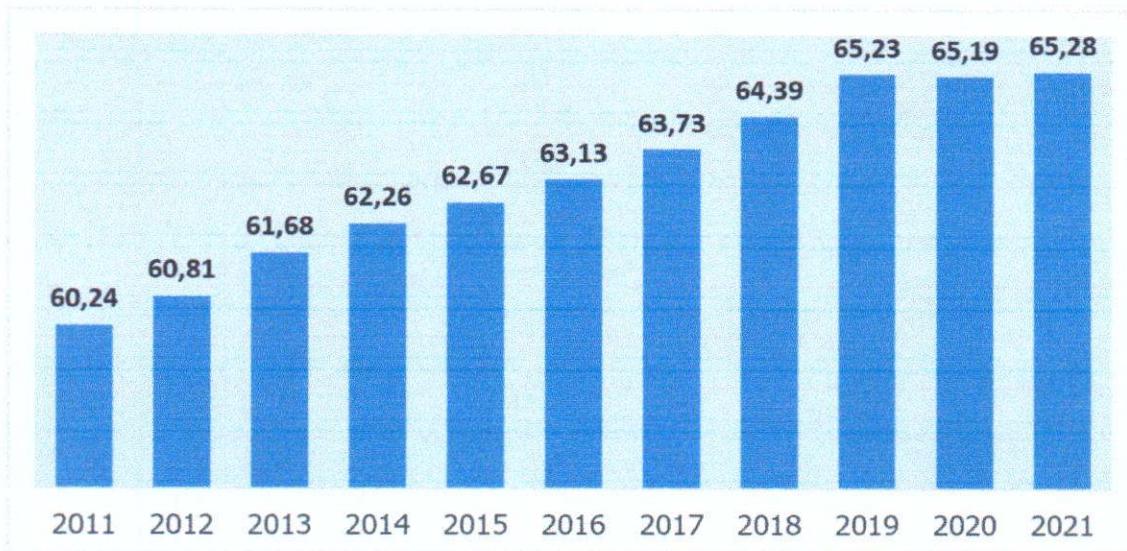


Gambar. 2.7
Grafik Gini Ratio Provinsi NTT tahun 2016-2021

2.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index (HDI)* merupakan sebuah instrumen yang dikembangkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) untuk memotret kinerja pembangunan manusia pada 3 (tiga) dimensi, yakni Umur Panjang dan Hidup Sehat (kesehatan), Pengetahuan (pendidikan), dan Standar Hidup Layak (ekonomi). Umur

Harapan Hidup (*Life Expectancy*) merupakan indikator yang digunakan oleh UNDP untuk mengukur capaian dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat. Pada dimensi Pengetahuan, indikator yang digunakan untuk mengukur capaianya adalah Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling*) dan Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*), sedangkan untuk mengukur capaian dimensi Standar Hidup Layak, indikator yang digunakan adalah Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*Gross National Income per capita (PPP \$)*). Dalam menghitung IPM di Indonesia, BPS menggunakan metodologi penghitungan dan dimensi yang serupa dengan UNDP. Meski demikian, sehubungan dengan faktor ketersediaan data pada level Kabupaten/ Kota, terdapat penyesuaian yang dilakukan oleh BPS, yakni penggunaan indikator Pengeluaran Riil per kapita untuk menggantikan indikator PNB per kapita (BPS, 2022b, p.10).



Sumber: BPS NTT, 2022

Gambar 2.8
IPM NTT tahun 2011-2021

Dalam konteks Nusa Tenggara Timur, angka IPM terus menunjukkan peningkatan pada 2 (dua) dekade terakhir. Gambar 2.8 memuat tren IPM NTT antara tahun 2011 dan 2021. Berdasarkan Gambar 2.8, tampak bahwa di awal periode (Tahun 2011), IPM NTT hanya sebesar 60,24 poin. Pada tahun selanjutnya, IPM NTT terus mengalami peningkatan yang berarti, yakni di atas 0,4 poin per tahun dan mencapai 65,23 poin di tahun 2019. Meski demikian, sejak tahun 2020 tren peningkatan IPM tersebut mengalami stagnansi dimana di Tahun 2021 capaian IPM NTT sebesar 65,28 poin.

Tabel 2.11
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
di Provinsi NTT Menurut Komponen, Tahun 2015-2021

Indikator	Tahun						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Umur Harapan Hidup (thn)	65,96	66,04	66,07	66,38	66,85	67,01	67,15
Harapan Lama Sekolah (HLS) (thn)	12,84	12,97	13,07	13,10	13,15	13,18	13,20
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (thn)	6,93	7,02	7,15	7,30	7,55	7,63	7,69
Pengeluaran per Kapita (PPP)(Rp.000)	7,003	7,122	7,350	7,566	7,769	7,598	7.554
IPM NTT	62,67	63,13	63,73	64,39	65,23	65,19	65,28
IPM Rata-rata Nasional	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29

Sumber: BPS NTT, 2022

Pada Tabel 2.11, dapat dilihat pula rincian capaian 4 (empat) komponen atau indikator IPM sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Dalam periode tersebut, tampak bahwa terjadi peningkatan pada ke-empat komponen yang ada. Meski demikian, capaian akhir setiap komponen tersebut masih cukup rendah yang menyebabkan angka IPM NTT di tahun 2021 yang masih jauh di bawah rata-rata nasional, yang telah mencapai 72,29 poin. Kenaikan IPM periode 2011- 2018 terjadi karena adanya kenaikan pada 3 (tiga) dimensi yaitu Umur Harapan Hidup, Pendidikan dan Ekonomi, akan tetapi penurunan pada periode Tahun 2019-2020 terjadi akibat adanya Pandemi Covid-19 khususnya pada indikator pengeluaran per kapita.

2.2.5.1 Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah jumlah uang yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Dengan kata lain, pengeluaran per kapita merupakan instumen yang digunakan untuk memotret kemampuan rata-rata individu-individu dalam setiap rumah dalam aspek konsumsi.

Tabel 2.12 merincikan jumlah pengeluaran per kapita pada setiap Kabupaten/ Kota di NTT pada Tahun 2019 sampai dengan 2021. Pada Tabel 2.12, tampak bahwa pengeluaran per kapita tertinggi pada level Kabupaten/ Kota berada pada Kota Kupang, yakni pada kisaran Rp 13 juta, sedangkan pada 21 kabupaten lainnya di NTT, besaran pengeluaran per kapita masih berada pada kisaran Rp 5 – 9 juta. Tingginya ketimpangan antar daerah di Provinsi NTT menjadi penyebab tingginya ketimpangan pengeluaran

masyarakat dan tidak optimalnya pertumbuhan ekonomi. Perekonomian di Provinsi NTT sangat terpusat di Kota Kupang. PDRB Perkapita dan pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang jauh di atas kabupaten yang lain di Provinsi NTT.

Tren data pada Tabel 2.12 juga menunjukkan bahwa sejak Tahun 2020, telah terjadi penurunan pengeluaran per kapita pada setiap entitas pemerintahan, baik pada level Provinsi maupun Kabupaten/ Kota. Pada level provinsi, khususnya, terjadi penurunan pengeluaran per kapita dari sebesar Rp 7,769 juta di tahun 2019, menjadi sebesar Rp 7,598 juta di Tahun 2020. Pada tahun selanjutnya (2021), kembali terjadi penurunan menjadi sebesar Rp. 7,554 juta.

Tabel 2.12
Jumlah Pengeluaran per Kapita di Provinsi NTT
Tahun 2019-2021

Wilayah	[MetodeBaru] PengeluaranRiil per KapitaDisesuaikanMenurutKabupaten / Kota (Ribu Rupiah)		
	2019	2020	2021
Sumba Barat	7586.00	7321.00	7307.00
Sumba Timur	9640.00	9406.00	9354.00
Kupang	7698.00	7526.00	7476.00
Timor Tengah Selatan	6955.00	6861.00	6839.00
Timor Tengah Utara	6479.00	6364.00	6324.00
Belu	7677.00	7479.00	7431.00
Alor	6958.00	6786.00	6751.00
Lembata	7474.00	7305.00	7257.00
Flores Timur	7770.00	7631.00	7578.00
Sikka	8313.00	8081.00	8021.00
Ende	9315.00	9094.00	9027.00
Ngada	8961.00	8865.00	8819.00
Manggarai	7276.00	7203.00	7133.00
Rote Ndao	6720.00	6539.00	6503.00
Manggarai Barat	7602.00	7468.00	7410.00
Sumba Tengah	6198.00	6108.00	6061.00
Sumba Barat Daya	6594.00	6372.00	6355.00
Nagekeo	8469.00	8309.00	8254.00
Manggarai Timur	5919.00	5818.00	5780.00
Sabu Raijua	5354.00	5265.00	5256.00
Malaka	5998.00	5901.00	5861.00
Kota Kupang	13592.00	13337.00	13218.00
Nusa Tenggara Timur	7769.00	7598.00	7554.00

Sumber : BPS NTT, 2022

2.2.5.2 Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk memotret kinerja pembangunan pada Sektor Kesehatan. Umur Harapan Hidup adalah Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Umur Harapan Hidup juga dipengaruhi dengan keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah maupun perekonomian masyarakat.

UHH juga menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan dalam menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tabel 2.13 merincikan Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2015-2021, menurut Kabupaten/Kota. Pada periode ini (2015-2021), UHH provinsi NTT menunjukkan tren kenaikan yang konstan. Di tahun 2015, UHH penduduk NTT sebesar 65,96 tahun. Pada tahun selanjutnya, UHH NTT terus menunjukkan perbaikan dan mencapai 67,15 tahun di tahun 2021. Hal ini dapat dimaknai pula bahwa anak-anak yang lahir pada tahun 2021 diperkirakan akan hidup rata-rata sampai dengan usia 67,15 tahun. Pada Tabel 2.13, tampak pula bahwa keseluruhan kabupaten/ kota memiliki tren kenaikan UHH. Meski demikian, disparitas UHH antara Kabupaten/ Kota masih cukup tinggi. Di tahun 2021, misalnya, tampak bahwa Kota Kupang memiliki UHH yang cukup tinggi jika dibanding 21 Kabupaten lainnya (69,73 tahun), sementara kabupaten lainnya berada pada angka 68 tahun ke bawah, dengan kabupaten dengan capaian UHH terendah yakni Rote Ndao (64,88 tahun), Alor (61,64 tahun), dan Sabu Raijua (60, 66 tahun).

Tabel 2.13
Umur Harapan Hidup di Provinsi NTT Tahun 2015-2021

Wilayah	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Sumba Barat	66,11	66,15	66,20	66,58	66,98	67,08	67,12
Sumba Timur	63,88	64,00	64,12	64,45	64,94	65,13	65,16
Kupang	63,17	63,33	63,49	63,86	64,39	64,63	64,91
Timor Tengah Selatan	65,55	65,60	65,65	65,91	66,32	66,42	66,46
Timor Tengah Utara	66,09	66,14	66,19	66,45	66,86	66,96	67,09
Belu	63,01	63,21	63,42	63,81	64,35	64,61	64,89
Alor	60,23	60,35	60,47	60,8	61,29	61,48	61,64
Lembata	65,85	66,02	66,19	66,57	66,97	67,07	67,20

Wilayah	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Flores Timur	63,28	64,36	64,45	64,7	65,10	65,20	65,31
Sikka	66,10	66,20	66,30	66,61	67,07	67,24	67,45
Ende	64,37	64,42	64,48	64,75	65,17	65,29	65,43
Ngada	67,32	67,34	67,36	67,59	67,96	68,04	68,12
Manggarai	64,48	65,66	65,84	66,23	66,77	67,03	67,11
Rote Ndao	62,86	63,13	63,41	63,8	64,34	64,60	64,88
Manggarai Barat	65,98	66,19	66,19	66,58	67,12	67,38	67,46
Sumba Tengah	67,65	67,73	67,74	67,96	68,32	68,38	68,42
Sumba Barat Daya	67,08	67,71	67,76	68,02	68,43	68,53	68,57
Nagekeo	66,25	66,31	66,36	66,62	67,03	67,13	67,25
Manggarai Timur	67,27	67,39	67,40	67,62	67,98	68,04	68,07
Sabu Raijua	58,38	58,69	59,00	59,53	60,23	60,64	60,66
Malaka	64,15	64,27	64,29	64,52	64,89	64,97	65,01
Kota Kupang	68,34	68,46	68,58	68,9	69,37	69,55	69,73
Nusa Tenggara Timur	65,96	66,04	66,07	66,38	66,85	67,01	67,15

Sumber : BPS NTT, 2022

Penyebab rendahnya UHH disebabkan oleh ketersedian dan akses ke fasilitas kesehatan yang belum memadai, kurangnya tenaga kesehatan, kematian neonatus, tingginya angka kematian akibat penyakit menular (TBC, Malaria, HIV), tekanan darah tinggi, penggunaan tembakau dan alkohol, kematian karena kecelakaan lalulintas. Keadaan geografis merupakan tantangan bagi pelayanan kesehatan, dimana akses dan keterjangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat menjadi terbatas. Untuk masyarakat yang tinggal pada pulau-pulau kecil, keterbatasan sarana kesehatan diperparah dengan akses transportasi laut yang sulit, bahkan tidak ada sama sekali pada musim-musim tertentu dimana keadaan laut tidak menentu. Sedangkan pada wilayah daratan, akses jalan yang terbatas membuat waktu tempuh antara fasilitas kesehatan dengan masyarakat di wilayah berbukit dan bergunung menjadi lama, sehingga dalam keadaan darurat akan sulit untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

2.2.6 Angka Kemiskinan

Pengentasan angka kemiskinan merupakan salah satu agenda kebijakan yang popular pada berbagai entitas pemerintahan saat ini. Dalam pengukuran kemiskinan, pendekatan yang umum digunakan yakni pendekatan moneter karena sederhana dan mudah digunakan sebagai pembanding antar waktu dan tempat. Pendekatan ini mengukur kemiskinan berdasarkan tingkat pendapatan atau konsumsi. Garis kemiskinan, baik bersifat absolut maupun relatif, biasanya ditetapkan untuk mengidentifikasi orang miskin yang pendapatan atau konsumsinya di bawah ambang batas (*cut-off*). Garis kemiskinan internasional (absolut) yang ditetapkan oleh Bank Dunia pada Tahun 2022 adalah US\$ 2,15 per kapita per hari berdasarkan pada Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity (PPP)*) Tahun 2017, menggantikan garis kemiskinan sebelumnya yakni US\$ 1,9 pada PPP 2011.

Dalam konteks Indonesia, dengan pendekatan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dari segi kemampuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan berdasarkan konsumsi. Untuk mengklasifikasikan penduduk miskin dan tidak miskin, garis kemiskinan (GK) nasional yang digunakan oleh BPS adalah “representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan”. Dengan demikian, penduduk miskin di Indonesia dalam ukuran moneter adalah mereka yang memiliki rata-rata konsumsi per bulan di bawah garis kemiskinan. Misalnya, berdasarkan perhitungan BPS per September 2021, Garis Kemiskinan di NTT sebesar Rp 437.606/kapita/bulan.

Tabel 2.14
Indikator Kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2016-2021

Indikator	Angka Kemiskinan (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	1.160,53	1.150,08	1.134,74	1.129,46	1.173,53	1.146,28
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	322.947	343.396	354.898	373.922	403.055	437.606
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	4,69	3,83	4,16	4,13	4,15	4,79
Indeks keparahan kemiskinan (P2)	1,30	0,96	1,17	1,12	1,24	1,44
Persentase Penduduk Miskin NTT	22,58	22,01	21,38	20,62	21,21	20,44
Persentase Penduduk Miskin Indonesia	10,70	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71

Sumber : BPS NTT, 2022. * Kondisi September 2021

Hasil potret penduduk miskin dengan metode pengukuran moneter menunjukkan bahwa terjadi tren penurunan pada sejumlah indikator kemiskinan di NTT, meski terjadi pelambatan atau stagnasi pada tahun 2020. Tabel 2.14 merincikan tren indikator - indikator yang digunakan untuk memotret fenomena kemiskinan di Provinsi NTT antara tahun 2016 dan 2021, yang mana meliputi Jumlah Penduduk Miskin, Indeks kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Persentase Penduduk Miskin.

Pada tahun 2016 (GK NTT= Rp 322.947,-), misalnya, secara absolut, penduduk miskin di NTT berjumlah 1.160,53 ribu jiwa, dengan persentase sebesar 22,58 %, sedangkan Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 4,69 poin dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 1,30 poin. Pada tahun selanjutnya, jumlah jiwa maupun persentase penduduk miskin terus menunjukkan penurunan. Namun, di tahun 2020 (GK NTT= Rp 403.055,-), terjadi kenaikan persentase maupun jumlah jiwa penduduk miskin menjadi 1.173,53 jiwa atau 21,21%, dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 4,15 poin dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 1,24 poin.

Terjadinya kenaikan angka kemiskinan baik secara persentase maupun absolut ini erat kaitannya dengan terjadinya pandemi global COVID-19, yang mana terjadi di provinsi NTT sejak bulan April 2020. Hal ini menjadi bertambah kompleks dengan terjadinya Badai Siklon Tropis Seroja pada tanggal 4 dan 5 April 2021 di sebagian besar wilayah NTT. Pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai pembatasan sosial yang mana berdampak langsung pada lesunya aktivitas ekonomi maupun secara tidak langsung terhadap akses masyarakat ke dalam pasar tenaga kerja. Penduduk miskin, khususnya, yang dominan bekerja di sektor informal mendapatkan proporsi dampak negatif yang lebih besar tentunya. Dengan minimnya akses ke dalam pasar tenaga kerja karena berbagai pembatasan sosial, penduduk miskin mengalami penurunan pendapatan yang berimplikasi pada rendahnya konsumsi penduduk miskin. Di lain sisi, peningkatan angka kemiskinan ini disebabkan pula karena berkurangnya anggaran pengentasan kemiskinan (*pro poor budget*) yang dialihkan (*refocussing*) ke pos belanja penanganan Covid-19 maupun penanganan pasca bencana Badai Siklon Tropis Seroja. Ruang fiskal yang terbatas ini diperparah dengan realisasi pendapatan yang berkurang sebagai dampak lesunya geliat ekonomi di sektor privat.

Seiring berjalananya waktu, tantangan dalam pengentasan kemiskinan di NTT cenderung berkurang disebabkan oleh semakin terkendalinya pandemi COVID-19. Laju vaksinasi yang dikawal secara serius oleh Pemerintah mendorong optimisme masyarakat dan pelaku usaha. Implikasinya, mobilitas dalam aktivitas ekonomi kembali terjadi sehingga masyarakat miskin kembali mendapat akses ke dalam pasar tenaga kerja maupun mendapat intervensi kebijakan *pro-poor* yang semakin membaik. Hal ini terefleksi melalui tren penurunan angka kemiskinan pada tahun 2021 (GK NTT= Rp 437.606,-), dimana jumlah penduduk miskin telah turun menjadi 1.146,28 jiwa atau sebesar 20,44%, dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 4,79 poin dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 1,44 poin.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Meski demikian, capaian akhir masing-masing indikator kemiskinan pada Tabel 2.14 tentu perlu menjadi perhatian serius segenap pemangku kepentingan ke depan. Kinerja pengentasan kemiskinan masih belum cukup signifikan jika dibanding dengan rata-rata nasional, sebagaimana tampak pada persentase penduduk miskin NTT di tahun 2021 yang masih sebesar 20,44 % sedangkan rata-rata nasional telah berada pada angka 9,71%. Untuk itu, akselerasi trend penurunan kemiskinan perlu ditingkatkan lagi ke depan.

Berdasarkan arahan dari Presiden dalam Rapat terbatas strategi percepatan pengentasan kemiskinan agar kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) pada 2024 dapat mencapai 0% dengan melakukan validasi data yang mencakup mencakup nama (*by name*) dan lokasi (*by address*). Berdasarkan Pedoman Umum Kemiskinan Ekstrem, miskin ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, Kesehatan, tempat tinggal, Pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan tetapi juga akses pada layanan sosial. Kemiskinan Ekstrem diukur

menggunakan “absolute poverty measure” yang konsisten antar negara dan antar waktu. Secara internasional, kemiskinan ekstrem adalah masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari US\$ 1,9 PPP (*purchasing power parities*). Purchasing Power Parities (PPP) adalah indeks harga internasional yang diukur dengan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membeli sekeranjang barang yang sama di setiap negara yang dilakukan pembanding dengan menggunakan US \$. Contoh konsep Purchasing Power Parities (PPP), jika harga satu buah pisang di USA adalah US \$ 1.00, sedangkan di Indonesia adalah Rp 500, maka Purchasing Power Parities (PPP) tersebut adalah US \$ 0,002/Rupiah. Pada tahun 2022, nilai US \$ 1,9 PPP = Rp 10.739 per kapita per hari atau Rp.322.170 per kapita per bulan.

Untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem pada Tahun 2021 intervensi kemiskinan ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan pada 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Pada tahun 2022 intervensi kemiskinan ekstrem diperluas menjadi 18 kabupaten/kota di Provinsi NTT (minus kabupaten Flores Timur, Sikka, Nagekeo dan Ngada) dan pada tahun 2023 intervensi diperluas lagi menjadi 22 kabupaten/kota.

Berdasarkan rangkuman hasil estimasi BPS 2022 di Provinsi NTT mengalami peningkatan tingkat kemiskinan ekstrem dari 6,44% (Maret 2021) menjadi 6,56% (Maret 2022) dan Dari 22 kabupaten/kota, terdapat 11 kabupaten yang mengalami penurunan dan 11 kab/kota yang mengalami peningkatan kemiskinan ekstrem.

Tabel 2.15
Estimasi Kemiskinan Ekstrem di NTT Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2021-2022

Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Estimasi Penduduk Miskin Ekstrem(%)		Estimasi Penduduk Miskin Ekstrem (ribu jiwa)	
	2021	2022	2021	2022
Sumba Barat	13,73	11,75	18.280	15.854
Sumba Timur	15,14	10,40	39.957	27.735
Kupang	5,72	5,98	22.729	24.275
Timor Tengah Selatan	6,56	13,01	30.959	61.574
Timor Tengah Utara	4,84	2,48	12.480	6.435
Belu	5,35	4,44	12.077	10.170
Alor	2,77	2,38	5.749	4.977
Lembata	9,90	7,98	14.635	12.010
Flores Timur	0,79	2,10	2.060	5.491

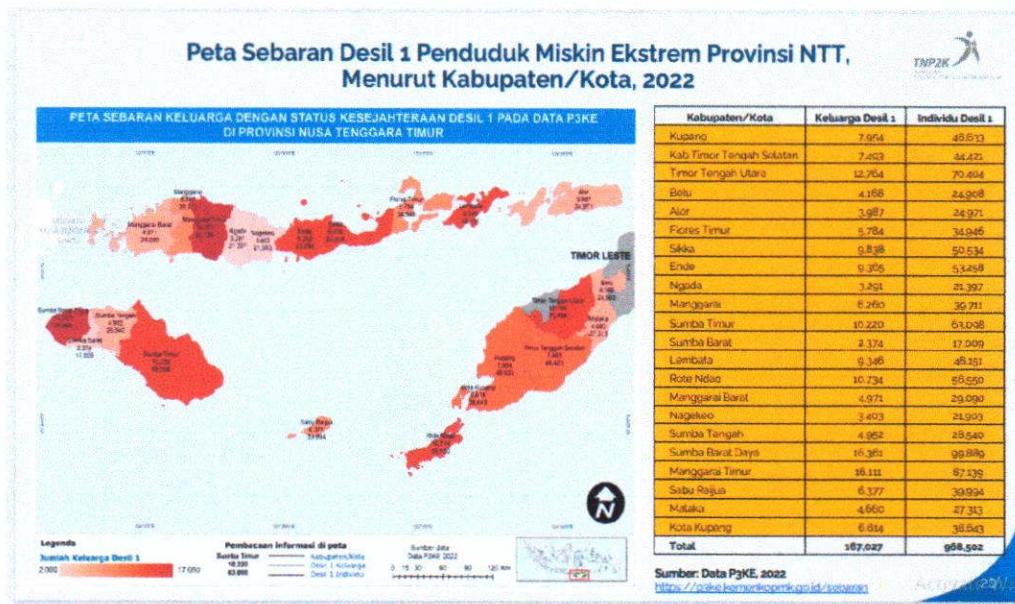
Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Estimasi Penduduk Miskin Ekstrem(%)		Estimasi Penduduk Miskin Ekstrem (ribu jiwa)	
	2021	2022	2021	2022
Sikka	0,42	2,57	1.358	8.320
Ende	13,00	10,99	35.764	30.291
Ngada	5,32	2,98	8.881	5.037
Manggarai	9,35	6,64	32.424	23.328
Rote Ndao	9,22	9,62	16.983	18.382
Manggarai Barat	6,98	9,79	19.906	28.515
Sumba Tengah	18,79	19,11	13.972	14.395
Sumba Barat Daya	6,91	4,63	24.622	16.800
Nagekeo	1,35	1,47	2.002	2.200
Manggarai Timur	6,85	9,11	19.936	26.781
Sabu Raijua	16,16	8,79	16.418	9.173
Malaka	3,06	3,54	6.035	7.071
Kota Kupang	0,38	2,49	1.724	11.640
Nusa Tenggara Timur	6,44	6,56	358.951	370.456

Sumber : estimasi BPS, 2022

Hasil pembelajaran Intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrem Tahap I, upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem membutuhkan data yang akurat dan terkini untuk menetapkan sasaran program intervensi. Oleh karena itu dengan memperhatikan arahan Presiden dan masukan Wakil Presiden pada Ratnas Data Kemiskinan Ekstrem pada 15 Februari 2022, telah dilakukan penyiapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dibawah koordinasi Kemenko PMK, dengan kolaborasi bersama BKKBN, Kemendagri, BPS, dan Set TNP2K. Data P3KE adalah subset dari Data PKBKKBN 2021 yang telah diberikan rangking dan divalidasi dengan Data NIK oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Data Pendataan Keluarga (PK) BKKBN 2021 merupakan data *set by name-by address* (BNBA) yang memiliki informasi karakteristik sosial-ekonomi keluarga yang dapat digunakan sebagai alternatif pengembangan peringkat kesejahteraan sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok miskin ekstrem. Dengan informasi sosial-ekonomi keluarga dan rangking kesejahteraan serta relatif barunya waktu pengumpulan data, menjadikan data PK BKKBN bermanfaat untuk memperbaiki pensasaran program pengurangan beban. Selain itu, karena cakupannya yang sangat besar data ini dapat dimanfaatkan untuk pensasaran program peningkatan pendapatan dan pemberdayaan.

Berdasarkan data P3KE di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat 167.027 Keluarga atau 968.502 ribu jiwa masuk sebagai Kelompok Desil 1 (status kesejahteraan 10% terendah), yang harus diprioritaskan sebagai sasaran intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masuk pada kelompok desil 1 tersebar di 22 kabupaten/kota, dengan jumlah terbanyak terdapat di Kabupaten Sumba Barat Daya (16.361 KK atau 99.889) dan di Kabupaten Manggarai Timur (16.111 KK atau 87.139 jiwa).



Gambar 2.8
Peta Sebaran Desil 1 Penduduk Miskin Ekstrem Provinsi NTT,
Menurut Kabupaten/Kota, 2022

2.2.7 Status Kesehatan

2.2.7.1 Status Gizi

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi gagal tumbuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang, dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang tidak memadai terutama dalam 1.000 HPK. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku. Standar dimaksud terdapat pada buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan beberapa dokumen lainnya.

Ibu hamil dengan konsumsi asupan gizi yang rendah dan mengalami penyakit infeksi akan melahirkan bayi dengan Berat Lahir Rendah (BBLR), dan/atau panjang badan bayi di bawah standar. Asupan gizi yang baik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga tetapi juga dipengaruhi oleh pola asuh seperti pemberian kolostrum (ASI yang pertama kali keluar), Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberian ASI eksklusif, dan pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) secara tepat. Selain itu, faktor kesehatan lingkungan seperti akses air bersih dan sanitasi layak serta pengelolaan sampah juga berhubungan erat dengan kejadian infeksi penyakit menular pada anak. Kehidupan anak sejak dalam kandungan ibu hingga berusia dua tahun (1.000 HPK) merupakan masa-masa kritis dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal. Faktor lingkungan yang baik, terutama di awal-awal kehidupan anak, dapat memaksimalkan potensi genetik (keturunan) yang dimiliki anak sehingga anak dapat mencapai tinggi badan optimalnya. Faktor lingkungan yang mendukung ditentukan oleh berbagai aspek atau sektor.

Menurut pencatatan e-PPBGM, terlihat ada kecenderungan penurunan prosentase balita stunting di wilayah NTT sejak tahun 2018; menurun dari 35,8% di tahun 2018 menjadi 17,7% di tahun 2022. Angka ini berada jauh di bawah rerata Nasional dan NTT (Riskesdas 2018) yang mencapai 30,8% dan 42,6%. Sementara itu prosentase balita yang mengalami wasting dan underweight cenderung fluktuatif sejak tahun 2018. Namun, pergerakan fluktuatif prosentase balita yang mengalami underweight dari tahun 2018-2022 justru masih jauh di atas prosentase nasional yang hanya 17,7 di tahun 2018 (Riskesdas 2018).

Tabel 2.16
Status Gizi Balita di NTT Tahun 2018-2022

Indikator	Percentase (e-PPBGM)					Riskesdas (NTT) 2018	Riskesdas (Nasional) 2018
	2018	2019	2020	2021	2022		
Stunting (%)	35,4	30,1	24,2	20,9	17,7	42,6	30,8
Wasting (%)	8,3	9,4	7,5	8,0	8,5	12,8	10,2
Underweight (%)	19,6	19,9	18,0	18,3	23,0	29,6	17,7

Sumber : Profil kesehatan NTT Tahun 2021 Dinas Kesehatan Provinsi NTT, akses Oktober 2022; Riskesdas 2018 Kementerian Kesehatan RI

2.2.7.2 Angka Kematian Ibu dan Bayi

Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) merupakan salah satu indikator utama menilai tingkat kesejahteraan dan status kesehatan masyarakat.

Sejak tahun 2018, jumlah kasus kematian Ibu di wilayah Provinsi NTT bersifat fluktuatif dengan jumlah >150 kasus setiap tahunnya kecuali pada tahun 2019. Penyebab Utama kematian Ibu: Perdarahan (42%), Eklampsi (14%), Infeksi (5%), Gangguan Metabolisme (4%) dan masalah lainnya termasuk masalah sosial, budaya dan ekonomi masyarakat (35%). Kabupaten dengan jumlah kematian ibu tertinggi (selalu muncul dalam lima (5) tahun terakhir): Timor Tengah Selatan, Kupang, Manggarai Timur, Manggarai, Sumba Barat Daya dan Sumba Timur.

Sebaliknya, jumlah kasus kematian bayi di wilayah Provinsi NTT mencapai 1265 kasus pada tahun 2018 dan turun pada tahun 2019 lalu relatif sedikit bertambah setiap tahunnya berturut-turut pada tahun 2020 dan 2021. Penyebab Utama Kematian Bayi: Asfiksia (27%), BBLR (18%), kelainan bawaan (8%), Pneumonia (7%), gangguan lainnya (6%), masalah sosial, budaya dan ekonomi masyarakat (34%). Kabupaten dengan jumlah kematian bayi tertinggi (selalu muncul dalam lima (5) tahun terakhir): Timor Tengah Selatan, Manggarai, Manggarai Barat, Kupang, Sikka, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Timor Tengah Utara



Sumber : Profil kesehatan NTT Tahun 2021 Dinas Kesehatan Provinsi NTT, akses Oktober 2022

Gambar 2.8
Kasus Kematian Ibu dan Bayi di NTT
Tahun 2018-2022

Tabel 2.17
Kasus Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten/Kota di Wilayah NTT
Tahun 2018-2022

NO	KAB/KOTA	AKI TAHUN					AKB TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kota Kupang	8	4	4	8	8	35	18	16	22	46
2	Kupang	11	5	11	15	8	86	73	78	96	81
3	TTS	24	12	17	17	7	144	86	109	100	45
4	TTU	6	3	7	11	11	74	54	43	33	43
5	Belu	10	5	12	7	6	62	80	66	52	35
6	Alor	12	7	7	10	8	25	16	9	17	13
7	Lembata	1	0	5	4	0	25	29	23	21	12
8	Flores Timur	9	3	5	6	7	100	49	29	45	37
9	Sikka	10	12	7	9	7	80	55	45	51	53
10	Ende	8	8	10	7	6	47	35	67	23	28
11	Nagekeo	4	1	4	2	1	36	25	24	28	16
12	Ngada	2	1	0	1	1	36	15	23	12	26
13	Manggarai Timur	9	10	12	11	17	119	51	48	49	41
14	Manggarai	6	12	5	12	5	83	76	85	96	81
15	Manggarai Barat	7	5	7	7	6	109	43	52	67	57
16	Sumba Barat Daya	5	10	9	14	5	34	25	32	42	56
17	Sumba Barat	1	1	1	3	2	15	22	14	29	42
18	Sumba Tengah	3	0	2	3	2	18	18	40	24	26
19	Sumba Timur	7	8	10	10	10	45	58	46	19	41
20	Rote Ndao	4	5	5	10	2	32	46	42	59	7
21	Sabu Raijua	3	1	8	9	5	44	10	37	55	25
22	Malaka	8	5	3	5	5	16	29	15	15	16
	NTT	158	118	151	181	129	1265	913	943	955	827

Sumber : Profil kesehatan NTT Tahun 2021 Dinas Kesehatan Provinsi NTT, akses Oktober 2022

2.2.8 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

Sejalan dengan mulai bangkitnya secara perlahan ekonomi di tahun 2021, TPT Provinsi NTT pada tahun 2021 tercatat 3,77%, mengalami penurunan dari tahun 2020 sebesar 4,28%. Secara spasial, TPT Provinsi NTT Agustus 2021 menempati peringkat ke-tujuh sebagai provinsi dengan TPT terendah setelah Provinsi Sulawesi Tengah (3,75%), Bengkulu (3,65%), Papua (3,33%), Sulawesi Barat (3,13%), Gorontalo (3,01% dan Nusa Tenggara Barat (3,01%). Sehingga secara Nasional, kondisi TPT Provinsi NTT pada Agustus 2021 lebih baik dibandingkan Nasional yang sebesar 6,49%.

Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Provinsi NTT pada Agustus 2021 menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2020. TPAK pada Agustus 2021 tercatat sebesar 73,78% atau lebih tinggi dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar 70,11%.

2.2.9 Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah NTT menunjukkan perbaikan. Tahun 2016-2021 secara berturut-turut pengelolaan keuangan daerah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan tahun 2013-2015 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Tabel 2.18
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah di Provinsi NTT Tahun 2013-2021

Indikator	Tahun									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2020

2.2.10 Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. Tujuan utama penyusunan PPH adalah untuk membuat suatu rasionalisasi pola konsumsi pangan yang dianjurkan, yang terdiri dari kombinasi aneka ragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan sesuai cita rasa. Skor PPH di NTT terus membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 PPH NTT 66,20 meningkat tahun 2016 menjadi 73,00 namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 67,9 persen.

Tabel 2.19
Skor Pola Pangan Harapan di Provinsi NTT Tahun 2013-2020

Indikator	Tahun (%)							
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Skor PPH	66,2	65,0	71,3	73,0	78,6	69,0	69,2	67,9

Sumber : Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian, 2021

AR

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Pendidikan

2.3.1.1 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Selanjutnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi NTT pada Umur 16-18 Tahun menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2018 sebesar 74,83, menjadi sebesar 75,04 pada Tahun 2019. Namun pada tahun 2020 menurun menjadi 74,92 dan APS tahun 2021 meningkat kembali menjadi sebesar 75,77 selengkapnya sebagaimana Tabel 2.20.

Tabel 2.20
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur 15-18 Tahun per Kabupaten/Kota (%)Tahun 2019-2021

Wilayah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 16-18 Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Sumba Barat	77.27	79.47	78.93	80.06
Sumba Timur	70.17	71.06	70.00	70.87
Kupang	78.76	80.17	80.86	80.94
Timor Tengah Selatan	68.34	70.79	71.29	71.58
Timor Tengah Utara	74.37	73.56	74.05	74.33
Belu	59.30	60.35	61.93	61.59
Alor	67.66	67.51	67.42	67.10
Lembata	70.78	70.53	70.88	70.42
Flores Timur	71.52	72.15	72.51	73.06
Sikka	71.11	71.33	73.31	74.53
Ende	74.36	74.01	76.41	76.50
Ngada	65.55	65.86	66.18	66.72
Manggarai	82.85	82.11	81.95	82.23
Rote Ndao	76.90	76.66	75.61	75.76
Manggarai Barat	74.72	73.98	73.48	74.84
Sumba Tengah	78.57	77.66	75.65	78.25

Wilayah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Umur 16-18 Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Sumba Barat Daya	74.11	73.28	72.99	73.12
Nagekeo	70.80	71.48	67.38	72.47
Manggarai Timur	75.92	75.66	74.44	77.58
Sabu Raijua	80.98	80.61	81.17	81.00
Malaka	77.68	76.12	74.07	77.39
Kota Kupang	89.11	89.57	88.74	89.32
Nusa Tenggara Timur	74.83	75.04	74.92	75.77

Sumber: BPS, Tahun 2022

Fenomena kenaikan dan penurunan APS antara Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 terjadi karena jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang SMA/SMK relatif tidak sama, putus sekolah dan tingkat kelulusan serta adanya perubahan regulasi terkait pengalihan kewenangan terhadap pelaksanaan pendidikan menengah atas dari Kabupaten/Kota ke Provinsi NTT.

Selain itu juga, faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat APS antara lain (1) faktor pendidikan orang dewasa, (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), (3) faktor guru (rasio murid terhadap guru) dan (4) faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah).

Pada kelompok umur yang lebih tinggi, partisipasi sekolah penduduk Nusa Tenggara Timur menunjukkan kecenderungan penurunan. Jika pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun partisipasi sekolah berada di atas 90 persen, maka pada kelompok penduduk 16-18 tahun hanya sekitar 75 persen dari total penduduk berumur 16-18 persen. Hal ini berarti hanya ada tiga dari empat orang penduduk berumur 16-18 tahun yang sementara bersekolah. Menurut jenis kelamin, terlihat adanya pola yang sama dengan partisipasi sekolah umur yang lebih muda. Partisipasi penduduk perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki pada kelompok umur 16-18 tahun.

Masih ada satu di antara empat orang yang telah meninggalkan bangku sekolah pada kelompok umur ini. Upaya bersama diarahkan untuk memperkecil berbagai hambatan dalam mengakses fasilitas pendidikan. Program wajib belajar yang selama ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi sekolah terutama pada pendidikan dasar dan menengah.

Pentingnya peningkatan APS untuk mendukung pencapaian rata-rata lama sekolah lebih tinggi yang dicapai tahun 2021. Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator kunci yang menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2.3.1.2 Rasio Murid/Guru

Rasio Murid dan Guru adalah Perbandingan antara jumlah Guru pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah Murid. kegunaannya adalah untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar; melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Rasio Murid dan Guru SMA di NTT adalah 14 berbanding 1 yang mana masih tergolong ideal sehingga rasio Guru dan Murid di Provinsi NTT bukan merupakan salah satu masalah pendidikan. Akan tetapi penyebaran Guru di NTT tersebut tidak merata di 22 Kabupaten/Kota, dan rasio guru mata pelajaran Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia masih terbatas.

Tabel 2.21
Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Ratio Murid-Guru
Sekolah Menengah Atas (SMA)

Wilayah	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)												
	Sekolah			Murid			Guru			Ratio Murid Guru			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
Sumba Barat	8	8	9	5572	5442	5327	280	284	302	20	19	18	
Sumba Timur	21	21	23	11536	11944	12447	673	657	670	17	18	19	
Kupang	58	59	62	15561	15547	15715	1287	12827	1332	12	12	12	
Timor Tengah Selatan	43	47	53	15872	16404	16912	970	985	1036	16	17	16	
Timor Tengah Utara	30	30	30	9670	9851	10145	728	722	709	13	14	14	
Belu	25	25	25	9318	9414	9380	626	659	659	15	14	14	
Alor	35	21	21	7176	6891	7108	772	790	810	9	9	9	
Lembata	15	14	14	4307	4214	4336	303	330	346	14	13	13	
Flores Timur	23	23	24	8076	7992	8101	630	645	667	13	12	12	
Sikka	23	23	24	9809	9200	8960	655	654	664	15	14	13	
Ende	21	3536	36	8062	7606	7396	633	654	644	13	12	11	
Ngada	13	16	18	6039	6071	6260	389	413	465	16	15	13	
Manggarai	26	27	27	14819	14014	14583	826	835	860	18	17	17	
Rote Ndao	13	13	14	6010	6298	6665	377	375	392	16	17	17	
Manggarai Barat	27	28	31	8981	8608	8691	654	689	769	14	12	11	
Sumba	4	4	5	2610	2725	2772	138	150	161	19	18	17	

AP

Wilayah	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas (SMA)												
	Sekolah			Murid			Guru			Ratio Murid Guru			
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
Tengah													
Sumba Barat Daya	26	26	27	10880	10907	11490	597	579	655	18	19	18	
Nagekeo	15	15	15	5486	5517	5354	417	429	436	13	13	12	
Manggarai Timur	47	46	46	10611	9962	9762	977	993	1015	11	10	10	
Sabu Raijua	7	8	8	4531	4934	5327	222	252	262	20	20	20	
Malaka	32	32	34	8994	8620	8587	722	747	776	12	12	11	
Kota Kupang	41	41	42	16314	15762	15645	1208	1200	1199	14	13	13	
Nusa Tenggara Timur	553	562	588	200234	197923	200963	14084	14329	18829	14	13	14	

Sumber: <https://dapo.kemdikbud.go.id/pd>

2.3.2 Kesehatan

2.3.2.1 Sarana Kesehatan

Sampai dengan Tahun 2021 terdapat 56 Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota. Data fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis fasilitas di 21 Kabupaten/Kota Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.22.

Tabel 2.22
Jumlah Fasilitas Kesehatan menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2018-2021

Wilayah	Fasilitas kesehatan															
	Rumah Sakit				Puskesmas				Posyandu				Polindes			
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Sumba Barat	2	2	3	3	9	10	10	10	245	256	256	250	73	73	73	73
Sumba Timur	3	3	3	3	24	24	24	24	505	571	567	570	85	85	70	70
Kupang	1	1	1	1	26	26	26	27	723	737	763	754	155	155	155	155
Timor Tengah Selatan	2	2	2	2	36	36	36	36	712	647	854	856	60	60	60	60
Tirto Tenggiri Utara	3	3	3	3	26	26	26	26	498	512	512	524	142	142	142	142
Alor	5	5	4	4	17	17	17	17	17	128	135	116	40	40	29	29
Lembata	2	2	2	2	26	26	26	26	443	454	444	446	41	41	45	45
Flores Timur	1	1	1	1	21	21	21	21	530	535	560	551	116	116	116	116
Sikka	3	3	3	3	25	25	25	25	647	648	638	650	125	125	125	125
Ende	2	2	2	3	24	25	25	26	672	641	662	652	75	75	75	75
Ngada	1	1	1	1	19	19	19	20	301	374	365	388	41	41	41	41
Manggarai	2	2	2	2	22	23	23	23	547	577	574	577	19	19	19	19
Rote Ndao	1	1	1	1	12	12	12	12	358	391	402	436	7	7	7	7
Manggarai Barat	2	2	3	3	20	21	21	21	451	475	480	434	19	19	19	19
Sumba Tengah	1	1	1	1	8	8	8	9	179	195	196	197	31	31	31	31
Sumba Barat Daya	1	2	2	2	13	15	16	16	405	463	545	553	57	57	57	57
Nagekeo	1	1	1	1	7	7	8	8	226	301	282	284	58	58	58	58
Manggarai Timur	0	0	1	1	25	29	29	29	559	566	579	579	20	20	20	20
Sabu Raijua	0	1	1	1	8	6	6	6	213	236	264	242	0	0	0	0
Malaka	1	1	1	1	20	20	20	20	460	469	474	474	58	58	58	58
Kota Kupang	13	13	13	14	11	11	11	11	307	315	315	315	5	5	5	5
Nusa Tenggara Timur	50	52	54	56	408	416	418	425	9793	10307	10484	10581	1249	1249	1227	1227

Sumber Data :

1. Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2018 & 2019
2. Profil Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Kesehatan, Kependudukan & Pencatatan Sipil Provinsi NTT Tahun 2020 & 2021
3. Data Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan, Kependudukan & Pencatatan Sipil Provinsi NTT

2.3.2.2 Tenaga Kesehatan

Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Tenaga Kesehatan merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan baik preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Ketersediaan tenaga kesehatan juga merupakan salah satu indikator dalam pembangunan kesehatan. Ketersediaan tenaga kesehatan tahun 2017-2021 sebagaimana Tabel 2.23:

Tabel 2.23
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)
Di Provinsi NTT Tahun 2017-2021

Wilayah	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa)															
	Tenaga Medis			Tenaga Keperawatan			Tenaga Kebidanan			Tenaga Kefarmasian			Tenaga Kesehatan Lainnya			
	2017	2018	2021	2017	2018	2021	2017	2018	2021	2017	2018	2021	2017	2018	2021	
Sumba Barat	60	43	32	312	318	381	58	78	122	18	22	18	47	21	32	
Sumba Timur	23	65	58	404	571	637	190	292	348	22	17	38	-	22	40	
Kupang	13	43	49	169	268	474	293	201	675	20	34	55	-	33	79	
Timor Tengah Selatan	61	54	68	205	227	528	199	319	596	29	26	59	-	44	87	
Timor Tengah Utara	39	76	54	306	394	506	304	306	612	66	63	80	-	43	73	
Belu	56	86	49	555	700	493	263	197	255	60	64	50	-	47	48	
Alor	18	42	81	596	292	666	394	231	497	35	54	91	-	21	88	
Lembata	26	30	28	318	289	251	278	263	322	11	35	39	-	30	37	
Flores Timur	37	35	54	366	458	700	310	350	693	50	46	71	-	29	59	
Sikka	13	99	51	300	463	692	325	364	587	42	52	62	-	38	54	
Ende	26	58	39	416	463	789	292	297	711	36	44	77	-	18	53	
Ngada	20	44	55	247	226	570	110	103	486	30	36	59	-	11	45	
Manggarai	17	71	45	691	790	880	596	649	904	53	43	84	-	45	72	
Rote Ndao	15	20	51	107	63	264	92	89	245	24	24	37	-	12	45	
Manggarai Barat	28	38	46	320	380	562	236	286	537	30	36	53	-	41	73	
Sumba Tengah	17	19	20	219	256	267	9	118	128	14	44	12	-	18	21	
Sumba Barat Daya	34	46	11	382	440	76	132	60	26	25	19	8	-	15	5	
Nagekeo	20	27	34	257	242	306	232	218	359	28	21	29	-	11	29	
Manggarai Timur	9	9	28	683	822	875	273	694	783	27	41	60	-	41	80	
Sabu Raijua	9	20	19	123	161	201	127	144	186	5	11	24	-	15	37	
Malaka	41	53	48	329	378	353	274	302	289	69	49	41	-	44	48	
Kota Kupang	44	469	123	291	1280	775	189	522	381	33	73	122	-	67	80	
Nusa Tenggara Timur	626	1447	1043	7596	9481	11246	5176	6083	9742	727	854	1169	47	666	1185	

Sumber: BPS, Tahun 2022

AR

2.3.3 Pekerjaan Umum

2.3.3.1 Jalan dan Jembatan

Total panjang jalan yang menjadi kewenangan provinsi adalah 2.650 km. Panjang capaian jalan mantap pada akhir tahun 2019 adalah 1.743, 88 km dan tidak mantap sepanjang 906,12 km. Pada periode tahun anggaran 2019 hingga 2022 telah dilakukan pencapaian kondisi jalan mantap sepanjang 884,24 km. Ini artinya beban jalan mantap kewenangan provinsi yang akan diselesaikan sampai akhir periode tahun 2023 adalah sepanjang 21,78 km. Melalui dukungan dari anggaran pemerintah provinsi dan sumber-sumber pembiayaan sah lainnya, ditargetkan pada akhir periode tahun anggaran 2023, kondisi jalan kewenangan provinsi sudah 100 persen menjadi jalan mantap.

Total panjang jalan menuju destinasi wisata adalah 542,87 km. Data eksisting tahun 2018 untuk penanganan ruas jalan ke destinasi wisata adalah 64 km dan realisasi penanganan sampai dengan 2020 adalah 165,95 km. Rencana penanganan tahun 2021 adalah 171,51 km yang merupakan paket-paket kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana pinjaman daerah melalui PT. SMI, baik lanjutan tahun 2020 maupun paket 2021. Realisasi pelaksanaan seluruhnya pada tahun 2021 adalah 36,64 km dari pelaksanaan paket-paket lanjutan PT. SMI tahun 2020. Dengan demikian capaian sampai dengan 2021 adalah sebesar 202,59 km.

Tabel 2.24 di bawah berikut adalah tabel ruas jalan kewenangan provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur NTT 256/KEP/HK tahun 2017 yang tersebar pada 21 wilayah kabupaten dan kota Nusa Tenggara Timur.

Tabel 2.24
Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km)
Tahun 2018-2020

Wilayah	Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km)											
	Baik			Sedang			Rusak			Rusak Berat		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Sumba Barat	58.72	50.00	61.24	2.47	10.26	10.26	2.00	2.53	2.53	24.08	24.91	13.67
Sumba Timur	99.31	111.16	10.96	32.80	19.09	28.47	20.00	14.37	10.37	121.84	129.73	125.88
Kupang	160.97	164.37	21.00	23.41	11.21	11.21	55.00	45.60	38.90	108.22	126.33	87.37
Timor Tengah Selatan	165.18	172.56	174.71	5.70	4.50	4.50	6.00	5.85	3.65	118.23	111.85	111.90

Wilayah	Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan (km)											
	Baik			Sedang			Rusak			Rusak Berat		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Timor Tengah Utara	128.56	124.36	124.36	3.20	7.40	7.40	0.65	0.65	0.65	0.60	0.60	0.60
Belu	56.52	54.72	54.72	5.90	7.70	7.70	0.60	0.60	0.60	0.40	0.40	0.40
Alor	31.86	27.79	37.52	9.20	8.73	12.34	35.00	25.68	32.64	47.66	61.62	41.33
Lembata	18.26	22.30	37.28	4.36	0.00	0.00	-	0.00	0.00	16.38	16.70	1.72
Flores Timur	89.54	104.39	102.91	15.31	4.65	54.00	10.00	11.00	10.90	34.74	29.86	30.68
Sikka	66.50	72.88	72.88	8.25	4.80	48.00	4.00	0.60	0.60	11.89	12.06	12.06
Ende	105.59	82.54	86.28	15.25	30.20	30.20	6.00	14.53	14.23	19.24	18.89	15.45
Ngada	115.61	104.34	115.94	3.80	25.96	25.96	32.00	27.63	27.03	47.85	41.31	30.31
Manggarai	56.71	65.05	56.20	21.80	12.00	18.60	12.00	7.40	14.30	7.79	13.65	9.00
Rote Ndao	23.01	23.41	23.41	5.00	4.60	4.60	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Manggarai Barat	29.91	61.31	60.88	18.74	24.00	10.80	21.00	28.80	29.90	72.65	27.69	40.22
Sumba Tengah	18.58	18.30	18.30	5.10	1.50	1.50	2.00	1.20	1.20	0.80	5.45	5.45
Sumba Barat Daya	76.77	67.45	67.45	-	6.14	6.14	0.07	3.20	3.20	6.23	6.28	6.28
Nagekeo	52.80	53.62	59.69	4.20	4.20	4.20	7.00	6.20	6.20	11.37	11.34	5.27
Manggarai Timur	34.70	51.40	59.80	17.60	6.60	8.40	6.00	5.80	6.40	54.90	49.20	38.40
Sabu Raijua	17.60	18.29	23.69	5.00	5.65	4.10	9.00	6.70	5.41	7.20	8.36	5.80
Malaka	64.15	64.38	64.38	3.00	2.00	2.00	0.55	1.55	1.55	0.23	0.00	0.00
Kota Kupang	26.72	25.73	28.07	1.00	2.34	0.00	-	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00
Nusa Tenggara Timur	1497.58	1540.35	1649.36	211.10	203.54	208.58	228.66	209.89	210.26	712.67	696.23	581.80

Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTT, 2021

Sedangkan untuk Jembatan, sampai dengan tahun 2020, panjang Jembatan, jumlah ruas dan banyaknya Jembatan Provinsi menurut Kabupaten/Kota, sebagaimana Tabel 2.25 berikut ini:

Tabel 2.25
Rekapitulasi Jembatan Provinsi Pada Ruas Jalan Provinsi Tahun 2020

NO	LOKASI PULAU/KAB/KOTA	SEMULA			MENJADI		
		PANJANG JEMBATA)	JUMLAH RUAS	BANYAKNYA JEMBATAN	PANJANG JEMBATAN (M)	JUMLAH RUAS	BANYAKNYA JEMBATAN
1	Kabupaten Alor	331	2	26	331	2	26
2	Kabupaten Lembata	63	1	5	-	-	-
3	Kabupaten Flotim	163	2	14	163	2	14
4	Kabupaten Sikka	341	7	27	341	7	27
5	Kabupaten Ende	699	6	31	699	6	31
6	Kabupaten Nagekeo	113	2	10	66	1	6
7	Kabupaten Ngada	840	9	40	840	9	40
8	Kabupaten Manggarai Timur	184	1	15	184	1	15
9	Kabupaten Manggarai	1.005	4	34	763	3	19
10	Kabupaten Manggarai Barat	75	1	3	75	1	3
11	Kabupaten Sumba Timur	1.117	8	61	344	3	28

NO	LOKASI PULAU/KAB/KOTA	SEMULA			MENJADI		
		PANJANG JEMBATAN)	JUMLAH RUAS	BANYAKNYA JEMBATAN	PANJANG JEMBATAN (M)	JUMLAH RUAS	BANYAKNYA JEMBATAN
12	Kabupaten Sumba Tengah	38	1	6	38	1	6
13	Kabupaten Sumba Barat	107	2	4	107	2	4
14	Kabupaten Sumba Barat Daya	107	1	7	107	1	7
15	Kota Kupang	-	-	-	-	-	-
16	Kabupaten Kupang	1.272	5	69	1.272	5	69
17	Kabupaten TTS	970	7	37	970	7	37
18	Kabupaten TTU	909	4	53	909	4	53
19	Kabupaten Belu	1.110	6	57	1.110	6	57
20	Kabupaten Rote Ndao	252	3	24	-	-	-
21	Kabupaten Sabu Raijua	-	-	-	-	-	-
	Nusa Tenggara Timur	9.692	72	523	8.315	61	442

Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTT, 2021.

2.3.3.2 Sumber Daya Air (Jaringan Irigasi, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya)

Dari penanganan yang dilakukan tahun anggaran 2022 melalui rehabilitasi jaringan irigasi di beberapa Daerah Irigasi, hingga Oktober 2022 terealisasi melayani luasan sawah 2.500 ha. Pencapaian penanganan (layanan) sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 34.268,08 ha. Total pencapaian layanan 36.768,08 ha atau sebesar 61 % dari total luas Daerah irigasi Kewenangan Provinsi yakni 60.328 Ha.

Tabel 2.26
Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi di Nusa Tenggara Timur

NO	Kabupaten/Kota Nama Daerah Irigasi	Jumlah D.I	Luasan (Ha)	Lokasi
I	KABUPATEN KUPANG	3	3.521	
1	Daerah Irigasi Enorain	1	1.100	Desa Enorain di Kecamatan Amarasi Timur
2	Daerah Irigasi Kolidoki	1	1.071	Desa Naibonat di Kecamatan Kupang Timur
3	Daerah Irigasi Netemnanu	1	1.350	Desa Netemnanu di Kecamatan Amfoang Timur
II	KABUPATEN TTS	2	1.489	
1	Daerah Irigasi Batu Putih/Oebobo	1	400	Desa Batu Putih di Kecamatan Batu Putih
2	Daerah Irigasi Oebelo	1	1.089	Desa Oebelo di Kecamatan Amanuban Selatan
III	KABUPATEN TTU	4	5.702	
1	Daerah Irigasi Ponu	1	1.430	Desa Ponu di Kecamatan Biboki Anleu
2	Daerah Irigasi Aroki	1	1.242	Desa Oninbesi di Kecamatan Biboki Tengah
3	Daerah Irigasi Hasfuik		1.600	Desa Nonat Batan di Kecamatan Biboki Anleu
4	Daerah Irigasi Biluana	1	1.430	Desa Fatutasu di Kecamatan Miomaffo Barat

se

NO	Kabupaten/Kota Nama Daerah Irigasi	Jumlah D.I	Luasan (Ha)	Lokasi
IV	KABUPATEN BELU	3	4.815	
1	Daerah Irigasi Fatubesi	1	1.650	Desa Fatubesi di Kecamatan Tasifeto Timur
2	Daerah Irigasi Maubusa	1	1.350	Desa Dafala di Kecamatan Tasifeto Timur
3	Daerah Irigasi Obor	1	1.815	Desa Leon Tolu di Kecamatan Raimanuk
V	KABUPATEN MALAKA	2	2.650	
1	Daerah Irigasi Alas	1	1.650	Desa Alas di Kecamatan Kobalima
2	Daerah Irigasi Weliman	1	1.000	Desa Naas di Kecamatan Malaka Barat
VI	KABUPATEN ROTE NDAO	1	1.250	
1	Daerah Irigasi Manubulu	1	1.250	Desa Edalode di Kecamatan Pante Baru
V	KABUPATEN LEMBATA	1	1.350	
1	Daerah Irigasi Wai Matan Boto	1	1.350	Desa Labalimut di Kecamatan Nagawutung
VI	KABUPATEN FLORES TIMUR	3	3.630	
1	Daerah Irigasi Konga	1	1.100	Desa Konga di Kecamatan Wulanggitang
2	Daerah Irigasi Waekelak	1	1.080	Desa Bandona di Kecamatan Tanjung Bunga
3	Daerah Irigasi Waiwadan	1	1.450	Desa Waiwadan di Kecamatan Adonara Barat
VII	KABUPATEN SIKKA	1	1.250	
1	Daerah Irigasi Kolisia	1	1.250	Desa Kolisia B di Kecamatan Magepanda
VIII	KABUPATEN NAGEKEO	1	1.000	
1	Daerah Irigasi Malawitu	1	1.000	Desa Olekile di Kecamatan Boawae
IX	KABUPATEN NGADA	4	4.544	
1	Daerah Irigasi Ganggong	1	1.000	Desa Rawang Kalo di Kecamatan Riung
2	Daerah Irigasi Luwur Weton	1	1.000	Desa Wolomeze di Kecamatan Riung
3	Daerah Irigasi Malatawa	1	1.344	Desa Uluwae di Kecamatan Bajawa Utara
4	Daerah Irigasi Nuakua	1	1.200	Desa Wue di Kecamatan Wolomeze
X	KABUPATEN MANGGARAI TIMUR	2	2.029	
1	Daerah Irigasi Wae Mokel I, II	1	1.007	Desa Watunggene di Kecamatan Kota Komba
2	Daerah Irigasi Waerana	1	1.022	Desa Watu Pari di Kecamatan Kota Komba
XI	KABUPATEN MANGGARAI	4	8.275	
1	Daerah Irigasi Cancar	1	2.500	Desa Donglale di Kecamatan Ruteng
2	Daerah Irigasi Golowoi	1	1.500	Desa Golowoi di Kecamatan Cibal Barat
3	Daerah Irigasi Satar Lenda	1	1.525	Desa Satar Lenda di Kecamatan Satar Mese Barat
4	Daerah Irigasi Wae Ces I - V	1	2.750	Desa Karot di Kecamatan Langke Rebong
XII	KABUPATEN MANGGARAI BARAT	4	4.731	
1	Daerah Irigasi Wae Ganggang	1	1.281	Desa Nanga Kantor di Kecamatan Macang Pacar

NO	Kabupaten/Kota Nama Daerah Irigasi	Jumlah D.I	Luasan (Ha)	Lokasi
2	Daerah Irigasi Wae Paku	1	1.050	Desa Golomanting di Kecamatan Sanangoang
3	Daerah Irigasi Tiwo Lawo	1	1.200	Desa Nangabire di Kecamatan Lembor
4	Daerah Irigasi Wae Racang	1	1.200	Desa Golodaring di Kecamatan Sanangoang
XIII	KABUPATEN SUMBA TIMUR	3	5.460	
1	Daerah Irigasi Mangili	1	2.666	Desa Tanah Manang di Kecamatan Pahunga Lodu
2	Daerah Irigasi Mataiyang	1	1.579	Desa Laihau di Kecamatan Lewa Tidahu
3	Daerah Irigasi Melolo	1	1.215	Desa Mutung Gedung di Kecamatan Uma Lulu
1	Daerah Irigasi Loli	1	2.390	Desa Doka Kaka di Kecamatan Loli
2	Daerah Irigasi Wanokaka	1	2.653	Desa Rewarara di Kecamatan
XV	KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA	2	3.589	
	Daerah Irigasi Mataliku	1	1.089	Desa Loura di Kecamatan Keruni
	Daerah Irigasi Waekelo Sawah	1	2.500	Desa Kalembo, Daramere,, Tema Tana di Kecamatan Mareda
	TOTAL	42	60.328	

Intervensi program dan kegiatan yang dilakukan untuk menjawab capaian indikator layanan irigasi ini adalah melalui kegiatan Pemeliharaan Berkala maupun Pemeliharaan rutin Daerah Irigasi yang dilakukan setiap tahunnya. Pemeliharaan Berkala Daerah Irigasi tahun 2022 dilakukan pada beberapa Daerah Irigasi dengan dukungan dana DAU, DAK dan program IPDMIP.

Sementara Cakupan Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya dengan target Pembangunan 142 embung. Intervensi yang dilakukan diwujudkan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air dengan Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan yang dilakukan adalah Pembangunan Embung Kecil secara tersebar di beberapa Kabupaten/Kota yang pelaksanaanya didukung dengan dana Pinjaman Daerah - PT. SMI. Total kebutuhan pembangunan embung untuk memenuhi kebutuhan penyediaan air adalah sebanyak 497 buah embung. Target pembangunan sesuai RPJMD dan Renstra untuk tahun 2019-2023 adalah 142 buah embung. Realisasi pelaksanaan di tahun 2019-2020 terbangun sebanyak 66 buah embung (46%) yang pembbiayaannya bersumber dari dana APBD. Beban yang belum dicapai sampai akhir tahun anggaran periode 2023 adalah 76 embung (54%). Selain pembangunan embung dengan dana APBD, pembiayaan sumber APBN juga

berkontribusi signifikan dimana sampai dengan periode Oktober tahun 2022 telah terbangun 257 buah embung. Sehingga, secara keseluruhan, jumlah embung terbangun sampai dengan tahun 2022 adalah 417 buah embung atau sebesar 84% terhadap total kebutuhan embung sebesar 497 buah.

2.3.3.3 Sanitasi Lingkungan

Demi mewujudkan pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (SDGs) salah satunya yaitu “Mewujudkan Akses Air Minum dan Sanitasi Aman serta berkelanjutan Bagi Semua”, Pemerintah telah menyelaraskan target SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang mengamanatkan terwujudnya 90% akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, serta penurunan angka BABS hingga 0% pada akhir tahun 2024.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) merupakan program pemerintah berupa pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.

Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. STBM dengan 5 (lima) pilar akan mempermudah upaya meningkatkan akses sanitasi masyarakat yang lebih baik serta mengubah dan mempertahankan keberlanjutan budaya hidup bersih dan sehat. Pelaksanaan STBM dalam jangka panjang dapat menurunkan angka kesakitan dan kematian yang diakibatkan oleh sanitasi yang kurang baik, dan dapat mendorong tewujudnya masyarakat sehat yang mandiri.

Lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) antara lain:

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) ; adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
2. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS); adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMRT); adalah melakukan kegiatan

mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.

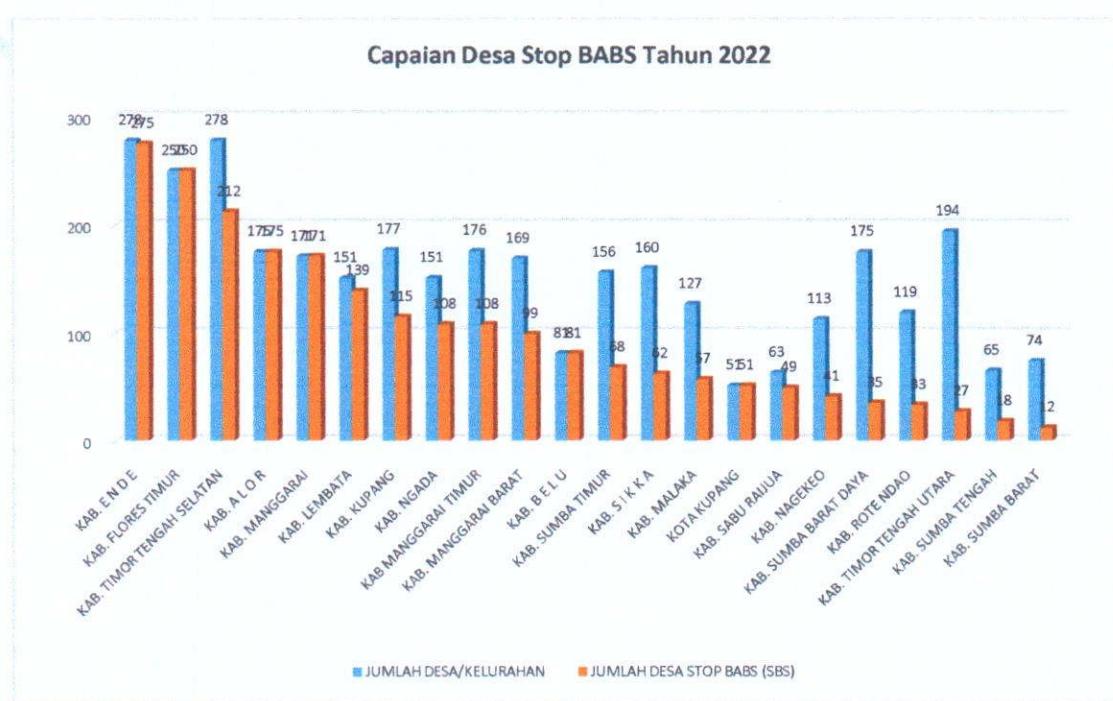
3. Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PSRT); adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
4. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT); adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standartbaku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit

Tabel 2.27
Percentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan
Jenis Tempat Buang Air Besar
di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021

Wilayah	Percentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat Buang Air Besar (Persen)											
	Sendiri			Bersama			Komunal			Tidak ada/ Tidak Menggunakan		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumba Barat	45.99	44.84	62.25	10.58	11.77	10.74	3.01	3.61	4.67	40.42	38.74	22.35
Sumba Timur	62.97	62.98	72.9	9.71	11.63	13.8	0.84	1.12	1.43	23.85	21.28	11.88
Kupang	84.18	84.66	85.86	10.4	9.54	7.6	0.54	0.28	0.74	4.54	5.53	5.8
Timor Tengah Selatan	84.83	82.89	80.12	7.98	10.63	13.13	0	0.28	0.16	7.19	6.1	6.58
Timor Tengah Utara	72.48	81.22	83.38	19.77	11.95	10.04	0.92	0.53	0.76	6.83	6.22	5.82
Belu	77.48	79.39	81.04	12.62	15.65	13.56	2.77	0.83	0.77	6.68	3.93	4.63
Alor	78.91	76.54	72.5	15.76	11.32	21.17	2.44	2.45	3.56	2.6	9.33	2.77
Lembata	90.4	90.13	90.43	6.41	5.74	5.5	0	0.51	0.19	3.19	3.63	3.88
Flores Timur	85.78	83.66	91.91	2.93	6.32	2.63	0.2	0	0	10.87	10.03	5.46
Sikka	70.49	74.75	74.54	13.65	17.69	15.62	1.99	0.44	0.31	13.49	7.12	9.53
Ende	65.85	67.7	72	28.61	23.9	19.17	5.54	4.79	4.38	0	3.43	4.46
Ngada	83.9	92.03	89.14	13.67	5.88	7.25	0.24	0.26	0	2.2	1.83	3.61
Manggarai	67.08	74.3	81.06	16.74	16.57	9.27	2.81	2.3	2.46	13.37	6.44	7.2
Rote Ndao	71.83	79.25	85.71	7.75	5.14	3.99	0.28	1	0.2	19.59	14.49	10.1
Manggarai Barat	68.24	75.64	79.02	10.07	11.59	10.43	5.32	1.84	3.29	16.37	10.94	7.26
Sumba Tengah	59.33	68.99	68.73	5.58	3.77	5.7	1.58	0.25	2.34	33.38	26.04	23.22
Sumba Barat Daya	59.47	59.32	66.49	3.28	6.31	5.65	1	0.54	2.02	36.25	33.63	25.84
Nagekeo	82.11	88.45	87.57	8.59	6.74	5.86	0.5	1.26	1.5	8.8	3.55	5.07
Manggarai Timur	88.71	81.45	83.93	8	10.33	10.01	1.03	0.41	1.52	2.26	7.81	4.54
Sabu Raijua	77.57	85.2	82.22	9.04	7.05	5.55	0.3	0	0.22	12.29	7.57	12.02
Malaka	58.46	62.51	68.02	17.32	17.92	19.59	6.69	4.86	3.69	17.03	14.7	8.69
Kota Kupang	73.75	73.57	76.7	24.21	26.03	22.67	2.05	0.13	0.5	0	0.27	0.12
Nusa Tenggara Timur	74.48	76.39	79.2	12.8	12.94	11.89	1.79	1.13	1.41	10.67	9.3	7.5

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

AE



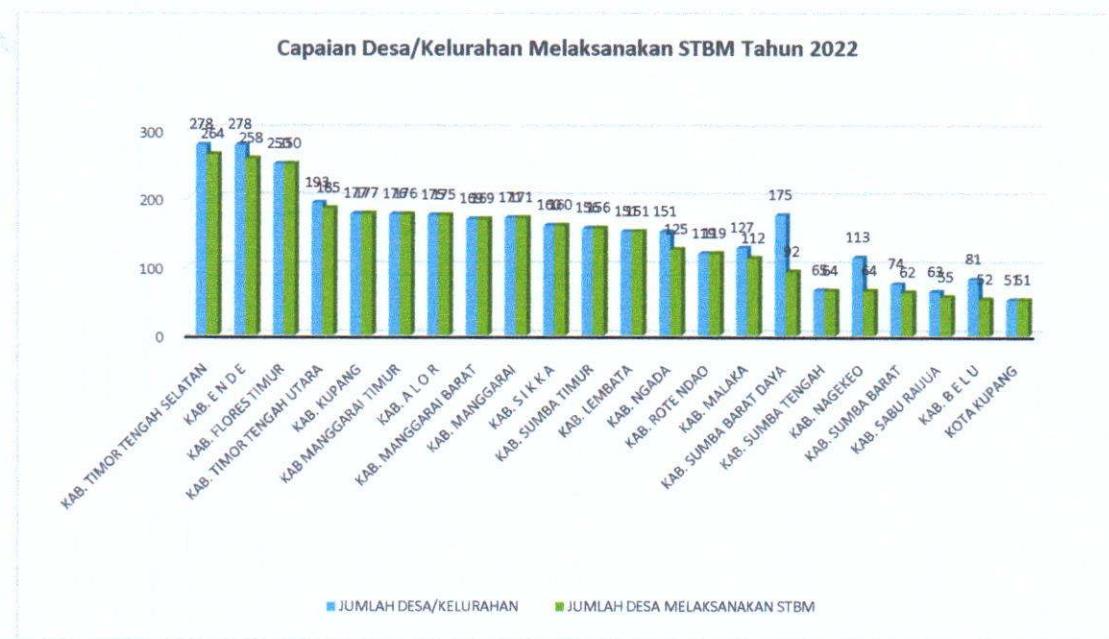
Gambar 2.9
Capaian Desa/Kelurahan STOP BABS Tahun 2022

Jumlah desa Stop BABS Tahun 2022 berjumlah 2.186 desa dari 3.353 desa/kelurahan (65%). Terdapat 5 kabupaten yang telah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten/Kota Stop BABS, yaitu Kota Kupang, Alor, Manggarai, Flores Timur dan Belu. Dari data tersebut juga diketahui masih 9 kabupaten yang pencapaian Desa ODF rendah yaitu di bawah 50% antara lain Kabupaten Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Utara, Sikka, Rote Ndao, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Nagekeo dan Malaka.

Indikator suatu Desa/Kelurahan dikatakan telah mencapai status SBS adalah:

1. Semua masyarakat telah BAB hanya di jamban yang sehat dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat.
2. Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar.
3. Ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat.

Ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% KK mempunyai jamban sehat. Ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total.



Gambar 2.10
Capaian Desa/Keluurahan Melaksanakan STBM Tahun 2022

Jumlah desa yang melaksanakan STBM adalah sebanyak 3.117 desa dari 3.353 desa di Provinsi NTT (92,96%). Terdapat 11 kabupaten/kota yang telah 100 persen melaksanakan STBM, antara lain : Kota Kupang, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Rote Ndao, Manggarai, Belu, Alor, lembata, Flores Timur, Sikka, Sumba Timur dan Kabupaten Kupang. Diketahui pula, masih terdapat 2 kabupaten yang pelaksanaan STBM di desa/kelurahannya masih di bawah 60% yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Nagekeo.

Indikator bahwa suatu Desa/Kelurahan dikatakan telah melaksanakan STBM adalah:

1. Minimal telah ada intervensi melalui Pemicuan di salah satu dusun dalam desa/kelurahan tersebut.
2. Ada masyarakat yang bertanggung jawab untuk melanjutkan aksi
3. intervensi STBM seperti disebutkan pada poin pertama, baik
4. individu (natural leader) ataupun bentuk kelompok masyarakat.
5. Sebagai respon dari aksi intervensi STBM, kelompok masyarakat menyusun suatu rencana aksi kegiatan dalam rangka mencapai komitmen perubahan perilaku pilar STBM, yang telah disepakati bersama.

Tabel 2.28
Data Akses Sanitasi Layak, Desa Stop BABS Dan STBM
Provinsi NTT

No	Lokasi/ Kab/ Kota	Jumlah KK Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)			Jumlah Desa/ Kelurahan	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)				
		Jumlah KK	Total KK akses Sarana	% KK Akses Sarana Sanitasi		Desa Melaksanakan STBM		Desa Stop BABS (SBS)		
						Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Sumba Barat	26,109	15,938	61.04%	74	62	83.78%	12	16%	
2	Sumba Timur	55,382	47,887	86.47%	156	156	100.00%	68	44%	
3	Kupang	74,273	66,521	89.56%	177	177	100.00%	115	65%	
4	Timor Tengah Selatan	114,141	112,972	98.98%	278	264	94.96%	212	76%	
5	Timor Tengah Utara	57,173	53,925	94.32%	193	185	95.85%	27	14%	
6	Belu	53,472	53,472	100.00%	81	81	100.00%	81	100%	
7	Alor	47,682	47,682	100.00%	175	175	100.00%	175	100%	
8	Lembata	34,356	34,198	99.54%	151	151	100.00%	139	92%	
9	Flores Timur	61,841	61,841	100.00%	250	250	100.00%	250	100%	
10	Sikka	78,631	70,908	90.18%	160	160	100.00%	62	39%	
11	Ende	66,616	66,600	99.98%	278	258	92.81%	275	99%	
12	Ngada	32,240	31,640	98.14%	151	125	82.78%	108	72%	
13	Manggarai	79,268	79,268	100.00%	171	171	100.00%	171	100%	
14	Rote Ndao	34,942	29,513	84.46%	119	119	100.00%	33	28%	
15	Manggarai Barat	56,758	40,908	72.07%	169	169	100.00%	99	59%	
16	Sumba Tengah	16,227	13,820	85.17%	65	64	98.46%	18	28%	
17	Sumba Barat Daya	57,865	38,325	66.23%	175	92	52.57%	35	20%	
18	Nagekeo	31,185	28,573	91.62%	113	64	56.64%	41	36%	
19	Manggarai Timur	66,167	62,254	94.09%	176	176	100.00%	108	61%	
20	Sabu Raijua	20,198	19,315	95.63%	63	55	87.30%	49	78%	
21	Malaka	50,032	37,163	74.28%	127	112	88.19%	57	45%	
22	Kota Kupang	79,358	79,358	100.00%	51	51	100.00%	51	100%	
	Nusa Tenggara Timur	1,193,916	1,092,081	91.47%	3353	3117	92.96%	2186	65%	

Sumber: Dinas PUPR Provinsi NTT, 2021

Akses sanitasi layak penduduk NTT tahun 2022 mencapai angka 91,47 %. Sebagian besar kabupaten di wilayah NTT telah mencapai lebih dari 80 % dan masih 4 kabupaten yang berada di bawah 80% akses sanitasi layak yaitu Kabupaten Malaka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Manggarai Barat

se

2.3.4. Perhubungan

Transportasi Udara sangat strategis dengan *load Factor* angkutan udara mencapai diatas 70%. Angkutan ini selain dipakai untuk pelayanan kemasyarakatan oleh pemerintah, namun yang lebih banyak menggunakan adalah pihak swasta untuk keperluan ekonomi dan juga keperluan penumpang wisatawan yang datang di NTT karena potensi pariwisata di NTT telah terbukti diminati oleh wisatawan baik wisatawan dalam negeri maupun luar negeri.

Bandara El Tari sebagai bandara pengumpul skala sekunder dengan status Bandara Internasional dan tiga bandara Pengumpul skala tersider dengan status Domestic yaitu Bandara H. Aroebusman, Bandara Frans Seda, Bandara Umbu Mehang Kunda dan Bandara Haliwen serta bandara Domestic dengan tingkat pelayanan skala pengumpulan yaitu Bandara Komodo, Frans Sales Lega, Mali, Tambolaka, Wunopitu, Gewayantana, Terdamu dan Bandara DC. Saudale.

Tabel 2.29

Arus Penumpang yang Datang dan Berangkat pada Pelabuhan Udara Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur 2019-2021

Bandara	Jumlah Penumpang Pesawat Menurut Pelabuhan Udara (Jiwa)					
	Datang			Berangkat		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Tambolaka - Sumba Barat Daya	103,642	54,633	33,940	106,244	50,006	36,992
Umbu Mehang Kunda - Sumba Timur	72,718	51,044	52,634	77,495	47,519	55,175
Terdamu - Sabu Raijua	5,780	3,952	2,989	5,960	4,191	3,584
A. A. Bere Talo - Belu	42,869	19,610	7,993	45,040	19,674	7,732
Mali - Alor	48,892	29,639	22,310	49,499	28,884	22,176
Wunopito - Lembata	14,011	3,959	4,976	13,090	3,809	4,470
Gewayantana - Flores Timur	37,419	24,937	17,753	38,146	25,889	15,650
Frans Seda - Sikka	101,962	59,208	47,324	100,905	54,683	49,376
H. Aroeboesman - Ende	86,939	55,829	54,298	86,404	55,038	55,029
Toreleleo - Ngada	41,083	24,381	21,472	45,901	25,921	23,215
Frans Sales Lega - Manggarai	12,925	6,134	10,490	13,244	6,134	11,646
Lekunik - Rote Ndao	26,626	13,656	12,218	28,122	14,768	12,357
Komodo - Manggarai Barat	347,510	167,859	154,800	34,6505	163,046	163,045
Eltari - Kota Kupang	936,224	495,384	499,770	817,758	441,124	440,126
Jumlah	1,878,600	1,010,225	942,967	1,774,313	940,695	900,573

Sumber: BPS, tahun 2022

2.3.5. Listrik

Penyediaan tenaga listrik PLN di Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan, namun belum mampu memenuhi kebutuhan yang terus bertambah sejalan dengan pertambahan penduduk dan jumlah rumah tangga dan lain-lain. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik maupun Non Listrik sebagaimana Tabel 2.30.

Tabel 2.30
Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (Persen)
Tahun 2019-2021

Wilayah	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (Persen)											
	Listrik PLN dengan meteran			Listrik PLN tanpa meteran			Listrik non PLN			Bukan listrik		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumba Barat	38.75	46.53	62.98	10.27	7.60	-	26.15	23.19	20.57	24.84	22.68	16.45
Sumba Timur	46.30	49.15	71.60	5.21	7.19	-	44.06	36.56	25.26	4.43	7.10	3.14
Kupang	66.89	69.94	84.48	11.02	11.10	-	11.92	8.10	6.84	10.17	10.86	8.68
Timor Tengah Selatan	33.71	40.59	68.76	9.85	7.59	-	19.96	13.54	16.13	36.48	38.28	15.11
Timor Tengah Utara	57.37	70.38	91.46	19.74	14.64	-	8.37	6.64	1.82	14.52	8.35	6.73
Belu	59.39	73.26	92.92	27.04	16.51	-	2.06	0.75	1.12	11.51	9.47	5.95
Alor	61.65	70.22	80.99	5.13	8.03	-	20.74	14.36	12.41	12.48	7.38	6.60
Lembata	75.35	83.56	95.76	9.79	7.85	-	6.28	1.84	0.92	8.58	6.75	3.32
Flores Timur	88.39	89.58	97.62	7.63	6.59	-	0.25	2.78	0.34	3.73	1.05	2.04
Sikka	60.51	68.16	81.79	19.03	13.62	-	11.06	3.80	8.47	9.41	14.42	9.74
Ende	74.86	83.89	93.92	16.07	7.20	-	7.09	3.80	4.52	1.98	5.10	1.56
Ngada	73.58	73.87	82.63	5.51	6.39	-	13.96	12.72	14.87	6.95	7.02	2.50
Manggarai	47.70	59.82	85.28	24.53	14.93	-	19.39	17.13	11.58	8.39	8.13	3.14
Rote Ndao	60.43	71.65	95.33	8.73	9.67	-	17.16	11.95	2.19	13.69	6.74	2.47
Manggarai Barat	39.52	49.44	67.94	12.87	14.84	-	25.96	25.64	20.41	21.65	10.08	11.65
Sumba Tengah	32.16	37.05	53.86	5.02	3.42	-	44.02	41.93	30.60	18.80	17.60	15.54
Sumba Barat Daya	26.87	32.28	51.55	9.54	6.38	-	32.57	25.94	24.31	31.02	35.40	24.14
Nagekeo	69.45	82.04	90.58	6.95	10.00	-	11.62	3.90	5.04	11.98	4.05	4.38
Manggarai Timur	29.68	31.38	56.31	12.48	8.55	-	33.31	23.93	32.89	24.53	36.14	10.80
Sabu Raijua	39.59	41.14	57.37	7.58	5.78	-	24.14	47.32	36.54	28.69	5.76	6.08
Malaka	58.08	67.01	90.91	24.71	14.57	-	7.35	8.55	0.84	9.86	9.87	8.25
Kota Kupang	85.67	84.10	99.40	14.26	15.88	-	-	0.00	0.57	0.07	0.02	0.03
Nusa Tenggara Timur	56.83	63.34	81.12	13.24	10.70	-	15.91	12.70	11.31	14.02	13.25	7.57

Sumber: Dinas ESDM Provinsi NTT, 2022

2.3.6. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

2.3.6.1. Koperasi

UU No.17 tahun 2012 tentang perkoperasian mendefenisikan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Untuk mewujudkan NTT sebagai provinsi koperasi, telah dilakukan berbagai upaya dengan pelibatan lintas pelaku dengan intervensi program dan kegiatan strategis, upaya ini berdampak pada pertumbuhan jumlah koperasi di NTT dari tahun 2019 s/d 2022 yang terus bertambah. Tahun 2020 jumlah koperasi di Provinsi NTT sebanyak 4.256 koperasi, yang terdiri dari koperasi aktif 3.905 dan koperasi tidak aktif sebanyak 351 koperasi. Tahun 2021 jumlah koperasi 4.282 dengan jumlah koperasi aktif 3.330 koperasi, dan 952 koperasi tidak aktif. Tahun 2022 jumlah koperasi 4.291 dengan jumlah koperasi aktif 3.339 dan koperasi tidak aktif 952. Pertumbuhan koperasi di NTT dapat dilihat pada Tabel 2.31 berikut :

Tabel 2.31
Jumlah Koperasi Menurut Kabupaten/Kota Di NTT Tahun 2022

No	Kabupaten/kota	Jumlah
1	Kota Kupang	633
2	Kabupaten Kupang	395
3	Kabupaten Timor Tengah Selatan	166
4	Kabupaten Timor Tengah Utara	104
5	Kabupaten Belu	179
6	Kabupaten Malaka	89
7	Kabupaten Alor	187
8	Kabupaten Lembata	116
9	Kabupaten Flores Timur	206
10	Kabupaten Sikka	190
11	Kabupaten Ende	187
12	Kabupaten Ngada	122
13	Kabupaten Nagekeo	115
14	Kabupaten Manggarai	173
15	Kabupaten Manggarai Timur	118

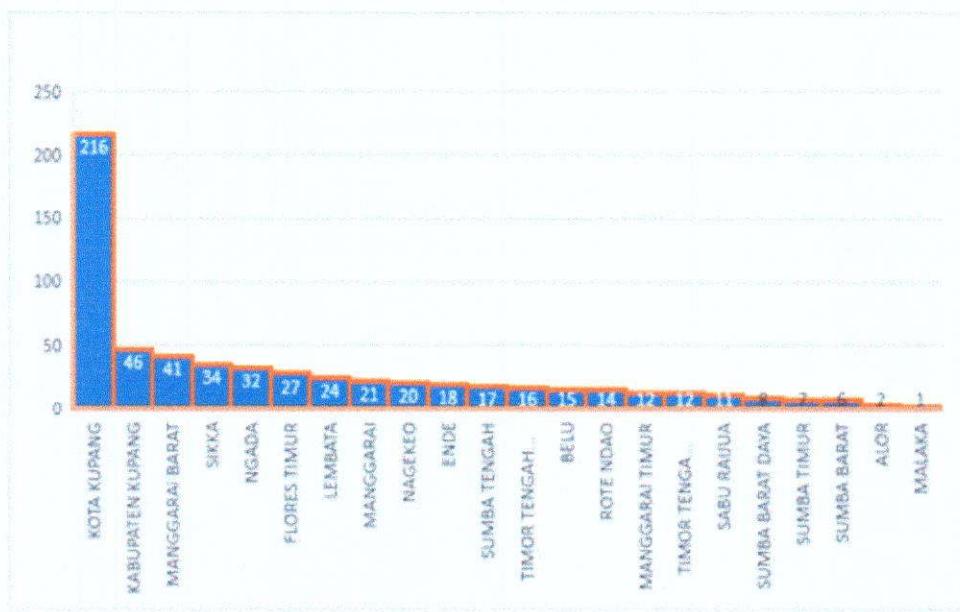
No	Kabupaten/kota	Jumlah
16	Kabupaten Manggarai Barat	147
17	Kabupaten Sumba Timur	149
18	Kabupaten Sumba Tengah	53
19	Kabupaten Sumba Barat	135
20	Kabupaten Sumba Barat Daya	152
21	Kabupaten Rote Ndao	203
22	Kabupaten Sabu Raijua	49
Provinsi		423
JUMLAH		4.291

Sumber : Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah koperasi terus bertambah selama tiga tahun terakhir dengan tingkat persentase pertumbuhan sebesar 0,822 % atau rata-rata penambahan jumlah koperasi setiap tahun ± 35 koperasi. Jumlah anggota koperasi tahun 2020 sebanyak 2.200.108 orang, 2021 sebanyak 2.492.946, dan tahun 2022 sebanyak 2.493.230 orang. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi selama 2020-2022 memiliki peningkatan sebesar 13,32 %. Kondisi ini berbanding terbalik dengan jumlah manajer Pertumbuhan manajer koperasi selama 2020-2021 yang memiliki trend pertumbuhan negative yang mana tahun 2020 jumlah manajer 1.840 orang, tahun 2021 1.440 orang dan tahun 2022 sebanyak 1.440 orang manajer, hal ini dikarenakan jumlah koperasi tidak aktif yang meningat pada periode tahun 2020-2021. Kepemilikan modal untuk menunjang pengembangan/ keberlanjutan koperasi sangat didukung oleh ketersediaan modal sendiri serta modal luar. Selama periode 2020-2022 jumlah modal sendiri yang dimiliki koperasi berjumlah 5.445.432.639.417 (triliun) dengan persentase pertumbuhan modal sendiri selama kurun waktu tersebut adalah sebesar 11,14%. Sedangkan jumlah modal luar sebesar 7.054.464.272.918 (triliun) dengan persentase pertumbuhan 11,11%. Untuk aset koperasi selama periode tahun 2020-2022 adalah sebesar 12.548.423.670.4436 (triliun) dengan pertumbuhan 11,55%. Pertumbuhan volume usaha untuk tiga tahun terakhir memiliki pertumbuhan dengan trend menurun dengan jumlah persentase pertumbuhan sebesar -14,11%. Kondisi ini mempengaruhi pertumbuhan SHU pada koperasi di NTT, selama periode ini SHU memiliki persentase pertumbuhan menurun yakni sebesar -2,42%.

2.3.6.2. Digitalisasi Koperasi

Pengertian digitalisasi koperasi adalah upaya untuk mengubah manajemen koperasi menjadi digital. Pengembangan digitalisasi koperasi diharapkan mampu membuat koperasi bergerak dinamis dan mampu mempercepat gerak bisnis koperasi. Digitalisasi Koperasi berorientasi terhadap tujuan, kemudahan, kecepatan layanan, kenyamanan, juga keamanan bertransaksi dengan koperasi. Guna mengembangkan koperasi di NTT lebih dinamis, digitalisasi koperasi menjadi perhatian untuk dilaksanakan dengan pelibatan pihak terkait. Perkembangan digitalisasi di NTT dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.



Sumber : Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT

Gambar.2.14
Perkembangan Digitalisasi Koperasi Menurut Kabupaten/Kota Di NTT

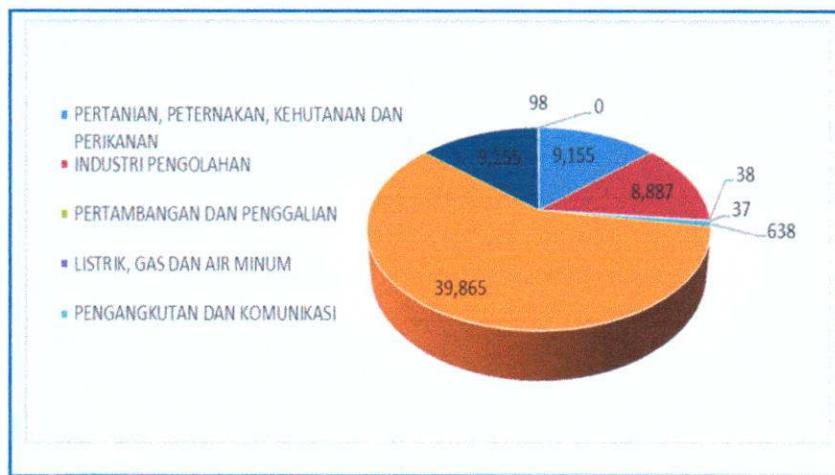
Dari 4.291 koperasi yang ada di NTT, jumlah koperasi yang sudah melakukan digitalisasi sebanyak 600 koperasi yang tersebar di 22 kabupaten/kota, yang sudah on proses sebanyak 237 koperasi, cleansing 16 koperasi, boarding 15 koperasi, dan yang go live sebanyak 332. Persentase per kabupaten/kota yang sudah melaksanakan digitalisasi koperasi adalah sebagai berikut : Kota Kupang 34% koperasi yang sudah digital dari 633 koperasi; Kabupaten Kupang 11% dari 395 koperasi; Kabupaten Flores Timur 13% dari 206 koperasi; Kabupaten Ende 9% dari 187 koperasi; Kabupaten Belu 8,37% dari 179 koperasi; Kabupaten Alor 1,06% dari 187 koperasi; Kabupaten Lembata 20,6% dari 116 koperasi; Kabupaten Malaka 1,12% dari 89 koperasi; Kabupaten Manggarai 12,1% dari 173 koperasi; Kabupaten

Manggarai Barat 27,8% dari 147 koperasi; Kabupaten Manggarai Timur 10,1% dari 118 koperasi; Kabupaten Nagekeo 17,3% dari 115 koperasi; Kabupaten Ngada 26,2% dari 112 koperasi; Kabupaten Rote Ndao 6,89% dari 203 koperasi; Kabupaten Sabu Raijua 22,4% dari 49 koperasi; Kabupaten Sikka 17,8% dari 190 koperasi; Kabupaten Sumba Barat 4,4% dari 135 koperasi; Kabupaten Sumba Barat Daya 5,2% dari 152 koperasi; Kabupaten Sumba Tengah 32,07% dari 53 koperasi; Kabupaten Sumba Timur 4,69% dari 149 koperasi; Kabupaten Timor Tengah Selatan 7,22% dari 166 koperasi; Kabupaten Timor Tengah Utara 15,3% dari 104 koperasi.

2.3.6.3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha atau bisnis yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha. UMKM di Indonesia diklasifikasikan menjadi Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. UMKM juga merupakan usaha yg dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha.

Permasalahan umum dibidang koperasi dan UKM adalah rendahnya daya saing produk Koperasi dan UKM menjadi salah satu tantangan pengembangan produk Koperasi dan UKM NTT, berkembangnya bisnis ritail oleh pengusaha besar saat ini menjadikan produk Koperasi dan UKM semakin terhimpit, disatu sisi keberadaan UKM membutuhkan kepastian tempat usaha, dengan keterbatasan yang dimiliki Koperasi dan UKM seringkali melakukan aktivitas usaha dengan lokasi yang tidak pasti dan berpindah-pindah. Selain itu rendahnya produktivitas dan daya saing produk Koperasi dan UKM, terlebih Koperasi dan UKM tidak memiliki jaringan pasar dan pemasaran yang luas, kebanyakan Koperasi dan UKM hanya memiliki akses pasar di tingkat lokal. Kinerja pembangunan UMKM di NTT digambarkan pada grafik di bawah ini



Sumber : Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT

Gambar 2.12
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menurut jenis usaha

Dari sembilan lapangan usaha UMKM yang ada di Provinsi NTTT, dari jumlah tersebut tiga lapangan usaha terbanyak adalah : 1). Lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran yakni sebanyak 39.865 lapangan usaha dengan persentase 40,57%; 2). Lapangan usaha pertanian dengan jumlah 39.552 lapangan usaha dengan persentase 40,25%; 3) Lembaga keuangan sebanyak 98,00 lapangan usaha dengan persentase 9,32%.

2.3.7. Penanaman Modal

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal merupakan segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia. Urusan penanaman modal di Provinsi NTT di laksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT. Berikut akan disajikan Tabel 2.32 realisasi PMDN di Provinsi NTT tahun 2017-2020-2021 :

Tabel 2.32
Realisasi Proyek dan Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2017-2020-2021

Wilayah	Realisasi Proyek dan Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)												
	Tenaga Kerja			Investasi (US \$)			Investasi (Rp)			Proyek			
	2017	2020	2021	2017	2020	2021	2017	2020	2021	2017	2020	2021	
Sumba Barat	749	-	-	-	1.679.104	5.143.455	597.426	22.500.000.000	75.094.435.920	1	9	37	
Sumba Timur	6.008	-	-	-	78.885.039	34.339.312	613.784.498	1.057.059.519.701	501.353.958.558	2	42	120	
Kupang	69	-	-	-	43.146.946	106.245.897	262.608.357	578.205.297.985	1.551.190.098.275	20	15	41	
Timor Tengah Selatan	10	-	-	-	1.322.999	6.390.418	1.500.727	17.728.184.000	93.300.107.047	1	13	374	
Timor Tengah Utara	-	-	-	-	2.674.104	679.358	-	35.833.000.000	9.918.620.000	-	16	31	
Belu	12	-	-	-	16.891.937	537.606	31.061.607	226.351.950.000	7.849.050.000	3	14	17	
Alor	281	-	-	-	-	753.809	-	-	11.005.611.714	1	24	16	
Lembata	784	-	-	-	5.169.500	260.051	-	69.271.305.930	3.796.744.668	1	4	2	
Flores Timur	47	-	-	-	1.943.433	7.782	1.700.000	26.042.000.000	113.618.552	1	7	1	
Sikka	200	-	-	-	1.456.168	8.360	81.574.230	19.512.656.520	122.053.771	2	10	66	
Ende	4	-	-	-	20.550	42.984	31.150.689	275.365.458	627.565.865	2	4	10	
Ngada	-	-	-	-	-	6.608.726	-	-	96.487.397.038	-	2	33	
Manggarai	190	-	-	-	7.658.652	10.861.804	-	102.625.930.635	158.582.330.902	1	17	82	
Rote Ndao	75	-	-	-	1.915.424	3.877.734	3.151.898	25.666.684.788	56.614.909.980	2	4	40	
Manggarai Barat	937	-	-	-	68.333.675	10.115.456	796.675.617	915.671.242.832	147.685.656.434	33	20	220	
Sumba Tengah	-	-	-	-	-	1.578.627	-	-	23.047.948.350	-	1	7	
Sumba Barat Daya	822	-	-	-	12.449.891	9.123.931	131.024.011	166.828.538.323	133.209.396.967	-	28	104	
Nagekeo	-	-	-	-	-	1.207.333	-	-	17.627.065.305	-	1	30	
Manggarai Timur	-	-	-	-	7.206.493	3.832.757	-	96.567.000.000	55.958.244.669	-	6	109	

AR

Wilayah	Realisasi Proyek dan Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota (Rupiah)												
	Tenaga Kerja				Investasi (US \$)			Investasi (Rp)			Proyek		
	2017	2020	2021	2017	2020	2021	2017	2020	2021	2017	2020	2021	
Sabu Raijua	-	-	-	-	-	949.058	-	-	13.856.250.000	-	-	44	
Malaka	200	-	-	-	8.761.851	759.120	6.900.000	117.408.807.741	11.083.153.352	1	2	4	
Kota Kupang	2.179	-	-	-	32.315.238	84.813.137	576.786.984	433.024.186.746	1.238.271.804.481	26	115	328	
Nusa Tenggara Timur	12.567	-	-	-	291.833.707	288.136.714	2.538.516.043	3.910.571.670.659	4.206.796.021.848	97	354	1.716	

Sumber : BPS Provinsi NTT (2022)

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi investasi PMDN tahun 2021 di Provinsi NTT mencapai Rp. 4.206.796.021.848 dimana angka ini mengalami peningkatan di bandingkan dengan tahun 2020 yang hanya mencapai Rp.3.910.571.670.659. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah proyek di NTT dimana pada tahun 2020 jumlah proyek di NTT mencapai 354 proyek dan pada tahun 2021 meningkat cukup signifikan menjadi 1716 proyek.

Untuk tahun 2022 target realisasi investasi secara Nasional untuk Provinsi NTT sebesar Rp. 6,95 Triliun. Sedangkan target realisasi investasi berdasarkan Perjanjian Kinerja untuk Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 6,324.085.076.095, yang terdiri dari PMA sebesar Rp. 2.529.634.030.438 dan PMDN sebesar Rp. 3.794.451.045.657. Realisasi Investasi s/d 31 Oktober 2022 di Provinsi NTT adalah sebesar Rp. 3.304.140.000.000 (52,25%), terdiri dari realisasi investasi PMA sebesar Rp. 694.540.000.000 (21,02%) dan realisasi investasi PMDN sebesar Rp. 2.609.600.000.000 (78,98%) (DPMPTSP Provinsi NTT, 2022).

Beberapa faktor yang mendorong peningkatan investasi di NTT adalah potensi sumber daya alam yang cukup menjanjikan serta di dukung dengan adanya kemudahan dalam berusaha dan berinvestasi di NTT melalui penerapan Sistem *Online Single Submission* (OSS) yang merupakan sistem perijinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perijinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha dalam negeri dimana dengan penerapan sistem OSS ini investor tidak lagi dihadapkan pada proses administrasi yang berbelit-belit dan rumit.

Selain itu terdapat juga beberapa faktor yang menjadi penghambat masuknya investasi ke NTT antara lain adalah (1) keterbatasan infrastruktur, (2) Keterbatasan kompetensi tenaga kerja, (3) Permasalahan kebijakan insentif fiskal dan non fiskal, dan (4) Legalitas kepemilikan/ status tanah. Selanjutnya juga ditemukan beberapa masalah yang terkait dengan para investor itu

sendiri antara lain adalah (1) Pelaku usaha belum memahami pengisian LKPM Online melalui sistem OSS, (2) Masih terdapat perusahaan belum menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online secara teratur dan tepat waktu, 3) Masih ada perusahaan yang sudah memiliki NIB namun belum memenuhi komitmen atau persyaratan dasar, seperti izin lokasi, izin lingkungan (AMDAL/UKL/UPL), serta kesesuaian dengan tata ruang, dan (4) Lokasi perusahaan yang tersebar di kecamatan dan desa menyulitkan untuk dilakukan pemantauan dan pengawasan sampai ke lokasi sasaran, karena terbatasnya anggaran baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota (DPMPTSP Provinsi NTT, 2022).

2.3.8. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan strategi dan aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dunia usaha dan *civil society* untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia khususnya para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui program pelayanan sosial yang meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial.

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang merupakan seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Pembangunan kesejahteraan sosial pada dasarnya bertujuan untuk memberdayakan para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti anak terlantar, anak jalanan, anak cacat, anak nakal, wanita rawan sosial ekonomi, korban bencana alam, fakir miskin, penyandang cacat, tunas susila, gelandangan, pemulung, lansia terlantar, penyandang HIV/AIDS, pekerja migran, Eks Narapidana, Korban Penyalahgunaan Napza, dan komunitas adat terpencil. Selain permasalahan tersebut, migrasi pekerja anak ke Kota Kupang dari beberapa kabupaten seperti TTS, Belu, Sikka, dan Sumba

Timur menimbulkan persoalan tersendiri yang perlu ditangani secara serius. Permasalahan PMKS terbanyak di Provinsi NTT pada tahun 2017 adalah fakir miskin, anak terlantar dan korban bencana alam. Data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT tahun 2017 tersaji dalam Tabel 2.33 di bawah ini.



Tabel 2.33
Jumlah Penyandang Masalah Kesejateraan Sosial (PMKS)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2022

No.	Kab/Kota	Jenis PMKS																								
		Anak Balita Teriantar (org)	Anak Terlantar (org)	Anak Berhadapan Hukum (org)	Anak Jalanan (org)	Anak Dengan Kedisabilitas an (org)	Anak Korban Tindak Kekerasan (org)	Anak Yang Memerluka n Perlindunga n Khusus (org)	Lansia Usia Terlantar (org)	Penyandang Disabilitas Terlantar (org)	Tuna Susila (org)	Gelandan gan (org)	Pengemis (org)	Pemulung (org)	Kelompok Minoritas (org)	Bekas Warga Binaan LP (org)	Orang Dengan HIV/AID S (ODHA) (org)	Korban Penyalah gunaan Napza (org)	Korban Trafficking (org)	Korban Tindak Kekerasan (org)	Korban Bencana Alam (org)	Korban Bencana Sosial (org)	Pekerja Migran Bermasal ah Sosial (org)	Perempu n Rawan Sosial Ekonomi (org)	Fakir Miskin (kk)	Keluarga Bermasala h Sosial Psikologis
1	Kota Kupang	9	247	123	375	163			7.167	995											16	3		49.534		
2	Kab. Kupang	32	203	108		139			25.823	799											3	5		64.892		
3	Kab. TTS	30	147	41		138			47.376	557												3		87.005		
4	Kab. TTU	51	678	61		203			20.159	1.057											1	2		48.626		
5	Kab. Belu		119	33	-	76			12.001	377												2		35.682		
6	Kab. Malaka	8	49	27		8			18.023	31											1		7		37.782	
7	Kab. Rote Ndao			20		28			10.970	196												5		30.141		
8	Kab. Sabu Raijua			20					8.651	2														24.088		
9	Kab. Sumba Timur		65	73		11			18.876	110												1		56.390		
10	Kab. Sumba Tengah	26	128	8					6.129															19.762		
11	Kab. Sumba Barat	3	211	12		16			9.473	74												1		35.137		
12	Kab. Sumba Barat Daya	25	137	35		69			19.742	302														83.590		
13	Kab. Manggarai Barat	3	160	10		49			16.520	219														54.227		
14	Kab. Manggarai	3	28	29		105			19.295	409											4			89.575		
15	Kab. Manggarai Timur			3		79			17.505	415														58.401		
16	Kab. Ngada		45	17		83			8.063	479														19.344		
17	Kab. Nagekeo			28		31			9.625	102														25.732		
18	Kab. Ende	5	212	27		105			19.792	735											2		51.114			
19	Kab. Sikka	99	1.352	46		68			24.110	323											1			75.976		
20	Kab. Flores Timur		1	19		147			20.311	612										1			1	48.604		
21	Kab. Alor	32	82	70		48			16.378	296														44.673		
22	Kab. Lembata		22	22		1			12.671	57											1		1	31.744		
Jumlah		326	3.886	832	375	1.567	-	-	368.660	8.147	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	20	33	-	1.072.019	-

Sumber : Dinas Sosial Prov. NTT, 2022

ME

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa jumlah PMKS di Provinsi NTT pada tahun 2017 yang terbanyak adalah keluarga fakir miskin yang mencapai 216.914 keluarga kemudian anak terlantar yang mencapai 120.876 jiwa dan korban bencana alam yang mencapai 86.106 jiwa. Kabupaten/Kota dengan jumlah keluarga fakir miskin terbanyak pada tahun 2017 adalah Kabupaten Sumba Barat Daya dengan jumlah 29.803 keluarga kemudian Kabupaten Manggarai Timur sebesar 25.028 keluarga dan kabupaten Timor Tengah Selatan yang mencapai 24.460 keluarga. Untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah anak terlantar terbanyak pada tahun 2017 adalah Kabupaten Manggarai Barat yang mencapai 12.526 jiwa dan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berjumlah 11.601 jiwa. Sedangkan untuk jumlah korban bencana alam terbanyak adalah pada kabupaten Nagekeo yang mencapai 36.787 jiwa dan kabupaten Manggarai Barat yang mencapai 21.358 jiwa. Secara akumulasi total jumlah keseluruhan PMKS di Provinsi NTT sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 426.740 jiwa dan 224.127 keluarga. Beberapa tantangan dalam pelayanan terhadap PMKS di NTT adalah (1) Rendahnya tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap fasilitas pelayanan sosial yang berdampak pada keterlambatan pemberian pelayanan bagi PMKS, (2) Upaya penanganan dan pemberdayaan fakir miskin yang bersumber dari berbagai pendanaan belum terintegrasi dan bersinergi dengan baik, serta aspek keberlanjutannya belum didesain dengan baik, (3) Kebijakan Nasional mengharuskan upaya penanganan dan pemberdayaan PMKS, terutama fakir miskin menggunakan aplikasi data base sehingga semua pemangku kepentingan pada tingkat desa/kelurahan di tuntut untuk memahami teknologi informasi, dan (4) Frekuensi bencana yang cukup tinggi belum diimbangi dengan ketersediaan jumlah SDM Taruna Siaga Bencana dan fasilitas pendukung yang memadai.

2.3.9. Pertanian

Sektor pertanian sampai saat ini tetap memberikan sumbangan besar dalam pembangunan nasional maupun regional, baik berupa sumbangan langsung maupun tidak langsung. Sumbangan langsung seperti dalam pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, perolehan devisa melalui ekspor, dan penekanan inflasi. Sumbangan tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran sektor pertanian dalam melaksanakan koordinasi dan memberikan fasilitas bagi pelaksanaan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat.



Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai daerah kepulauan dengan topografi yang berbukit dan beriklim kering dalam hal struktur perekonomian hingga saat ini masih bergantung pada sektor pertanian. Pada tahun 2021 kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB sebesar 29,17 persen. Nilai tersebut didominasi subsektor peternakan dan hasil-hasilnya (10,18%) dan tanaman pangan (7,58%).

Tabel 2.34
Sektor Pertanian Dalam Pembentukan PDRB Tahun 2019-2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Uraian	Tahun		
	2019	2020	2021
I. Sektor Pertanian	27,93	28,51	29,17
1. Tanaman pangan	8,04	7,75	7,58
2. Tanaman hortikultura	2,24	2,20	2,24
3. Tanaman perkebunan	2,26	2,34	2,46
4. Peternakan dan hasil-hasilnya	9,48	9,89	10,18
5. Jasa pertanian dan perburuan	0,43	0,44	0,40
6. Kehutanan	0,13	0,15	0,16
7. Perikanan	5,33	5,75	6,15
II. Sektor-Sektor Non Pertanian	72,07	71,49	70,83

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Nusa Tenggara Timur, BPS

Pada masa pandemi (2020-2021), sektor pertanian tetap mengalami pertumbuhan positif dengan angka 4,26 persen, dibandingkan dengan sektor non pertanian seperti perdagangan, konstruksi, pariwisata yang pertumbuhannya cenderung negatif., Artinya bahwa sektor pertanian di NTT harus dijadikan pegangan dalam mendukung sektor lainnya terutama sektor pariwisata di NTT yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi NTT sebagai *prime mover* pembangunan NTT.

2.3.9.1. Tanaman Pangan

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar, ubi kayu, palawija lainnya serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah.¹

¹ <https://ntt.bps.go.id/publication/2022/04/05/66948483c52dd044e62c7266/produk-domestik>

Perkembangan produksi padi di NTT selama tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif. Produksi padi di NTT tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 86.700 ton jika dibandingkan dengan tahun 2019 (Tabel 2.35). Hal ini terjadi sebagai akibat pembatasan social masyarakat dalam mencegah penyebaran covid 19 dan bencana alam yang melanda sentra-sentra produksi padi di NTT. Sementara produksi padi di NTT sepanjang Tahun 2021 mencapai sekitar 731.878 ton GKG atau mengalami peningkatan sekitar 6.854 ton GKG dibandingkan 2020 sebesar 725.024 ton GKG.

Tabel 2.35
Produksi Padi di Provinsi NTT Tahun 2019-2021

Wilayah	Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota (Ton)		
	2019 ²	2020 ³	2021 ⁴
Sumba Barat	32.013	23.588	30.574
Sumba Timur	68.917	49.563	54.189
Kupang	61.593	52.086	55.838
Timor Tengah Selatan	20.032	16.496	14.539
Timor Tengah Utara	40.135	12.942	32.661
Belu	17.107	11.761	22.449
Alor	2.382	3.324	3.196
Lembata	2.730	3.591	765
Flores Timur	10.997	11.165	8.089
Sikka	13.051	17.235	11.399
Ende	19.561	20.627	23.684
Ngada	55.563	51.771	54.380
Manggarai	92.029	92.346	96.433
Rote Ndao	37.776	22.600	26.795
Manggarai Barat	121.440	126.012	100.874
Sumba Tengah	25.883	26.238	27.757
Sumba Barat Daya	35.858	42.689	41.311
Nagekeo	40.087	36.790	29.776
Manggarai Timur	88.988	74.361	66.798
Sabu Raijua	4.063	4.493	8.634
Malaka	19.728	24.383	20.239
Kota Kupang	1.792	963	1.498
Nusa Tenggara Timur	811.724	725.024	731.878

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

² regional-bruto-provinsi-nusa-tenggara-timur-menurut-lapangan-usaha-2017-2021.html

³ <https://ntt.bps.go.id/indicator/53/929/2/produksi-padi-menurut-kabupaten-kota.html>

⁴ <https://ntt.bps.go.id/indicator/53/929/1/produksi-padi-menurut-kabupaten-kota.html>

⁴ <https://ntt.bps.go.id/indicator/53/929/1/produksi-padi-menurut-kabupaten-kota.html>

Pada tahun 2021, luas tanaman jagung di NTT mencapai ± 305.000 ha dengan produksi sekitar 735.000⁵ ton atau rata-rata produksi 2,4 ton/ha. Produktifitas jagung di NTT tergolong rendah, jika dibandingkan dengan produktifitas jagung nasional yang sudah mencapai 5,09 ton/ha. Permasalahan utama rendahnya produktifitas tanaman jagung adalah keterbatasan modal usaha dan jaminan pemasaran hasil. Upaya yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT dalam peningkatan produksi tanaman jagung adalah penyediaan sarana produksi berupa benih unggul, pupuk, obat-obatan, dengan dukungan alsintan sehingga memudahkan petani saat penanaman dan panen.

Tabel 2.36
Produksi Jagung Menurut Kabupaten/Kota (Ton), 2019-2021

Wilayah	Produksi Jagung menurut Kabupaten/Kota (Ton)		
	2019	2020	2021
Sumba Barat	23.818	17.816	30.574
Sumba Timur	49.724	48.011	36.030
Kupang	64.017	41.524	42.689
Timor Tengah Selatan	168.398	125.340	183.931
Timor Tengah Utara	46.621	36.406	42.945
Belu	45.185	34.786	31.975
Alor	21.164	25.258	23.995
Lembata	21.866	15.682	30.191
Flores Timur	23.618	18.631	20.118
Sikka	30.878	19.329	30.344
Ende	14.323	17.357	14.938
Ngada	50.719	17.149	16.938
Manggarai	8.447	13.132	10.316
Rote Ndao	10.476	9.312	6.895
Manggarai Barat	41.082	28.637	10.078
Sumba Tengah	19.461	19.364	26.506
Sumba Barat Daya	97.374	109.056	104.280
Nagekeo	21.161	5.335	9.494
Manggarai Timur	41.544	28.697	14.982
Sabu Raijua	4.403	4.464	9.487
Malaka	78.777	55.012	67.796
Kota Kupang	1.272	963	565
Nusa Tenggara Timur	884.326	745.753	750.166

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT dan BPS

⁵ <https://ntt.bps.go.id/indicator/53/1470/1/produksi-jagung-menurut-kabupaten-kota.html>

Kondisi ini memicu pemerintah untuk menyiapkan program yang diharapkan mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan petani dalam skema ekosistem pembiayaan pertanian yang dengan *tagline Tanam Jagung Panen Sapi* (TJPS) yang dikembangkan dengan konsep *pentha helix* atau multi-pihak, melibatkan unsur pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media dengan menggerakkan pengelolaan sumberdaya lokal, penyediaan pembiayaan, jaminan pemasaran hasil, penerapan inovasi dan teknologi, serta pelatihan dan pendampingan asumsi semakin tinggi produksi akan semakin tinggi pendapatan.

Peningkatan produksi tanaman pangan dilaksanakan melalui ekstensifikasi, intensifikasi, diversifikasi dan pengembangan perbenihan/perbibitan serta didukung dengan sarana dan prasarana pertanian.

Selain padi dan jagung, komoditas tanaman pangan lainnya yang dibudidayakan yaitu kacang-kacangan (kacang tanah dengan produksi tahun 2021 sebanyak 12.476 ton biji kering, kacang hijau dengan produksi tahun 2021 sebanyak 8.971 ton biji kering, kacang kedele dengan produksi tahun 2021 sebanyak 2.292 ton) serta umbi-umbian (ubi kayu dengan produksi pada tahun 2021 sebanyak 675.182 ton umbi basah dan ubi jalar dengan produksi tahun 2021 sebanyak 32.107 ton umbi basah).

2.3.9.2. Hortikultura

Sub kategori tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi tanaman hortikultura yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman hortikultura meliputi kelompok (i) komoditas buah-buahan; (ii) komoditas sayur-sayuran; dan (iii) komoditas biofarmaka.

Tabel 2.37
Produksi Buah-Buahan Tahunan (Kuintal) Tahun 2019-2021⁶

Jenis Buah-Buahan Tahunan	Produksi Buah-Buahan Tahunan (Kuintal)		
	2019	2020	2021
Alpukat	116.825	111.186	342.837
Anggur	183	179	74
Apel	90	76	358
Belimbing	7.555	5.594	6.630
Duku/Langsat	160	42	155
Durian	15.742	14.416	37.131
Jambu Air	10.010	10.375	16.850
Jambu Biji	38.755	52.723	151.505
Jeruk Besar	37.095	20.854	18.454
Jeruk Siam/Keprok	260.177	548.670	568.119
Jeruk/ Orange	51.8447	56.9524	-
Mangga	38	396.599	854.833
Manggis	1 653	9	166
Markisa	210 496	4.242	-
Nangka/Cempedak	78 093	175.346	255.007
Nenas	678 789	164.040	111.060
Pepaya ⁷	2 274 612	668.141	1.020.612
Pisang	37 537	2.369.251	2.364.974
Rambutan	10 465	37.392	78.555
Salak	8 073	29.372	24.84
Sawo/Sapodilla	26 655	6.513	9.131
Sirsak	27 852	25.978	42.508
Sukun	21 989	21.012	30.298

Sumber: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-BST

Produksi buah-buahan di NTT selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya kenaikan meskipun terdapat beberapa jenis buah yang mengalami penurunan. Jenis buah yang banyak dihasilkan di NTT adalah pisang, alpukat, papaya, jeruk dan nenas.

⁶ <https://ntt.bps.go.id/indicator/55/983/1/produksi-buah-buahan-tahunan.html>

⁷ Data Sementara sebelum Angka Tetap <https://ntt.bps.go.id/indicator/55/982/1/produksi-buah-buahan-tahunan-menurut-kabupaten-kota.html>

Tabel 2.38
Produksi Tanaman Biofarmaka (kg), 2019-2021

Tanaman Biofarmaka	Produksi Tanaman Biofarmaka (kg)		
	2019	2020	2021
Dlingo	74	409	-
Jahe	1.159.878	759.754	917.307
Kapulaga	423	158	1.173
Keji beling/Kecibeling	373	348	-
Kencur	488.075	62.645	80.121
Kunyit	3.708.139	498.986	518.766
Laos/Lengkuas	2.933.639	269.996	208.586
Lempuyang	2.914	2.645	8.193
Lidah Buaya	4.994	12.767	2.962
Mahkota Dewa	18.764	62.070	40.436
Mengkudu/Pace	28.395	19.354	17.411
Sambiloto	2.184	5.682	9.759
Temuireng	11.261	39.522	6.940
Temukunci	5.170	30.506	68.638
Temulawak	61.591	134.810	62.171

Sumber: BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TBF

Tanaman biofarmaka dikategorikan sebagai tanaman yang bermanfaat untuk obat-obatan, kosmetik dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, buah, umbi (rimpang) ataupun akar.

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, jahe merupakan komoditi tanaman obat-obatan terbanyak dengan produksi sebesar 1.625.741 kg dan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 0,27 persen per tahun selama 5 (lima) tahun terakhir.

Tanaman sayuran dapat dikategorikan (i) tanaman sayuran semusim: tanaman sayuran yang berumur kurang dari satu tahun; dan (ii) tanaman sayuran tahunan: tanaman sayuran yang berumur lebih dari satu tahun. Terdapat beberapa komoditas sayur-sayuran mengalami kenaikan produksi maupun penurunan produksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kebutuhan konsumsi yang berpengaruh pada harga jual dan harga beli, peningkatan dan penurunan luas panen, ketersediaan sarana dan prasarana produksi serta pengaruh iklim yang berpengaruh pada kualitas sesuai preferensi konsumen dan kuantitas produksi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Tabel 2.39
Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota (Kuintal)
Tahun 2019-2021⁸

Wilayah	Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota (Kuintal)																							
	Bawang Merah			Cabai			Kentang			Kubis			Petsai			Tomat			Bawang Putih					
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumba Barat	351	34	818	1.227	870	1.276	-	66	-	186	1.888	119	1.048	75	3.992	233	55	1.795	47	-	-			
Sumba Timur	1.753	1.289	1.385	5.324	5.782	4.652	28	134	18	62	4.154	174	3.531	301	5.244	2.371	2.229	2.600	100	166	34			
Kupang	11.576	24.877	21.196	14.516	18.660	21.026	-	5.423	160	6.217	13.250	6.195	14.687	137	14.849	17.474	27.235	26.787	1.204	818	550			
Timor Tengah Selatan	12.130	17.340	15.030	16.654	13.630	10.344	3.900	15.835	2.270	21.450	25.710	10.150	24.350	176	24.900	13.600	15.300	9.130	1.570	3.160	3.740			
Timor Tengah Utara	244	360	154	214	187	848	45	412	37	435	2.355	735	1.349	44	467	2.473	1.153	971	84	303	91			
Belu	2.660	3.704	2.532	7.700	16.806	14.161	-	1.451	-	1.566	4.585	1.482	3.554	138	3.863	6.172	7.829	6.396	2.493	3.576	1.162			
Alor	314	300	1.190	2.460	4.155	2.540	-	2.217	-	2.404	8.033	2.610	7.715	68	9.422	6.276	6.511	4.281	-	-	-			
Lembata	403	315	715	325	141	67	-	-	6	-	124	-	63	22	107	23	4	58	7	-	5			
Flores Timur	14	170	37	134	114	747	-	-	-	10	251	47	391	10	606	374	71	579	-	-	-			
Sikka	1.204	2.112	378	7.281	10.531	4.670	15	405	609	23	7.441	249	25.705	95	10.347	8.036	8.657	6.510	61	4	-			
Ende	655	550	369	1.410	2.283	1.822	1.300	3.120	880	2.560	3.340	2.245	2.799	163	3.487	4.175	7.590	3.504	510	220	40			
Ngada	16	14	4	164	100	147	2	18	42	40	225	29	128	154	263	48	47	86	5	-	-			
Manggarai	792	12.670	7.452	1.444	2.304	1.036	-	1.342	-	757	1.734	947	1.455	119	804	7.929	2.167	2.079	130	81	20			
Rote Ndao	34.257	27.753	45.952	41.160	38.816	22.482	-	595	-	1.725	14.206	260	17.235	140	10.311	13.757	5.425	11.505	1.799	1.320	120			

⁸ <https://ntt.bps.go.id/indicator/55/595/1/produksi-tanaman-sayuran-menurut-kabupaten-kota.html>

Wilayah	Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota (Kuintal)																								
	Bawang Merah			Cabai			Kentang			Kubis			Petsai			Tomat			Bawang Putih						
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
Manggarai Barat	2.940	893	845	7.745	9.645	9.900	-	2.270	-	1.165	5.440	3.700	6.321	67	15.960	3.080	3.864	9.840	-	-	-				
Sumba Tengah	376	324	168	249	562	298	-	204	-	190	309	-	574	31	94	148	21	84	-	-	-				
Sumba Barat Daya	57	14	1.112	1.649	1.098	9.474	-	2	-	-	421	770	651	205	8.979	594	674	9.002	66	2	-				
Nagekeo	545	390	-	1.315	1.716	3.465	-	200	-	-	3.350	200	2.190	24	3.190	2.985	1.423	2.205	-	-	-				
Manggarai Timur	6.379	8.377	11.139	881	1.764	4.468	5	5.110	75	2.752	9.779	3.704	5.679	103	7.501	3.002	4.826	4.233	181	52	23				
Sabu Raijua	3.143	1.631	3.498	665	277	220	-	100	-	250	1.518	-	3.257	16	2.209	1.493	1.016	817	-	-	2				
Malaka	2.569	698	110	4.174	7.559	8.719	-	280	-	475	7.735	200	4.457	179	4.941	3.760	1.404	1.540	426	35	-				
Kota Kupang	162	418	14	670	395	92	-	377	-	240	2.143	347	2.743	49	2.090	1.493	518	1.440	-	-	-				
NTT	82.540	10.234	114.098	117.361	137.394	122.453	5.295	39.561	4.097	42.507	117.991	34.163	129.882	2.314	133.626	99.496	98.019	105.440	8.683	9.737	5.787				

⁸ <https://ntt.bps.go.id/indicator/55/595/1/produksi-tanaman-sayuran-menurut-kabupaten-kota.html>

2.3.10. Kehutanan

Pembangunan kehutanan mampu mendukung pembangunan ekonomi produktif melalui pengembangan secara proporsional kawasan hutan produksi. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu hasil hutan kayu maupun hasil hutan non kayu. Selain itu, pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu.

Hutan Produksi memiliki banyak kegunaan dan manfaat. Salah satunya adalah menghasilkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan bahan baku industri.

Hutan yang memiliki fungsi untuk produksi ini memiliki areal yang relatif luas dan pada umumnya dikelola oleh perusahaan swasta yang sudah besar atau pemerintah daerah setempat.

Tabel 2.40
Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar) di Provinsi NTT
Tahun 2017-2020

Wilayah	Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar)											
	Terbatas			Tetap			Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus			Dapat dikonversi		
	2017	2018	2020	2017	2018	2020	2017	2018	2020	2017	2018	2020
Sumba Barat	1191.93	922.10	922.10	5106.68	4787.65	4787.65	-	-	-	-	-	-
Sumba Timur	19158.65	19084.76	19084.76	19694.98	25418.21	25418.21	486.83	-	-	72549.75	61366.03	61366.03
Kupang	41756.84	43478.21	43478.21	61240.99	60863.45	60863.45	3082.35	-	-	-	531.73	531.73
Timor Tengah Selatan	3506.89	2923.41	2923.41	43628.19	40566.57	40566.57	-	1807.23	-	-	-	-
Timor Tengah Utara	54614.16	53909.34	53909.34	14021.95	12981.91	12981.91	-	-	-	298.12	300.78	300.78
Belu	618.59	-	-	953.28	961.80	961.80	-	-	-	-	-	-
Alor	26625.08	26699.70	26699.70	20084.08	19341.02	19341.02	-	-	-	-	-	-
Lembata	-	-	-	599.77	605.12	605.12	-	-	-	-	-	-
Flores Timur	12571.28	11123.86	11123.86	4528.59	4410.55	4410.55	-	-	-	516.42	521.03	521.03
Sikka	843.96	734.53	734.53	902.56	1037.12	1037.12	-	-	-	-	-	-
Ende	405.60	177.75	177.75	35686.74	29653.86	29653.86	-	-	-	1083.83	932.88	932.88
Ngada	-	-	-	5355.88	6330.41	6330.41	-	-	-	30332.03	13438.30	13438.30
Manggarai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1155.14	1136.25	1136.25
Rote Ndao	-	-	-	9234.74	9352.55	9352.55	-	1418.35	-	-	-	-
Manggarai Barat	-	-	-	18067.00	18174.15	18174.15	-	-	-	-	-	-
Sumba Tengah	16045.22	15189.18	15189.18	5111.39	5157.06	5157.06	-	-	-	-	-	-
Sumba Barat Daya	-	-	-	8420.48	8853.18	8853.18	-	-	-	-	-	-
Nagekeo	9166.37	9176.56	9176.56	9657.06	9871.63	9871.63	-	-	-	-	-	-
Manggarai Timur	-	-	-	16159.45	15583.62	15583.62	-	-	-	3138.85	971.67	971.67
Sabu Raijua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AC

Wilayah	Luas Hutan Produksi Menurut Kabupaten/Kota (Hektar)											
	Terbatas			Tetap			Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus			Dapat dikonversi		
	2017	2018	2020	2017	2018	2020	2017	2018	2020	2017	2018	2020
Malaka	3056.49	2984.45	2984.45	2539.38	2547.40	2547.40	-	-	-	-	-	-
Kota Kupang	-	-	-	-	58.98	58.98	-	-	-	5633.27	1604.80	1604.80
Nusa Tenggara Timur	189561.06	186403.84	186403.84	280993.19	276556.23	276556.23	3569.18	3225.58	-	114707.41	80803.47	80803.47

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2021

2.3.11. Kelautan dan Perikanan

Wilayah NTT memiliki potensi untuk pengembangan sector perikanan, dimana luas daratan NTT \pm 47.349,9 Km² atau 19,14% dari luas NTT dan memiliki lautan dengan luas \pm 200.000 K m² atau 80,85%. Panjang garis pantai 5.700 Km, memiliki desa pantai berjumlah 808, jumlah penduduk di pesisir pantai sebanyak \pm 1,3 juta jiwa, dan angka konsumsi ikan masyarakat NTT sebesar 46,39 kg/kapita/thn (2021). Kondisi ini didukung lagi oleh pelaku usaha perikanan yang terdiri dari : petambak garam 1,591%; pembudidaya ikan 25,989%; pemasar perikanan 2,877%; dan nelayan 35,137%. Produksi perikanan tangkap di NTT dapat dilihat pada grafik berikut.

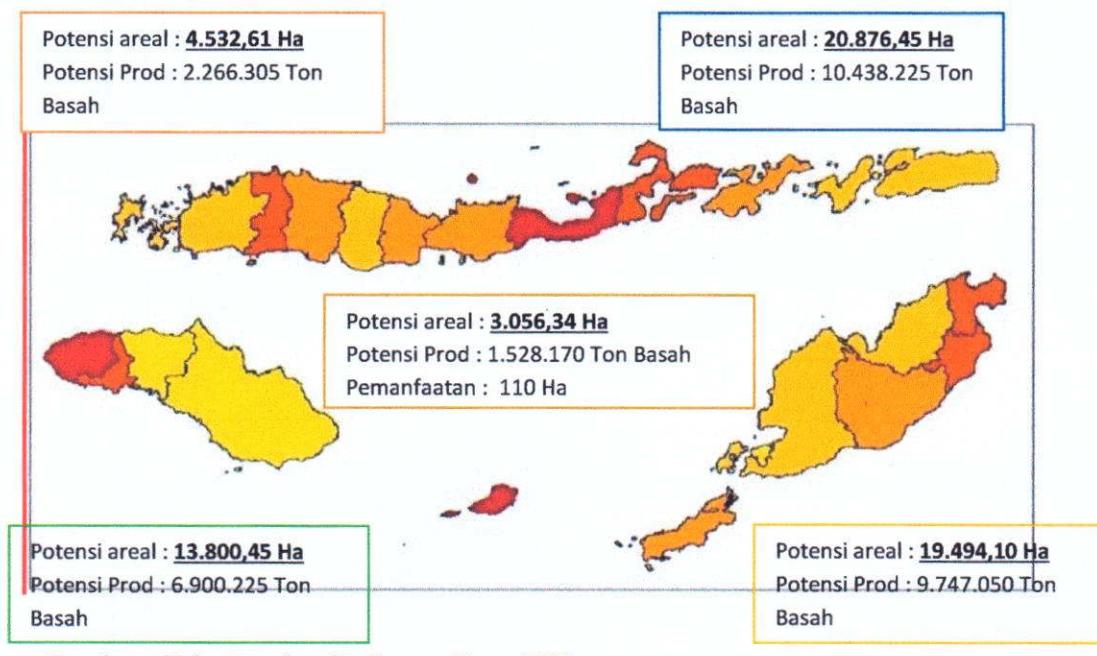
2.3.11.1. Perikanan Tangkap

Potensi perikanan tangkap di NTT sebesar 393.360 (ton/tahun), dengan pemanfaatan sebesar 171.520 (ton/tahun) dengan demikian dari potensi yang ada baru dmanfaatkan sebesar 43,85% dengan jenis tangkapan terbanyak adalah tongkol, laying, cakalang, kakap, kerapu, dan tuna. Trend produksi perikanan tangkap 2016-202 memilki trend kenaikan produksi, dengan rincian tahun 2016 produksi 123.770 ton dan mengalami peningkatan 11,71% pada tahun 2017. Persentase peningkatan terjadi berturut-turut sebesar 14,05% pada tahun 2018, pada tahun 2019 naik sebesar 1,46% dan pada tahun 2020 naik menjadi 7,83%. Dengan demikian pelayanan dinas kelautan dan perikanan dibidang perikanan tangkap dengan demikian kinerja perikanan takap selama kurun waktu 2016-2020 meningkat dengan nilai produksi rata-rata 8,76%

2.3.11.2. Budidaya Laut

Luas lahan budidaya laut di NTT 53.727 Ha, dengan pemanfaatan (budidaya rumput laut dan Kerapu) seluas 12.150 Ha atau 22,6%, dengan produksi rumput laut sebanyak \pm 1,5 juta ton basah (**), jenis yang dibudidayakan adalah E. Cottoni dan Sakul. Wilayah pengembangan usaha budidaya laut (rumput laut) di NTT dapat dilihat pada gambar berikut.

JK



Sumber : Kelautan dan Perikanan Prov. NTT

Grafik.2.13.
Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya
Di NTT Tahun 2021

Produksi rumput laut di NTT sebagian besar berasal dari lima kabupaten yakni: 1). Wilayah Flores Barat dengan potensi area 4.532,61 Ha, potensi produksi sebesar 2.266.305 ton basah, produksi tahun 2021 sebesar 455,67 ton (0,02%); 2). Kabupaten Flores Timur dan Alor dengan potensi area 20.876,45 Ha, potensi produksi 10.438.225 ton basah, produksi 2021 sebesar 73.830,08 ton (0,71%); 3). Kabupaten se daratan Sumba dengan potensi 13.800,45 Ha, potensi produksi 6.900.225 ton basah, pemanfaatannya 600 Ha, produksi 2021 sebesar 35.961,08 ton (0,52%); 4). Kabupaten Sabu Raijua dengan potensi area 3.056,34 Ha, potensi produksi sebesar 1.528.170 ton basah, pemanfaatannya 110 Ha, produksi tahun 2021 70.958,13 ton (4,64%); 5). Kabupaten se daratan Timor, Kabupaten Rote dengan potensi area 19.494,10 Ha, potensi produksi 9.747.050 ton basah, pemanfaatannya 1.539 Ha, produksi 2021 sebesar 1.219.002,96 ton (12,51%).

Produksi rumput laut di wilayah Timor berasal dari kecamatan Semau, Semau Selatan, Kupang Barat, dan Kecamatan Sulamo. Untuk wilayah Rote dari kecamatan Loaholo, Rote Barat, dan Kec. Rote Barat Daya. Produksi rumput laut wilayah Sabu berasal dari Kecamatan Sabu Timur, Haumehara, dan Kecamatan Raijua. Produksi rumput laut wilayah Sumba berasal dari Kecamatan Pahunga Lodu, Wula Waejelu, Rindi, dan Kecamatan Umalulu.

10

2.3.11.3. Budidaya Air Payau

Luas lahan budidaya air payau di NTT seluas 35.455 Ha, dengan pemanfaatan (budidaya Bandeng, Udang) seluas 1.510 Ha atau 4,3%, dengan produksi Udang dan Bandeng sebanyak ± 1.115 ton.

2.3.12. Peternakan

Kawasan pengembangan peternakan pada RTRWP berupa hamparan padang penggembalaan untuk Peternakan Sapi, Kuda, Kerbau dan Kambing seluas 832.228 Ha tersebar di Kabupaten/Kota. Kawasan pengembangan peternakan lainnya dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan usaha tanaman pangan dan perkebunan. Perkembangan populasi ternak besar dan ternak kecil yang populasinya menonjol pada tahun 2019-2021 sebagaimana yang ditampilkan dalam Tabel 2.41.

Tabel 2.41
Populasi Ternak Besar Menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Ternak di Provinsi NTT
Tahun 2019-2021 (Ribu ekor)

Wilayah	Populasi Ternak Besar Menurut Kabupaten/Kota											
	Sapi Potong			Sapi Perah			Kerbau			Kuda		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumba Barat	1.692	2.400	2.549	-	-	-	13.626	14.811	15.729	6.276	6.903	-
Sumba Timur	54.999	65.693	60.025	5	9	8	40.425	44.007	35.730	33.943	37.338	-
Kupang	239.239	254.759	301.915	-	-	-	1.984	2.297	2.078	8.361	5.292	-
Timor Tengah Selatan	202.000	206.644	223.076	13	13	12	344	357	357	957	975	942
Timor Tengah Utara	132.675	161.889	145.132	-	-	-	803	872	861	1.454	1.599	-
Belu	74.126	80.344	77.320	11	11	11	788	749	699	792	806	780
Alor	5.268	7.574	8.044	-	-	-	-	-	-	116	127	135
Lembata	5.141	6.978	5.350	-	-	-	-	-	-	2.187	2.406	-
Flores Timur	4.965	5.552	5.896	-	-	-	-	-	-	1.365	1.502	-
Sikka	15.274	18.182	19.309	-	-	-	2.135	2.087	2.216	3.610	2.863	-
Ende	38.342	41.875	44.471	-	-	-	2.828	3.074	3.265	3.349	3.684	-
Ngada	43.436	52.968	56.252	-	-	-	15.265	16.594	17.623	7.251	7.976	-
Manggarai	26.825	27.871	29.599	-	-	-	8.448	9.184	9.753	1.299	1.428	-
Rote Ndao	67.736	81.550	86.606	-	-	-	17.735	19.280	20.475	8.019	8.821	-
Manggarai Barat	15.978	16.944	17.995	-	-	-	15.897	17.281	18.352	218	239	254
Sumba Tengah	8.538	8.917	9.470	-	-	-	10.013	10.885	12.295	7.300	8.030	-
Sumba Barat Daya	3.452	4.385	4.657	-	-	-	16.331	17.753	18.854	6.531	7.184	-
Nagekeo	35.917	29.390	31.212	-	-	-	7.187	7.812	8.296	3.931	4.323	-
Manggarai Timur	16.277	17.580	18.670	-	-	-	9.360	10.175	10.806	3.585	3.943	-

AP

Wilayah	Populasi Ternak Besar Menurut Kabupaten/Kota											
	Sapi Potong			Sapi Perah			Kerbau			Kuda		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sabu Raijua	5.827	7.356	7.812	-	-	-	11.231	12.208	12.965	8.652	9.517	-
Malaka	82.996	82.512	86.088	-	-	-	471	512	445	75	82	85
Kota Kupang	6.912	7.619	-	-	-	-	32	34	34	84	91	95
Nusa Tenggara Timur	1.087.615	1.188.982	1.248.930	29	33	31	174.903	189.972	190.833	109.355	115.129	-

Catatan: Angka Sementara

Sumber: BPS, tahun 2022

Tabel 2.42
Populasi Ternak Kecil Menurut Kabupaten/Kota
dan Jenis Ternak di Provinsi NTT
Tahun 2019-2021 (Ribu ekor)

Wilayah	Populasi Ternak Kecil Menurut Kabupaten/Kota								
	Babi			Kambing			Domba		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumba Barat	65.554	76.264	84.501	2.510	2.526	2.683	-	66	73
Sumba Timur	149.640	179.568	70.145	69.335	70.083	68.725	1.280	1.536	9.380
Kupang	501.690	525.445	474.396	45.862	172.229	155.926	214	220	212
Timor Tengah Selatan	224.521	240.887	230.560	30.674	32.453	29.542	-	-	-
Timor Tengah Utara	86.131	103.357	95.660	46.666	46.974	52.529	38	46	49
Belu	69.219	70.399	66.110	19.205	19.386	17.297	-	37	34
Alor	119.459	143.351	158.833	50.984	51.321	54.503	-	-	-
Lembata	54.988	65.985	73.111	49.248	49.573	52.647	624	749	830
Flores Timur	104.465	125.358	138.897	76.000	76.501	81.244	928	1.115	1.235
Sikka	160.149	88.198	97.723	67.571	115.511	122.673	281	337	373
Ende	71.247	85.496	94.730	31.161	31.366	33.311	16	19	21
Ngada	171.033	205.239	227.405	31.404	31.611	33.571	2.603	3.123	3.460
Manggarai	47.316	56.779	62.911	13.554	13.643	14.489	-	-	-
Rote Ndao	56.656	67.987	75.330	59.592	59.985	63.704	25.342	30.410	33.694
Manggarai Barat	44.584	53.500	59.278	7.235	7.283	7.735	-	-	-
Sumba Tengah	42.957	51.548	57.115	11.618	11.734	13.560	-	-	15
Sumba Barat Daya	96.725	116.070	128.606	21.507	21.811	23.163	-	-	-
Nagekeo	105.755	126.906	140.612	51.590	51.930	55.150	8.121	9.822	10.883
Manggarai Timur	74.100	88.920	98.523	35.225	35.457	37.655	-	-	-
Sabu Raijua	40.827	48.992	54.283	65.717	66.151	70.252	26.081	28.973	32.102
Malaka	104.646	125.575	69.301	23.642	23.797	33.996	-	-	-
Kota Kupang	40.839	49.006	-	8.350	8.405	7.989	61	79	66
Nusa Tenggara Timur	2.432.501	2.694.830	2.598.370	818.650	999.730	1.032.344	65.589	76.532	92.427

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi NTT, 2022

SL

Berdasarkan Tabel 2.41 dan Tabel 2.42, diketahui bahwa perkembangan populasi per komoditinya cenderung menunjukkan angka positif. Kenaikan populasi tertinggi disumbangkan ternak Babi untuk ternak kecil dan Sapi untuk ternak besar. Peningkatan populasi ternak Sapi merupakan wujud suksesnya pelaksanaan tekan menjadikan Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Ternak.

Untuk menjaga kesehatan daging, pembangunan peternakan didukung 28 unit Rumah Potong Hewan (RPH) yang terdiri dari 27 RPH pemerintah dan 1 RPH Swasta. RPH yang ada belum mampu memberikan pelayanan masyarakat karena 40% lebih kegiatan pemotongan ternak secara perorangan dilakukan di luar RPH.

Tabel 2.43
Banyaknya Rumah Potong Hewan Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2019-2021

Wilayah	Banyaknya Rumah Potong Hewan Menurut Kabupaten/Kota (Unit)								
	Pemerintah			Swasta			Jumlah		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Sumba Barat	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Sumba Timur	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Kupang	3	3	3	1	1	1	4	4	4
Timor Tengah Selatan	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Timor Tengah Utara	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Belu	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Alor	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Lembata	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Flores Timur	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Sikka	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Ende	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Ngada	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Manggarai	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Rote Ndao	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Manggarai Barat	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Sumba Barat Daya	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Nagekeo	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Manggarai Timur	-	-	-	-	-	-	0	-	-
Sabu Raijua	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Malaka	1	1	1	-	-	-	1	1	1
Kota Kupang	2	2	2	-	-	-	2	2	2
Nusa Tenggara Timur	25	27	27	1	1	1	26	28	28

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2022



2.3.13. Pariwisata

Pada Triwulan II-III tahun 2022, sektor Pariwisata di Provinsi NTT mulai menunjukkan pemulihan sehingga mampu tumbuh sebesar 30,47% diakhir Triwulan III. Pertumbuhan tinggi yang dicapai sektor pariwisata dipengaruhi oleh kebijakan maskapai penerbangan membuka kembali rute penerbangan ke Nusa Tenggara Timur walaupun dengan kebijakan *fuel surcharge*, yang mengakibatkan naiknya harga tiket pesawat. Hal ini dimaknai bahwa wisatawan yang datang ke Nusa Tenggara Timur lebih mementingkan pada destinasi wisatanya dibanding harga tiket pesawat. Dengan dibukanya kembali rute penerbangan ke Nusa Tenggara Timur, memberikan dampak bagi meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan semakin berkembangnya Lapangan Usaha Akomodasi Makan Minum yang tercermin dari kinerja penyaluran kredit akmamin yang pada Triwulan II 2022 meningkat dari Triwulan sebelumnya menjadi 27,90%, karena keterisian kamar dan kedatangan jumlah wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur serta optimisme masyarakat yang terus membaik. Selain itu juga, penurunan kasus covid 19 yang menyebabkan Pemerintah semakin melonggarkan aturan perjalanan domestik, memberikan andil besar dalam peningkatan kunjungan wisatawan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Oleh karena itu, sebagai sektor terbesar yang memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah perlu melakukan strategi-strategi dalam pengembangan pariwisata NTT, seperti : 1).peningkatan koordinasi, sinergitas dan kerjasama antar pihak Pemerintah Pusat, Daerah, sektor-sektor terkait, investor lokal/asing, BUMN, pelaku usaha dan UMKM dan masyarakat untuk mendukung upaya perbaikan pariwisata dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi secara berkelanjutan di NTT. 2). Pemerintah Daerah bersama dengan asosiasi serta perusahaan teknologi meningkatkan promosi digital untuk mempromosikan Labuan Bajo sebagai salah satu kawasan wisata super premium sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kemitraan pelaku usaha melalui ekosistem digital, serta mempercepat transformasi digital UMKM sektor pariwisata. 3). Meningkatkan 10 A terhadap pariwisata Labuan Bajo salah satunya melalui pengembangan dan maintenance terhadap destinasi wisata Labuan Bajo dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Seperti yang diketahui bahwa Labuan Bajo merupakan salah satu Destinasi Wisata Super Prioritas (DWSP) yang ditetapkan oleh Pemerintah



Pusat. Potensi wisata tersebut perlu dioptimalkan oleh pemerintah daerah melalui program dan kegiatan dalam rangka pengembangan destinasi wisata Labuan Bajo dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagai *prime mover economy*.

Tabel 2.44
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2019-2022

Wilayah	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik (Jiwa)											
	Mancanegara				Domestik				Jumlah			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Sumba Barat	-	862	946	1.212	-	3.079	7.083	7.320	-	3.941	8.029	8.532
Sumba Timur	-	202	87	930	-	5.880	18.489	34.654	-	6.082	18.576	35.854
Kupang	-	316	-	424	-	3.759	4.619	42.041	-	4.075	4.619	42.465
Timor Tengah Selatan	-	-	-	-	-	6.927	11.038	12.854	-	6.927	11.038	12.854
Timor Tengah Utara	-	37	-	-	-	1.250	10.980	36.693	-	1.287	10.980	36.693
Belu	-	811	34	9.253	-	20.429	22.324	5.600	-	21.240	22.358	14.853
Alor	-	12	18	198	-	1.431	2.382	933	-	1.443	2.400	1.131
Lembata	-	-	-	-	-	1.203	1.760	-	-	1.203	1.760	-
Flores Timur	-	147	21	-	-	2.685	20.156	-	-	2.832	20.177	-
Sikka	-	2.159	119	-	-	12.296	21.214	-	-	14.455	21.333	-
Ende	-	31	6	4.266	-	2.145	13.053	66.162	-	2.176	13.059	70.428
Ngada	-	62	29	2.684	-	3.841	12.384	96.738	-	3.903	12.413	99.422
Manggarai	-	116	4	-	-	2.128	10.435	-	-	2.244	10.439	-
Rote Ndao	-	490	-	306	-	983	1.890	634	-	1.473	1.890	940
Manggarai Barat	-	15.031	6.129	44.443	-	64.917	136.836	89.643	-	79.948	142.965	134.086
Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sumba Barat Daya	-	4.116	172	-	-	2.366	4.217	-	-	6.482	4.389	-
Nagekeo	-	-	-	-	-	2.142	5.252	-	-	2.142	5.252	-
Manggarai Timur	-	-	-	-	-	1.001	2.488	-	-	1.001	2.488	-
Sabu Raijua	-	9	-	5	-	523	521	68.519	-	532	521	68.524
Malaka	-	-	-	29	-	771	622	627	-	771	622	656
Kota Kupang	-	20.377	1.180	1.869	-	202.532	235.898	106.309	-	222.909	237.078	108.178
Nusa Tenggara Timur	155.900	44.778	8.745	65.619	931.967	342.288	533.641	568.727	987.867	387.066	552.386	634.346

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

AR

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, finansial daerah, inflasi daerah dan SDMnya.

2.4.1. Ekonomi Makro Regional

Perekonomian Provinsi NTT pada triwulan II 2022 tumbuh sebesar 3,01%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 1,86%, meskipun masih lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang dapat tumbuh sebesar 5,44%. Dari sisi pengeluaran, peningkatan didorong oleh akselerasi konsumsi rumah tangga seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan melalui penurunan level PPKM di tengah penyebaran COVID-19 yang semakin mereda. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), sebagian besar LU mengalami perbaikan ekonomi terutama LU utama yaitu LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, LU Perdagangan Besar dan Eceran, serta LU Konstruksi. Musim panen raya yang terjadi ditriwulan II mendorong pertumbuhan LU Pertanian. Sementara itu, peningkatan aktivitas masyarakat di tengah melandainya pandemi COVID-19 serta momen libur HBKN Idul Fitri turut mendorong LU Perdagangan. Adapun pertumbuhan LU Konstruksi didorong oleh berlanjutnya pembangunan proyek-proyek strategis pemerintah di Provinsi NTT. Kinerja perekonomian NTT pada Triwulan. III-2022 tercatat tumbuh sebesar 3,35% (oy) searah dengan proyeksi REKDA Oktober 2022 sebesar 3,22% (oy) dan meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,11% (oy). Kinerja ekonomi NTT pada triwulan III 2022 terutama bersumber dari Konsumsi Rumah Tangga (KRT) Konsumsi Pemerintah dan Ekspor. Sementara dari sisi lapangan usaha ((LU) kinerja LU Pertanian, LU Administrasi Pemerintah, dan dan LU Perdagangan Besar dan Eceran menjadi penopang pertumbuhan ekonomi NTT. Program pemerintah seperti Food Estate, Ekosistem TJPS Pola Kemitraan, Pembangunan Infrastruktur dari Pinjaman PT. SMI dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

2.4.2. Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi total belanja pemerintah (APBD dan APBN) di Provinsi NTT sampai dengan Triwulan II 2022 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sejalan dengan perlambatan konsumsi pemerintah. Total belanja tercatat sebesar Rp14,365 triliun, atau terkontraksi 7,24% dibandingkan Triwulan II pada tahun 2021. Nominal realisasi tersebut

AE

mencapai 29,25% dari total anggaran, juga menurun dari periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 30,14%. Penurunan terjadi baik pada belanja APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota. Di sisi lain, realisasi pendapatan pemerintah sampai dengan Triwulan II 2022 tercatat tumbuh sebesar 1,41%, terutama didorong oleh realisasi pendapatan transfer yang membaik khususnya ditingkat Kabupaten/Kota. Realisasi belanja APBD pemda pada triwulan III 2022 tercatat sebesar Rp14,9 Triliun, atau tumbuh 6,79% (yoY). Secara persentase, realisasi belanja pada triwulan III 2022 mencapai 49,8% dari total pagu sebesar Rp30,0 Triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III 2021 yang mencapai realisasi 45,9% dari total pagu sebesar Rp30,4 Triliun. Sebanyak 21,0% dari realisasi belanja APBD pada triwulan III 2022 di NTT berasal dari belanja pemerintah provinsi, sedangkan sisanya dari belanja pemerintah kabupaten/kota. Jenis belanja yang memiliki share terbesar adalah belanja operasional yakni sebesar 68,1%. Realisasi belanja APBN di Provinsi NTT pada triwulan III 2022 tercatat sebesar Rp12,0 Triliun, atau tumbuh 4,71% (yoY). Secara persentase, realisasi belanja pada triwulan III 2022 mencapai 62,4% dari total pagu sebesar Rp19,2 Triliun, lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2021 yang mencapai realisasi 54,5% dari total pagu sebesar Rp20,9 Triliun. Jenis belanja APBN yang memiliki share terbesar adalah belanja pegawai sebesar 20,4% diikuti belanja barang 19,9% dan dana desa 18,0%. Realisasi anggaran pemerintah menjadi salah satu penopang perekonomian Provinsi NTT, sehingga perlu terus didorong agar dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi.

2.4.3. Perkembangan Inflasi

Tren inflasi tahunan (yoY) maupun inflasi kalender (IHK) untuk Triwulan I-III secara nasional dan regional (NTT) terus bergerak naik berbeda dengan tren pada Triwulan IV baik Nasional maupun regional mengalami penurunan. Secara nasional, sepanjang Januari – September 2022, angka inflasi terus meningkat. Laju inflasi tahunan (yoY) Triwulan I 2,64 % meningkat menjadi 4,35 % pada Triwulan II dan pada Triwulan III menjadi 5,95%. Sementara itu inflasi kalender (IHK) pada periode yang sama juga mengalami kenaikan signifikan dari 0,69 % pada Triwulan I menjadi 2,83 % pada Triwulan II dan 4,84 % di Triwulan III. Secara Nasional pendorong utama inflasi September adalah komponen harga yang diatur pemerintah. Inflasi yang berasal dari komponen harga yang diatur pemerintah disebabkan oleh kenaikan tarif angkutan pasca penyesuaian harga BBM. Penyesuaian harga BBM berdampak pada lonjakan inflasi kelompok energi hingga mencapai 16,48% pada



September 2022. Komoditi makanan yang bergejolak akibat kenaikan harga BBM adalah cabai rawit, beras dan telur ayam ras. Pada periode yang sama di NTT, angka inflasi tahunan (yo) Triwulan I 2,89 % meningkat menjadi 4,28 % pada Triwulan II dan pada Triwulan III menjadi 6,97. Sementara itu inflasi kalender (IHK) pada periode yang sama juga mengalami kenaikan signifikan dari Triwulan I 0,71 % menjadi 2,96 % pada triwulan II dan 4,89 % di Triwulan III. Tren inflasi tahunan (yo) maupun inflasi kalender (IHK) Nasional dan NTT meningkat secara paralel dari Januari-September 2022. Besaran inflasi kalender (IHK) menunjukkan laju kenaikan yang relatif besar. Hal ini mengindikasikan kenaikan biaya hidup yang relatif besar pada periode Januari – September 2022. Inflasi Provinsi NTT pada tahun 2022 terutama bersumber dari peningkatan harga dari kelompok komoditas transportasi, yakni tarif angkutan udara dan angkutan dalam kota. Hal ini seiring dengan kebijakan *fuel surcharge* yang diterapkan Kementerian Perhubungan untuk angkutan udara dan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum dalam wilayah Kota Kupang. Selain itu, beberapa komoditas dari kelompok makanan, minuman & tembakau seperti minyak goreng, rokok kretek filter, dan daging babi turut menjadi penyumbang inflasi di triwulan II 2022. Pada triwulan III 2022, tekanan inflasi masih terjadi dan bahkan lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2022. Hal ini didasarkan pada faktor pendorong inflasi yang berasal dari tarif angkutan udara yang dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas masyarakat yang belum dapat diimbangi dengan pemulihan kapasitas maskapai penerbangan. Selain itu, komoditas hortikultura seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah yang sempat mengalami kenaikan harga yang signifikan diawal triwulan II juga menjadi penyumbang inflasi dari sisi bahan pangan untuk triwulan III pada tahun 2022. Untuk Triwulan IV 2022 tren inflasi di Provinsi NTT berpola menurun. Secara tahunan, inflasi NTT pada Oktober 2022 tercatat sebesar 7,37% (yo) dan pada November 2022 tercatat sebesar 6,74%, hal ini juga sama dengan keadaan inflasi tahunan di Nasional pada bulan Oktober 2022 tercatat sebesar 5,71% dan pada bulan November turun menjadi 5,42% .Tekanan inflasi tahunan di NTT terutama didorong oleh kelompok administered prices yang mengalami kenaikan signifikan seiring dengan kenaikan tarif angkutan udara serta penyesuaian harga BBM. Selain itu, puncak panen hortikultura yang telah berlalu juga dapat mengurangi ketersediaan pasokan sehingga berdampak pada kenaikan harga. Kenaikan tarif angkutan udara seiring dengan masih tingginya harga avtur juga dapat mendorong inflasi.

2.4.4. Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Dan Pengelolaan Uang Rupiah

Indikator utama sistem pembayaran non tunai, yaitu transaksi BI-RTGS (*Real Time Gross Settlement*) merupakan indikator yang mengalami pertumbuhan nilai transaksi yang paling besar pada triwulan II 2022. Akan tetapi, indikator transaksi lain seperti transaksi kartu debit mengalami perlambatan dan kartu kredit mengalami kontraksi yang lebih dalam. Pada triwulan IV 2022 hingga bulan Oktober transaksi tunai di Provinsi NTT mengalami posisi net inflow senilai Rp24,8 miliar. Sementara itu, transaksi RTGS pada bulan Oktober tumbuh sebesar 71,69% (yoY), sedangkan transaksi kliring atau Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) terkontraksi sebesar 26,87% (yoY). Transaksi e-commerce di Provinsi NTT pada triwulan III 2022 tumbuh 2,26% (yoY) menjadi Rp259,74 Miliar. Transfer bank adalah metode pembayaran yang paling banyak digunakan dalam transaksi e-commerce. Selanjutnya, jumlah merchant dan user QRIS juga terus berkembang. Pada bulan Oktober 2022 jumlah merchant QRIS di NTT mencapai 139 ribu merchant, sedangkan user QRIS per bulan September sebanyak 105 ribu orang (Penambahan 90.060 user pada tahun 2022). Jadi sistem pembayaran nontunai, yaitu transaksi BI-RTGS masih merupakan indikator yang mengalami pertumbuhan nilai transaksi yang paling besar.

2.4.5. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Jumlah angkatan kerja di Provinsi NTT pada Agustus 2022 tercatat sebesar 3,02 juta orang, dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 75,23% naik 1,45% dibandingkan Agustus tahun sebelumnya. Selama Agustus 2021-Agustus 2022, lapangan usaha industri pengolahan menjadi sektor tertinggi penyerap tenaga kerja di NTT (sebanyak 36,83 ribu orang), sementara lapangan usaha pertanian menyerap 26 ribu orang, transportasi dan pergudangan menyerap sebanyak 19,09 ribu tenaga kerja. Lapangan usaha konstruksi mengalami penurunan paling besar yaitu sebanyak 12,78 ribu orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2022 tercatat sebesar 3,54% menurun sebesar 0,47% dari Agustus tahun sebelumnya. Kondisi ketenagakerjaan terindikasi membaik, tercemin dari jumlah pekerja terdampak COVID-19 yang menurun 288,64 ribu orang dibandingkan periode Agustus 2021. Sementara itu, rasio kemiskinan di Provinsi NTT pada Maret 2022 tercatat sebesar 20,05%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pada bulan September 2022, NTP Nusa Tenggara Timur sebesar 95,14% terjadi peningkatan 0,70% jika dibandingkan dengan NTP Nusa Tenggara Timur pada bulan Agustus 2022.



2.4.6. Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Provinsi NTT pada keseluruhan tahun 2022 diprakirakan tumbuh pada kisaran 2,8–3,6%, meningkat dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2021. Dari sisi pengeluaran, akselerasi kinerja perekonomian Provinsi NTT ditopang oleh meningkatnya konsumsi swasta dan investasi seiring dengan berlanjutnya program vaksinasi sebagai *game changer* dalam pemulihan ekonomi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan diperkirakan ditopang oleh perluasan program pemerintah yang mendorong kinerja LU Pertanian dan LU Perdagangan Besar dan Eceran sejalan dengan normalisasi mobilitas masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan yang lebih tinggi sedikit tertahan akibat penyebaran varian virus *omicron* pada awal tahun 2022 yang berdampak terhadap peningkatan kasus COVID-19 dan penebalan kebijakan pembatasan. Tekanan inflasi Provinsi NTT pada tahun 2022 diprakirakan meningkat dibandingkan dengan inflasi tahun sebelumnya didorong oleh kenaikan harga BBM yang berimbang pada kenaikan harga komoditas pangan, angkutan udara dan angkutan darat. Berdasarkan disagregasinya, tekanan inflasi diperkirakan terjadi pada komponen *volatile food* dan *administered prices*. Koordinasi kebijakan bersama Pemerintah daerah melalui TPID terus dilakukan dalam menjaga ekspektasi inflasi dan meminimalkan risiko inflasi.

2.5 PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

2.5.1. Urusan Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan, pelaksanaan urusan pendidikan sesuai SPM yang dilaksanakan Provinsi adalah:

- a. Pendidikan Menengah (peserta didik yang berusia 16–18 Tahun)
- b. Pendidikan Khusus (peserta didik yang berusia 14–18 Tahun)

Tabel 2.45
Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi Urusan Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Batas Waktu Capaian	Target Capaian (%)	Realisasi
Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah	Tahun 2021	100	75,77
Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Tahun 2021	100	74,65

Sumber data : Permendagri 100 Tahun 2018

Adapun SPM urusan Pendidikan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi NusaTenggara Timur mencakup 2 (dua) indikator pelayanan yakni:

- a. Partisipasi anak usia 16-18 Tahun yang berada pada Pendidikan menengah sebanyak 304.310 anak dari jumlah anak usia 16-18 Tahun sebanyak 401.600 anak.
- b. Partisipasi anak disabilitas usia 4-18 Tahun yang berada pada sekolah luar biasa (SLB) sebanyak 2.679 anak dari jumlah anak disabilitas usia 4-18 Tahun sebanyak 3.589 anak.

2.5.2. Urusan Kesehatan

Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi dan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi.

1. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (BabVII) terdapat target untuk Urusan Kesehatan yakni Persentase Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan (100%) setiap Tahun dari 2018-2023. Akan tetapi tidak diuraikan target masing-masing Pelayanan Dasar sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Tabel 2.46
Target dan Realisasi Menurut Jenis Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Batas Waktu Capaian	Target Capaian (%)	Realisasi (%)
Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Tahun 2021	100	100
Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	Tahun 2021	100	100

Sumber data : Permendagri 100 Tahun 2018

Realisasi capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Provinsi NTT Tahun 2021, untuk 2 indikator tersebut masing-masing 100%. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), dipilah wewenang antara Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

2.5.3. Urusan Pekerjaan Umum

1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum jenis pelayanan dasarnya adalah Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota dengan indikator:

- a. Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota.

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum, sedangkan air minum curah adalah air hasil olahan instalasi pengolahan air pada Sistem Penyediaan Air Minum lintas Kabupaten/Kota.

- b. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.

AR

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 yang berhubungan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Daerah	Realisasi	Ket
Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas Kabupaten/Kota	100%	11,61%	Batas Waktu pencapaian adalah 100% setiap Tahun Anggaran, sesuai dengan Permendagri 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Penyediaan pelayanan Pengolahan limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara Yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik Regional lintas Kabupaten/Kota	100%	-	Tidak terdapat Kegiatan terkait Pelayanan Dasar tersebut pada Dinas PUPR Provinsi NTT

Sumber data : Permendagri 100 Tahun 2018

2.5.4. Urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal untuk untuk Bidang Perumahan Rakyat jenis pelayanan dasarnya adalah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi korban bencana Provinsi dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator:

- Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni;
- Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

AQ

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Ket.
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi korban Bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara korban Bencana yang Meperoleh rumah layak huni	100%	-	Batas waktu pencapaian adalah 100% setiap tahun anggaran, sesuai dengan
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi masyarakat Yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi Yang memperoleh Fasilitasi penyediaan Rumah yang layak huni	100%	-	Permendagri 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sumber data : Permendagri 100 Tahun 2018

2.5.5. Urusan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

2.5.5.1. Satuan Polisi Pamong Praja

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum (TRANTIBUM) dan Bidang Penegakan peraturan Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah PERDA dan PERKADA yakni:

- Penganganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam1(Satu) Daerah Provinsi
- Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

SPM	Target (%)	Realisasi (%)
Penganganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam1(Satu) Daerah Provinsi	100	95,71
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	100	97,12

2.5.5.2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Jenis Pelayanan Dasar

- Pelayanan informasi rawan bencana
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

AR

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

Kegiatan	Target	Realisasi
Pelayanan informasi rawan bencana	22 Kabupaten/Kota	100%
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	22 Kabupaten/Kota	27,7%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	22 Kabupaten/Kota	100%

2.5.6. Urusan Sosial

1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan dasar pada SPM Bidang Sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur:

- Rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas terlantar di panti
- Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di dalam Panti;
- Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Provinsi

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan Realisasi

Target yang ditetapkan pemerintah Daerah dalam mencapai SPM tahun 2021 dimuat dalam RPJMD serta realisasi target standar pelayanan minimal oleh Dinas Sosial Provinsi NTT Tahun 2021 sebagai berikut:

No	SPM	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas Terlantar di dalam panti.	100	100
2.	Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di dalam Panti	100	100
3.	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	100	100
4.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	100	100

2.6. CAPAIAN SDGS PROVINSI NTT TAHUN 2021

Secara umum, RPJMD Provinsi NTT periode 2018-2023 sudah mengandung unsur-unsur yang jelas berkontribusi pada pencapaian SDGs. Namun, dalam proses pelaksanaannya, program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah masih bersifat terpusat pada aktor pembangunan dari sisi pemerintah semata. Oleh karena itu, perlu penguatan terkait partisipasi dari aktor pembangunan non-pemerintah yang seharusnya dapat difasilitasi sedemikian rupa agar bekerja secara kolaboratif dengan para aktor pembangunan dari sisi pemerintah.

Dari total 75 indikator SDGs yang mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi NTT, tercatat hanya 37 indikator atau sebesar 49,3% yang tercapai, sedangkan sisanya sebanyak 38 indikator atau 50,7% belum tercapai. Ini membutuhkan perhatian serius untuk ditingkatkan lagi kinerjanya.

Berdasarkan Laporan Tahunan SDGs Tahun 2021, anggaran atau dana yang dialokasikan untuk empat pilar SDGs sebesar Rp. 1.871.915.172.256,- yang terbagi dalam empat pilar sebagai berikut: (1) Pilar Sosial sebesar Rp. 1.031.635.645.362,- (55,11%); Pilar Ekonomi sebesar Rp. 76.789.992.396,- (4,10%); Pilar Lingkungan sebesar Rp. 759.491.895.197,-(40,57%); Pilar Hukum dan Tata Kelola sebesar Rp. 3.997.639.301,-(0,21%). Terdapat empat sektor yang mendapatkan anggaran terbesar, yaitu sector pendidikan (Dinas P&K) sebesar Rp. 862.931.457.144,- (46,10% dari total anggaran empat pilar). Kemudian sector pengembangan infrastruktur (PUPR) sebesar Rp. 717.237.276.310,- (38,32% dari total empat pilar). Sektor Kesehatan (Dinkes) sebesar Rp. 168.704.188.218,- (9,01% dari total empat pilar).

Pada setiap pilar SDGs, dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perlu memperhatikan porsi yang seimbang di Pilar Ekonomi, dimana dana pembangunannya masih 4,10% dari total anggaran untuk keempat pilar, dan hanya 4,29% dari dana yang dialokasikan untuk Pilar Sosial dan Pilar Lingkungan. Memperhatikan NTT, secara defacto, merupakan sebuah kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 500 buah, walaupun secara de jure belum ditetapkan status ini, namun, mengingat potensi kelautan dan perikanan dan wisata bahari yang cukup besar dan laut sebagai urat nadi ekonomi, maka pembangunan berwawasan kelautan menjadi sangat relevan. Di samping itu, pulau-pulau kecil yang tersebar di seluruh penjuru Nusa Tenggara Timur banyak dihuni oleh penduduk dengan mata pencaharian sebagainelayan, disamping pulau-pulau besar atau utama yang mayoritas

penduduknya adalah petani. Disamping itu, perdagangan antar pulau atau antar pelabuhan dalam satu pulau, menjadikan laut sebagai urat nadi ekonomi dan jalur transportasi masyarakat NTT yang cukup populer. Sebagaimana diketahui, di dalam Pilar Ekonomi, terdapat sector Pertanian dan Kelautan yang menjadi pengayom ekonomi 70 % penduduk NTT (Petani dan Nelayan), alokasi anggaran untuk kedua sektor ini hanya Rp. 68.877.268.598,- (3,68%) dari total anggaran untuk empat pilar. Oleh karena itu Pilar Ekonomi perlu mendapat perhatian untuk menumbuhkan kekuatan ekonomi berbasis pulau dan air sebagai bagian dari mendukung upaya percepatan peningkatan ekonomi dari masyarakat NTT.

Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menjadi andalan pemerintah sekarang juga mendapat alokasi yang kurang memadai, yaitu sebesar Rp.4.873.818.368,-(6,35% dari total anggaran Pilar Ekonomi) dan hanya 0,26% dari total Anggaran untuk empat Pilar SDGs.

Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah penyusunan program yang harus diarahkan dengan pendekatan holistik dan didasarkan pada suatu landasan teori yang berkualitas dan jelas, termasuk dalam aspek pengarusutamaan gender(Goal 5) disemua Tujuan SDGs dan seluruh program dan aktivitas di semua SDGs lainnya di semua program/kegiatan pembangunan. Dengan demikian memungkinkan terwujudnya distribusi peran diantara para actor pembangunan secara baik dan representative sesuai tupoksi masing-masing pada wilayah kerja yang sama. Hal ini berlandaskan pada prinsip SDGs/SDGs –Multi-Stakeholder Partnerships – memungkinkan terbukanya peluang bagi terlaksananya kegiatan pembangunan secara kolaboratif dan jelas keterkaitan antar goal SDGs-nya.

Agar pelaksanaan pencapaian SDGs di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilakukan secara benar dan terprogram, penggunaan nomenklatur indikator SDGs yang sesuai dengan Metadata Indikator (edisiII), sesuai arahan dari Sekretariat Nasional SDGs di Kementerian PPN/Bappenas harus dikawal agar dipakai dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) mendatang dan RPJMD gubernur terpilih, serta didorong agar indikator-indikator SDGs tertuang secara gamblng dalam dokumen-dokumen perencanaan daerah (RPJMD) dan menjadi bagian dari IKU dan IKK.

Indikator SDGs telah dibuat agar dapat mendukung terlaksananya perencanaan berbasis tema. Setiap indikator SDGs idealnya harus menjadi satu tema yang dapat digunakan untuk memayungi perencanaan yang lebih



mendetail dan holistic lintas sektor dan lintas actor (pembangunan pemerintah maupun non-pemerintah).

Sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan daerah, maka ketersediaan data target dan capaian untuk masing-masing indikator SDGs terpilih harus menjadi prioritas diadakan dalam upaya penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang berbasis SDGs dalam masa transisi mendatang. Pemilahan yang jelas antara data mana yang dapat disediakan oleh BPS dan data mana yang harus diambil dari OPD terkait harus ada agar perencanaan pembangunan daerah menjadi lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian pendekatan perencanaan dalam konteks SDGs – dengan prinsip No One Left Behind menjadi roh dan inspirator dalam memastikan kalangan masyarakat yang paling membutuhkan yang mendapatkan dampak dari pelaksanaan pembangunan.

Prinsip kolaborasi dengan pendekatan kemitraan multi pihak antara actor pemerintah dan aktor non pemerintah menjadi solusi untuk mempercepat pencapaian SDGs di Nusa Tenggara Timur. Aktor Non Pemerintah dalam pendekatan tujuan pembangunan berkelanjutan menjadi mitra strategis untuk menuntaskan berbagai persoalan masyarakat yang terindikasi dalam indikator-indikator yang tersebar dalam 17 SDGs dan dalam dokumen perencanaan daerah. Kolaborasi antar actor ini akan menjadi pendekatan pembangunan modern kedepan. Karena itu, Pemerintah Daerah perlu menfasilitasi peran aktor-aktor non pemerintah yang menjadi mitra pemerintah ini dapat memberikan kontribusi mereka, terutama dan terpenting adalah kontribusi mereka menjadi bagian dari laporan tahunan SDGs yang dikompilasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Terakhir, program/kegiatan pembangunan berbasis SDGs yang sukses (Best Practice), perlu dikumpulkan atau dikompilasi dan didokumentasikan secara sistematis sebagai pengetahuan (knowledge) bagi banyak pihak. Best Practice dalam kolaborasi menjadi cerita sukses dapat dirayakan bersama oleh para pelaku pembangunan terkait, sehingga, kedepan, kualitas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan menjadi sasaran bersama dan dapat member pelajaran kepada para pihak yang lain untuk juga mensukseskan program/kegiatan pembangunannya.

AR

Secara manajerial, perlu ada kapasitas yang terbangun untuk mengelola data/informasi SDGs, data target dan pencapaian SDGs, serta data praktik terbaik ditata dalam satu sistem pencatatan yang baik agar menjadi sumber pembelajaran pengetahuan yang mudah diakses dan ter-update secara regular.

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pengelolaan Keuangan daerah memiliki peranan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”. Sedangkan Pengelolaan keuangan daerah merupakan “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah”.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah diperlukan untuk bisa mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah yang menjadi dasar proyeksi kerangka pendanaan jangka menengah. Kerangka pendanaan jangka menengah inilah yang digunakan dalam merencanakan kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan. Hasil kajian keuangan daerah ini merupakan pagu indikatif yang akan menjadi dasar pengalokasian sumber daya sebagai input dalam melaksanakan program. Dengan demikian akan tergambar arah kebijakan, strategi dan program apa yang menjadi prioritas melalui pengalokasian anggaran sebagai langkah operasional dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Gambaran pengelolaan keuangan daerah ini juga menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menganalisis capaian untuk memperoleh proyeksi yang tepat dalam mendanai perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU (2019-2021)

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bentuk realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektifitas

anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Pengelolaan keuangan mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Ruang lingkup keuangan daerah dapat dijabarkan secara lebih terperinci sebagai berikut:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah. Dalam asas umum ini, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.

Data yang digunakan untuk analisis Bab III RPD ini adalah data realisasi APBD TA. 2019 – 2021 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga mempertimbangkan kondisi fiskal daerah pada saat terjadinya pandemi Covid-19. Sebagaimana arahan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka APBD merupakan satu kesatuan dengan struktur APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Selanjutnya kinerja pelaksanaan masing-masing struktur tersebut akan dikaji secara rinci untuk bisa mendapatkan

kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk penghitungan kerangka pendanaan selama tahun 2024-2026.

3.1.2 Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah dibagi ke dalam tiga komponen yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Analisis Pendapatan daerah sangat penting karena dengan analisis ini diketahui bagaimana sebenarnya kinerja pendapatan daerah, potensi apa yang masih bisa dikembangkan dan selanjutnya dapat diproyeksikan target pendapatan daerah ke depan untuk menjadi dasar pengalokasian belanja daerah untuk membiayai berbagai program dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan.

Realisasi pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan Pendapatan Transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah yaitu bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah berasal dari hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur ditargetkan semakin meningkat setiap tahunnya, meskipun realisasinya cenderung fluktuatif. Pendapatan total Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil pajak dan bukan pajak serta dana transfer lainnya, yang mengindikasikan derajat kemandirian fiskal yang masih perlu untuk ditingkatkan.

Perkembangan realisasi kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2021 dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 3.1
Kinerja Pendapatan Daerah 2019 – 2021

No	Uraian	Tahun Anggaran					
		2019		2020		2021	
		Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
PENDAPATAN	5.354.092.405.679,30	96,28	5.419.935.156.637,49	92,84	5.312.446.872.608,51	90,32	
Pendapatan Asli Daerah	1.258.958.963.288,30	93,54	1.166.570.596.936,49	79,59	1.238.032.648.888,51	74,04	
Pajak daerah	908.207.117.663,00	95,08	924.189.837.048,00	89,80	925.862.559.388,00	72,14	
Retribusi daerah	60.831.986.435,00	86,92	34.959.171.078,00	33,56	69.890.857.732,45	68,42	
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	70.662.452.308,00	85,93	65.135.467.629,92	46,02	64.982.172.050,00	100,39	
Lain-lain PAD yang sah	219.257.396.882,30	91,97	142.286.121.180,57	75,44	177.297.059.718,06	79,96	
Dana Perimbangan	4.067.952.844.498,00	97,46	4.171.362.593.723,00	97,61	4.000.655.446.445,00	96,99	
Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	38.360.205.100,00	60,72	67.539.025.428,00	89,49	77.108.302.308,00	139,48	
Dana alokasi umum	1.875.182.301.000,00	100,00	1.716.206.146.000,00	99,85	1.726.712.089.000,00	100,00	
Dana alokasi khusus	2.154.410.338.398,00	96,36	2.368.294.056.295,00	96,40	2.189.395.443.137,00	93,74	
Pendapatan Transfer Lainnya			19.323.366.000,00	99,79	7.439.612.000,00	100,00	
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	27.180.607.893,00	66,04	82.001.965.978,00	83,22	73.758.777.275,00	87,23	
Hibah	27.180.607.893,00	66,04	82.001.965.978,00	83,22	73.758.777.275,00	87,23	
Dana darurat							
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)							
Pendapatan lainnya							
Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya							

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022

Tabel 3.1. di atas menunjukkan pada kurun waktu 2019 - 2021, dana Perimbangan masih merupakan sumber pendapatan terbesar daerah. Pada tahun 2019, Dana Perimbangan berkontribusi sebesar Rp. 4,06 Trilyun lebih terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp. 5,35 Trilyun lebih, atau sebesar 75,98%. Pada tahun 2020, dana perimbangan menyumbang sebesar Rp. 4,17 Trilyun lebih terhadap total pendapatan daerah tahun tersebut sebesar Rp. 5,41 Trilyun lebih atau sebesar 76,96%. Terlihat bahwa terjadi peningkatan Dana perimbangan secara nominal maupun proporsinya dalam struktur pendapatan dibanding tahun sebelumnya,. Pada tahun 2021, Dana Perimbangan menyumbang sebesar Rp. 4,00 Trilyun lebih terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp. 5,31 Trilyun lebih. Terjadi penurunan nominal dana perimbangan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 dan juga penurunan proporsinya dalam struktur pendapatan daerah menjadi 75,31%.

Sepanjang periode 2019-2021 setidaknya dua hal yang menjadi catatan. *Pertama* : Komponen dana perimbangan masih merupakan komponen terbesar dalam total pendapatan daerah sepanjang periode tersebut. Dana perimbangan masih mendominasi sumber pendapatan daerah dengan kontribusi sebesar lebih dari 75%. Ini mengindikasikan ketergantungan fiskal yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Dana Perimbangan/ Transfer Pemerintah Pusat. *Kedua*: sepanjang periode tersebut, tidak terlihat

pergeseran struktur pendapatan daerah yang mengindikasikan masih tetap dominannya ketergantungan terhadap dana transfer. Memang terjadi penurunan nominal alokasi dana transfer pada tahun 2020 namun kelompok PAD juga mengalami penurunan yang lebih besar sehingga justru proporsi dana transfer meningkat pada tahun ini. Pada tahun 2021 terlihat bahwa Ketika proporsi realisasi Dana transfer menurun menjadi yang terendah sepanjang 2019-2021, proporsi PAD justru tidak mampu menyamai catatan proporsinya pada tahun 2019.

3.1.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pasal 157 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

1. Hasil pajak daerah, yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang/badan dan benda bergerak/tidak bergerak, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, dll.
2. Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran/pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata, seperti retribusi Pelayanan Kesehatan, retribusi Pelayan Persampahan / Kebersihan, retribusi pelayanan pemakaman, retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair, dll.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemda, seperti hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, dll.

Pada tahun 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 1,28 Trilyun lebih atau setara dengan 93,54% dari target yang ditetapkan. Nominal PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2020 sebesar 1,16 Trilyun lebih menurun Rp. 120 Miliar lebih dari tahun 2019, dan jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan realisasi ini hanya mencapai 79,59%. Pada tahun 2021 nominal PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai Rp. 1,23 Trilyun lebih atau apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat sebesar Rp. 700 juta lebih. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, realisasi PAD tahun 2021 hanya mencapai 74,04%.

Dua hal yang perlu menjadi perhatian sepanjang periode 2019-2021 terdapat, yaitu *pertama* : komponen dana perimbangan masih merupakan komponen terbesar dalam total pendapatan daerah sepanjang periode tersebut. Dana perimbangan masih mendominasi sumber pendapatan daerah dengan kontribusi sebesar lebih dari 70%. Ini mengindikasikan ketergantungan fiskal yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Dana Perimbangan/Transfer Pemerintah Pusat. *Kedua*: meskipun masih merupakan komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah, proporsi Dana Perimbangan menunjukkan trend penurunan yang konstan sepanjang 2019-2021 sedangkan proporsi PAD perlahan menunjukkan tren peningkatan. Kinerja PAD sepanjang 2019-2021 jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan memang sedikit cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir. Hal yang sama juga terlihat pada proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah. Pada tahun 2019 dari total Pendapatan daerah sebesar Rp. 5,35 Trilyun lebih dan Pendapatan Asli Daerah berkontribusi sebesar Rp. 1,25 Trilyun lebih atau sebesar 21,52%. Pada tahun 2020 dari total pendapatan daerah sebesar Rp. 5,41 Trilyun lebih, PAD berkontribusi sebesar Rp. 1,16 Trilyun lebih atau sebesar 25,11%. Terjadi peningkatan proporsi PAD dalam struktur Pendapatan Daerah pada tahun 2020. Lebih dari seperempat penerimaan daerah disumbangkan dari Pendapatan Asli Daerah. Hal ini masih konsisten pada tahun 2021, dimana dari total pendapatan daerah sebesar Rp. 5,31 Trilyun lebih, Pendapatan asli daerah berkontribusi sebesar Rp. 1,23 Trilyun atau sebesar 23,30%. Terlihat bahwa proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah memang kembali meningkat pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya namun masih berada di bawah capaian tahun 2019.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Tahun Anggaran 2019 hingga tahun 2021 disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Proporsi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Proporsi
2019	5.354.092.405.679	1.258.958.953.288	23,51%
2020	5.419.935.156.637	1.166.570.596.936	21,52%
2021	5.312.446.872.609	1.238.032.648.889	23,30%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus pasang surut sepanjang tiga tahun 2019-2021. Sepanjang periode tersebut pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu tumbuh 14,95% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 Pendapatan asli Daerah mengalami pelambatan (kontraksi) dan tumbuh negative sebesar -7,34%. Pembatasan aktivitas masyarakat sebagai langkah kebijakan untuk antisipasi meluasnya pandemic covid-19 pada tahun tersebut ikut memukul sumber-sumber pendapatan daerah sehingga capaian PAD Nusa Tenggara Timur lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 PAD Provinsi Nusa Tenggara Timur Kembali tumbuh positif sebesar 6,13% yang mengindikasikan dimulainya fase pemulihan ekonomi daerah. Pertumbuhan rata-rata sepanjang kurun waktu 2019-2021 adalah sebesar 4,58%. Pertumbuhan rata-rata PAD yang tetap positif sepanjang periode yang terinterupsi oleh kontraksi ekonomi daerah akibat meluasnya pandemi Covid-19 tersebut mengindikasikan kinerja positif dalam upaya mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah di tengah situasi perekonomian daerah yang belum sepenuhnya pulih.

Lebih lanjut Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019- 2021 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019- 2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pertumbuhan (%)
2019	1.258.958.953.288	14,95%
2020	1.166.570.596.936	(7,34%)
2021	1.238.032.648.889	6,13%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT

3.1.3 Neraca Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa neraca menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut : Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas (perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar) dan solvabilitas (penilaian kemampuan daerah dalam melunasi semua kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jaminan aktiva atau kekayaan yang dimiliki).

Neraca Daerah memberikan informasi tentang posisi keuangan pada saat tertentu. Posisi keuangan yang dimaksud adalah posisi keuangan atas aset, utang dan ekuitas. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurun waktu 2019-2021 seperti terlihat tabel berikut dan dapat dijelaskan secara rinci, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Neraca Provinsi NTT Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
		Rp	Rp	Rp
1.	ASET	9.148.346.887.827,31	9.780.730.244.942,22	10.875.133.634.376,80
1.1.	ASET LANCAR	463.602.595.083,15	269.666.041.007,46	482.245.798.151,61
1.1.1	Kas	282.629.763.941,55	68.383.358.384,40	62.544.957.626,61
1.1.2	Piutang	74.014.842.941,57	93.366.490.820,53	162.122.316.441,81
1.1.3	Persediaan	106.267.912.931,86	107.592.933.738,53	257.366.795.588,57
1.1.4	Beban Dibayar dimuka	690.075.268,17	323.258.064,00	211.728.494,62
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	592.998.225.439,52	594.630.895.887,37	829.823.515.360,80
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	7.975.834.273,00	4.671.332.858,35	3.435.164.323,39
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	585.022.391.166,52	589.959.563.029,02	826.388.351.037,41
1.3	ASET TETAP	7.973.851.665.808,35	8.500.707.994.266,59	9.165.391.028.141,05
1.3.1	Tanah	2.816.892.864.072,79	2.864.160.351.261,05	2.970.509.471.380,05
1.3.2	Peralatan dan Mesin	514.564.673.693,05	607.167.473.230,57	666.843.407.440,38
1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.572.379.124.805,87	1.638.136.673.180,64	1.768.448.619.693,24
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.583.277.441.762,01	3.019.497.773.582,04	3.281.118.734.916,89
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	121.810.071.907,14	171.551.388.631,79	202.452.912.760,99
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	364.927.489.567,49	200.194.334.380,50	276.017.881.949,50
1.4	ASET LAINNYA	117.894.401.496,29	415.725.313.780,80	397.673.292.723,31
1.4.1	Tagihan Penjualan Angsuran			
1.4.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	30.507.462.571,82	31.207.842.280,09	27.722.867.144,72
1.4.3	Kemitraan Dengan Pihak Kedua	33.060.950.000,00	33.060.950.000,00	35.243.950.000,00
1.4.4	Aset Tak Berwujud	9.566.707.974,87	8.640.269.603,55	9.374.962.224,28
1.4.5	Asey Lain-lain	44.759.280.949,60	342.816.251.897,16	325.331.513.354,31
	JUMLAH ASET DAERAH	9.148.346.887.827,31	9.780.730.244.942,22	10.875.133.634.376,80
2	KEWAJIBAN	56.929.422.509,42	228.479.309.224,28	641.414.208.027,47
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	56.929.422.509,42	156.520.948.224,28	390.635.768.027,47
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga			
2.1.2	Utang Bunga		1.070.113.277,01	
2.1.3	Bagian Lancar Utang		71.958.361.000,00	210.015.569.086,21
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	1.550.815.833,67	1.262.383.333,34	2.712.571.253,79
2.1.5	Utang Belanja	27.674.966.719,63	33.177.073.949,93	34.053.595.722,47
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	27.703.639.956,12	49.053.016.664,00	143.854.031.965,00
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	71.958.361.000,00	250.778.440.000,00
2.2.1	Utang Dalam Negeri		71.958.361.000,00	250.778.440.000,00
3	EKUITAS DANA	9.091.417.465.317,89	9.552.250.935.717,94	10.233.719.426.349,30
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	9.091.417.465.317,89	9.552.250.935.717,94	10.233.719.426.349,30
3.1.1	SILPA	9.091.417.465.317,89	9.552.250.935.717,94	10.233.719.426.349,30
3.1.2	Cadangan Piutang			

AE

No	Uraian	2019	2020	2021
		Rp	Rp	Rp
3.1.3	Cadangan Persediaan			
3.2	EKUITAS DAN INVESTASI	-	-	-
3.2.1	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap			
3.2.2	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya			
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	9.148.346.887.827,31	9.780.730.244.942,22	10.875.133.634.376,80

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022

Sedangkan rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019- 2021 dapat dijelaskan pada Tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3. 5
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan
		Rp	Rp	Rp	
1.	ASET	9.148.346.887.827,31	9.780.730.244.942,22	10.875.133.634.376,80	13,26%
1.1.	ASET LANCAR	463.602.595.083,15	269.666.041.007,46	482.245.798.151,61	18,12%
1.1.1	Kas	282.629.763.941,55	68.383.358.384,40	62.544.957.626,61	-17,17%
1.1.2	Piutang	74.014.842.941,57	93.366.490.820,53	162.122.316.441,81	36,03%
1.1.3	Persediaan	106.267.912.931,86	107.592.933.738,53	257.366.795.588,57	44,59%
1.1.4	Beban Dibayar dimuka	690.075.268,17	323.258.064,00	211.728.494,62	-29,22%
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	592.998.225.439,52	594.630.895.887,37	829.823.515.360,80	11,79%
1.2.1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	7.975.834.273,00	4.671.332.858,35	3.435.164.323,39	79,09%
1.2.2	Investasi Jangka Panjang Permanen	585.022.391.166,52	589.959.563.029,02	826.388.351.037,41	11,83%
1.3	ASET TETAP	7.973.851.665.808,35	8.500.707.994.266,59	9.165.391.028.141,05	13,12%
1.3.1	Tanah	2.816.892.864.072,79	2.864.160.351.261,05	2.970.509.471.380,05	26,80%
1.3.2	Peralatan dan Mesin	514.564.673.693,05	607.167.473.230,57	666.843.407.440,38	10,01%
1.3.3	Gedung dan Bangunan	1.572.379.124.805,87	1.638.136.673.180,64	1.768.448.619.693,24	6,48%
1.3.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.583.277.441.762,01	3.019.497.773.582,04	3.281.118.734.916,89	9,46%
1.3.5	Aset Tetap Lainnya	121.810.071.907,14	171.551.388.631,79	202.452.912.760,99	18,91%
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	364.927.489.567,49	200.194.334.380,50	276.017.881.949,50	37,08%
1.4	ASET LAINNYA	117.894.401.496,29	415.725.313.780,80	397.673.292.723,31	81,79%
1.4.1	Tagihan Penjualan Angsuran				
1.4.2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	30.507.462.571,82	31.207.842.280,09	27.722.867.144,72	11,93%
1.4.3	Kemitraan Dengan Pihak Kedua	33.060.950.000,00	33.060.950.000,00	35.243.950.000,00	2,69%
1.4.4	Aset Tak Berwujud	9.566.707.974,87	8.640.269.603,55	9.374.962.224,28	171,45%
1.4.5	Aset Lain-lain	44.759.280.949,60	342.816.251.897,16	325.331.513.354,31	209,48%
	JUMLAH ASET DAERAH	9.148.346.887.827,31	9.780.730.244.942,22	10.875.133.634.376,80	13,26%

10

No	Uraian	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan
		Rp	Rp	Rp	
2	KEWAJIBAN	56.929.422.509,42	228.479.309.224,28	641.414.208.027,47	145,30%
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	56.929.422.509,42	156.520.948.224,28	390.635.768.027,47	92,78%
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga				
2.1.2	Utang Bunga		1.070.113.277,01		
2.1.3	Bagian Lancar Utang		71.958.361.000,00	210.015.569.086,21	95,93%
2.1.4	Pendapatan Diterima Dimuka	1.550.815.833,67	1.262.383.333,34	2.712.571.253,79	40,75%
2.1.5	Utang Belanja	27.674.966.719,63	33.177.073.949,93	34.053.595.722,47	4,13%
2.1.6	Utang Jangka Pendek Lainnya	27.703.639.956,12	49.053.016.664,00	143.854.031.965,00	69,30%
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	71.958.361.000,00	250.778.440.000,00	124,25%
2.2.1	Utang Dalam Negeri	-	71.958.361.000,00	250.778.440.000,00	124,25%
3	EKUITAS DANA	9.091.417.465.317,89	9.552.250.935.717,94	10.233.719.426.349,30	11,61%
3.1	EKUITAS DANA LANCAR	9.091.417.465.317,89	9.552.250.935.717,94	10.233.719.426.349,30	11,61%
3.1.1	SILPA	9.091.417.465.317,89	9.552.250.935.717,94	10.233.719.426.349,30	11,61%
3.1.2	Cadangan Piutang				
3.1.3	Cadangan Persediaan				
3.2	EKUITAS DAN INVESTASI	-	-	-	-
3.2.1	Diinvestasikan Dalam Aset Tetap				
3.2.2	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya				
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	9.148.346.887.827,31	9.780.730.244.942,22	10.875.133.634.376,80	13,26%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT

3.1.3.1 Aset

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dari tabel di atas aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode tahun 2019-2021 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,26%. Jenis aset tersebut terdiri dari : aset lancar yang tumbuh rata-rata 18,12% sepanjang 2019-2021; investasi jangka Panjang tumbuh rata-rata 11,79%; aset tetap tumbuh rata-rata 13,12%; dan aset lainnya tumbuh rata-rata 81,79%.



Dalam kelompok aset lancar jenis aset yang tumbuh rata-rata paling besar sepanjang periode 2019-2021 adalah berturut-turut : Persediaan tumbuh rata-rata 44,59%, Piutang tumbuh rata-rata 36,03%, Kas mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) tumbuh rata-rata -17,17%, dan Beban Dibayar dimuka yang juga mengalami kontraksi, tumbuh rata-rata -29,22%.

Dalam kelompok investasi jangka Panjang, pertumbuhan rata-rata tiap jenis sepanjang 2019-2021 adalah sebagai berikut : Investasi Jangka Panjang Non Permanen tumbuh rata-rata 79,09%, Investasi Jangka Panjang Permanen tumbuh rata-rata 11,83%.

Dalam kelompok aset tetap, pertumbuhan rata-rata tiap jenis sepanjang 2019-2021 adalah sebagai berikut : Konstruksi Dalam Pengrajan tumbuh rata-rata 37,08%, Tanah tumbuh rata-rata 26,80%, Aset Tetap Lainnya tumbuh rata-rata 18,91%, Peralatan dan Mesin tumbuh rata-rata 10,01%, Jalan, Irigasi dan Jaringan tumbuh rata-rata 9,46%, dan Gedung dan Bangunan tumbuh rata-rata 6,48%.

Dalam kelompok aset lainnya, pertumbuhan rata-rata tiap jenis sepanjang 2019-2021 adalah sebagai berikut: Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tumbuh 11,93%, Kemitraan Dengan Pihak Kedua tumbuh 2,69%; Aset Tak Berwujud tumbuh 171,45%, dan Aset Lain-lain tumbuh 209,48%.

3.1.3.2 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Rata-rata pertumbuhan kewajiban pemerintah daerah Provinsi NTT selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar (145,30%). Jenis Kewajiban Pemerintah Daerah terdiri dari kewajiban jangka pendek yang tumbuh rata-rata sepanjang 2019-2021 sebesar 92,78%, dan kewajiban jangka Panjang yang tumbuh rata-rata sepanjang 2019-2021 sebesar 124,25%.

Dalam kelompok kewajiban jangka pendek, pertumbuhan rata-rata sepanjang 2019-2021 menurut jenisnya adalah sebagai berikut : Bagian Lancar Utang tumbuh rata-rata sebesar 95,93%; Pendapatan Diterima Dimuka tumbuh rata-rata 40,75%; Utang Belanja tumbuh 4,13%; dan Utang Jangka Pendek Lainnya tumbuh 69,30%. Sedangkan Utang Bunga tidak dapat dihitung pertumbuhan rata-rata nya karena hanya ada di tahun 2020 sebesar Rp. 1,07 Milyar.

Yang termasuk dalam kelompok kewajiban jangka Panjang adalah jenis utang luar negeri yang tumbuh rata-rata sebesar 124,25% sepanjang tahun 2019-2021.

3.1.3.3 Ekuitas Dana

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Perkembangan ekuitas Provinsi NTT selama tahun 2019-2021 tumbuh rata-rata sebesar 11,61%. Ekuitas Dana lancar hanya dikomposisi oleh Ekuitas Dana Lancar (tidak terdapat ekuitas dana investasi) yang dikomposisi hanya oleh silpa (tanpa cadangan piutang dan cadangan persediaan) yang tumbuh rata-rata 11,61%.

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui suatu sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam pengambilan keputusan baik terkait pendapatan maupun belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran dengan menggunakan basis atau pendekatan kinerja, dimana setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan pencapaian tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan pembiayaan dari APBD harus memiliki tujuan, sasaran yang jelas, mampu memberikan manfaat yang besar dan dampak yang terukur pada kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi berikut:

1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.



3. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesesuaian kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi, mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran, yaitu :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tertera dalam dokumen perencanaan. Karena itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sampai sejauh mana penganggaran konsisten dengan perencanaan pembangunan. Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian



belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta pendekatan *value of money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi diacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2019, 2020 dan 2021 yang digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Gambaran mengenai proporsi kinerja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dan pelayanan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Proporsi Kinerja Belanja Daerah 2019 - 2021

NO	URAIAN	PROPORSI			Rata-rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	
2	Belanja	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.1	Belanja Operasi	73,08%	67,89%	63,90%	68,29%
2.1.1	Belanja Pegawai	36,27%	36,51%	38,07%	36,95%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	31,74%	29,41%	27,31%	29,49%
2.1.3	Belanja Bunga	0,00%	0,32%	0,68%	0,33%
2.1.4	Belanja Hibah	31,29%	33,21%	33,70%	32,73%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	0,70%	0,56%	0,23%	0,50%
2.2	Belanja Modal	17,21%	19,39%	27,00%	21,20%
2.2.1	Tanah	0,00%	17,03%	0,05%	5,69%
2.2.2	Peralatan dan Mesin	13,59%	14,75%	10,95%	13,09%
2.2.3	Gedung dan Bangunan	14,61%	54,34%	12,03%	26,99%
2.2.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	57,05%	13,88%	76,43%	49,12%
2.2.5	Aset Tetap Lainnya	14,75%	0,00%	0,54%	5,10%
2.3	Belanja Tidak Terduga	0,22%	4,45%	2,23%	2,30%
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

AE

NO	URAIAN	PROPORSI			Rata-rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	
2.4	Belanja Transfer	9,49%	8,27%	6,87%	8,21%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	99,50%	99,05%	97,79%	98,78%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	0,50%	0,95%	2,21%	1,22%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Dari Tabel 3.6. di atas diketahui bahwa sepanjang Periode 2019-2021 proporsi Belanja Operasi dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan komponen terbesar dalam struktur belanja daerah namun demikian, terlihat bahwa proporsi belanja operasi menurun sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2019 Belanja Operasi berkontribusi sebesar 73,08% terhadap total belanja, menurun menjadi 67,89% pada tahun 2020 dan kembali menurun menjadi 63,90% pada tahun 2021. Sepanjang periode tersebut belanja operasi memiliki proporsi rata-rata sebesar 68,29%. Dalam kelompok belanja operasi, dua jenis belanja yang terbesar adalah belanja pegawai dan belanja hibah. Kedua jenis belanja ini mengkomposisi masing-masing sebesar rata-rata 36,95% dan 32,73% sepanjang terhadap total belanja operasi pada periode tersebut. Belanja barang dan jasa memiliki proporsi rata-rata 29,49% sementara belanja bunga dan belanja bantuan sosial hanya memiliki proporsi rata-rata dibawah 1% sepanjang periode 2019-2021.

Belanja modal merupakan kelompok belanja terbesar kedua setelah belanja operasi. Pada periode 2019-2021 proporsi rata-rata belanja modal adalah sebesar 21,20%. Terdapat trend peningkatan proporsi belanja modal sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2019, belanja modal memiliki proporsi sebesar 17,21% terhadap total belanja. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 19,39 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 27,00%. Peningkatan proporsi belanja modal dalam struktur belanja daerah didorong oleh peningkatan pesat jenis belanja jalan, jaringan dan irigasi yang memiliki proporsi terbesar pada kelompok belanja modal. Jenis belanja jalan, jaringan dan irigasi memiliki proporsi rata-rata 49,12% sepanjang periode 2019-2021 diikuti oleh Gedung dan Bangunan sebesar 26,99%. Sementara itu rata-rata proporsi belanja Peralatan dan Mesin, Tanah, dan Aset Tetap Lainnya sepanjang periode tersebut adalah masing-masing 13,09%, 5,69% dan 5,10% terhadap total belanja modal. Fluktuatifnya rata-rata proporsi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, disebabkan adanya pinjaman daerah untuk membiayai aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan dimana sampai akhir TA. 2020, progres fisik pekerjaan belum mencapai 100% sehingga aset tersebut belum dicatat sebagai aset definitif namun dicatat pada aset kontruksi dalam pekerjaan (KDP).

Belanja tidak terduga merupakan belanja dengan proporsi terkecil dalam APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2021. Rata-rata proporsi Belanja Tidak Terduga sepanjang tiga tahun tersebut adalah 2,30%.

Belanja transfer sepanjang periode 2019-2021 menunjukkan trend penurunan dengan rata-rata proporsi sebesar 8,21%. Pada tahun 2019 proporsi kelompok belanja ini terhadap total belanja daerah adalah sebesar 9,49% menurun pada tahun 2020 menjadi 8,27% dan kembali mengalami penurunan menjadi 6,87% pada tahun 2021. Jenis belanja terbesar dalam kelompok belanja transfer adalah belanja bagi hasil yang proporsinya secara rata-rata dalam periode 2019-2021 adalah sebesar 98,78%. Jenis belanja lainnya dalam kelompok belanja transfer adalah belanja bantuan keuangan yang rata-rata proporsinya adalah 1,22% sepanjang periode tersebut.

Dari Proporsi Kinerja Belanja Daerah 2019 – 2021, selanjutnya dilakukan analisis terhadap rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah periode 2019-2022 sebagaimana termuat dalam Tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7
Rata – Rata Pertumbuhan Belanja Daerah 2019 – 2021

No. Rek	Uraian	Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6
2.	BELANJA DAERAH	4.758.379.563.095,30	5.290.121.484.382,14	5.100.995.655.110,69	3,80%
2.1	BELANJA OPERASI	3.958.664.698.490,30	4.022.397.290.093,34	4.061.962.995.625,69	1,30%
2.1.1	Belanja Pegawai	1.442.966.171.684,54	1.444.646.968.075,00	1.608.464.234.033,00	5,73%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.194.831.892.391,76	1.221.574.013.528,45	1.078.288.386.249,19	-4,75%
2.1.3	Belanja Bunga		5.875.483.689,89	17.483.698.421,50	197,57%
2.1.4	Belanja Hibah	1.291.513.467.414,00	1.329.334.450.800,00	1.347.483.386.922,00	2,15%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	29.353.167.000,00	20.966.374.000,00	10.243.290.000,00	-39,86%
2.2	BELANJA MODAL	798.224.255.845,00	1.026.785.278.414,80	903.257.622.800,00	8,30%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	30.000.000,00		147.952.000,00	-
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	116.636.579.503,00	202.160.307.477,95	185.901.613.833,00	32,64%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	139.208.422.686,00	177.836.474.129,85	135.344.543.385,00	1,93%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	472.361.496.339,00	504.964.198.116,00	572.412.496.697,00	10,13%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	69.987.757.317,00	141.824.298.691,00	9.451.016.885,00	4,65%
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.490.608.760,00	240.938.915.874,00	135.775.036.685,00	8010,07%
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	1.490.608.760,00	240.938.915.874,00	135.775.036.685,00	8010,07%

No. Rek	Uraian	Realisasi			Rata-Rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6
3.	TRANSFER	518.685.087.892,00	465.136.531.811,50	407.772.251.022,00	-11,33%
3.1.	BELANJA TRANSFER	518.685.087.892,00	465.136.531.811,50	407.772.251.022,00	-11,33%
3.1.1	Belanja Bagi Hasil	515.982.681.892,00	460.136.531.811,50	397.772.251.022,00	-12,19%
3.1.2	Belanja Bantuan Keuangan	2.702.406.000,00	5.000.000.000,00	10.000.000.000,00	92,51%
	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER	5.277.064.650.987,30	5.755.258.016.193,64	5.508.767.906.132,69	2,39%

Sumber : LRA (audited) tahun 2019-2021, Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Belanja daerah dalam APBD Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2021 tumbuh rata-rata sebesar 3,80% sementara Transfer mengalami kontraksi/tumbuh negatif sebesar rata-rata -11,33% sebagaimana termuat dalam Tabel 3.7 di atas. Diantara kelompok belanja, belanja tidak terduga tumbuh paling tinggi sepanjang periode tersebut sebesar 8.010,07% dari nominal Rp. 1,49 Milyar lebih pada tahun 2019 menjadi Rp 135,7 Milyar lebih pada tahun 2021. Dalam kelompok transfer, belanja bagi hasil mengalami kontraksi pertumbuhan rata-rata tahunan sepanjang periode 2019-2021 sebesar -12,19% dari Rp. 515,98 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp. 397,77 miliar pada tahun 2021 sementara belanja bantuan keuangan sepanjang periode tersebut tumbuh rata-rata 92,51% dari Rp. 2,70 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp. 10,00 Miliar pada tahun 2021. Belanja operasi tumbuh dengan rata-rata 1,30% sementara belanja modal tumbuh rata-rata 8,30% sepanjang periode tersebut. Total Belanja dan transfer dalam periode 2019-2021 tumbuh sebesar 2,39% pertahun dari Rp. 5,27 Trilyun pada tahun 2019 menjadi Rp. 5,50 Trilyun pada tahun 2021.

Selanjutnya dilakukan analisis proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk 3 (tiga) tahun terakhir dengan Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Tahun anggaran	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan (Rp))	Percentase (%)
1	2019	1.772.658.139.104	5.780.607.564.377	30,67%
2	2020	1.843.492.044.256	6.373.051.009.714	28,93%
3	2021	1.904.055.771.793	7.150.472.335.906	26,63%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa selama periode 2019-2021, total belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.772.658.139.104 meningkat di tahun 2020 menjadi Rp. 1.843.492.044.256 dan kembali meningkat di tahun 2021 menjadi Rp. 1.904.055.771.793. namun meskipun secara nominal mengalami peningkatan, proporsinya terhadap total belanja mengalami penurunan yang konstan sepanjang periode 2019-2021. Pada tahun 2019 proporsi belanja untuk pemenuhan aparatur adalah sebesar 30,67% dari total pengeluaran, pada tahun 2020 menurun menjadi 28,93% dan pada tahun 2021 kembali menurun menjadi 26,63%. Trend penurunan alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebagai akibat dari adanya regulasi pembagian proporsi belanja lainnya dan belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Trend penurunan alokasi belanja aparatur dari tahun 2019 – 2021 mengindikasikan bahwa belanja non kebutuhan aparatur secara konstan meningkat proporsinya dalam struktur belanja daerah sepanjang periode tersebut, yang juga berarti belanja-belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat lewat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan daerah semakin mendominasi struktur belanja pemerintah daerah sepanjang periode 2019-2021.



Apabila didalami, juga terlihat trend penurunan belanja Pegawai terhadap total belanja daerah pada periode 2019-2021. Pada tahun 2019, proporsi belanja pegawai terhadap total belanja adalah sebesar 26,50%, menurun pada tahun berikutnya menjadi 24,78% dan kembali menurun menjadi 24,32% pada tahun 2021. penurunan proporsi belanja pegawai ini sejalan dengan penurunan proporsi belanja untuk kebutuhan aparatur yang mengindikasikan perubahan konstan dalam struktur belanja daerah sepanjang periode 2019-2021. Apabila

jumlah belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur menurun berarti alokasi belanja operasi semakin besar. Anggaran belanja operasi merupakan anggaran terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu arah pengelolaan belanja daerah seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung (*pro-poor*), pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) dan perluasan lapangan kerja (*pro-job*).

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

**Tabel 3.9 Struktur Pembiayaan Daerah Provinsi NTT
tahun 2019-2021**

No	Uraian	REALISASI			Rata-Rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	216.350.973.249,55	430.706.217.940,55	503.023.089.714,99	58%
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	212.794.972.828,55	282.629.763.942	68.383.358.383,99	-21%
1.2	Penerimaan Kembali Investasi non permanen	3.556.000.421,00	4.159.731.999,00	3.405.345.681,00	-1%
1.3	Penerimaan Pinjaman Daerah dan obligasi daerah	-	143.916.722.000,00	431.234.385.650,00	200%
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10.748.964.000,00	27.000.000.000,00	244.157.098.564,20	478%
2.1	Penyertaan Modal Daerah/ Investasi Pemerintah Daerah	10.748.964.000,00	27.000.000.000,00	127.300.000.000,00	261%
2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo			114.357.098.564,20	
2.3	Pemberian Pinjaman Daerah			2.500.000.000,00	
3	PEMBIAYAAN NETTO	205.602.009.249,55	403.706.217.940,55	258.865.991.150,79	30%
4	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	282.629.763.942	68.383.358.383,99	62.544.957.626,61	-42%

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Sepanjang periode 2019-2021, Penerimaan Pembiayaan daerah meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 58% pertahun dari Rp.216,35 Miliar pada tahun 2019 menjadi Rp. 503,02 Miliar pada tahun 2021. Komponen Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (silpa) yang termasuk dalam

kelompok ini sepanjang periode yang sama mengalami kontraksi sebesar rata-rata -21% pertahun dari Rp. 212,79 Miliar pada tahun 2019 sempat meningkat menjadi Rp. 282,62 miliar pada tahun 2020 untuk kemudian menurun menjadi Rp. 68,38 miliar pada tahun 2021. Komponen penerimaan Kembali investasi non permanen mengalami sedikit kontaksi pertumbuhan rata-rata sepanjang periode tersebut sebesar -1% dari Rp.3,55 Miliar pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp.4,159% pada tahun 2020 untuk kemudian Kembali menurun menjadi Rp.3,40 Miliar pada tahun 2021. Kenaikan terbesar yang menyumbang pertumbuhan penerimaan pembiayaan datang dari komponen penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah yang pada tahun 2019 tidak diterima, pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 143,91 Miliar dan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 431,23 Miliar. Pertumbuhan rata-rata komponen ini sepanjang periode 2019-2021 adalah sebesar 200%

Pengeluaran Pembiayaan tumbuh sebesar rata-rata 478% pertahun dari Rp.10,74 miliar pada tahun 2019, meningkat menjadi Rp.27 Miliar pada tahun 2020 dan Kembali meningkat tajam menjadi Rp.244 miliar pada tahun 2021. Pertumbuhan yang tinggi ini disumbangkan oleh meningkatnya pertumbuhan komponen penyertaan modal daerah/investasi pemerintah daerah sebesar rata-rata 261% dari Rp.10,64 miliar di tahun 2019 meningkat menjadi Rp.27 Miliar di tahun 2020, dan meningkat menjadi Rp.127,30 Miliar di tahun 2021. Pertumbuhan pengeluaran pendapatan yang tinggi juga disebabkan karena pada tahun anggaran 2021 pemerintah daerah melakukan pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo sebesar Rp. 114,35 miliar dan pemberian pinjaman daerah sebesar Rp.2,5 miliar yang mana kedua komponen ini tidak terealisasi pada struktur pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2019 dan tahun 2020.

Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dihitung sebagai pembiayaan netto, tumbuh sebesar rata-rata 30% sepanjang periode 2019-2021 dari Rp. 205,60 miliar di tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 403,70 miliar pada tahun 2020, dan menurun menjadi Rp.258,86 miliar di tahun 2021.

Setelah menutup defisit, sisa dari pembiayaan netto dihitung sebagai sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun berkenaan. Pertumbuhan rata-rata silpa tahun berkenaan dalam realisasi APBD NTT 2019-2021 adalah sebesar -42% dari Rp. 282,62 Miliar pada tahun 2019 menurun menjadi Rp.68,38 Miliar pada tahun 2020 dan kemudian menurun Kembali menjadi Rp.62,544.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada periode anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui Analisis sumber penutup defisit riil, yang akan memberi gambaran tentang kebijakan anggaran periode sebelumnya untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah.

Tabel 3.10
Defisit Riil Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	5.354.092.405.679,30	5.419.935.156.637,49	5.312.446.872.608,51
	Dikurangi realisasi :			
2	Belanja Daerah	5.277.064.650.987,30	5.755.258.016.193,64	5.508.767.906.132,69
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.748.964.000,00	27.000.000.000,00	244.157.098.564,20
A	Defisit riil	66.278.790.692,00	(362.322.859.556,15)	(440.478.132.088,38)

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Sepanjang periode 2019-2020 hanya pada tahun 2019 terjadi surplus rill anggaran sebesar Rp. 66,27 Miliar lebih sementara pada tahun 2020 dan 2021 terjadi defisit riil anggaran sebesar masing-masing Rp 362,32 Miliar lebih dan Rp 440,47 Miliar lebih. Pada tahun 2019 Realisasi pendapatan daerah melampaui target sehingga dapat menutupi realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah sementara pada tahun 2020 dan 2021 Realisasi pendapatan daerah yang tidak mencapai target sehingga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya defisit riil.

Adapun komposisi penutup defisit riil APBD Anggaran Provinsi NTT Tahun 2017-2019 digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.11
Komposisi Penutup Defisit Riil APBD Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019-2021

No	Uraian	2019	2020	2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
	Penerimaan Pembiayaan			
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	212.794.972.828,55	282.629.763.941,55	68.383.358.383,99
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-

No	Uraian	2019	2020	2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
Penerimaan Pembiayaan				
4	Penerimaan Pinjaman Daerah		143.916.722.000,00	431.234.385.650,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pembiayaan Daerah	3.556.000.421,00	4.159.731.999,00	3.405.345.681,00
6	Penerimaan Piutang Daerah			
7	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	216.350.973.249,55	430.706.217.940,55	503.023.089.714,99
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Defisit Riil dikurangi Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah)	282.629.763.941,55	68.383.358.384,40	62.544.957.626,61

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, Badan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Total realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2019 berasal dari Silpa sebesar Rp. 212,79 miliar dan penerimaan kembali pembiayaan daerah sebesar Rp. 3,55 miliar sehingga berjumlah total Rp. 216, 62 miliar. Ditambah dengan surplus riil tahun 2019, maka sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan 2019 adalah sebesar Rp 282,62 miliar lebih. Pada tahun 2020, silpa tahun sebelumnya yang sebesar Rp 282,62 miliar lebih ditambah pinjaman daerah sebesar Rp. 143,91 miliar ditambah dengan penerimaan kembali pemberian pembiayaan daerah sebesar Rp 4,15 miliar lebih mengkomposisi total realisasi penerimaan pembiayaan daerah 2020 sebesar Rp. 430, 70 Miliar lebih. Setelah menutup defisit riil tahun 2020 yang sebesar Rp 362,32 Miliar lebih, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan 2020 adalah sebesar Rp. 68,38 miliar lebih.

Pada tahun 2021, ketika defisit riil mencapai Rp. 440,47 Miliar lebih, total realisasi penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp. 503,02 miliar lebih yang terdiri dari silpa sebesar Rp. 68,35 miliar lebih, penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp. 431,23 miliar lebih dan Penerimaan Kembali Pemberian Pembiayaan Daerah sebesar Rp. 3,40 miliar lebih. Pinjaman daerah dilakukan untuk membiayai belanja modal jalan, jaringan dan irigasi. Setelah menutup defisit riil tahun 2021, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan adalah sebesar Rp. 62,54 miliar lebih.

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Analisis Kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama masa transisi menuju pelaksanaan Pemilihan sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024. Kapasitas riil keuangan daerah adalah merupakan penerimaan/pendapatan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pемbiayaan yang wajib dan mengikat.

Proyeksi pendanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023-2026 merupakan angka optimal yang didasarkan atas asumsi dan tren rata-rata pertumbuhan dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dari sisi pendapatan yang dipakai adalah analisis pertumbuhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah, ditambah dengan potensi pendapatan daerah yang akan dikembangkan dalam periode perencanaan. Dari sisi belanja tren pertumbuhan digunakan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, membiayai program strategis dan prioritas pembangunan daerah serta pencapaian indikator kinerja utama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023-2026. Dari sisi pembiayaan, akan dilakukan investasi-investasi pada sektor produktif untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah, disamping membiayai kebijakan hutang daerah untuk membiayai investasi publik yang menghasilkan pendapatan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut selanjutnya akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan serta perubahan terhadap asumsi makro ekonomi, harga minyak, nilai tukar rupiah, inflasi, dan perkembangan situasi serta kondisi ekonomi global, nasional, dan regional.

Adapun Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023-2026 sebagaimana berikut:

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

3.3.1.1 Proyeksi Pendapatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur sumber keuangan Pemerintah Daerah sebagai standar teknis pembagian subsidi pusat kepada Daerah. Pada prinsipnya pembagian sumber keuangan menurut Undang-Undang ini menganut asas pemisahan terikat terhadap sumber keuangan, dimana objek pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Pusat tidak dapat dikenakan lagi oleh Pemerintah Daerah sehingga sistem pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia menganut asas pemisahan terikat pembagian sumber penerimaan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sumber-sumber penerimaan daerah menurut Undang-Undang ini adalah: (1) hasil pajak daerah, (2) hasil retribusi daerah, (3) hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain PAD yang sah, (5) Dana Transfer, (6) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana Transferyang dimaksud pada poin 5 (lima) adalah Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dari komponen pendapatan sebagaimana dijabarkan di atas dan gambaran perkembangan realisasi kinerja pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2021, ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur cukup tinggi terhadap alokasi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukan permasalahan pengelolaan keuangan daerah yang masih belum berubah yaitu belum optimalnya pengelolaan PAD yang berakibat masih rendahnya kemampuan PAD, alokasi jenis belanja yang tidak produktif, pemanfaatan alokasi belanja yang tidak efisien dan efektif serta pengelolaan administrasi yang belum optimal.

Terkait dengan permasalahan tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pengelolaan keuangan kedepan yaitu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menetapkan arah dan kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan daerah. Untuk Pendapatan, perlu adanya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD agar ketergantungan keuangan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap Pemerintah Pusat dapat ditutupi.

3.3.1.2 Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan desentralisasi dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. PAD diartikan sebagai penerimaan dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 , Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdiri dari :

- (a). Pajak daerah,
- (b) Retribusi daerah,
- (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
- (d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Mendasarkan capaian kinerja pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019-2021, maka pendapatan daerah Tahun 2023-2026 diupayakan dapat meningkat. Peningkatan kinerja pendapatan daerah tersebut dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh melalui upaya:

1. Pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatkan porsi pembayaran pajak melalui digitalisasi System (SAMSAT);
3. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak;
4. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.

Sedangkan upaya ekstensifikasi pendapatan daerah melalui:

1. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
2. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha;
3. Optimalisasi, Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah sebagai sumber pendapatan daerah;
4. Perlunya menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan.

Proyeksi Pendapatan daerah sebagaimana terihat pada tabel 3.12 berikut :

Tabel 3.12
Rata-rata Pertumbuhan dan Proyeksi Pendapatan Daerah

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan %	Proyeksi Pertumbuhan %
1.	PENDAPATAN	3,74	2,46
1.1	Pendapatan Asli Daerah	4,58	2,49
1.1.1	Pajak Daerah	2,27	10,00
1.1.2	Retribusi Daerah	59,34	12,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	(3,49)	5,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	19,77	3,00
1.2	Dana Perimbangan	2,99	2,50
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	16,57	2,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	(1,75)	0,05
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	7,61	3,00
1.2.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		1,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	195,51	0,06
.3.1	Hibah	195,51	0,06
1.3.2	Dana Darurat		
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya **)		
1.3.4	Pendapatan Lainnya		
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022

Pajak daerah walaupun secara rata-rata bertumbuh sebesar 2,27% selama kurun waktu 2019-2021, namun selama tahun rencana 2024 – 2026 diproyeksikan bertumbuh rata-rata 10% setiap tahunnya. Hal ini disebabkan pajak provinsi yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok. Dengan pajak daerah yang terbatas ini, perlu kerja keras untuk mengoptimalkan penerimaan



pajak dari kendaraan yang sudah ada, dan penerimaan dari piutang pajak. Walaupun kondisi perekonomian ke depan diprediksi tidak menentu, namun optimisme atas penerimaan pajak terkait kendaraan bermotor tetap ada, khususnya untuk kendaraan baru dan BBNKB. Di sisi lain, PBBKB dan pajak rokok walaupun merupakan pajak provinsi tetapi dipungut oleh pemerintah pusat sehingga sangat tergantung pada alokasi dari pemerintah pusat. Pajak Air Permukaan selama ini besarannya sangat kecil dan tidak signifikan.

Retribusi Daerah diproyeksikan mengalami pertumbuhan 12%, berdasarkan skenario optimalisasi, rehabilitasi, peremajaan kembali dan *restocking* asset-aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan cara melakukan investasi pada kebun-kebun dinas, instalasi ternak milik Pemerintah, investasi pada pengembangan instalasi yang akan mendatangkan profit sesuai hasil kajian, investasi pada BBI Noekele, PPI Oeba, Tambak Oesapa dan mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset lainnya untuk peningkatan PAD yang bersumber dari Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah serta Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah. Pengelolaan Pariwisata Estate yang telah dibangun perlu dioptimalkan sehingga dapat memberikan kontribusi pada PAD. Dengan semakin terbatasnya penerimaan dari pajak daerah, maka optimalisasi pada retribusi daerah, termasuk dengan pola investasi, menjadi salah satu strategi yang harus dilakukan untuk memastikan dalam kurun waktu 2024-2026 ini, PAD harus bisa memberikan kontribusi yang lebih baik pada total pendapatan daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, diharapkan juga akan memberikan kontribusi pendapatan berupa deviden.

Selain peningkatan PAD, prioritas arahan belanja juga diarahkan untuk mengatasi inflasi khususnya untuk memastikan ketersediaan produksi *volatile food* penyebab iniasi. Hal ini dilakukan dengan memastikan tersedianya anggaran untuk tanaman hortikultura seperti cabe, bawang dan tomat sedangkan di sektor peternakan disediakan investasi pada pos pembiayaan daerah untuk pengembangan ayam pedaging dan ayam petelur. Untuk sektor perikanan, diarahkan melalui peningkatan pengawasan dan memastikan PPI dimanfaatkan secara optimal.

Pengembangan sektor-sektor produktif seperti pertanian dengan program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS), peningkatan produksi beras, peningkatan populasi ternak (sapi, babi, kambing dan unggas), pengembangan perikanan baik tangkap maupun budi daya, pengembangan hasil-hasil perikanan dan kelautan seperti rumput laut, *shrimp*, pengembangan garam, pengembangan kelor, dan sektor-sektor lain yang potensial sebagaimana selama ini telah



dilakukan tetap dilanjutkan dengan pola kemitraan atau kerja sama dengan pihak ketiga, baik perbankan maupun pihak lainnya yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Khusus untuk lain-lain PAD yang sah, karena komponen terbesarnya adalah penerimaan jasa giro dan bunga deposito, ke depan, tidak dibenarkan menyimpan uang yang tidak digunakan terlalu lama, karena akan mempengaruhi alokasi DAU dengan pola dinamis.

Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar kewenangan menarik pungutan pajak dan retribusi daerah segera disesuaikan dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan belum ditetapkannya pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang bagi daerah untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Selain itu, bisa dikaji agar pengalokasian belanja yang berhubungan langsung dengan pelayanan yang berakibat mendatangkan penerimaan daerah, misalnya terkait dengan UPTD yang mengelola pendapatan, termasuk penyewaan sarana prasarana olahraga bisa dialokasikan melalui pembiayaan daerah dengan konsep investasi daerah yang anggarannya harus dikembalikan ke Pemerintah. UPTD Pendapatan Daerah yang selama ini lebih mengarah pada pencapaian target pajak daerah, juga mengawal pencapaian target retribusi daerah dengan melakukan monitoring dan pengawasan terhadap asset-aset pemerintah provinsi yang berada di wilayah kerjanya. Di sisi lain, dari segi pelaksanaan, perlu memastikan semua proses berjalan secara transparan, akuntabel dan terintegrasi.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat, yang merupakan hak pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari *revenue sharing policy*. Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan besaran alokasinya karena tergantung pada pemerintah pusat. Dengan pola DAU saat ini dimana Sebagian merupakan DAU terikat yang diarahkan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal, dan hanya sebagian yang bebas digunakan sebagai *block grant* akan semakin mempersulit Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran yang sangat terbatas karena tingkat ketergantungan yang tinggi pada Pemerintah Pusat. Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga harus dapat diupayakan peningkatannya melalui pelaporan dan pengelolaan dana DAK yang baik dengan memastikan realisasi penyerapan DAK sesuai target, penyusunan program unggulan yang dapat diajukan



untuk dibiayai dengan DAK, perencanaan dengan didukung ketersediaan data yang baik untuk proses pengusulan sesuai aplikasi dan menu yang disediakan.

Pertumbuhan Dana Perimbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 diproyeksikan 2.50%, meliputi: pertumbuhan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 2%, pertumbuhan Dana Alokasi Umum sebesar 1.50% dan pertumbuhan Dana Alokasi Khusus sebesar 4.65%. Dana Alokasi Khusus diproyeksikan bertumbuh cukup besar dengan harapan ke depan alokasi DAK sesuai filosofinya digunakan untuk memperkecil kesenjangan antar wilayah, dengan alokasi untuk wilayah tertinggal meningkat cukup besar.

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan pendapatan di atas, maka proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026

URAIAN	PROYEKSI INDIKATIF PENDAPATAN DAERAH		
	TAHUN		
	2024	2025	2026
PENDAPATAN	4.935.636.695.000	5.079.390.410.700	5.307.818.311.000
Pendapatan Asli Daerah	1.614.605.073.000	1.716.942.931.700	1.902.753.915.000
Pajak Daerah	1.247.452.245.000	1.328.432.675.000	1.491.110.910.000
Retribusi Daerah	98.190.557.000	109.974.618.000	123.171.572.000
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	75.224.987.000	78.986.236.000	82.935.548.000
Lain-lain PAD yang sah	193.737.284.000	199.549.402.700	205.535.885.000
Pendapatan Transfer	3.247.139.999.000	3.288.511.521.000	3.331.084.077.000
Transfer Pemerintah Pusat	54.861.209.000	55.958.433.000	57.077.602.000
Dana Perimbangan	1.875.956.650.000	1.876.894.585.000	1.877.833.050.000
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	1.308.657.100.000	1.347.916.813.000	1.388.354.318.000
Dana Alokasi Umum	7.665.040.000	7.741.690.000	7.819.107.000
Dana Alokasi Khusus	4.935.637.761.000	5.079.390.410.700	5.307.818.311.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.614.606.139.000	1.716.942.931.700	1.902.753.915.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	73.891.623.000	73.935.958.000	73.980.319.000
Hibah	73.891.623.000	73.935.958.000	73.980.319.000
Dana Darurat			
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya **)			
Pendapatan Lainnya			
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022

3.3.1.3 Proyeksi Belanja

Belanja Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan - perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan didasarkan atas pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka mengengah selama tahun 2024-2026. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dan diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (efektivitas).

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

Belanja diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. **Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.** Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. **Prioritas.** Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
3. **Tolok ukur dan target kinerja.** Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
4. **Optimalisasi Belanja.** Belanja diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. **Transparansi dan Akuntabilitas.** Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan pada publik dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, maka prencanaan dan panganggaran telah menggunakan *e-planning* dan *e-budgeting*. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses keluaran dan hasil.

Belanja daerah tahun 2024-2026 diproyeksikan dengan *baseline* penganggaran tahun 2023. Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, belanja daerah diarahkan untuk: 1) pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), 2) membiayai kewajiban serta belanja wajib dan mengikat, 3) membiayai program yang akan berdampak pada peningkatan PAD.

Pemenuhan standar pelayanan minimal dilakukan melalui DAU yang sudah diarahkan, untuk memastikan alokasi anggaran secara konsisten dan kontinyu untuk membiayai SPM. Pemenuhan kewajiban serta belanja wajib dan



Pemenuhan standar pelayanan minimal dilakukan melalui DAU yang sudah diarahkan, untuk memastikan alokasi anggaran secara konsisten dan kontinyu untuk membiayai SPM. Pemenuhan kewajiban serta belanja wajib dan mengikat seperti pembayaran hutang pinjaman daerah, alokasi dana untuk PILKADA, penyertaan modal, alokasi anggaran untuk menjawab arahan pusat, belanja gaji ASN, membiayai tugas belajar yang sudah berjalan, membiayai operasional kantor selama 1 tahun. Sedangkan anggaran program yang berdampak pada peningkatan PAD diarahkan untuk optimalisasi, rehabilitasi, peremajaan ataupun restocking asset-aset daerah yang akan mendatangkan PAD ataupun pengembangan potensi-potensi PAD.

Rata-rata perumbuhan proyeksi pertumbuhan belanja daerah terlihat pada tabel 3.14 berikut.

Tabel 3.14
Rata-rata Pertumbuhan dan Proyeksi Pertumbuhan Belanja

URAIAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN	PROYEKSI PERTUMBUHAN
	%	%
Belanja	3,80%	0,91
Belanja Operasi	1,30%	1,07
Belanja Pegawai	5,73%	0,05
Belanja Barang dan Jasa	-4,75%	0,001
Belanja Bunga	197,57%	0,09
Belanja Hibah	2,15%	0,005
Belanja Bantuan Sosial	-39,86%	0,04
Belanja Modal	8,30%	0
Tanah	N/A	0,001
Peralatan dan Mesin	32,64%	0,03
Gedung dan Bangunan	1,93%	0,01
Jalan, Jaringan dan Irigasi	10,13%	0,02
Aset Tetap Lainnya	4,65%	0,01
Belanja Tidak Terduga	8010,07%	0,07
Belanja Tidak Terduga	8010,07%	0,01
Belanja Transfer	-11,33%	1,84
Belanja Bagi Hasil	-12,19%	0,065
Belanja Bantuan Keuangan	92,51%	0,005

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022

Sedangkan proyeksi indikatif Belanja Daerah tahun 2024-2026 sebagaimana terlihat pada table 3.15 berikut.

Tabel 3.15
Proyeksi Belanja Daerah 2024-2026

URAIAN	PROYEKSI INDIKATIF BELANJA DAERAH		
	TAHUN		
	2024	2025	2026
BELANJA	5.002.614.225.950	4.894.317.017.627	5.065.630.989.488
Belanja Operasi	3.629.486.868.350	3.533.069.166.227	3.665.141.227.488
Belanja Pegawai	2.052.268.897.000	2.145.186.692.627	2.270.795.113.588
Belanja Barang dan Jasa	1.392.807.096.950	1.192.199.632.000	1.192.478.072.000
Belanja Bunga	76.534.400.000	83.422.412.000	90.930.428.000
Belanja Hibah	80.217.674.400	80.618.762.400	81.021.856.000
Belanja Bantuan Sosial	27.658.800.000	31.641.667.200	29.915.757.900
Belanja Modal	406.041.708.600	381.209.453.700	403.610.870.500
Tanah	-	-	-
Peralatan dan Mesin	67.591.255.000	69.618.993.000	71.707.562.000
Gedung dan Bangunan	196.854.187.600	188.822.729.700	200.810.956.500
Jalan, Jaringan dan Irigasi	138.553.306.000	119.694.342.000	127.988.229.000
Aset Tetap Lainnya	3.042.960.000	3.073.389.000	3.104.123.000
Belanja Tidak Terduga	136.196.697.000	137.558.663.700	138.934.250.000
Belanja Tidak Terduga	136.196.697.000	137.558.663.700	138.934.250.000
Belanja Transfer	830.888.952.000	842.479.734.000	857.944.641.500
Belanja Bagi Hasil	790.605.621.000	801.994.986.000	817.257.469.500
Belanja Bantuan Keuangan	40.283.331.000	40.484.748.000	40.687.172.000

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022

Belanja bunga dialokasikan sebesar kewajiban yang harus dipenuhi terkait pinjaman daerah pada PT. SMI. Belanja hibah dan bansos mengalami peningkatan untuk antisipasi kondisi tahun mendatang yang diprediksi penuh ketidakpastian.

Proyeksi belanja modal akan mengalami peningkatan, walaupun tidak signifikan. Begitu pula untuk belanja tidak terduga, tetap mengalami pertumbuhan walaupun tidak signifikan. Sedangkan proyeksi pertumbuhan belanja transfer adalah 1,84%.

3.3.1.4 Proyeksi Pembiayaan Daerah

Dalam perencanaan anggaran, pemerintah daerah dapat merencanakan anggaran pendapatan dan belanjanya defisit atau surplus. Pada kenyataannya, di dalam perencanaan yang dilakukan seringkali terjadi defisit anggaran daerah. Defisit tersebut harus dapat ditutup dengan pembiayaan daerah. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.



Pembiayaan daerah terdiri dari dua pos yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pemerintah daerah memiliki kecenderungan untuk menutup defisit daerah dari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya atau dengan melakukan pinjaman daerah atau obligasi daerah yang berada di pos penerimaan pembiayaan. Dalam perencanaan dokumen rencana jangka menengah, tidak diperkenankan untuk merencanakan apalagi memproyeksi SiLPA. Pos pengeluaran pembiayaan juga memiliki dua komponen utama yang banyak digunakan oleh pemda yaitu penyertaan modal (investasi daerah) dan pembayaran pokok utang.

Pada RPD 2024-2026 ini direncanakan anggaran untuk investasi non permanen bagi sektor-sektor produktif untuk bisa mengelola investasi terkait urusan yang ditangani untuk meningkatkan PAD. Investasi tersebut harus dikaji dan akan disetujui jika kelayakan investasi usulan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu diberikan juga pinjaman daerah pada tahun 2025 dalam rangka meningkatkan PAD. Proyeksi Pembiayaan Daerah sebagaimana terlihat pada tabel 3.16.

Tabel 3.16
Proyeksi Pembiayaan Daerah

URAIAN	PROYEKSI INDIKATIF PEMBIAYAAN DAERAH		
	TAHUN		
	2024	2025	2026
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	493.832.090.000	7.500.000.000	8.175.000.000
Penerimaan pinjaman daerah			
Pencairan Dana Cadangan	486.250.000.000		
Investasi non permanen		7.500.000.000	7.500.000.000
Penerimaan kembali pinjaman daerah	7.582.090.000	0	675.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	426.854.559.050	192.573.393.073	250.362.321.512
Pembentukan dana cadangan	166.375.003.050		
Penyertaan Modal	92.000.000.000	21.593.837.073	81.882.765.512
Investasi non permanen	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Pembayaran pokok hutang	163.479.556.000	163.479.556.000	163.479.556.000
Pemberian pinjaman daerah	0	2.500.000.000	0

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022

Secara lengkap proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana terlihat pada tabel 3.17.

Tabel 3.17
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2024-2026

URAIAN	PROYEKSI INDIKATIF ANGGARAN DAERAH		
	TAHUN		
	2024	2025	2026
PENDAPATAN	4.935.636.695.000	5.079.390.410.700	5.307.818.311.000
Pendapatan Asli Daerah	1.614.605.073.000	1.716.942.931.700	1.902.753.915.000
Pajak Daerah	1.247.452.245.000	1.328.432.675.000	1.491.110.910.000
Retribusi Daerah	98.190.557.000	109.974.618.000	123.171.572.000
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	75.224.987.000	78.986.236.000	82.935.548.000
Lain-lain PAD yang sah	193.737.284.000	199.549.402.700	205.535.885.000
Dana Perimbangan	3.247.139.999.000	3.288.511.521.000	3.331.084.077.000
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	54.861.209.000	55.958.433.000	57.077.602.000
Dana Alokasi Umum	1.875.956.650.000	1.876.894.585.000	1.877.833.050.000
Dana Alokasi Khusus	1.308.657.100.000	1.347.916.813.000	1.388.354.318.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.665.040.000	7.741.690.000	7.819.107.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	73.891.623.000	73.935.958.000	73.980.319.000
Hibah	73.891.623.000	73.935.958.000	73.980.319.000
Dana Darurat			
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya **)			
Pendapatan Lainnya			
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
BELANJA	5.002.614.225.950	4.894.317.017.627	5.065.630.989.488
Belanja Operasi	3.629.486.868.350	3.533.069.166.227	3.665.141.227.488
Belanja Pegawai	2.052.268.897.000	2.145.186.692.627	2.270.795.113.588
Belanja Barang dan Jasa	1.392.807.096.950	1.192.199.632.000	1.192.478.072.000
Belanja Bunga	76.534.400.000	83.422.412.000	90.930.428.000
Belanja Hibah	80.217.674.400	80.618.762.400	81.021.856.000
Belanja Bantuan Sosial	27.658.800.000	31.641.667.200	29.915.757.900
Belanja Modal	406.041.708.600	381.209.453.700	403.610.870.500
Tanah	-	-	-
Peralatan dan Mesin	67.591.255.000	69.618.993.000	71.707.562.000
Gedung dan Bangunan	196.854.187.600	188.822.729.700	200.810.956.500
Jalan, Jaringan dan Irigasi	138.553.306.000	119.694.342.000	127.988.229.000
Aset Tetap Lainnya	3.042.960.000	3.073.389.000	3.104.123.000
Belanja Tidak Terduga	136.196.697.000	137.558.663.700	138.934.250.000
Belanja Tidak Terduga	136.196.697.000	137.558.663.700	138.934.250.000
Belanja Transfer	830.888.952.000	842.479.734.000	857.944.641.500
Belanja Bagi Hasil	790.605.621.000	801.994.986.000	817.257.469.500
Belanja Bantuan Keuangan	40.283.331.000	40.484.748.000	40.687.172.000
SURPLUS/(DEFISIT)	-66.977.530.950	185.073.393.073	242.187.321.512

URAIAN	PROYEKSI INDIKATIF ANGGARAN DAERAH		
	TAHUN		
	2024	2025	2026
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	493.832.090.000	7.500.000.000	8.175.000.000
Penerimaan pinjaman daerah			
Pencairan Dana Cadangan	486.250.000.000		
Investasi non permanen		7.500.000.000	7.500.000.000
Penerimaan kembali pinjaman daerah	7.582.090.000	0	675.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	426.854.559.050	192.573.393.073	250.362.321.512
Pembentukan dana cadangan	166.375.003.050		
Penyertaan Modal	92.000.000.000	21.593.837.073	81.882.765.512
Investasi non permanen	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Pembayaran pokok hutang	163.479.556.000	163.479.556.000	163.479.556.000
Pemberian pinjaman daerah	0	2.500.000.000	0
Pembiayaan Netto	66.977.530.950	-185.073.393.073	-242.187.321.512
SILPA / (SIKPA)	-		-

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai penghitungan kerangka pendanaan dengan tujuan untuk mengetahui kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya.

Tabel 3.18
Kapasitas Riil Keuangan Daerah

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN		
		2024	2025	2026
1	Pendapatan Daerah	4.935.636.695.000	5.079.390.410.700	5.307.818.311.000
2	Pencairan Dana Cadangan	486.250.000.000		
3	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	7.582.090.250		675.000.000
4	SiLPA			
TOTAL PENERIMAAN DAERAH		5.429.468.785.250	5.079.390.410.700	5.308.493.311.000
Dikurangi :				
1	Belanja Wajib Mengikat	2.950.141.984.000	3.112.262.139.000	3.283.522.453.000
2	Pengeluaran Pembiayaan	426.854.559.050	192.573.393.073	250.362.321.512
	Kapasitas riil Keuangan daerah	2.052.472.242.200	1.774.554.878.627	1.774.608.536.488

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022

Kapasitas riil keuangan daerah selanjutnya dibagi dalam prioritas belanja, yaitu : prioritas 1 digunakan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), dan prioritas 2 untuk membiayai program pembangunan daerah guna mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, sesuai tupoksi masing-masing perangkat daerah.

Tabel 3. 19
Penggunaan Kapasitas Riil Keuangan Daerah

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN		
		2024	2025	2026
	Kapasitas riil keuangan daerah			
1	Prioritas I	1.231.483.345.320	1.064.732.927.176	1.064.765.121.893
2	Prioritas II	820.988.896.880	709.821.951.451	709.843.414.595
	TOTAL	2.052.472.242.200	1.774.554.878.627	1.774.608.536.488

Sumber: Badan Keuangan Daerah, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda Provinsi NTT, 2022

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kerangka pendanaan pembangunan dan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan, dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Provinsi NTT
Tahun 2024-2026

URAIAN	PROYEKSI INDIKATIF ANGGARAN DAERAH		
	TAHUN		
	2024	2025	2026
PENDAPATAN	4.935.636.695.000	5.079.390.410.700	5.307.818.311.000
Pendapatan Asli Daerah	1.614.605.073.000	1.716.942.931.700	1.902.753.915.000
Pajak Daerah	1.247.452.245.000	1.328.432.675.000	1.491.110.910.000
Retribusi Daerah	98.190.557.000	109.974.618.000	123.171.572.000
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan	75.224.987.000	78.986.236.000	82.935.548.000
Lain-lain PAD yang sah	193.737.284.000	199.549.402.700	205.535.885.000
Dana Perimbangan	3.247.139.999.000	3.288.511.521.000	3.331.084.077.000
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	54.861.209.000	55.958.433.000	57.077.602.000
Dana Alokasi Umum	1.875.956.650.000	1.876.894.585.000	1.877.833.050.000
Dana Alokasi Khusus	1.308.657.100.000	1.347.916.813.000	1.388.354.318.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7.665.040.000	7.741.690.000	7.819.107.000
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	73.891.623.000	73.935.958.000	73.980.319.000
Hibah	73.891.623.000	73.935.958.000	73.980.319.000
Dana Darurat			
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya **)			
Pendapatan Lainnya			
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
BELANJA	5.002.614.225.950	4.894.317.017.627	5.065.630.989.488
Belanja Operasi	3.629.486.868.350	3.533.069.166.227	3.665.141.227.488
Belanja Pegawai	2.052.268.897.000	2.139.073.704.800	2.264.597.704.000
Belanja Barang dan Jasa	1.392.807.096.950	1.198.312.619.827	1.198.675.481.588
Belanja Bunga	76.534.400.000	83.422.412.000	90.930.428.000
Belanja Hibah	80.217.674.400	80.618.762.400	81.021.856.000
Belanja Bantuan Sosial	27.658.800.000	31.641.667.200	29.915.757.900

URAIAN	PROYEKSI INDIKATIF ANGGARAN DAERAH		
	TAHUN		
	2024	2025	2026
Belanja Modal	406.041.708.600	381.209.453.700	403.610.870.500
Tanah	-	-	-
Peralatan dan Mesin	67.591.255.000	69.618.993.000	71.707.562.000
Gedung dan Bangunan	196.854.187.600	188.822.729.700	200.810.956.500
Jalan, Jaringan dan Irigasi	138.553.306.000	119.694.342.000	127.988.229.000
Aset Tetap Lainnya	3.042.960.000	3.073.389.000	3.104.123.000
Belanja Tidak Terduga	136.196.697.000	137.558.663.700	138.934.250.000
Belanja Tidak Terduga	136.196.697.000	137.558.663.700	138.934.250.000
Belanja Transfer	830.888.952.000	842.479.734.000	857.944.641.500
Belanja Bagi Hasil	790.605.621.000	801.994.986.000	817.257.469.500
Belanja Bantuan Keuangan	40.283.331.000	40.484.748.000	40.687.172.000
SURPLUS/(DEFISIT)	-66.977.530.950	185.073.393.073	242.187.321.512
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	493.832.090.000	7.500.000.000	8.175.000.000
Penerimaan pinjaman daerah			
Pencairan Dana Cadangan	486.250.000.000		
Investasi non permanen		7.500.000.000	7.500.000.000
Penerimaan kembali pinjaman daerah	7.582.090.000	-	675.000.000
Pengeluaran Pembiayaan	426.854.559.050	192.573.393.073	250.362.321.512
Pembentukan dana cadangan	167.260.800.000		
Penyertaan Modal	91.114.203.050	21.593.837.073	81.882.765.512
Investasi non permanen	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Pembayaran pokok hutang	163.479.556.000	163.479.556.000	163.479.556.000
Pemberian pinjaman daerah	-	2.500.000.000	-
Pembiayaan Netto	66.977.530.950	-185.073.393.073	-242.187.321.512
SILPA / (SIKPA)	0	0	0

Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, Tahun 2022, diolah oleh Tim Ekonomi Bappelitbangda, Badan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT

Sam Dgn Standar Data Tahun 3.17

Pencapaian indikator dan target pembangunan yang telah ditetapkan dengan input berupa anggaran sesuai pagu indikator dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana pada Tabel 7.2.

ME

Tabel 7.2
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2024-2026

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
X		NON URUSAN													
X	XX	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	%	-	100	2.155.842.681.866	100	2.102.267.232.065	100	2.175.907.830.972	100			
			Meningkatnya sarana dan prasarana	%		100		100		100		100	100	Semua Perangkat Daerah	
			Tercapainya penyusunan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja dan keuangan	%		100		100		100		100	100	Semua Perangkat Daerah	
1		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
1	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan													
1	1	2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.038.874.781.169		1.045.701.881.196		1.082.331.911.686				
			Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilih Gender)	%	76,00	80,00		82,00		85,00		87,00	87,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
			Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB	%	74,85	76,85		78,00		80,00		82,00	82,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
			Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	%	75,00	85,00		90,00		95,00		97,00	97,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
1	1	3 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				7.000.000.000		23.907.901		24.745.374				
			1. Cakupan SMA berakreditasi B (554 Unit)	%	41,16	45,13		54,15		63,18		72,20	72,20	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
			2. Cakupan SMK berakreditasi B (295 unit)	%	38,31	44,07		50,85		84,75		88,14	88,14	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	
			3. Cakupan SLB berakreditasi B (32 unit)	%	0,00	6,00		13,00		19,00		19,00	19,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			4. Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan Menengah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
			5. Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan Khusus	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				25.000.000		25.000.000		25.000.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
			1. Cakupan Ketersediaan Guru SMA berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (16.164 orang)	%	1,10	27,44		28,06		28,67		29,08	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
			2. Cakupan Ketersediaan Guru SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (8.024 orang)	%	27.94	28,60		2922		29,91		30,53	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
			3. Cakupan Ketersediaan Guru SLB berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (847 orang)	%	0,80	20,07		0,8791666 67		21.25		0,917361111	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PERIZINAN PENDIDIKAN				25.000.000		25.000.000		25.000.000		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
			Jumlah Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.	%	26.67	53,00		67,00		80,00		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				230.452.640		230.452.640		230.452.640				
			Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturnannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan sastra)	%	66,67	75,00		83,33		91,67		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
1	2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan													
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				183.200.970.024		139.178.770.469		144.054.082.159				
			Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Persentase Balita Stunting	Per센 (%)	17,70	15,70		13,50		11,50		11,50	11,50	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Persentase Balita Wasting	Per센 (%)	20,50	19,50		18,50		17,50		17,50	17,50	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Persentase Balita Underweight	Per센 (%)	8,50	7,50		7,00		6,50		6,50	6,50	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Angka Kematian Ibu	Kasus/1 00.000 KH	192/100.000 KH	172/100.000 KH		152/100.00 KH		132/100.00 KH		132/100.000 KH	132/100.000 KH	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Angka Kematian Bayi	Kasus/1 000 KH	10/1.000 KH	9/1.000 KH		8/1.000 KH		7/1.000 KH		7/1.000 KH	7/1.000 KH	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Angka Kematian Balita	Kasus/1 000 KH	12/1.000 KH	11/1.000 KH		10/1.000 KH		9/1.000 KH		9/1.000 KH	9/1.000 KH	Dinas Kesehatan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Persentase Rumah Sakit Terakreditasi	%	83,90	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria	%	31,81	70,00		80,00		90,00		90,00	90,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85%	%	89,00	85,00		85,00		85,00		85,00	85,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Persentasi Kasus HIV Yang diobati	%	56,00	58,00		60,00		62,00		62,00	62,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar	%	50,00	60,00		65,00		70,00		70,00	70,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	% (Kab/Kot a)	0,00	36 (8 Kab/Kota)		63 (14 Kab/Kota)		63 (14 Kab/Kota)		63 (14 Kab/Kota)	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	%	50,00	70,00		90,00		100,00		100,00	Rs Jiwa Naimata Kupang		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					102.878.323.404		96.908.862.163		100.303.495.604				
			Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit	%	78,20	100,00		100,00		100,00		100,00	Rsud Prof. W.Z Johannes		
			Meningkatnya kemandirian BLUD RSU	%	45,00	52,00		52,00		52,00		52,00	Rsud Prof. W.Z Johannes		
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				7.922.452.800		24.239.264.875		25.088.345.313				
			Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	%	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata anak per Wanita	2,29 Rata- rata anak per Wanita	2,27 Rata- rata anak per Wanita		2,2					Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran n per 1000 WUS	20 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	18 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun		18 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun					Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Rsud Prof. W.Z Johannes		
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN				218.039.184		3.634.428.457		3.761.739.336				

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					100.000.000		100.000.000		100.000.000				
			Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Pengelolaan Persampahan TPA/ TPST/ SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	%	0,00	20,00		60,00		20,00		100,00	Dinas PUPR			
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					2.690.000.000		2.690.000.000		2.690.000.000				
			Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional yang Disusun	%	0,00	60,00		20,00		20,00		100,00	Dinas PUPR			
			Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak	%	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas PUPR			
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					25.000.000		25.000.000		25.000.000				
			Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	%	0,00	0,00	0,00	75,00		25,00		100,00	Dinas PUPR			
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					1.600.000.000		6.694.212.028		6.928.704.473				
			Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman pada KSDP	Lokasi	26,00	1,00		2,00		2,00		5,00	Dinas PUPR			
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					100.000.000		100.000.000		100.000.000				
			Persentase Layanan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Pengelolaan Rumah Negara	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas PUPR			
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					100.000.000		100.000.000		100.000.000				
			Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di KSDP dan	%	0,00	33,33		33,33		33,33		100,00	Dinas PUPR			

AE

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			Lintas Kabupaten/ Kota yang disusun													
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				128.855.427.591		134.835.814.402		139.558.996.105					
			Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	%	86,86	86,86		86,86		86,86		86,86	Dinas PUPR			
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				100.000.000		100.000.000		100.000.000					
			Ratio Tenaga Kerja Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli	%	60,73	63,84		66,94		70,04		70,04	Dinas PUPR			
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				200.000.000		765.052.838		791.851.976					
			Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	%	0,00	43,48		86,96		100,00		100,00	Dinas PUPR			
			Persentase Peningkatan Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang	%	0,00	30,00		60,00		100,00		100,00	Dinas PUPR			
1	4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman														
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				840.000.000		96.630.839		98.980.705					
			Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena lokasi rumah program pemerintah provinsi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas PUPR			
			Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena bencana tingkat provinsi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas PUPR			
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				2.112.500.000		2.112.500.000		2.112.500.000					
			Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	%	100,00	95,00		93,00		88,00		88,00	Dinas PUPR			
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)				577.500.000		577.500.000		577.500.000					
			Persentase Lingkungan yang	%	4,55	4,55		18,18		22,73		22,73	Dinas PUPR			

AE

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			didukung Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)													
1	5	1	Urusan Ketenteraman. Ketenteraman Umum Dan Linmas													
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.808.842.261			2.030.380.250		2.101.502.711			
			Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	91,49	100,00		100,00			100,00		100,00	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.419.687.500			1.357.669.940		1.405.227.941			
			Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan	%	80 (4 Dokumen)	100,00		0,00			0,00		100 (5 Dokumen)	BPBD		
			Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana	%	60 (6 Lokasi)	80,00		100,00			0,00		100 (10 Lokasi)	BPBD		
			Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	%	87,5 (140 Desa/ Kelurahan)	93,75		100,00			0,00		100 (160 Desa/ Kelurahan)	BPBD		
			Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih	%	18,18 (40 orang)	45,45		72,73			100,00		100 (220 orang)	BPBD		
			Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki buffer stok logistik	%	100 (22 Kabupaten/ Kota)	100,00		100,00			100,00		100 (22 Kabupaten/ Kota)	BPBD		
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					52.000.000			52.597.382		54.439.823			
			Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	%	57,62	100,00		100,00			100,00		100,00	Satuan Polisi Pamong Praja		
1	6	1	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial													
1	6	2	PROGRAM PEMERDAYAAN SOSIAL													
			Persentase peningkatan mutu dan kemampuan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)					3.457.000.000			1.328.131.728		1.374.655.031			
				%	80,00	80,00		90,00			100,00		100,00	Dinas Sosial		
1	6	3	PROGRAM	Persentase warga negara						23.907.901			24.745.374			

AE

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
		PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	migran yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya				260.000.000								
1	6	4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	%	90,00	100,00		100,00		100,00			100,00	Dinas Sosial	
				%	100,00	100,00		10.300.000.000		10.048.152.917			10.400.131.004		
1	6	5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase aksesibilitas masyarakat miskin yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%				13.524.000.000		31.874.013.895			32.990.532.974		
1	6	6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA		%	80,00	90,00		90,00		90,00			90,00	Dinas Sosial	
			Persentase korban bencana alam dan sosial daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100,00	100,00		100.000.000		23.984.406			24.824.559		
1	6	7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					529.000.000		23.907.901				24.745.374		
			Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dan Makam Pahlawan Nasional Provinsi	%	100,00	80,00		90,00		90,00			100,00	Dinas Sosial	
2		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
2	7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja													
2	7	3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					150.000.000		150.000.000			150.000.000			
			Cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	%	70,00	90,00		92,00		95,00			95,00	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	7	4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					519.662.000		519.662.000			550.000.000			
			Persentasi penempatan tenaga kerja di pasar kerja	%	70,00	75,00		78,00		78,00			78,00	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	

AS

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					365.000.000		334.708.000		350.061.000				
				Percentase Perusahaan yang membentuk Sarana Hubungan Industrial	%	11,17	12,40		13,63		14,86		14,86	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
2	7	6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN					300.000.000		300.000.000		300.000.000				
				Percentase Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja	%	-	45,00		67,00		70,00		70,00	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
2	8		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak													
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					3.000.000		3.000.000		3.000.000				
				Cakupan OPD Provinsi NTT yang Melaksanakan PPRG	%	84,61	95,00		97,00		100,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					448.681.400		369.334.326		382.271.787				
				Percentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	%	80,00	90,00		95,00		100,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					5.000.000		5.000.000		5.000.000				
				Cakupan Kabupaten / Kota yang melaksanakan tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	%	27,00	64,00		82,00		100,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					3.000.000		3.000.000		3.000.000				
				Cakupan ketersediaan data terpilah di OPD lingkup Provinsi	%	10,00	15,00		18,00		20,00		20,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK					5.000.000		5.000.000		5.000.000				
				Peningkatan Cakupan	%	4,50	9,00		13,50		18,00		18,00	Dinas		

AP

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
		Kabupaten/Kota Layak Anak												Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2	8	7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					83.788.000		80.127.809		82.934.616				
		Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar	%	80,00	90,00			95,00		100,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
2	9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan													
2	9	3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					862.000.000		849.070.000		962.000.000				
		Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan	%	13,00	20,00			25,00		30,00		30,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
2	9	4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					300.000.000		295.500.000		300.000.000				
		Persentase daerah rentan rawan pangan	%	25,88	24,50			24,00		23,50		-	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
2	9	5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					300.000.000		295.500.000		300.000.000				
		Persentase Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan	%	12,00	20,00			25,00		30,00		30,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
2	10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan													
2	10	3 PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM					45.000.000		45.000.000		45.000.000				
		Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu	%	0,00	33,33			33,33		33,33		100,00	Dinas PUPR		
2	10	7 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					135.000.000		135.000.000		135.000.000				
		Persentase Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	13,64	18,18			18,18		18,18		68,18	Dinas PUPR		
2	11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan													

6e

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			Hidup													
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					24.463.142		23.907.901		24.745.374				
			Percentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH	%	-	50,00		75,00		100,00			100,00	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup		
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					490.505.567		479.372.545		496.164.550				
			Percentase pelayanan pengujian laboratorium	%	-	100,00		100,00		100,00			100,00	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup		
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					984.355.840		962.013.882		995.712.395				
			Percentase limbah B3 yang diolah	%	11,18	25,00		30,00		33,00			33,00	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup		
2	12		Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil													
2	12	4	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					637.070.600		262.979.645		272.191.594				
			Cakupan Kepemilikan KTP elektronik untuk penduduk wajib KTP	%	97,00	98,00		99,00		100,00			100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Cakupan penduduk <17 tahun memiliki kartu identitas anak	%	80,00	82,00		83,00		85,00			100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Cakupan anak 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	%	90,00	95,00		100,00		100,00			100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan (Perjanjian Kerjasama dengan Perangkat	%	77,00	77,00		78,00		80,00			100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan		

AP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			Daerah = 15 PD)											Sipil		
2	12	5	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					25.000.000			25.000.000		25.000.000			
				Penyediaan Profil Kependudukan	%	0,00	100		100		100		100	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
2	13		Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa													
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan Kemasyarakatan di Desa (Jumlah Desa Persiapan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembang)				50.000.000		42.204.235		43.682.613				
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/ Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Desa	111 Desa	32 Desa Persiapan		24 Desa Persiapan		20 Desa Persiapan		433 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan				585.000.000		544.199.890		563.262.741				
				Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	141 Perpub	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kab/ Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1.454 BUMdes di 21 Kabupaten	21 Kabupaten	21 Kabupaten		21 Kabupaten		21 Kabupaten		21 Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		
2	13	5	PROGRAM PEMERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)				965.000.000		1.087.060.232		1.125.139.010				
				Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota		22 Kab/Kota		22 Kab/Kota		22 Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat													
			Jumlah alat TTG yang diproduksi	678 Unit	20 unit	20 unit		20 unit		20 unit			738 Unit	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		
			Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata anak per Wanita	2,29 Rata-rata anak per Wanita	2,27 Rata-rata anak per Wanita		2,2		-		-		Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS	20 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	18 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun		18 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun		-		-		Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
2	15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan														
2	15		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				3.896.352.824		478.794.067		495.565.508					
			Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	%	9,00	17,00		23,00		17,00		15,00		Dinas Perhubungan		
2	15	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				2.226.719.000		5.441.141.857		5.631.740.340					
			Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut	%	8,00	11,00		14,00		17,00		15,00		Dinas Perhubungan		
			Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	%	66,00	33,00		33,00		33,00		100,00		Dinas Perhubungan		
2	16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika														
2	16		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1.072.000.000		1.069.863.469		1.107.339.859					
			Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	88,38	85,00		90,00		95,00		95,00		Dinas Komunikasi Dan Informatika		
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				4.990.569.734		4.887.298.604		5.048.146.146					
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,28	2,50		2,70		3,00		3,00		Dinas Komunikasi Dan Informatika		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Internet berkualitas yang dikelola Dinas KOMINFO		PD	5,00	34,00		34,00		34,00		34,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika		
2	17		Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah													
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					2.736.326.000		2.618.807.700		2.796.065.000				
			Persentase koperasi aktif	%	93,00	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					158.182.000		99.421.900		188.051.000				
			Persentase SDM koperasi yang dilatih	%	5,00	8,00		8,00		8,00		8,00	8,00	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)					418.428.000		404.391.700		425.563.000				
			Persentase kelompok UMKM yang dibina	%	54,00	100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					5.390.928.000		4.595.068.059		5.398.063.000				
			Persentase kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/ pengolahan	%	3,00	9,00		9,00		10,00		10,00	10,00	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
2	18		Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal													
	18	1	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					60.000.000		50.000.000		55.000.000				
			Persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	%	61,38	61,38		100,00		100,00		100,00	100,00	DPMTSP		
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM					200.463.142		23.907.901		24.745.374				

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			PENANAMAN MODAL													
				Persentase Pertumbuhan Investor	%	30,00	35,00		40,00		45,00		45,00	DPMTSP		
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					195.705.136			191.263.209		197.962.994			
				Persentase Pertumbuhan calon investor yang mengurus ijin setiap tahun	%	60,00	65,00		70,00		75,00		75,00	DPMTSP		
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					212.583.763			110.028.445		113.882.646			
				Persentase ijin dan non ijin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SO	%	100,00	100,00		100,00		100,00			DPMTSP		
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					415.899.132			734.833.251		760.573.823			
				Persentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	DPMTSP		
2	19		Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga													
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					497.866.745			1.405.784.591		1.455.028.006			
				Jumlah wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dan Organisasi kepemudaan	orang	1438,00	250,00		250,00		250,00		750,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga		
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHARGAAN					7.000.000.000			5.833.690.722		6.038.039.852			
				Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan										Dinas Pemuda Dan Olahraga		
				Medali	Medali	200,00	50,00		50,00		50,00		150,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga		
				Cabor	Cabor	8,00	10,00		11,00		13,00		13,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga		
				Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik												
				Medali	Medali	30,00	15,00		25,00		35,00		75,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga		
				Cabor	Cabor Atletik	1,00	3,00		3,00		3,00		3,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga		
				Cabor Tradisional	Medali	-	5,00		5,00		5,00		5,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga		
				Cabor Rekreasi	Cabor	4,00	5,00		5,00		5,00		5,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga		

AP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				733.894.259		717.237.036		742.361.228				
					Organisasi (Kwartab)		7,00		8,00		8,00		23,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga		
2	20		Urusan Pemerintahan Bidang Statistik													
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					22.710.143		22.710.143		22.710.143				
				Persentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	%	79,49	85,00		90,00		95,00		95,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika		
2	21		Urusan Pemerintahan Bidang Persandian													
2	21	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					35.363.918		34.561.261		35.771.913				
				Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Level	II+	III		III +		III +		III +	Dinas Komunikasi Dan Informatika		
2	22		Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan													
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					2.089.297.525		2.089.297.525		2.089.297.525				
				Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Budaya Tak Benda 20 unit, Bahasa Daerah 68 unit)	%	89,77	92,05		95,45		98,86		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
				Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan	%	40,00	60,00		80,00		90,00		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					5.996.386.055		2.660.471.246		2.753.665.248				
				Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan.	%	40,00	60,00		80,00		90,00		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					330.000.000		38.836.909		40.186.982				
				Cakupan Sejarah Lokal dari setiap daerah yang dipublikasi	%	16,00	24,00		32,00		40,00		44,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		

AS

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			(Sanggar) Budaya 25 Unit)													
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				1.477.293.620		697.728.188		722.169.002					
			Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan (Cagar Budaya 2 buah, Desa Adat 25 buah)	%	25.93	37,04		74,07		92,59		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan			
2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				4.416.500.000		2.390.790.121		2.474.537.426					
			Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	%	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan			
2	23		Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan													
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				818.412.278		2.368.876.036		2.451.855.688					
			Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan e-library	%	60,00	75		90		100		100	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan			
			Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	%	25,00	50		75		100		100	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan			
			Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun	%	100,00	100		100		100		100	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan			
2	23	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				75.000.000		717.237.036		178.104.455					
			Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun	%	45,50	50,00		60,00		70,00		70,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan			
2	24		Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan													
2	24	2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP				761.500.000		353.989.594		366.389.543					
			Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan			
			Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan	Angka Pengawa san Arsip	0,00	60,00		70,00		80,00		80,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan			
2	24	3	PROGRAM						57.378.771		59.388.700					

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
		PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					108.500.000								
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
3		Urusan Pemerintahan Pilihan													
3	25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan													
3	25	2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN. PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				2.975.098.000		2.845.133.963		2.944.796.539				
			Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	Ha	701.545	790.420		790.420		803.326		803.326	DKP		
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				24.813.592.799		24.405.731.613		25.260.643.237				
			Produksi Perikanan Tangkap	Ton	186.364	200.000		205.000		210.000		210.000	DKP		
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				2.339.624.019		1.902.709.379		1.969.359.640				
			Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.404.233	1.620.000		1.749.600		1.889.568		1.889.568	DKP		
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.964.896.800		2.213.772.960		2.291.319.508				
			Percentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%	10,34	6,89		3,45		0		0	DKP		
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				121.838.158		116.515.785		120.597.232				
			Angka Konsumsi Ikan	kg/perka pita/tah un	45,92	56.00.00		58.00.00		60.00.00		60.00.00	DKP		
3	26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata													
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				519.769.719		342.230.799		354.218.847				
			Percentase destinasi yang ditangani/ dipelihara	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Disparekraf		

Ae

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi	%	NA	4,17		4,17		0,53		20,83	Disparekraf		
			Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Disparekraf		
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				900.000.000		1.045.314.358		1.081.930.814				
			Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun)	%		31,82		31,82		36,36		100	Disparekraf		
3	26	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				363.452.443		355.203.150		367.645.608				
			Cakupan produk ekraf yang yang mendapatkan HKI	%	N/A	33,33		33,33		33,33		100	Disparekraf		
			Persentase produk ekraf yang dipasarkan melalui media digital	%	0,00	33,33		33,33		33,33		100	Disparekraf		
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				258.599.071		252.729.639		261.582.539				
			Persentase tenaga kerja pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikasi	%		33,33		33,33		33,33		100	Disparekraf		
			Persentase tenaga kerja Ekonomi kreatif (Kriya dan Fashion) yang bersertifikat	%		33,33		33,33		33,33		100	Disparekraf		
3	27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian													
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				23.729.211.175		18.532.830.101		19.182.019.075				
			Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Besar	%	6,10	5,01		6,68		6,11		6,11	Dinas Peternakan		
			Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Kecil	%	11,00	11,32		11,37		11,48		11,48	Dinas Peternakan		
			Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Unggas	%	5,80	5,52		5,98		6,05		6,05	Dinas Peternakan		

AE

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			Persentase Konsumsi Daging	%	9,11	9,61		10,11		10,61		10,61	Dinas Peternakan		
			Persentase Konsumsi Telur	%	3,00	3,20		3,40		3,60		3,60	Dinas Peternakan		
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				18.808.734.165		23.369.160.838		24.005.704.824					
			Produksi Tanaman Padi	Ton	772.475	847.240,27		889.602,28		934.082,40		934.082,40	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
			Produksi Tanaman Jagung	Ton	654.921,04	869.618,32		913.099,23		958.754,20		958.754,20	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
			Produksi Tanaman Sorgum	Ton	3.274,95	3.610,63		3.791,16		3.980,72		3.980,72	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
			Produksi kedelai	Ton	1.030	2.654,43		2.787,16		2.926,51		2.926,51	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
			Produksi kacang hijau	Ton	7.470,00	12.126,12		12.732,43		13.369,05		13.369,05	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
			Produksi Tanaman Jeruk	Ton	46.474	65.770,46		69.058,99		72.511,94		72.511,94	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
			Produksi Tanaman Mangga	Ton	81.997	101.061,82		106.114,91		111.420,66		111.420,66	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
			Produksi Tanaman Bawang Merah	Ton	5.715	13.230,50		13.892,02		14.586,62		14.586,62	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
			Produksi Tanaman Cabe	Ton	8.359	6.269,70		6.583,18		6.912,34		6.912,34	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
			Produksi Tanaman Kelapa	Ton	67.857,00	71.065,97		73.197,95		75.393,89		75.393,89	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
			Produksi Tanaman Kopi	Ton	26.256,00	28.229,32		29.076,20		29.948,49		29.948,49	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
			Produksi Tanaman Kakao	Ton	20.787,00	22.502,89		23.177,97		23.873,31		23.873,31	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
			Produksi Tanaman Jambu Mete	Ton	53.007,00	57.382,95		59.104,44		60.877,57		60.877,57	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
			Produksi Tanaman Cengkeh	Ton	5.699,00	4.419,00		4.551,57		4.688,12		4.688,12	Dinas Pertanian Dan Ketahanan		

AE

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
														Pangan		
			Produksi Tanaman (daun basah)	Ton	3.000,00	3.713,15		3.824,54		3.939,28			3.939,28	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
			Cakupan penggunaan benih bersertifikat	%	100,00	100,00		100,00		100,00			100,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
			Cakupan Penggunaan Pupuk	%	13,00	17,00		19,00		21,00			21,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
			Rasio ketersediaan alsintan	%	13,00	13,79		14,20		14,63			14,63	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				105.000.000		98.500.000		120.000.000					
			Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar	%	100,00	100,00		100,00		100,00			100,00	Dinas Peternakan		
			Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik	%	0,00	75,00		80,00		85,00			85,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				840.128.076		501.826.643		519.405.196					
			Persentase Ternak yang sehat	%	80,00	80,00		80,00		80,00			80,00	Dinas Peternakan		
			Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	Unit	38,00	43,00		48,00		53,00			53,00	Dinas Peternakan		
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				1.125.000.000		1.030.500.000		1.050.000.000					
			Persentase areal serangan OPT yang dikendalikan	%	56,00	75,00		75,00		75,00			75,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1.450.000.000		1.295.500.000		1.450.000.000					
			Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Pemula)	%	71,45	86,45		4,03		100,00			100,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
			Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Lanjut)	%	70,67	78,01		89,00		100,00			100,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		

Al

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
				Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Madya)	%	51.75	64.91		3,45		100,00		100,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
				Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Utama)	%	30,00	33,33		66.67		100,00		100,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
3	28		Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan													
3	28	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN					18.197.672.189		17.784.639.007		18.407.619.496				
				Persentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	%	-	1,30		1,32		1,32		1,32	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan		
3	28	4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					17.363.057		16.968.967		17.563.375				
				Persentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	%	-	10,99		10,99		10,99		10,99	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan		
3	28	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					97.585.333		95.370.434		98.711.178				
				Persentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	%	15,39	15.43		15.47		15.51			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan		
3	29		Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral													
3	29	2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					657.955.520		589.185.418		609.824.073				
				Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun	%	30,00	40,00		60,00		100,00		100,00	Dinas ESDM		
				Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 = 41 Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 = 59 Rekomendasi Teknis)	%	25,00	50,00		75,00		100,00		100,00	Dinas ESDM		
3	29	3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					730.730.920		456.667.422		472.664.086				
				Persentase Potensi sumber	%	16,00	17,00		19,00		22,00		22,00	Dinas ESDM		

AP

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
				daya mineral yang terkelola (Tahun 2019=12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenis)												
3	29	5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKN					25.000.000		25.000.000		25.000.000				
				Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik berbasis EBT setiap tahun	% (KW)	17,00	20,00		30,48	84.854.234.070	35,00	87.826.604.338	35,00	Dinas Esdm		
3	29	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					88.050.247.971		1.825.027.522		1.888.956.654				
				Presentase Cakupan Rumah Tangga yang terlayani listrik	Unit	89,01	93,00		94,00		95,00		95,00	Dinas ESDM		
3	30		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan													
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					35.000.000		35.000.000		35.000.000				
				Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	%	45,00	45,00		49,00		51,00		51,00	Disperindag		
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					138.615.068		23.907.614		24.745.077				
				Persentase rata-rata kenaikan barang pokok per tahun	%	3 s/d 10	3 s/d 10		3 s/d 10		3 s/d 10		3 s/d 10	Disperindag		
				Persentase rata-rata kenaikan barang penting per tahun	%	3 s/d 10	3 s/d 10		3 s/d 10		3 s/d 10		3 s/d 10	Disperindag		
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					50.000.000		50.000.000		50.000.000				
				Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Eksport	%	16,67	28,57		11,11		20,20		20,20	Disperindag		
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					500.341.666		838.519.141		867.891.740				
				Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen	%	53,00	60,00		65,00		70,00		70,00	Disperindag		
				Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian	%	17,65	20,00		25,00		30,00		30,00	Disperindag		
3	30	7	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK					899.916.614		956.316.048		989.814.970				

AE

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			DALAM NEGERI													
				Nilai transaksi produk yang dipasarkan	%	40,00	60,00		80,00		100,00		100,00	Disperindag		
3	31	1	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian													
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					270.561.372		264.420.431		273.682.849				
				Pertumbuhan industri pengolahan	%	1,25	1,50		1,75		2,00		2,00	Disperindag		
3	31	3	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					42.502.100		42.502.100		42.502.100				
				Peningkatan ketataan ijin usaha industri	%	13,00	15,00		17,00		20,00		20,00	Disperindag		
3	31	4	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					50.000.000		50.000.000		50.000.000				
				Kesesuaian data informasi industri dalam mendukung Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	%	35,00	37,00		39,00		41,00		41,00	Disperindag		
3	32	1	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi													
3	32	2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					275.000.000		225.000.000		275.000.000				
				Persentase Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	%	75,00	89,00		90,00		92,00		92,00	Dinas Koperasi, Nakertrans		
3	32	3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					535.000.000		500.000.000		437.776.282				
				Persentase Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	%	75,00	89,00		90,00		92,00		92,00	Dinas Koperasi, Nakertrans		
3	32	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					464.229.000		400.000.000		475.000.000				
				Persentase unit pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya	%	75,00	89,00		90,00		92,00		92,00	Dinas Koperasi, Nakertrans		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
4			Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan													
4	1		Sekretariat Daerah													
4,00	1,00	1,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					25.000.000			25.000.000		25.000.000			
			Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	%	85,00	100,00			100,00			100,00		100,00	Biro Administrasi Pimpinan	
			Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokolan	%	85,00	100,00			100,00			100,00		100,00	Biro Administrasi Pimpinan	
			Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	%	85,00	100,00			100,00			100,00		100,00	Biro Administrasi Pimpinan	
4,00	1,00	1,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					25.000.000			25.000.000		25.000.000			
			Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten	%	100 (180 kegiatan)	100 (180 kegiatan)			100,00			100,00		100,00	Biro Umum	
4	1	2	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI					632.137.500			617.789.845		639.430.488			
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai=80-90)	%	39,39	45,45			51,51			57,57		57,57 (19 PD)	Biro Organisasi	
			Level Maturitas Kelembagaan	Nilai	40,67	45,00			47,00			49,00		49,00	Biro Organisasi	
			Indeks Pelayanan Publik	Nilai	2,81 (Cukup)	2,85 (Cukup)			3,1 (Baik)			3,2 (Baik)		3,2 (Baik)	Biro Organisasi	
			Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik	%	0,00	15,15			30,30			45,45		45,45 (15 PD)	Biro Organisasi	
4	1	3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH					820.319.213			18.700.399		29.783.269			
			Persentase cakupan tugas- tugas administrasi kewilayahannya	%	100,00	100,00			100,00			100,00		100,00	Biro Pemerintahan	
			Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD	%	100,00	100,00			100,00			100,00		100,00	Biro Pemerintahan	
			Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan	%	100,00	100,00			100,00			100,00		100,00	Biro Pemerintahan	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
				Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan penyelenggaraan pemerintahan	%	100,00	100,00		100,00		100,00			100,00	Biro Pemerintahan	
				Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi	%	100,00	100,00		100,00		100,00			100,00	Biro Pemerintahan	
4	1	4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT					8.796.475.476			8.596.821.574			8.897.960.782		
				Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	%	100,00	100,00		100,00		100,00			100,00	Biro Pemerintahan	
4	1	5	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM					782.820.540			765.052.838			791.851.976		
				Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	%	312,26	100,00		100,00		100,00			100,00	Biro Hukum	
				Cakupan penanganan kasus Litigasi, Non-Litigasi dan HAM setiap tahun	%	526,60	100,00		100,00		100,00			100,00	Biro Hukum	
4	1	6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					562.652.782			549.882.053			569.143.944		
				Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (kebijakan ekonomi makro-mikro dan SDA)	%	100,00	100,00		100,00		100,00			100,00	Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	
				Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik	%	100,00	100,00		100,00		100,00			100,00	Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	
4	1	7	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					6.239.980.846			6.098.349.788			6.311.969.695		
				Persentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa	%	85,00	100,00		100,00		100,00			100,00	Biro PBJ	
				Persentase jumlah paket pengadaan langsung yang dilakukan melalui e-Purchasing	%	90,00	100,00		100,00		100,00			100,00	Biro PBJ	
				Persentase JF Pengelola PBJ	%	44,00	64,00		84,00		100,00			100,00	Biro PBJ	
4	1	8	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI					97.852.345			95.631.356			98.981.239		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			PEMBANGUNAN													
				Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	%	99,99	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan		
4	2		Sekretariat DPRD													
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					74.676.943.331		67.501.647.751		69.866.171.961				
				Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	99,40	100,00		100,00		100,00		100,00	Sekretariat Dprd Provinsi Ntt		
5			Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan													
5	1		Perencanaan													
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.997.630.556		1.952.290.268		2.020.677.304				
				Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	%	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Bappelitbangda		
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					4.806.925.005		4.697.822.066		4.862.382.701				
				Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPd, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Bappelitbangda		
5	2		KEUANGAN													
5	2	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					910.292.801.356		889.837.088.500		921.007.310.405				
				Persentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundang – undangan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Badan Keuangan Daerah		

AE

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
				Persentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	%	100,00	100,00		100,00		100,00			100,00	Badan Keuangan Daerah	
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					2.255.000.000			1.616.172.783		1.672.785.914			
				Persentase penatausahaan Barang Milik Daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00			100,00	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	
				Persentase pemanfaatan aset	%	100,00	100,00		100,00		100,00			100,00	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	
				Persentase Pemindahtempahan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00			100,00	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					15.025.000.000			13.803.062.032		14.286.571.331			
				Persentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	%	19,41 (2021, audited)	22,00		23,00		24,00			24,00	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	
5	3		Kepegawaian													
5	3	2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					3.824.047.207			3.737.252.677		3.868.165.399			
				Persentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	%	80,00	85,00		95,00		90,00				Badan Kepegawaian daerah	
				Persentase Penurunan indisipliner ASN	%	85,00	90,00		90,00		95,00				Badan Kepegawaian daerah	
				Persentase Capaian Kinerja "BAIK" ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	%	90,00	95,00		95,00		95,00				Badan Kepegawaian daerah	
				Persentase Penurunan indisipliner ASN	%	85,00	90,00		95,00		95,00				Badan Kepegawaian daerah	
5	4		Pendidikan Dan Pelatihan													
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					20.034.920.941			20.265.994.542		20.975.894.765			
				Predikat akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	Predikat Akreditasi	B	A		A		A			A	BPSDM	
				Akkreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS	Predikat Akreditasi	B	A		A		A			A	BPSDM	
				Akkreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Predikat Akreditasi	B	B		A		A			A	BPSDM	
				Akkreditasi Program Pelatihan	Predikat	B	B		A		A			A	BPSDM	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			Kepemimpinan Administrator	Akreditasi											
			Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional	%	-	20,00		40,00		60,00		60,00	BPSDM		
			Pelatihan sesuai standar	%	60,00	100,00		100,00		100,00		100,00	BPSDM		
			Pelatihan sesuai kebutuhan	%	60,00	100,00		100,00		100,00		100,00	BPSDM		
			Tersertifikasinya tenaga pelatihan pada BPSDMD	%	90,00	100,00		100,00		100,00		100,00	BPSDM		
			Terisinya formasi jabatan fungsional widyaiswara sesuai formasi	%	-	100,00		100,00		100,00		100,00	BPSDM		
			Tersedianya tenaga ahli atau narasumber sesuai kebutuhan pelatihan	%	-	100,00		100,00		100,00		100,00	BPSDM		
5	5	Penelitian Dan Pengembangan													
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				1.185.128.297		1.158.229.399		1.198.801.170				
			Persentase Rekomendasi Hasil Kelibangan serta Fasilitasi Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	%	0,00	100,00		96,55		100,00		100,00	Bappelitbangda		
5	6	Pengelolaan Perbatasan													
5	6	2	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN				975.333.326		765.052.743		791.851.877		Badan Perbatasan Daerah		
			Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL)	%	100,00	3 Dok		3 Dok		3 Dok		9 Dok	Badan Perbatasan Daerah		
			Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	%	100,00	4 Dok		4 Dok		4 Dok		12 Dok	Badan Perbatasan Daerah		
			Meningkatnya Cakupan Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan	%	100,00	4 Dok		4 Dok		4 Dok		12 Dok	Badan Perbatasan Daerah		
5	7	Pengelolaan Penghubung													
5	7	2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				591.301.000		589.764.888		610.423.841		Badan Penghubung		
			Meningkatnya Cakupan Pembinaan Masyarakat	%	100,00	80,00		90,00		100,00		100	Badan Penghubung		
			Meningkatnya cakupan layanan Pemerintah Daerah	%	80,00	80,00		90,00		100,00		100	Badan Penghubung		

Ae

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			Meningkatnya cakupan Promosi Daerah	%	100,00	80,00		90,00		100,00			100	Badan Penghubung		
6			Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan													
6	1		Inspektorat Daerah													
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWSASAN				5.767.233.792		5.637.588.831		5.835.068.681			Inspektorat Daerah		
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP		WTP		WTP			WTP	Inspektorat Daerah		
			Percentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pada PD di Provinsi dan Kabupaten/Kota	%	100,00	100		100		100			100	Inspektorat Daerah		
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				1.759.284.468		1.722.986.304		1.783.341.021					
			Percentase Pendampingan dan Asistensi pada PD di Provinsi	%	100,00	100		100		100			100	Inspektorat Daerah		
8			Unsur Pemerintahan Umum													
8	1		Kesatuan Bangsa Dan Politik													
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				75.630.759		73.914.164		76.503.313					
			Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi siswa/wi Tingkat SMA/SMU sederajat, Pengurus Parpol, Ormas dan FPK, FKUB, FKDM	%	100,00	70,00		80,00		87,00			100,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah		
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				3.920.549.243		3.831.564.404		3.965.780.783					
			Presentase Peningkatan Pendidikan politik bagi siswa/wi tingkat SMA/SMU sederajat, Pemilih Perempuan, Ormas, Pengurus Parpol, FPK, FKUB, FKDM	%	3,60	73,00		81,00		88,00			100,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah		
8	1	4	PROGRAM						39.603.916		40.991.207					

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
		PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					40.523.684								
			Presentase Peningkatan Pengawasan dan Pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan Ijin penelitian.	%	65,30	70,00		75,00		81,00		100,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah		
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL. DAN BUDAYA				263.246.501		257.271.586		266.283.586				
			Presentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Bagi Ormas	%	100,00	70,00		79,00		93,00		100,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah		
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				2.289.003.786		2.237.050.190		2.315.412.119				
			Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan meningkatnya Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	%	100,00	63,00		75,00		88,00		100,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah		
			TOTAL NON URUSAN (A)				2.155.842.681.866		2.102.267.232.065		2.175.907.830.972				
			TOTAL URUSAN (B)				2.846.771.544.085		2.792.049.785.562		2.889.723.158.516				
			JUMLAH TOTAL (A+B)				5.002.614.225.950		4.894.317.017.627		5.065.630.989.488				

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan data kondisi umum perkembangan pembangunan Provinsi NTT, pembangunan Nasional dan perkembangan global serta sesuai hasil Evaluasi P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, pada bagian ini disampaikan data dan analisis atas permasalahan-permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis.

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara harapan dengan realisasi tujuan pembangunan yang dicapai dalam kurun waktu lima tahun (Tahun 2018-2023) yang terkandung dalam indikator-indikator kinerja pembangunan. Tidak tercapainya tujuan ini disebabkan karena rendahnya kapasitas kelembagaan, keuangan dan pengaruh faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diantisipasi serta sulit dikendalikan seperti adanya pandemi Covid-19, Badai Seroja, Krisis Ekonomi dan Perang Rusia-Ukraina.

Selain faktor-faktor eksternal tersebut juga terdapat faktor internal yang berkaitan dengan kondisi geografis NTT yang berbeda dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. Kondisi geografis dan topografis Nusa Tenggara Timur, terutama kondisi-kondisi yang meliputi iklim, topografi, jenis dan kualitas tanah, hutan dan vegetasi, serta kondisi perairan dan keanakeragaman hayati yang sangat mempengaruhi aktivitas penduduk.

Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang berciri kepulauan yang mempunyai 1.192 pulau dengan kondisi topografis yang kurang menguntungkan. Dengan kondisi tersebut, NTT masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan dasar, sarana dan prasarana transportasi laut dan udara, biaya transportasi yang mahal dalam rangka pelayanan pemerintahan, terbatasnya aksesibilitas masyarakat secara umum, dan masih adanya wilayah yang terisolasi secara fisik dan sosial pada musim-musim tertentu.



Tabel 4.1
Pemetaan Permasalahan Pembangunan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Rendahnya SDM	Akses terhadap pendidikan menengah rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya anak usia sekolah yang bersekolah • Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan diwilayah terpencil • Belum meratanya penyebaran guru antar wilayah • Sebaran sekolah yang tidak merata
Rendahnya Umur Harapan Hidup	Akses terhadap layanan kesehatan rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Masih tingginya Angka Kematian Ibu • Masih Tingginya Angka kematian bayi • Masih tingginya angka kematian balita • Rendahnya derajat kesehatan • Belum meratanya tenaga kesehatan • Terbatasnya sarana dan Prasarana Kesehatan • Tingginya kasus gizi buruk • Tingginya angka Stunting • Jangkauan Jamkesmas yang belum merata
Kemiskinan	Masih rendahnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan layanan rehabilitasi • Masih rendahnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan perlindungan sosial
	Pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat miskin belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Lembaga pemberdayaan masyarakat, PKK dan Posyandu di tingkat desa belum optimal
	Rendahnya Indeks Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebaran Produksi yang tidak merata
		<ul style="list-style-type: none"> • ketersediaan pangan dan akses terhadap sumber pangan yang tidak merata • masih rendahnya SDM petani
	Angka Konsumsi ikan per kapita yang rendah	<ul style="list-style-type: none"> • belum optimalnya produksi perikanan budidaya

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<ul style="list-style-type: none"> • cakupan binaan terhadap kelompok nelayan miskin dan rentan miskin yang belum optimal
	Rendahnya Indeks Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebaran Produksi yang tidak merata • ketersediaan pangan dan akses terhadap sumber pangan yang tidak merata
	Rendahnya pendapatan Masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat produktifitas masyarakat yang rendah.
	Rendahnya pendapatan Masyarakat miskin	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang terus meningkat
	Masih rendahnya Usia Harapan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya asupan pangan dan gizi seimbang • Belum terpenuhinya jumlah, kualitas dan sebaran tenaga kesehatan • Tingginya kasus gizi buruk dan gizi kurang • Rendahnya akses dan mutu pelayanan kesehatan • Rendahnya derajat kesehatan • Rendahnya akses air minum dan sanitasi yang layak • Terbatasnya sarana dan Prasarana Kesehatan • Rendahnya kesejahteraan masyarakat
	Rendahnya angka Rata-rata Lama Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di wilayah terpencil • Belum meratanya penyebaran guru antar wilayah • Kurangnya Guru yang berkualitas (sertifikasi)
	Rendahnya angka Harapan Lama Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Keadaan Geografis: Ketimpangan pembangunan pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain sangat terlihat sekali, baik secara fisik maupun non fisik
Pembangunan Gender, Equality, Disabilitas dan Sosial Inklusi (GEDSI) belum optimal	Rendahnya Pemahaman terkait Pembangunan Gender, Equality, Disabilitas dan Sosial Inklusi (GEDSI)	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengarusutamaan GEDSI di level kebijakan dan regulasi • Belum optimalnya pemenuhan hak anak, disabilitas dan Inklusi

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>sosial lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum kuatnya sinergi layanan untuk penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan • Masih rendahnya kualitas sumber daya kaum perempuan
	Belum optimalnya Penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar perangkat daerah belum memperbaiki rumusan tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi hasil yang tertuang dalam renstra perangkat daerah • Kinerja sebagai perangkat daerah belum sepenuhnya belum berorientasi pada hasil (outcome) dan indikator kinerja yang tetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (measurable), relevan dan cukup • Penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja telah dilakukan sampai ke level organisasi terendan walaupun belum merata sampai diseluruh perangkat daerah dan penjabarnya belum sepenuhnya di sadarkan kinerja organisasi dan kinerja level di atasnya. • Kualitas evaluasi program yang dilakukan oleh penanggungjawab program belum mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan maupun hasil program tertutama untuk program antara perangkat daerah • Analisis capaian kinerja belum diungkapkan secara mendalam pada laporan kinerja. • Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di level Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
INFRASTRUKTUR	Rendahnya ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya air minum yang layak dan sanitasi yang bersih • Belum optimalnya konektivitas wilayah melalui pengembangan infrastruktur jalan dan SDA untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat • Fasilitas umum belum ramah GEDSI • Keadaan Geografis : Ketimpangan pembangunan pendidikan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain sangat terlihat sekali, baik secara fisik maupun non fisik • Kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di wilayah terpencil
	Terbatasnya akses terhadap rumah layak huni	<ul style="list-style-type: none"> • masih rendahnya persentasi rumah dengan sanitasi dan air minum yang layak • masih adanya lingkungan kumuh • Masih rendahnya akses masyarakat terhadap sambungan listrik rumah
	Energi	<ul style="list-style-type: none"> • rendahnya Rasio elektrifikasi dari EBT dan non EBT di masyarakat tidak mampu dan terpencil
	Belum Optimalnya Implementasi Perencanaan Tata Ruang dan Pembangunan Rendah Karbon	<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan penyimpangan terhadap RUTR dan RDTR pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota masih tinggi • Belum optimalnya pengendalian terhadap pemanfaatan ruang (fungsi, struktur dan pola ruang) • Rusaknya sistem ekologi mulai dari hutan hingga pencemaran air • Meningkatnya emisi gas rumah kaca yang didominasi oleh sektor energy dan transportasi. • Kurang memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dapat memperparah rusaknya ekosistem.
	Jalan, jembatan dan SDA	<ul style="list-style-type: none"> • Jaringan jalan Provinsi yang belum merata dikerjakan, serta ruas jalan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat yang

Ae

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>masih tinggi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih ada ketimpangan pembangunan jalan antar-kawasan di wilayah Timor, Sumba dan Manggarai Timur, sehingga tingkat mobilitas antar wilayah terbatas, terutama di daerah yang terisolasi. • Sebagian besar jalan kewenangan provinsi belum di sertifikasi kepemilikan lahan. • Belum optimalnya pemanfaaan jaringan irigasi Provinsi; • Masih kurangnya proporsi antara kebutuhan air baku dan ketersediaan air baku.
	Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya akses sarana dan prasarana (sarpras) transportasi di perdesaan, wilayah perbatasan, dan tempat wisata; • Belum optimalnya ketersediaan fasilitas pelabuhan darat, laut dan udara untuk menjamin koneksi antar-wilayah; • Belum optimalnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan <i>guardrail</i>) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Provinsi; • Tingginya kerusakan prasarana jalan akibat muatan lebih kendaraan, karena jembatan timbang tidak beroperasi; • Belum adanya sarana angkutan antar-modus transportasi yang terintegrasi; • Rendahnya kualitas layanan sarana angkutan umum (transportasi publik); • Meningkatnya angka kecelakaan dan kecelakaan yang menyebabkan kematian; • Tingginya permintaan ijin trayek angkutan antar jemput, angkutan sewa dan <i>taksi online</i>; • Aktivitas transportasi berpotensi mencemarkan lingkungan dan konflik sosial (masalah tanah); • Adanya praktik percaloan tarif



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		penumpang/barang.
	Perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terselesaikannya PLBN
	Bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya penerapan SPM Sub Urusan Bencana • Meningkatnya risiko bencana akibat belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan/Sistem Peringatan Dini Bencana (Early Warning System) terhadap bencana
Belum optimalnya pengelolaan sektor-sektor produksi untuk meningkatkan perekonomian daerah	Produksi dan Produktivitas pertanian masih rendah	<ul style="list-style-type: none"> • Pola pertanian masih subsisten • SDM pertanian masih rendah • Penggunaan teknologi, sarana dan prasarana pertanian masih rendah • Infrastruktur pendukung kurang memadai • Kondisi dan perubahan iklim tidak menentu • Kurang optimalnya pemanfaatan lahan • Akses permodalan masih terbatas • Belum optimalnya Pengelolaan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Belum optimalnya penciptaan nilai tambah	Belum berkembangnya industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya SDM • Rendahnya akses permodalan • Belum optimalnya manajemen pengelolaan • Terbatasnya ketersediaan dan kontinuitas bahan baku • Rendahnya dukungan teknologi pengolahan
	Rendahnya produktivitas tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pendidikan tenaga kerja masih rendah • Tingkat keterampilan tenaga kerja masih rendah
	Tenaga kerja tidak berbayar	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya pengawasan ketenagakerjaan
Belum optimalnya kegiatan distribusi dan pemasaran	Peran Lembaga Ekonomi dalam mengumpulkan dan mendistribusikan komoditi dan produk	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya ketersediaan dan peran lembaga ekonomi masyarakat



Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Ketersediaan dan kontinuitas produk	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya akses pada informasi pasar • Belum optimalnya pemasaran digital
Rendahnya kemandirian Fiskal	Tingginya ketergantungan fiskal	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah • Belum optimalnya pemanfaatan aset Daerah • Belum optimalnya pemanfaatan potensi – potensi pendapatan • Rendahnya Pola Investasi dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah

Dari target sebagaimana yang telah ditetapkan, capaian indikator makro pembangunan sebagaimana berikut:

4.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Semakin besar pertumbuhan ekonomi tahunan menunjukkan semakin besar output barang dan jasa yang dihasilkan ekonomi daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, Pemerintah Provinsi NTT menargetkan pertumbuhan sebesar 5,87% pada Tahun 2019 dan 6,6% pada Tahun 2020, dengan melihat realisasi pertumbuhan ekonomi daerah periode sebelumnya yang tumbuh diatas 5% pertahun, dan capaian Tahun 2017 yang sebesar 5,19%. Pada Tahun 2019 ekonomi daerah tumbuh sebesar 5,24% lebih tinggi 0,13 persen jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2018 yang sebesar 5,11% meskipun masih sedikit berada dibawah target RPJMD sebesar 5,87%. Pada Tahun 2020, ekonomi daerah mengalami kontraksi sebesar -0,85%. Perkembangan yang tidak diduga dan tidak ada presedennya ini juga dialami pada level nasional dan global, khususnya karena dalam rangka antisipasi meluasnya virus covid-19, pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk membatasi aktivitas sosial yang mendorong melambatnya aktivitas ekonomi.





Gambar 4.1
**Perbandingan Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Tahun 2019 dan 2020**

4.1.2 PDRB Perkapita

PDRB Perkapita menghitung besaran total PDRB pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk pada tahun tertentu. Meningkatnya PDRB Perkapita mengindikasikan meningkatnya pendapatan masyarakat. Pada Tahun 2017 PDRB perkapita NTT adalah sebesar Rp. 11,874 juta. Nominal tersebut menjadi baseline ketika Pemerintah Provinsi menyusun target pada tahun rencana 2019 dan 2020 sebesar masing-masing Rp. 13 juta dan Rp. 15 Juta. Capaian PDRB Perkapita pada Tahun 2019 dan 2020 melampaui target yang dipatok Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2019 PDRB Perkapita NTT mencapai Rp. 19,56 juta dan pada Tahun 2020 walaupun sedikit menurun menjadi Rp. 19,22 juta, namun tetap melampaui target pemerintah daerah yang termuat dalam RPJMD Provinsi NTT 2018-2023.

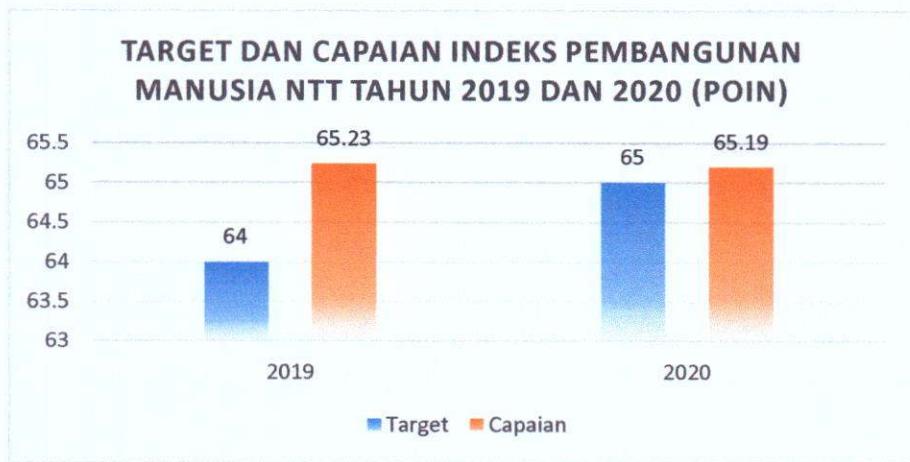


Gambar 4.2
**Perbandingan Target dan PDR Per Kapita
Tahun 2019 dan 2020**

4.1.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran perbandingan tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dari tiga dimensi yaitu, kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang layak. IPM dihitung dari empat komponen yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan konsumsi perkapita. Semakin tinggi nilai IPM menandakan makin luasnya akses masyarakat terhadap pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Dalam RPJMD Provinsi NTT 2018-2023, Pemerintah Provinsi

NTT menetapkan target IPM Provinsi NTT pada Tahun 2019 sebesar 64 poin dan pada Tahun 2020 sebesar 65 poin setelah melihat bahwa capaian pada Tahun 2017 yang digunakan sebagai baseline adalah sebesar 63,73 poin. Capaian IPM NTT pada Tahun 2019 adalah sebesar 65,23 poin, lebih tinggi dari target Pemerintah Provinsi NTT, sementara pada Tahun 2020 meskipun sedikit mengalami penurunan menjadi 65,19 poin, namun masih berada diatas target Pemerintah Provinsi NTT. Ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil yang positif yang menandakan kemajuan yang berarti dalam upaya memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan dan standar hidup.

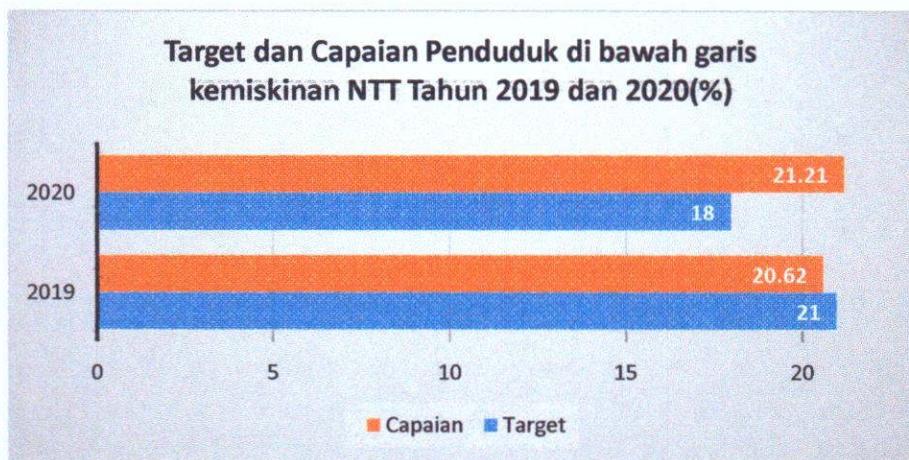


Gambar 4.3
Target dan Capaian IPM NTT Tahun 2019 dan 2020

4.1.4 Penduduk dibawah Garis Kemiskinan

Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori perkapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Semakin sedikit

persentase penduduk yang masuk dalam golongan penduduk miskin berarti semakin banyak penduduk yang pengeluaran perkapita perbulannya berada di atas garis kemiskinan dibandingkan dengan kelompok yang pengeluaran perkapita perbulannya berada di bawah garis kemiskinan, dan sebaliknya. Pada Tahun 2017 persentase penduduk miskin di NTT mencapai 21,35%. Berdasarkan angka tersebut Pemerintah Provinsi NTT dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 menargetkan penurunan menjadi 21% pada Tahun 2019 dan 18% pada Tahun 2020.

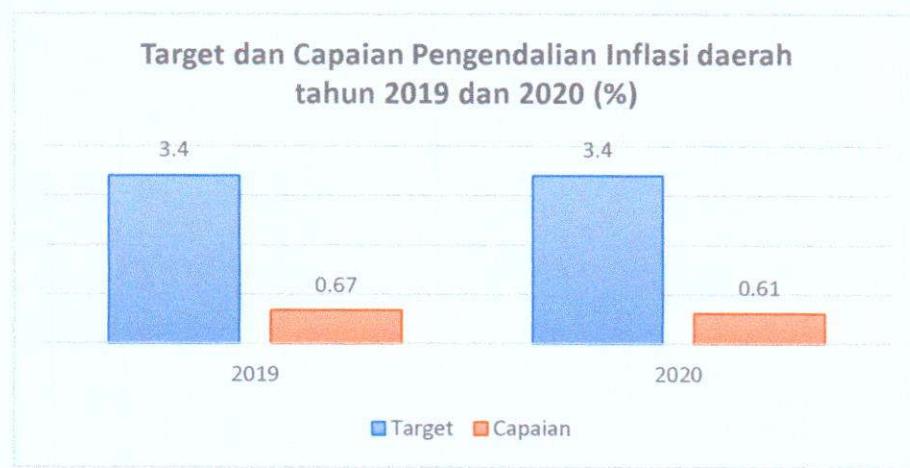


Gambar 4.4
Target dan Capaian Penduduk dibawah garis Kemiskinan Tahun 2019 dan 2020

4.1.5 Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Tingkat inflasi ringan membawa pengaruh positif untuk mendorong perekonomian karena membantu meningkatkan pendapatan nasional, mendorong masyarakat untuk menabung, investasi, dan bekerja. Inflasi yang tidak terkendali membuat perekonomian sulit berkembang. Terjadi penurunan minat masyarakat untuk menabung dan berinvestasi, penyebabnya karena nilai mata uang semakin menurun. Dari sudut pandang pemerintah, inflasi tinggi berdampak pada rencana pembangunan pemerintah dan Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena inflasi yang tinggi menyebabkan alokasi sumber daya yang direncanakan menjadi tidak lagi sesuai dengan situasi pada saat rencana tersebut dilaksanakan. Pada Tahun 2017, inflasi di Nusa Tenggara Timur tercatat sebesar 2%, capaian yang tergolong rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Pemerintah Provinsi NTT dalam RPJMD Tahun 2018-2023 menargetkan inflasi berada pada level 3-3,4% pertahun untuk tahun rencana 2019-2020. Pada Tahun 2019

inflasi di Nusa Tenggara Timur tercatat sebesar 0,67%, dan pada Tahun 2020 inflasi tahunan menurun menjadi 0,61%. Rendahnya inflasi di Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2019 dan 2020 dapat dibaca sebagai kontraksi (pelemahan) terhadap keinginan berinvestasi.

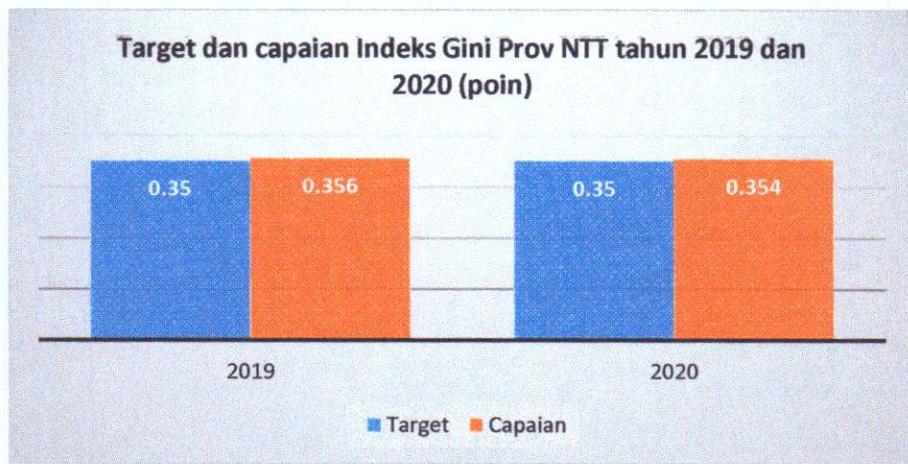


Gambar 4.5
Target dan Capaian Pengendalian Inflasi Daerah
Tahun 2019 dan 2020

4.1.6 Indeks Gini

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk. Pada Tahun 2017 Indeks Gini NTT tercatat sebesar 0,36. Berdasarkan perkembangan pada periode sebelumnya Pemerintah Provinsi NTT dalam RPJMD NTT 2018-2023 menargetkan Indeks Gini pada Tahun 2019 dan 2020 sebesar 0,35. Pada Tahun 2019 capaian indeks gini NTT sedikit berada diatas target yaitu sebesar 0,356, sedangkan Tahun 2020 indeks Gini NTT menurun menjadi 0,354 atau sesuai target.



Gambar 4.6
Target dan Capaian Indeks Gini
Tahun 2019 dan 2020

4.1.7 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Sebaliknya semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. Pada Tahun 2017 IPG NTT mencapai 92,44 poin. RPJMD Provinsi NTT pada Tahun 2019 dan 2020 menargetkan IPG sebesar 93 poin. Capaian pada Tahun 2019 sebesar 92,72 poin, sedikit berada dibawah target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2020 terjadi sedikit peningkatan menjadi 92,73 poin.

4.2 PERMASALAHAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

Berdasarkan substansi masalah-masalah di atas, diperoleh isu-isu strategis baru yang diprioritaskan dan diagendakan dalam rangka menyusun program baru untuk dicari solusinya sesuai dengan kewenangan yang menjadi urusan pemerintah Provinsi. Permasalahan-permasalahan tersebut dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan yang diuraikan sebagai berikut:

4.2.1 Urusan Wajib Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

4.2.1.1 Urusan Wajib Yang Berhubungan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pendidikan

- a. Masih rendahnya Angka Partisipasi Sekolah Usia 16-18 tahun;
- b. Belum optimalnya penduduk usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus (SPM),
- c. Masih Rendahnya cakupan Ketersediaan Guru SMA dan SMK yang berkompeten
- d. Masih rendahnya Cakupan SMA dan SMK berakreditasi B
- e. Rendahnya kualitas Penyelenggaraan pendidikan vokasional,
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung pendidikan melalui online,
- g. Masih minimnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan di daerah terpencil.
- h. Terbatasnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion, dan Maritim).

2. Urusan Kesehatan

- a. Masih terbatasnya Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana,
- b. Masih terbatasnya Pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi,
- c. Terbatasnya kualitas layanan UKM dan UKP
- d. Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan bergerak di DTPK (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan)
- e. Masih terdapat Kasus Kematian Ibu
- f. Masih terdapat Kasus Kematian Bayi dan Balita
- g. Masih tingginya angka Wasting (Gizi Buruk dan Gizi Kurang) dan Underweight
- h. Masih Tingginya Prevalensi Stunting
- i. Masih terbatasnya Fasilitas Pelayanan, Sarana Prasarana dan Alkes untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- j. Terbatasnya Kasus HIV yang diobati
- k. Terbatasnya Kabupaten / Kota mencapai Eliminasi Malaria



1. Terbatasnya Kab/kota dengan angka keberhasilan pengobatan (success Rate) TBC>85%
- m. Terbatasnya Kabupaten / kota dengan prevalensi Rate Kusta
- n. Rendahnya Persentase Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar
- o. Rendahnya Persentasi Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan Sesuai Standar
- p. Rendahnya Cakupan Pemberdayaan Masyarakat melalui pos Upaya Kesehatan Kerja
- q. Rendahnya cakupan kesehatan berbasis masyarakat

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih rendahnya Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di Kawasan Destinasi Pariwisata
- b. Belum semua jalan dan jembatan Kewenangan Provinsi dalam kondisi mantap
- c. Terbatasnya Cakupan Pembangunan dan Pemeliharaan embung Kecil dan bangunan penampung air
- d. Masih kurangnya akses pada daerah terisolir dan daerah-daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah di Kabupaten/Kota
- e. Masih rendahnya Cakupan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Layak Lingkup Provinsi setiap tahun di Kawasan Destinasi Wisata
- f. Masih rendahnya Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

- a. Masih rendahnya Persentase rumah tangga menurut sanitasi layak
- b. Masih rendanya Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak di Kawasan Destinasi Pariwisata
- c. Masih rendahnya Cakupan Pengelolaan Limbah Domestik
- d. Masih rendahnya Cakupan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
- e. Masih rendahnya Cakupan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Layak Lingkup Provinsi setiap tahun di Kawasan Destinasi Wisata
- f. Masih rendahnya Cakupan KK yang mampu mengakses air minum layak
- g. Masih terbatasnya Cakupan Pembangunan TPA / TPST / SPA

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- a. Penegakan PERDA belum optimal
- b. Masih rendahnya Cakupan Pencegahan dan penanggulangan Daerah



- berpotensi Rawan kebakaran setiap Tahun
- c. Masih terbatasnya Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada Kawasan Pariwisata Estate
 - d. Masih terbatasnya Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana
 - e. Masih terbatasnya Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana pada Kawasan Pariwisata Estate
 - f. Masih minimnya Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki rencana Kontinjensi Kebencanaan

6. Urusan Sosial

- a. Masih rendahnya Cakupan PMKS
- b. Masih terbatasnya penanganan warga negara pekerja migran korban tindak kekerasan
- c. Masih terbatasnya Cakupan Jaminan Sosial bagi PMKS
- d. Masih terbatasnya Cakupan Penanganan Korban Bencana Skala Provinsi
- e. Masih terbatasnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan kewenangan provinsi

4.2.1.2 Urusan Wajib Tidak Berhubungan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga kerja

- a. Belum optimalnya upaya peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan
- b. Rendahnya daya saing tenaga kerja
- c. Terbatasnya pencari kerja terdaftar yang ditempatkan
- d. Terbatasnya cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi
- e. Terbatasnya penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja
- f. Masih terdapat perusahaan yang belum Melaksanakan Upah Minimum Provinsi
- g. Tingginya Angka sengketa pengusaha-pekerja
- h. Terbatasnya Jumlah SDM Pengawas Ketenagakerjaan untuk menilai perusahaan yang melaksanakan norma kerja

2. Urusan Pangan

- a. Masih rendahnya ketersediaan pangan utama
- b. Masih rendahnya ketersediaan energi perkapita.
- c. Masih rendahnya ketersediaan protein perkapita
- d. Masih tingginya Jumlah Desa Rawan Pangan
- e. Terbatanya Produsen pangan segar yang menjadi keamanan pangan



3. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Rendahnya keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum
- b. Rendahnya Cakupan Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender.
- c. Rendahnya Cakupan Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengarusutamaan Gender
- d. Terbatasnya Cakupan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- e. Minimnya pendampingan Champion Gender dalam pola asuh pemenuhan hak anak untuk pencegahan stunting
- f. Terbatasnya data gender dan anak
- g. Rendahnya Cakupan Desa Layak Anak
- h. Rendahnya cakupan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang mendapatkan layanan komprehensif / sesuai standar

4. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Belum semua Penduduk wajib KTP memiliki KTP
- b. Belum semua penduduk usia < 17 tahun yang memiliki kartu identitas anak.
- c. Belum semua anak memiliki Akta kelahiran
- d. Terbatasnya Cakupan pemanfaatan data kependudukan

5. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Angka kelahiran total masih relatif tinggi
- b. Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan
- c. Belum menetapkan Grand design pembangunan kependudukan
- d. Masih rendahnya angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR)

6. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Terbatasnya limbah B3 yang diangkut atau diolah
- b. Minimnya pengaduan lingkungan hidup yang tertangani
- c. Rendahnya upaya pengurangan dan penanganan sampah
- d. Terbatasnya Pemenuhan ketentuan ijin Lingkungan dan ijin PPLH
- e. Belum terintegrasinya RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dengan dokumen perencanaan perangkat daerah



7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Masih rendahnya Kualitas SDM pengelola BUMDes
- b. Kurangnya inovasi dari Desa dalam mengembangkan potensi yang ada
- c. Kurangnya Jumlah modal untuk pemberdayaan kelompok masyarakat
- d. Masih terbatasnya data potensi desa
- e. Masih kurangnya Dana untuk pembuatan peta Desa dan penetapan batas Desa
- f. Terbatasnya cakupan pemberdayaan PKK

8. Urusan perhubungan

- a. Belum optimalnya pengelolaan Arus Masuk dan Keluar Barang di Pelabuhan yang dikelola Pemerintah Provinsi
- b. Masih kurangnya fasilitas keselamatan jalan terpasang pada Ruas Jalan Provinsi
- c. Masih diperlukannya upaya peningkatan pelayanan pada terminal penumpang
- d. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan pada Pelabuhan.
- e. Belum optimalnya layanan pemberian ijin dan rekomendasi bidang pelayaran

9. Urusan Penanaman Modal

- a. Belum optimalnya upaya pemberian dukungan kemudahan berusaha dan perbaikan iklim berusaha bagi usaha kecil dan menengah (UKM) melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan keterbukaan investasi, keterampilan tenaga kerja, teknologi serta peningkatan akses kredit bagi perusahaan kecil
- b. Belum optimalnya realisasi PMA dan PMDN
- c. Terbatasnya promosi penanaman modal

10. Urusan Koperasi dan UMKM

- a. Minimnya pembinaan terhadap koperasi aktif karena kurangnya ketersediaan SDM bidang koperasi
- b. Terbatasnya jumlah koperasi perempuan yang terbentuk
- c. Masih terbatasnya nilai transaksi UMKM di Pariwisata estate
- d. Terbatasnya kelompok perempuan yang mendapat bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan
- e. Tingkat produktivitas dan daya saing UKM belum optimal akibat keterbatasan permodalan serta rendahnya penguasaan proses produksi dan teknologi.



11. Urusan Pertanahan

- a. Minimnya masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi
- b. Terbatasnya Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi
- c. Minimnya Fasilitasi penyelesaian masalah tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi serta Inventarisir dan memanfaatkan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi

12. Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Minimnya sarpras infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)
- b. Minimnya pemahaman badan public terhadap urgensi tersedianya informasi bagi masyarakat
- c. Belum optimalnya pembangunan sistem Elektronik di Instansi Pemerintah, hanya sebatas penyerapan anggaran tanpa memaksimalkan manfaat dari sistem yang telah dibangun

13. Urusan Statistik

- a. Minimnya data statistic sektoral untuk perencanaan pembangunan sektoral
- b. Minimnya data statistic sektoral untuk evaluasi hasil pembangunan sektoral

14. Urusan Persandian

- a. Rendahnya kesadaran dan sistem keamanan informasi

15. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- a. Terbatasnya pengembangan wirausaha muda
- b. Belum optimalnya prestasi atlet olahraga
- c. Minimnya pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi
- d. Minimnya pembinaan organisasi kepemudaan

16. Urusan Kebudayaan

- a. Masih kurangnya optimalisasi pelestarian dan pengembangan cagar budaya, serta nilai-nilai budaya lokal

17. Urusan Kearsipan

- a. Belum optimalnya pengelolaan kearsipan di instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

18. Urusan Perpustakaan

- a. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan kepada masyarakat;
- b. Menurunnya minat baca dan minat pemanfaatan perpustakaan;
- c. Belum optimalnya sarana prasarana dan SDM untuk mendukung gerakan literasi masyarakat.



4.2.1.3 Urusan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

- a. Terbatasnya Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola;
- b. Masih terbatasnya Produksi Perikanan Tangkap dan budidaya
- c. Masih rendahnya angka konsumsi ikan

2. Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- a. Belum optimalnya pengembangan pariwisata;
- b. Masih terbatasnya Produksi Perikanan Tangkap dan budidaya
- c. Masih rendahnya angka konsumsi ikan

3. Urusan Pertanian

- a. Rendahnya produksi tanaman pangan;
- b. Rendahnya Produksi hortikultura
- c. Terbatasnya jumlah tenaga kerja pertanian termasuk kapasitas dan kualitas SDM pertanian
- d. Belum optimalnya pertumbuhan polulasi ternak besar
- e. Belum optimalnya penggunaan benih dan bibit unggul bersertifikat sehingga berdampak pada tingkat produktivitas;
- f. Masih tingginya kasus penyakit hewan

4. Urusan Kehutanan

- a. Belum optimalnya upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. Masih terbatasnya SDM tenaga teknis kehutanan yang berkompetens.
- c. Adanya kerusakan wilayah DAS yang diindikasikan dengan adanya banjir, erosi dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah
- d. Masih terjadinya gangguan dan ancaman terhadap keamanan hutan dan kelestarian sumber daya hutan yang disebabkan oleh faktor manusia dan daya alam;

5. Urusan Transmigrasi

- a. Belum optimalnya Pengelolaan transmigrasi;
- b. Lahan untuk lokasi transmigrasi belum clear and clean

6. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Belum optimalnya pemanfaatan EBT sebagai sumber energi dalam rangka peningkatan capaian rasio desa berlistrik;
- b. Masih terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki listrik



7. Urusan Perdagangan

- a. Belum optimalnya jumlah komoditas ekspor;
- b. Terbatasnya Cakupan distribusi barang di dalam wilayah NTT
- c. Belum optimalnya Transaksi Produk Lokal di dalam wilayah NTT

8. Urusan Perindustrian

- a. Terbatasnya Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online
- b. Rendahnya Pertumbuhan industri pengolahan dengan memanfaatkan teknologi industry
- c. Terbatasnya data informasi industri provinsi dalam mendukung SII Nas
- d. Pembangunan sektor industri pengolahan (manufacturing industry) masih belum optimal

4.2.1.4 Pendukung Urusan**1. Sekretariat Daerah**

- a. Belum optimalnya pelayanan terhadap kepala daerah/wakil kepala daerah dan Sekertaris daerah
- b. Belum optimalnya Kerjasama Daerah yang difasilitasi setiap tahun
- c. Belum optimalnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif

2. Sekretariat DPRD

- a. Belum optimalnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

4.2.1.5 Penunjang Urusan**1. Perencanaan**

- a. Belum optimalnya ketersediaan, akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi program pembangunan
- b. Koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan daerah belum optimal

2. Keuangan

- a. Belum optimalnya koordinasi antar instansi di daerah Kabupaten/Kota terkait identifikasi serta pemetaan sumber PAD baru;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah untuk mendorong pendapatan asli daerah

3. Kepegawaian

- a. Belum optimalnya pemetaan kompetensi PNS sebagai dasar pengembangan kompetensi dan karier;



- b. Belum optimalnya sinergitas antara kebutuhan pengembangan kompetensi PNS dengan pelaksanaan pendidikan dan latihan formal dalam rangka peningkatan kapasitas PNS

4. Pendidikan dan Pelatihan

- a. Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN

5. Penelitian dan Pengembangan

- a. Belum optimalnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian untuk pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- b. Belum optimalnya upaya fasilitasi penerapan inovasi daerah terhadap perangkat daerah.

6. Penghubung

- a. Belum optimalnya cakupan layanan pemerintah daerah dan KL.
- b. Belum optimalnya cakupan pembinaan kemasyarakatan
- c. Belum optimalnya cakupan promosi daerah

7. Pengelolaan Perbatasan

- a. Belum optimalnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan.

8. Pengawasan

- a. Masih terbatasnya jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- b. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan baik internal maupun ekternal;
- c. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di SKPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah masih belum sepenuhnya berorientasi pada hasil

9. Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. permasalahan pembangunan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:
- b. Belum optimalnya pembinaan terhadap Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan dalam penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- c. Belum optimalnya pembinaan terhadap Parpol, Ormas dan Forum Pembaruan Kebangsaan dalam Pendidikan Politik serta Pengembangan Etika dan Budaya Politik
- d. Belum optimalnya Pemberdayaan dan Pengawasan organisasi kemasyarakatan;



4.3 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

4.3.1 Lingkungan Global

Kondisi lingkungan global yang menjadi ancaman/tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan daerah lima tahun ke depan, yaitu:

4.3.1.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) TPB / SDGs

Isu global yang berkaitan dengan berakhirnya *Millenium Development Goals* (MDGs) 2000-2015 dan diganti dengan *Platform* baru yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2016-2030.

SDGs merupakan pembangunan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi yang bersinergi dengan aspek lingkungan secara berkelanjutan.

Peran negara sangat penting dan strategis dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs berbasis pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan. Hal ini karena konten permasalahan dalam SDGs merupakan permasalahan aktual dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun 17 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan bersama-sama oleh pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, adalah:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun;
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan;
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan;
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua;
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua;
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua;



9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi;
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara;
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati;
16. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

4.3.1.2 Perekonomian Global dan Perdagangan Global

Meskipun pertumbuhan ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif, perlu tetap diwaspada terjadinya inflasi global yang meningkat, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Cina, Eropa dan negara-negara sedang berkembang. Tambahan pula dengan adanya gejolak harga minyak dunia di satu sisi memberi dampak positif pada perekonomian nasional, namun di sisi lain juga dapat berdampak pada tekanan inflasi apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Kebijakan perekonomian AS saat ini juga perlu tetap diantisipasi dampaknya ke depan, terkait dengan normalisasi kebijakan moneter seperti meningkatnya suku bunga FFR (*Federal Funds Rate*), yang berpotensi memicu gejolak di pasar keuangan. Gejolak tersebut dapat mengakibatkan arus modal keluar (*capital outflow*) tiba-tiba dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia, yang dapat memicu kenaikan pinjaman dan fluktuasi harga saham sehingga investasi bisa terhambat. Kebijakan perpajakan AS (*tax policy*) yang baru juga dapat memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia, di mana Pemerintah AS berencana memotong pajak AS yang dapat mendorong



perpindahan arus modal ke AS dan pelemahan mata uang global terhadap dolar AS. Selain kebijakan Pemerintah AS, kebijakan ekonomi Cina yang sedang melakukan restrukturisasi perekonomian dalam upaya menyeimbangkan komposisi pertumbuhan ekonominya dinilai juga dapat berpengaruh pada perekonomian nasional dan daerah.

Kawasan Asia Pasifik mulai mengalami pergeseran gravitasi perekonomian global karena kurang lebih 41% penduduk dunia berada di kawasan ini dan 50 % transaksi dunia terjadi di kawasan ini. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Asia Pasifik mulai pulih dan membaik. Pertumbuhan kawasan akan terus ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, termasuk dari publik dan investasi swasta. Kecenderungan (*trend*) ini akan ditopang oleh kenaikan ekspor secara bertahan, seiring dengan pemulihan perekonomian yang berkembang. Berbagai kerjasama lintas negara Asia Pasifik yang dibangun dalam beberapa tahun ini menempatkan posisi kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi perdagangan yang semakin kuat. Beberapa kerjasama tersebut antara lain *Trans Pacific Partnerships (TPP)*, *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *Shanghai Cooperation Organization (SCO)*, *East Asia Summit (EAS)*, serta *Expand ASEAN Maritime Forum (EAMF)*.

4.3.1.3 Revolusi Industri 4.0

Era Revolusi Industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) yang bisa menjadi peluang sekaligus ancaman. Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu).

Arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya.

4.3.1.4 Keterbukaan Pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diimplementasikan sejak tahun 2016

Pemberlakuan MEA sebagai pasar tunggal ASEAN, tetap menjadi sebuah peluang sekaligus ancaman bagi Indonesia dan bahkan Nusa Tenggara Timur ke

depan. Kebutuhan pasar tenaga kerja terampil, aliran barang, investasi, dan modal yang lintas batas negara, menuntut kesiapan negara dan daerah mengantisipasinya secara tepat dan cepat. Apalagi Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga dunia, yang merupakan potensi untuk pasar komoditas utama MEA, dan menjadikan masyarakat Indonesia yang konsumtif. Namun di sisi lain, ketersediaan tenaga kerja produktif, terampil, dan kompeten, seharusnya menjadi peluang kompetitif, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak.

4.3.1.5 Pariwisata Dunia

Beberapa kebijakan promosi wisata di negara berkembang mulai bergeser dari manual ke digital, hal ini terbukti kenaikan tercepat kunjungan wisatawan yang merupakan hasil dari transformasi digital. *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) menyatakan berbagai keberhasilan kebijakan *visa free*, *sustainable tourism observatories* dan *conservatories*, *go digital*, *story telling on tourism*, dan *homestay* yang secara umum memberikan perkembangan yang positif bagi pengembangan pariwisata di Indonesia.

UNWTO mendukung implementasi teknologi pada pengembangan pariwisata di Indonesia, yang sejalan dengan visi UNWTO. “*Sustainable Tourism Development*” di Indonesia juga sangat diapresiasi UNWTO melalui pengembangan lima (5) *Sustainable Tourism Observatories (STOs)* yang terus mengalami perkembangan yang sangat prospektif.

Dalam RPJMN 2020-2024, prioritas pembangunan untuk wilayah Nusa Tenggara termasuk di dalamnya Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah untuk pengembangan pariwisata. Labuan Bajo juga ditetapkan sebagai salah satu destinasi Super prioritas dan super premium dari 10 lokasi destinasi wisata prioritas di Indonesia. Ini menyebabkan Labuan Bajo menjadi pintu gerbang dan pendorong pariwisata daerah sekitarnya.

4.3.1.6 Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo

1. Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo

Pemerintah telah memutuskan untuk mentransformasi perekonomian dengan menggunakan pariwisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan utama. Sektor pariwisata dipercaya akan terus mencatatkan pertumbuhan yang positif sebagai penghasil devisa. Hal itu mengingat pariwisata Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di tahun 2018 yaitu 12,58% lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan sektor pariwisata dunia yang hanya mencapai 5,6% serta ASEAN yang sebesar 7,4%.



Untuk mendukung pencapaian tersebut, Kemenpar pada 2018 telah menetapkan 10 program prioritas yaitu: 1) Digital tourism (e-tourism); 2) Homestay; 3) Air accessibility; 4) Branding; 5) Top 10 origination; 6) Top 3 main destination (15 destination branding); 7) Develop 10 new priority tourism destinations; 8) Certified human resources in tourism & tourism awareness movement; 9) Tourism investment growth; dan 10) Crisis center management (Kemenpar, 2019).

Untuk mempercepat pembangunan destinasi pariwisata, Pemerintah telah menetapkan 10 Destinasi Wisata Prioritas melalui Rapat Koordinasi Kementerian pada tanggal 14 September 2015, antara lain Danau Toba, Kep. Seribu, Tanjung Kelayang, Wakatobi, KEK Morotai, KEK Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, KEK Mandalika dan Labuan Bajo.



Sumber : Bappenas, 2020

Gambar 4.7
Destinasi Wisata Prioritas

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah resmi diberlakukan sebagai pedoman pembangunan Indonesia 5 (lima) tahun mendatang, melalui penetapan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020, peningkatan nilai tambah pariwisata menjadi perhatian penting. Dalam lima tahun mendatang, fokus nilai tambah pariwisata akan diarahkan pada lama tinggal dan pengeluaran wisatawan sebagai hasil dari perbaikan 3A (Aksesibilitas, Atraksi, dan Amenitas). Untuk itu, percepatan kesiapan 10 DPP, termasuk DPP Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi fokus utama pemerintah. Beberapa Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) dan Proyek Prioritas K/L (Pro K/L), yang sifatnya strategis dan menjadi

unggulan, atau yang dikenal sebagai Major Projects RPJMN 2020-2024 saat ini telah ditetapkan, antara lain Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan DPP Labuan Bajo. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Labuan Bajo juga dimaksudkan sebagai upaya mendorong pengembangan kawasan berbasis non-sumber daya alam di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam bentuk kawasan strategis prioritas.



Sumber: Lampiran 1. Perpres No. 18 Tahun 2020

Gambar 4.8.
Lokasi DPP Labuan Bajo dan Sebaran Major Project RPJMN 2020-2024 di Kepulauan Nusa Tenggara

Pengembangan kawasan strategis prioritas DPP Labuan Bajo tersebut nantinya didukung pelabuhan pengumpulan (*feeder*) di Pelabuhan Tenau Kupang; dukungan infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi dan informatika, pengairan dan irigasi, serta perumahan dan permukiman. Selain itu, dikembangkan pula kawasan Bandar Udara Komodo sebagai pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta.

Dalam perkembangannya, Labuan Bajo sebagai satu dari 5 (lima) *Destinasi Pariwisata Super Prioritas* di Indonesia terus berbenah dalam memperkuat posisinya, yang sejak Juli 2019 telah menyandang status sebagai *Destinasi Wisata Premium* yang kemudian dinaikkan lagi statusnya sebagai *Destinasi Pariwisata Super Premium*. Tujuan akhir “wisata super premium” di Labuan Bajo adalah meningkatkan jumlah pengunjung yang bernilai tinggi ini untuk meningkatkan perolehan devisa negara, yang pada gilirannya akan dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagai “destinasi pariwisata super premium”, pengembangan Labuan Bajo dan wilayah sekitarnya akan membidik segmen pasar wisatawan yang total

pengeluarannya jauh lebih besar dari wisatawan kebanyakan, yang selanjutnya dikategorikan dengan “wisatawan super premium”. Wisatawan super premium ini memiliki potensi yang dapat memberikan manfaat (ekonomi, sosial budaya dan ekologi) yang berbeda dari manfaat yang diperoleh dari pariwisata biasa.

Strategi pengembangan “pariwisata super premium” secara berkelanjutan di Labuan Bajo Flores (*sustainable luxury Labuan Bajo Flores*) difokuskan kepada berkembangnya suatu narasi tentang pengalaman baru berupa kesempurnaan dari setiap perspektif, yang menunjukkan kemewahan khusus dan jaminan eksklusivitas serta keunikan berwisata. Sesuatu yang belum pernah dijelajahi, tidak terjamah, dimana tidak semua orang dapat mencapai, jauh dari massa dan dengan kemampuan untuk berbagi pengalaman unik yang emosional, eksperimental, memungkinkan para wisatawan super premium ini untuk memiliki sedikit ruang untuk menikmatinya. Para wisatawan super premium akan berkesempatan untuk me-rekonseptualisasi pencarian dan komitmennya pada kekayaan alam yang unik, serta produk dan layanan wisata dengan standar *sustainability*. Keberadaan Taman Nasional Komodo menjadi salah satu jawaban dalam memenuhi ekspektasi dan pengalaman unik wisatawan dengan segmentasi premium diatas, baik dari sektor daratan maupun laut (bahari).

2. Ruang Lingkup

Kebijakan dan Tata Cara Kemitraan pada Wilayah Kawasan Konservasi Peraturan mengenai tata cara kerja sama pada kawasan konservasi tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 Jo Peraturan Pemerintah No 108 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pada Pasal 43 menerangkan bahwa penyelenggaraan KSA dan KPA dapat dikerjasamakan dengan badan usaha, lembaga internasional atau pihak lainnya untuk kepentingan Penguatan Fungsi KSA dan KPA serta kepentingan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 85/Menhut-II/2014 Jo Peraturan Menteri LHK No 44/MENLHK/SETJEN/KUM/2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan KSA dan KPA, pada Pasal 3 diterangkan bahwa Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA dapat meliputi penguatan fungsi KSA dan KPA serta konservasi keanekaragaman Hayati dan pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan. Selanjutnya pada Pasal 5 diterangkan bahwa mitra kerjasama dalam penyelenggaraan KSA dan KPA berupa badan usaha, lembaga internasional dan pihak lainnya.



Peraturan mengenai tata cara pengajuan izin pengusahaan pariwisata alam (IUPJWA dan IUPSWA) tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, Peraturan Menteri LHK No 22/MENLHK/SETJEN/KUM/2018 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik lingkup Kementerian LHK Jo Peraturan Menteri LHK No 5/MENLHK/SETJEN/KUM/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri LHK No 22/MENLHK/SETJEN/KUM/2018 tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik lingkup Kementerian LHK. Peraturan Menteri LHK No 8/MENLHK/SETJEN/KUM/2019 tentang pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, pada Pasal 4 diterangkan bahwa usaha penyediaan jasa wisata alam dapat dilaksanakan pada zona/blok Taman nasional (kecuali zona inti) dan pada zona pemanfaatan Taman Nasional untuk usaha penyediaan sarana wisata alam. Selanjut Pasal 19 menerangkan permohonan IUPJWA dapat dilakukan oleh pelaku usaha diantaranya badan usaha milik daerah (BUMD), dan Pasal 26 menerangkan permohonan IUPSWA dapat dilakukan oleh pelaku usaha diantaranya badan usaha milik daerah (BUMD).

Dari beberapa uraian rezim perizinan diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMD dalam mengembangkan destinasi wisata potensial pada kawasan konservasi, terutama taman nasional memungkinkan untuk dilakukan sepanjang mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku sesuai peraturan diatas.

3. Pengembangan Ekowisata Premium Komodo

Setiap destinasi pariwisata yang memiliki entitas spasial, bisnis, sosial budaya dan lingkungan, memerlukan pendekatan sistemik dalam integrasi ekosistem kepariwisataan untuk menjamin kualitas aktivitas, fasilitas dan pelayanan yang optimal. Tata kelola wisata premium komodo perlu dikembang konsep yang seimbang antara nilai etika, estetika, lingkungan, ekonomi serta lokalitas untuk menciptakan kualitas pengalaman berwisata serta memaksimalkan manfaat yang inklusif bagi masyarakat dan lingkungan.

Taman Nasional Komodo dibentuk pada tahun 1980 dan dinyatakan sebagai *World Heritage Site* dan *Man and Biosphere Reserve* oleh Unesco pada tahun 1986. TNK pada awalnya dibentuk untuk melindungi satwa unik Komodo (*Varanus komodoensis*), dan habitatnya. Jenis-jenis satwa darat lain yang khas



termasuk burung gosong (*Megapodius reinwardt*), tikus Rinca (*Rattus rintjanus*), dan rusa Timor (*Cervus timorensis*). Sekitar 70% dari kawasan terestrial berupa hutan savana padang rumput. Tipe habitat daratan yang lain berupa hutan tropis musim (monsoon) dan hutan kuasi awan di atas 500 m sepanjang punggung dan puncak gunung. Selain daratan, Taman Nasional Komodo (TNK) meliputi salah satu kawasan laut yang paling kaya di dunia. Taman Nasional ini meliputi 1,214 kilometer persegi habitat laut dengan keanekaragaman tinggi, termasuk karang, mangrove, rumput laut, gunung laut, dan teluk yang semi tertutup.

Habitat-habitat tersebut mempunyai lebih dari 1000 spesies ikan, sekitar 260 spesies karang, dan 70 spesies bunga karang. Dugong (*Dugong dugon*), lumba-lumba (10 spesies), paus (6 spesies), dan penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*) dan penyu hijau (*Chelonia mydas*) beruaya di Taman Nasional ini.

Pada saat ini, Taman Nasional dihadapkan pada berbagai masalah, baik di darat maupun perairan termasuk:

- a. Tekanan populasi penduduk dan peningkatan kebutuhan sumberdaya alam mengarah pada degradasi sumberdaya darat dan perairan;
- b. Kegiatan penangkapan ikan yang merusak di kawasan ini merupakan ancaman terbesar bagi sumberdaya perairan;
- c. Kelebihan kunjungan wisatawan;
 - Polusi meningkat karena cara pembuangan limbah yang tidak tepat untuk MCK dan sampah, tumpahan minyak/bahan bakar ke lingkungan perairan, dan sisa pupuk dan pestisida;
 - Perburuan pakan komodo, dll

Balai Taman Nasional Komodo telah melakukan kajian daya dukung wisata di TN Komodo dimana beberapa rekomendasinya antara lain : menetapkan kuota kunjungan wisata untuk masing-masing lokasi sesuai *kapasitas* data dukungnya, membangun mekanisme pengaturan dan pemberian kuota kunjungan kepada pelaku wisata serta menerapkan sistem tarif yang berbeda pada lokasi tertentu. Harapan kedepannya adalah tata kelola wisata alam berkelanjutan yang tetap memperhatikan etika sosial dan keunikan lingkungan yang ada di kawasan Taman Nasional Komodo.

Dalam mewujudkan “wisata premium komodo”, salah satu persyaratan utama *adalah* terjaganya keidahan alam yang luar biasa di kawasan ini, terutama keberadaan satwa Komodo dan habitatnya. Pengembangan wisata di kawasan TN komodo kedepannya tidak lagi cukup menempuh upaya atau



langkah yang biasa-biasa saja, namun perlu inovasi dalam melihat dinamika kebutuhan wisata dimasa akan datang. Destinasi wisata yang ada di kawasan TN Komodo harus diproyeksikan menjadi destinasi kelas dunia yang dicirikan dengan penerapan konsep ekowisata berkelanjutan yang mengoptimalkan potensi pariwisata yang otentik dan mengedepankan kondisi asli serta terjaganya kekayaan alam dan budaya lokal. Mempersiapkan kawasan TN Komodo sebagai wisata premium bukan berarti menutup peluang wisata menengah kebawah, akan tetapi lebih ke bagai mana mengatur dan mendistribusikan kunjungan wisatawan ke destinasi yang ada di Kawasan TN Komodo sesuai dengan segmentasi yang disepakati.

Sebagaimana yang *telah* di sepakati di dalam meeting konkuren antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam menjaga aspek konservasi TN Komodo, maka akan diterapkan konsep Kawasan Wisata Super Premium dengan sistem Premium Membership. Di harapkan dengan system Premium Membership ini maka jumlah wisatawan akan dibatasi dengan maksimum jumlah kartu keanggotaan yang hanya 50.000 (lima puluh ribu) keanggotaan per tahun. Untuk dapat menunjang rencana strategis ini maka diperlukan pula langkah untuk mengidentifikasi peluang peluang bisnis turunan lainnya yang dapat menjaga sustainabilitas dari konsep super premium ini.

4. Optimalisasi Peran BUMD Flobamor

Berbagai macam isu lingkungan dan sosial-budaya serta ditetapkannya Labuan Bajo sebagai Kawasan Pariwisata Super Prioritas Nasional dimana Kawasan Taman Nasional Komodo ada didalamnya, maka dirasa perlu kehadiran Pemerintah Daerah Provinsi sebagai bagian administratif wilayah melalui Badan Usaha nya (BUMD Flobamor) didalam mengembangkan wisata alam yang memperhatikan kaidah sosial dan lingkungan dengan mendorong berbagai pola kemitraan dengan pengelola kawasan TN Komodo dalam hal ini Balai Taman Nasional Komodo dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu, keterlibatan BUMD Flobamor didalam pengusahaan kepariwisataan Labuan Bajo, khususnya wisata alam kawasan TN Komodo diharapkan akan memberikan peningkatan langsung terhadap PAD daerah khususnya sektor pariwisata.



Kolaboratif pengelolaan antara Pemerintah Daerah dengan UPT melalui kemitraan baik dalam bentuk Kerja Sama Peningkatan Kawasan maupun tata kelola wisata pada zona pemanfaatan melalui IPPA, merupakan bentuk upaya bersama atau listas wewenang dalam menjaga keberadaan kawasan Taman Nasional Komodo secara keseluruhan. Bentuk-bentuk kemitraan yang akan didorong oleh BUMD Flobamor dengan UPT BTNK antara lain: 1) Kemitraan dengan Taman Nasional Komodo dalam upaya penguatan fungsi dan peningkatan kapasitas kawasan Taman Nasional Komodo, 2) Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) dan 3) Kemitraan Konservasi dengan Masyarakat di dalam dan sekitar Taman Nasional Komodo.

Rencana mengenai pengembangan kawasan pariwisata premium di taman nasional komodo menitik beratkan pengelolaan pariwisata alam berkelanjutan yang memperhatikan kaidah-kaidah sosial-budaya, keunikan lingkungan serta kemampuan daya dukung pariwisata di taman nasional komodo. Pengembangan konsep pariwisata premium taman nasional komodo ini diharapkan dapat menjawab tantangan permasalahan yang terjadi dewasa ini, baik dari sisi pengelolaan pariwisata maupun pelaku usaha sehingga konsep ekowisata berkelanjutan dapat terwujud di kawasan taman nasional komodo. Pertukaran pengetahuan dan pembagian peran antar pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan program sehingga membawa dampak sosial dan ekonomi yang positif bagi masyarakat sekitar kawasan dan Labuan Bajo khususnya, dan warga Provinsi NTT pada umumnya.

Pengembangan pariwisata premium taman nasional komodo dengan pencirian utama adanya segmentasi destinasi wisata terbatas dan member/keanggotaan khusus bukan berarti “memprioritaskan” orang-orang kaya atau wisatawan mancanegara yang berkunjung, akan tetapi lebih menitik beratkan kepada pengaturan ruang segmen wisata serta upaya mendukung perlindungan dan pelestarian ekosistem yang “eksotis” yang berada dalam kawasan taman nasional komodo. Kesadaran berbagi ruang ini diharapkan akan mendorong kegiatan pengusahaan yang berkelanjutan baik dari sektor kepariwisataan maupun keberadaan flora dan fauna dalam mendukung kelestarian ekosistem kawasan taman nasional komodo dimasa akan datang.



4.3.2 Lingkungan Nasional

4.3.2.1 Kebhinekaan Indonesia dari sisi etnis, ras, suku, sosial, budaya dan agama

Perbedaan dan keragaman bangsa Indonesia juga menjalar sampai ke daerah, yang membuat kondisi tersebut sebagai peluang sekaligus menjadi tantangan pembangunan ke depan. Modal sosial berupa keberagaman, toleransi, kerjasama, saling kepercayaan (trust) dapat dijadikan sebagai fundasi penguatan bangunan bangsa. Namun di sisi lain, keberagaman juga menimbulkan kerawanan tersendiri, berupa kerenggangan dan konflik horizontal antar kelompok masyarakat yang saat ini mulai marak terjadi. Pemahaman dan penerapan ideologi Pancasila menjadi penting sebagai upaya antisipatif membendung perpecahan, konflik vertikal dan horizontal yang mengancam keutuhan bangsa.

4.3.2.2 Kebijakan Pembangunan Nasional di Wilayah NTT

Kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dari perencanaan pembangunan nasional yang dituangkan dalam dokumen RPJMN 2020-2024 menjadi pedoman bagi penyusunan RPJMD Provinsi NTT. Dalam penyusunan RPJMD Provinsi NTT diperlukan adanya keselarasan dengan RPJMN. Keselarasan antara RPJMD dan RPJMN 2020-2024 dapat dilakukan dengan menyelaraskan antara dokumen RPJMN 2020-2024 dengan dokumen RPJMD Provinsi NTT 2018-2023. Dukungan terhadap pencapaian target pembangunan nasional antara lain dapat ditunjukkan dari capaian pembangunan daerah. Buku IV RPJMN 2020-2024 memuat agenda pembangunan wilayah Nusa Tenggara yang disampaikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan RPJMN untuk
Provinsi NTT Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,60	6,50	5,90	7,3	7,5
2	Tingkat Kemiskinan	18	17,35	16,15	14,56	12,35
3	Tingkat Pengangguran	2,70	2,70	2,60	2,20	2
4	Kebutuhan Investasi	57,35	63,91	71,47	80,94	91,78

Sumber: Buku IV RPJMN 2020-2024



Berdasarkan analisis atas indikator kinerja, secara umum pembangunan Nusa Tenggara Timur belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMN. Indikator kinerja pertumbuhan ekonomi NTT sampai tahun 2019 bertumbuh 5,20% masih perlu kerja keras untuk mencapai target pertumbuhan yang diamanatkan RPJMN pada tahun 2020 sebesar 5,60%; tingkat kemiskinan NTT tahun 2019 adalah 20,62% juga masih jauh dari target RPJMN tahun 2020 sebesar 18%, sedangkan tingkat pengangguran tahun 2019 sebesar 3,35% juga masih di bawah target RPJMN tahun 2020 yang sebesar 2,70%.

Prioritas pembangunan wilayah Nusa Tenggara tahun 2020-2024 difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Koridor Pertumbuhan dan Pemerataan
di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Koridor Pertumbuhan		Koridor Pemerataan	
1.	Kab. Manggarai Barat	1.	Kab. Sumba Timur
2.	Kab. Manggarai	2.	Kab. Sumba Tengah
3.	Kab. Manggarai Timur	3.	Kab. Sumba Barat
4.	Kab. Ngada	4.	Kab. Sumba Barat Daya
5.	Kab. Nagekeo	5.	Kab. Timor Tengah Selatan
6.	Kab. Ende	6.	Kab. Timor Tengah Utara
7.	Kab. Sikka	7.	Kab. Malaka
8.	Kota Kupang	8.	Kab. Belu
9.	Kab. Kupang		

Sumber: Bappelitbangda Provinsi NTT, 2020

Dalam pencapaian target pembangunan nasional, Pemerintah menetapkan beberapa kegiatan strategis pembangunan untuk Provinsi NTT. Kegiatan strategis tersebut termuat dalam Buku IV RPJMN 2020 - 2024, sebagai berikut:

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah, sebagai berikut:



1. Pengembangan sektor unggulan

Proyek prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain sebagai berikut:

- a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu: kelapa, lada, pala, cengkeh, kopi, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap, dengan fokus komoditas yaitu: kopi, kelapa, lada, pala, cengkeh, tebu, garam, dan perikanan budidaya.
- b. Pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tersebar di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).
- c. Pengolahan sumber daya alam yang dihasilkan dari sentra produksi perikanan di SKPT/WPP antara lain SKPT Sumba Timur, SKPT Rote Ndao, WPP 573 (Samudera Hindia Selatan Jawa – Laut Timor Barat), WPP 713 (Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali), dan WPP 714 (Teluk Tolo dan Laut Banda).

2. Pengembangan Kawasan Strategis

Proyek prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024 antara lain:

- a. Destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sektor jasa yaitu DPP Labuan Bajo;
- b. Pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Lingkar/Trans Pulau dan jalan akses ke kawasan pariwisata dan kawasan perbatasan, Jalan Akses DPP Labuan Bajo, Jalan Paralel Perbatasan Sektor Timur Pos Perbatasan Motaain dan Motamasin, pembangunan Jalan Perbatasan Sektor Barat NTT, pengembangan Pelabuhan Labuan Bajo, dan Bandara Labuan Bajo;
- c. Penyediaan outlet untuk komoditas mentah maupun barang hasil olahan di Nusa Tenggara direncanakan berlokasi di pelabuhan feeder yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Pelabuhan Tenau Kupang;
- d. Pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi;
- e. Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja, seperti:
 - 1) Pengembangan SMK di wilayah Nusa Tenggara secara keseluruhan



berjumlah 183 SMK yang mendukung sektor agribisnis dan agroteknologi, kemaritiman, pariwisata, seni dan industri kreatif, teknologi dan rekayasa, dan energi dan pertambangan.

- 2) Pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 15 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri (Ekonomi kreatif, khususnya otomotif dan manufaktur di Nusa Tenggara Timur), konstruksi, pariwisata dan pertanian.
- 3) Pengembangan BLK ditargetkan sebanyak 13 unit yang tersebar dan mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor prioritas yang meliputi: tenaga presisi tekstil, buruh petani, buruh konstruksi gedung, dan manajer umum perdagangan.
- 4) Penanganan anak tidak sekolah di seluruh provinsi wilayah Nusa Tenggara.

3. Pengembangan Kawasan Perkotaan

Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 adalah Pengembangan kawasan perkotaan di Kota Kupang.

4. Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Daerah Tertinggal, dan Kawasan Perbatasan

- a. Penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah. percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur di 13 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari 13 kabupaten tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 9 kabupaten yang termasuk dalam koridor kewilayahan, yaitu: koridor pertumbuhan: Manggarai Timur dan Kupang; dan koridor pemerataan, antara lain: Belu, Sumba Barat, Sumba Timur, Malaka, Sumba Barat Daya, Timor Tengah Selatan, dan Sumba Tengah.
- b. Pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap 62 daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022), yaitu Ende, Manggarai, Manggarai Barat, Nagekeo, dan Timor Tengah Utara.
- c. Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan pada 38 kecamatan lokpri di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. Pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan di PKSN Atambua dan PKSN Kefamenanu;
- e. Percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong



transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa yang mencakup perbaikan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pelayanan dasar: air minum, sanitasi, listrik desa dan transportasi, serta pengembangan desa wisata, desa digital dan produk unggulan desa dan kawasan perdesaan; peningkatan kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan, pemanfaatan dana desa, tata kelola keuangan dan aset desa; pemberdayaan masyarakat desa adat dan penguatan pendamping desa khususnya desa tertinggal dengan pendamping lokal; penataan ruang dan penetapan batas desa; serta peningkatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

- f. Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) melalui penguatan sinergi antarkampung berbasis komoditas unggulan yang terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Bersama di KPPN Ngada, KPPN Manggarai Barat, KPPN Sumba Timur;
 - g. Revitalisasi kawasan transmigrasi di Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur/Tanyu Manu di Kabupaten Malaka,, Kawasan Transmigrasi Ponu di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kawasan Transmigrasi Melolo di Kabupaten Sumba Timur;
 - h. Penanganan stunting dengan lokus prioritas pada tahun 2020 mencakup 21 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);
 - i. Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 15,69 persen di NTT; dan
 - j. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim, yang meliputi:
 - 1) Peningkatan ketahanan wilayah utara dan selatan Kepulauan Nusa Tenggara;
 - 2) Peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan;
 - 3) Peningkatan konservasi hutan.
 - k. Pengembangan Kawasan Perkotaan
- Proyek prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024 dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah antara lain sebagai berikut:
- 1) Percepatan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah secara penuh dan konsisten;
 - 2) Percepatan kemudahan berusaha, dan reformasi pelayanan perizinan, terutama investasi;



- 3) Penataan lembaga dan organisasi pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif;
- 4) Optimalisasi pemanfaatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- 5) Peningkatan riset dan inovasi daerah;
- 6) Peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen pertanian dan kelautan, manajemen kawasan ekonomi, manajemen investasi terutama kerjasama pemerintah dan swasta, manajemen kawasan pariwisata dan lainnya;
- 7) Peningkatan kualitas belanja daerah;
- 8) Pengembangan dan penguatan peran kecamatan;
- 9) Pengembangan kerjasama antardaerah, dan
- 10) Penguatan kerjasama, kemitraan dan kolaborasi multipihak;
- 11) Perluasan cakupan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu pada Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Ende, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Alor, Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Malaka;
- 12) Perluasan kepemilikan akta kelahiran dengan target prioritas Kabupaten Sikka, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Manggarai, Kota Kupang, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Sabu Raijua;
- 13) Penataan ruang dan lahan, yang meliputi:
 - a) Peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, terutama kelengkapan RDTR;
 - b) Penyediaan RTR Kawasan Strategis Nasional;
 - c) Penyediaan RDTR Kawasan Perbatasan Negara;
 - d) Penyediaan peta dasar skala besar (1:5.000) secara nasional;
 - e) Penerapan insentif dan disinsentif, serta sanksi bagi pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - f) Sertifikasi hak atas tanah terutama di wilayah yang diarahkan sebagai koridor pertumbuhan ekonomi dan pemerataan serta wilayah sekitarnya termasuk di kawasan transmigrasi;
 - g) Penataan dan publikasi batas kawasan hutan dan nonhutan dalam skala kadastral;



- h) Penetapan deliniasi batas wilayah adat;
- i) Pembentukan bank tanah;
- j) Peningkatan pelayanan pertanahan berbasis digital; dan
- k) Penerimaan PNS petugas ukur pertanahan.

14) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal kebencanaan melalui:

- a) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah (salah satunya melalui pemanfaatan Pusat Data dan Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB), masyarakat dan logistik kebencanaan);
- b) Adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat;
- c) Peningkatan investasi mitigasi struktural dan non struktural untuk pengurangan risiko bencana; dan
- d) Meningkatkan riset – riset dan penjangkauan informasi dampak perubahan iklim Provinsi NTT dan kemampuan adaptasinya.

15) Pelaksanaan Kaidah Pembangunan Rendah Karbon, yang meliputi:

- a) Peningkatan luasan dan produktivitas lahan pertanian pangan terutama padi;
- b) Optimalisasi potensi sumber energi baru terbarukan;
- c) Pengaturan ulang arahan tata ruang khususnya bagi pemukiman dan pusat-pusat kegiatan yang berada pada lokasi rawan bencana alam;
- d) Konservasi hutan primer dan habitat spesies kunci, serta perlindungan kawasan hutan;
- e) Peningkatan pembinaan lingkungan dan upaya reklamasi pada lahan bekas tambang;
- f) Penerapan kaidah-kaidah ekowisata dan pariwisata berkelanjutan dalam pengembangan kawasan pariwisata;
- g) Penegakan hukum atas kejahatan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- h) Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun secara terpadu;
- i) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal;
- j) Optimalisasi upaya rehabilitasi hutan dan lahan untuk mempertahankan luas tutupan hutan dan mengkonservasi sumber daya air; dan
- k) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi massal.



4.3.2.3 Proyek Prioritas Strategis di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam mendorong percepatan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2020-2024, Proyek prioritas strategis (*Major Project*) adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas: Labuan Bajo;
2. Pembangunan Pusat Kegiatan Strategis Nasional:
 - a. PKSN Atambua dan
 - b. PKSN Kefamenanu;
3. Pembangunan Jalan Trans pada Pulau Tertinggal, Terluar, dan Terdepan: Pulau Sumba.

4.3.2.4 Penelaahan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025

Perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan perencanaan yang holistik dan berkesinambungan. Karena itu, penelaahan RPJPD dalam perumusan RPJMD adalah hal penting yang harus dilakukan, mengingat RPJMD merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan periode 5 (lima) tahunan berkenaan dalam RPJPD. RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005- 2025.

Isu strategis dalam RPJPD NTT 2005-2025, yaitu:

1. Angka kemiskinan yang masih tinggi;
2. Indeks Pembangunan Manusia NTT yang masih rendah;
3. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan;
4. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan;
5. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
6. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur.

Berdasarkan isu strategis dan kondisi daerah saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2005-2025 adalah :

“Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Adapun visi ini bermaksud memberdaya-gunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk



mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai visi di atas, yang memuat tujuan pembangunan yang sarat dengan makna, maka misi pembangunan merupakan usaha konkret interpretasi untuk mewujudkan visi pembangunan yang masih umum dan abstrak, maka disusunlah misi pembangunan NTT selama periode tersebut sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila,** dapat dilaksanakan melalui agenda :
 - a. Mengupayakan citra penguatan dan penegasan jati diri.
 - b. Meningkatkan kualitas manusia NTT yang berbudi-pekerji terpuji.
 - c. Mempertahankan keberadaan dan keragaman budaya baik dalam bentuk nilai dan norma maupun dalam perilaku, sifat religiositas, serta mampu menerima, menghargai dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
 - d. Menghindari dan mencegah benturan dan friksi antar golongan, sebaliknya meningkatkan persatuan dan solidaritas dengan memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan wilayah.
 - e. Meningkatkan etos kerja yang bermoral baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
- 2. Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global,** dilakukan melalui agenda:
 - a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di segala bidang yang maju, mandiri, adil, merata dan setara.
 - b. Meningkatkan implementasi karya pembangunan yang berpihak kepada kaum pinggiran (marginal) sebagai sarana utama pemerataan politik pembangunan.
 - c. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
 - d. Meningkatkan mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
 - e. Meningkatkan manajemen pembangunan sumberdaya manusia secara transparan dan akuntabel.



- f. Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pola pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- g. Meningkatkan jaringan interaksi, interelasi dan interkoneksi ekonomi wilayah.

3. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum, dapat dilaksanakan dengan agenda :

- a. Membangun masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi dalam segala lingkup baik secara kelembagaan maupun secara individu sebagai warga masyarakat.
- b. Mengusahakan agar semua atau setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hukum.
- c. Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah.
- d. Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab.
- e. Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.

4. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahtaan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan, dapat dilakukan melalui agenda :

- a. Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta lingkungan untuk memperoleh ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat.
- b. Menumbuh kembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat NTT
- c. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik.

5. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan, dapat dilakukan melalui agenda :

- a. Meningkatkan kemajuan, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, merata, serasi dan lestari.
- b. Mencegah kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.



- c. Mengadakan penghijauan yang bertahap dan berkesinambungan.
- d. Meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap alam dan lingkungan.
- e. Meningkatkan lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai.

6. Mewujudkan posisi dan peran Nusa Tenggara Timur dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat, dapat dilakukan melalui agenda:

- a. Memposisikan peran wilayah NTT sebagai pemimpin, konsultan, defender/pembela, transmiter/penyebar, katalisator dan dinamisator (penggerak interaksi) antar masyarakat dan antar (daerah) serta antar negara demi memperlancar dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam usaha mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah dalam berbagai dimensinya.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih proaktif di dalam menangkap berbagai peluang lokal, nasional dan internasional, untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara kelompok maupun individu.

7. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim, dapat dilakukan melalui agenda :

- a. Memantapkan habitus (kebiasaan), tata ruang dan pola hidup kepulauan serta membimbing masyarakat untuk terbiasa dengan cara hidup antar pulau di kawasan Nusa Tenggara Timur.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan memanfaatkan potensi laut yang bersentuhan langsung dengan upaya pengembangan hidup masyarakat setiap hari dan pariwisata.
- c. Meningkatkan budaya bahari dalam diri anak-anak dan kaum muda.

4.3.3 Isu Strategis Provinsi

4.3.3.1 Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Yang Mempertimbangkan Daya Dukung Lingkungan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, perkembangan struktur ekonomi yang lebih seimbang dan memungkinkan terjadinya pemerataan pembangunan. Ekonomi NTT pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,16% (yoy), sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang sebesar 5,17% (yoy), meskipun masih lebih tinggi dibandingkan nasional yang



tumbuh 5,07% (yoY). Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi, terdiri dari konsumsi rumah tangga, lembaga non-profit, rumah tangga dan pemerintah yang seluruhnya tumbuh meningkat serta pembentukan modal tetap bruto/investasi. Investasi dan ekspor yang sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi perannya sangat kecil akibat dari neraca perdagangan defisit. Rendahnya pertumbuhan ekonomi berdampak pada rendahnya pengeluaran perkapita penduduk yang mencapai Rp 7,32 juta jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai Rp.10,66 juta dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai hanya sekitar 0,30% dari rata-rata nasional.

Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekologi yang ada. Sumber daya alam dan lingkungan memiliki kapasitas daya dukung yang terbatas. Pembangunan ekonomi yang tidak memerhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan permasalahan pembangunan dikemudian hari. Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan ekosistem pendukung kehidupannya.

4.3.3.2 Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Petani, Peternak dan Nelayan Yang Berkelanjutan

Pertanian menghadapi masalah di mana kontribusi pangsa sektor pertanian terhadap perekonomian terus mengalami penurunan dibarengi dengan penurunan tenaga kerja di sektor ini dengan persoalan produksi, distribusi dan fluktuasi harga komoditi pertanian. Walaupun sektor pertanian sebagai penyumbang utama PDRB terbesar, namun fakta menunjukkan bahwa kontribusinya terhadap PDRB NTT terus menurun dari angka 40% pada tahun 2000-an menjadi 29,65% pada tahun 2017. Menurut Bank Indonesia, struktur ekonomi NTT pada Triwulan I 2018 masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,87%.

Dari keseluruhan luas (NTT dalam angka, 2017) Provinsi NTT 47.931,54 km² atau 4.739.174 ha lahan kering ada sekitar 3 juta ha lahan kering. Potensi lahan kering yang potensial untuk pertanian adalah 1,5 juta Ha dan ada potensi padang penggembalaan untuk pengembangan peternakan dan sumber pakan seluas 422.722 Ha (RPJMD, 2018). Namun, luas lahan kritis dan terlantar terus meningkat mencapai 2.926.215,80 atau 70% pada tahun 2017 dibandingkan dengan 2.109.496 ha atau 44,55% pada tahun 2004 dan 46% (2.667.705 ha.) dari luas NTT pada tahun 2006.



Pemanfaatan potensi perikanan tangkap baru mencapai sekitar 40%. Pemanfaatan potensi laut tersebut dominan untuk penangkapan ikan seperti ikan tuna, cakalang, plagis, dan berbagai jenis ikan lainnya terutama di wilayah laut 0-12 mil (Dinas Perikanan Propinsi NTT). Berdasarkan pengelolaan dan capaian sampai saat ini, maka potensi ekonomi perikanan tangkap dan budidaya rumput laut belum dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan pertanian baik lahan kering maupun lahan basah terkendala oleh terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan teknologi baik di sektor hulu maupun hilir, rendahnya indeks pertanaman (masa tanam yang pendek), rendahnya akses petani/nelayan ke sumber-sumber pembiayaan.

Tenaga kerja produktif sektor pertanian diperkirakan akan semakin berkurang di masa yang akan datang karena dianggap kurang memberikan nilai tambah yang cukup atau kurang menjanjikan. Tingkat pengetahuan dan keterampilan teknis penyuluh dan petani, peternak dan nelayan juga masih sangat perlu ditingkatkan bukan hanya untuk memproduksi komoditi dalam jumlah dan kualitas yang lebih baik tetapi juga lebih bernilai komersial. Kapasitas SDM di bidang pertanian juga masih rendah dan terus menurun jumlahnya. Jumlah petani pada tahun 2016 adalah 61,67% dari total jumlah penduduk di mana 60,65% hanya tamat SD dan sebagiannya lagi tidak tamat SD.

Pembangunan sektor pertanian menghadapi masalah belum tersedianya industri perbenihan/pembibitan untuk mempercepat kapasitas produksi. Produktivitas pertanian dan pendapatan petani akan dapat ditingkatkan, jika ada perbaikan penguatan kelembagaan pengelola dan pendukung pertanian. Pergeseran dan perbaikan sistem produksi pertanian dari subsistem dan intermedier/semi komersial atau komersial yang akan meningkatkan nilai tambah dan pendapatan dari sektor pertanian. Keamanan dan cadangan pangan melalui penanganan distribusi, keamanan, akses, dan cadangan yang belum optimal. Perlu ada penataan dan perbaikan rantai tata niaga produk sektor pertaniandengan menyederhanakan atau memperpendek rantai, memperkuat kelembagaan dan melalui kelompok posisi tawarnya. Kemampuan dan kapasitas petani dan nelayan dalam bidang kewirausahaan perlu ditingkatkan.



4.3.3.3 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Masalah Sosial

Jumlah penduduk miskin di NTT adalah sebesar 1.134.74 ribu orang atau sebesar 21,38% yang menurun dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu 1.159.84 ribu orang atau sekitar 22,62%. Data ini menunjukkan penurunan yang masih sangat kecil dan lambat, yakni sebesar 1,24%. Persoalan kemiskinan yang dihadapi juga terkait dengan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Sehubungan dengan itu, penurunan jumlah penduduk miskin juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta kemampuan memenuhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diantaranya ketersediaan pangan, akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, ketersediaan perumahan yang layak, air minum, listrik dan sanitasi. Sehubungan dengan kompleksnya masalah kemiskinan, maka upaya penurunan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, swasta, kelembagaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan.

4.3.3.4 Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

NTT adalah Provinsi dengan sebelas jenis bencana, baik bencana yang dipicu oleh kejadian alam, non-alam maupun bencana sosial. Selama 60 tahun terakhir, NTT sudah mengalami kurang lebih 651 kejadian bencana dengan korban jiwa lebih dari 6000 (DIBI 2017). Sebanyak 75% dari bencana-bencana tersebut adalah bencana hidrometeorologis, seperti banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin topan, gelombang ekstrim, dan sebagainya, yang dipicu oleh iklim. Dengan demikian, perubahan iklim akan mempengaruhi kekerapan dan keparahan bencana. Walaupun tidak menyebabkan korban jiwa sebanyak bencana geologis (gempa bumi, tsunami, letusan gunung api), tetapi bencana hidrometeorologis merusak aset- aset penghidupan masyarakat dan terjadi secara musiman. Jenis bencana akan memperburuk kemiskinan bila tidak diatasi dengan baik. Sehubungan dengan itu, maka pembangunan yang dilaksanakan harus mengeliminasi dampak bencana akibat perubahan iklim.

4.3.3.5 Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat NTT

Peningkatan kualitas hidup masyarakat diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.



Pembangunan manusia di NTT terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT. Pada tahun 2017, IPM NTT telah mencapai 63,73. Angka ini meningkat sebesar 0,60 poin dibandingkan dengan IPM NTT pada tahun 2016 sebesar 63,13. Komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 66,07 tahun, meningkat 0,03 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,07 tahun, meningkat 0,10 tahun dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,15 tahun, meningkat 0,13 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai Rp. 7,35 juta rupiah dan pada tahun 2017, meningkat Rp. 228 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. Namun peningkatan IPM NTT masih terpaut jauh jika dibandingkan dengan rata-rata Nasional sebesar 70,81%.

4.3.3.6 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan kunci kemajuan pemerintah, karena menjadi jalan utama dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta melakukan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek penataan kelembagaan, hukum dan ketatalaksanaan, serta sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi merupakan transformasi segenap aspek dalam manajemen pemerintah menuju manajemen yang berkualitas tinggi dan terwujudnya birokrasi yang profesional, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Upaya mewujudkan reformasi dilakukan melalui berbagai penataan kelembagaan dan pembenahan sistemnya.

Penataan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal penting yang berhubungan dengan pencapaian tujuan organisasi, diantaranya: peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi, peniadaan tumpang-tindih kewenangan dan mempermudah koordinasi dalam struktur baru. Manfaat dari penataan kelembagaan yang *right-sizing* adalah tanggapan terhadap permasalahan terkait pekerjaan menjadi lebih cepat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan motivasi kerja dan perbaikan atau peningkatan hubungan kerja yang harmonis di antara pegawai, baik secara vertikal maupun horizontal. Akuntabilitas juga menjadi lebih baik terlebih karena kompetensi



pegawai tepat sasaran dan menjamin kualitas kinerja yang sesuai harapan. *Right-sizing* organisasi bukan semata terkait pengurangan struktur tetapi juga melakukan revitalisasi dan penajaman tugas dan fungsi.

Tinjauan atas analisis jabatan diperlukan agar pola penentuan dan penangkatan pejabat yang kurang tepat sasaran seperti yang selama ini telah dilakukan bisa diperbaiki. Pola perekutan yang tidak memperhatikan relevansi keahlian, latar belakang pendidikan, serta karakter kerja calon pejabat dengan jabatan yang diemban harus segera dihentikan. Dampak buruk dari “kebiasaan lama” ini adalah peran dan kinerja pejabat atau pegawai pemerintahan menjadi tidak maksimal, di saat yang sama pengeluaran organisasi terkait para pejabat tersebut menjadi tidak efektif.

Tinjauan analisis jabatan dan beban kerja diperlukan agar kinerja individu dan organisasi dapat dioptimalkan. Restrukturisasi menjadi langkah berikut yang wajib dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil analisis jabatan dan beban kerja.

Dengan demikian, harapan akan terbentuknya tim kerja yang kuat berdasarkan kompetensi dan jaminan kinerja organisasi yang mumpuni dapat diwujudkan. Untuk menjamin pekerjaan sesuai rencana, maka perlu penerapan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SOP bermanfaat sebagai tatalaksana pemerintahan untuk membantu kinerja pemerintah untuk lebih efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat. Kenyataannya, SOP-AP yang telah ditetapkan belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini disebabkan karena masing-masing Perangkat Daerah membangun sistemnya secara parsial sehingga sulit dikontrol dan dikoordinasikan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan yang berdampak pada biaya yang sangat mahal. Reformasi birokrasi juga perlu menerapkan sistem *e-government* untuk mengintegrasikan perangkat daerah (PD) dalam satu sistem secara digital sehingga terjamin penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang transparan, adil dan akuntabel. Hal ini berdampak pada terstandardisasinya proses penyelenggaraan pemerintahan serta tertatanya produk hukum daerah dan mencegah tumpang-tindih antara regulasi-regulasi yang memiliki tujuan yang sama.



4.3.3.7 Dampak Covid 19

Kontraksi yang terjadi pada perekonomian NTT, tidak saja disebabkan dampak Covid 19 pada skala regional NTT, tetapi disebabkan pula kontraksi perekonomian nasional dan global. Dengan demikian dampak Covid 19 terhadap perekonomian NTT bersifat masif dan terstruktur. Dampak seperti ini berpengaruh seketika dan langsung, utamanya pada lapisan masyarakat bawah atau tenaga kerja yang berpendapatan tidak tetap. Golongan masyarakat bawah dan tenaga kerja berpendapatan tidak tetap tersebut, akibat pembatasan yang dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid 19, seketika mengalami kehilangan sumber pendapatan. Dampaknya terlihat langsung pada sisi pengeluaran, dimana pengeluaran konsumsi rumah tangga menurun tajam. Mengingat PDRB sisi pengeluaran yang berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga relatif besar yaitu 46,56% (2019), maka penurunan tajam pada pengeluaran konsumsi rumah tangga mengakibatkan kontraksi ekonomi yang cukup besar.

Dari sisi ini, isu strategis yang perlu dikedepankan adalah menyediakan secepat mungkin sumber pendapatan bagi masyarakat lapis bawah dan golongan pekerja yang berpendapatan tidak tetap dan golongan angkatan kerja yang bekerja tetapi tidak memperoleh upah. Dalam jangka pendek kelompok ini sangat membutuhkan pekerjaan yang bersifat renumeratif. Untuk itu program pemulihan ekonomi segera didorong melalui skim program yang berbasis bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi pada aktivitas ekonomi yang cepat menghasilkan.

Selain itu, dari sisi pelaku ekonomi, perekonomian NTT sejatinya ditopang oleh sektor UMKM. Pada situasi perekonomian mengalami kontraksi, pelaku ekonomi korporasi cenderung pasif. Pada sisi lain, pelaku ekonomi UMKM justru menunjukkan sikap yang lebih agresif. Di NTT, pada triwulan I 2020, penyaluran kredit perbankan ke UMKM sebesar Rp. 11,86 triliun; sementara ke korporasi hanya sebesar Rp. 1,94 triliun. Hal ini menunjukkan dalam masa-masa sulit seperti ini, UMKM lebih responsif dibanding korporasi.

Dilihat dari lapangan usahanya, penyaluran kredit perbankan untuk UMKM sebagian besar (Rp. 7,45 triliun) pada perdagangan besar/eceran dan sisanya untuk pertanian, listrik/gas/air minum, akomodasi, makanan/minuman dan konstrksi. Sementara untuk korporasi pada lapangan usaha konstruksi dan perdagangan besar/eceran. Fakta ini menunjukkan bahwa jangkauan UMUM untuk lapangan usaha lebih luas dibanding korporasi.



Kelebihan UMKM seperti perlu dimanfaatkan lebih lanjut untuk kepentingan pemulihan ekonomi NTT. Ke depan, masih tersedia likuiditas yang cukup besar, baik melalui sektor perbankan maupun pemerintahan, untuk membiayai pengembangan usaha UMKM.

Dari sisi ini, isu strategis yang patut dikedepankan adalah penguatan UMKM sebagai penggerak utama pemulihan ekonomi NTT. Dengan pembatasan sosial yang masih akan berlangsung, fleksibilitas yang dimiliki UMKM untuk tetap berproduksi pada sektor perdagangan eceran, pertanian dan industri pengolahan, kerajinan, makanan/minuman dan akomodasi, sangat diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Untuk itu, penguatan pada sisi produksi dan demand (pasar) perlu terus didorong.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa, dalam situasi pembatasan aktivitas sosial, UMKM yang berbisnis melalui sistem jaringan dapat tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, penguatan pada sisi produksi dan demand (pasar) hendaknya diarahkan pada pengembangan *market place* bagi UMKM, sehingga terjadi ekstensifikasi, baik dari sisi jumlah UMKM maupun produksi; dan juga terjadi intensifikasi (peningkatan produktivitas) melalui perbaikan teknologi produksi dan sistem pemasaran berbasis jaringan.

4.3.3.8 Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak Tahun 2024

Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum yang diselenggarakan untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 merupakan perwujudan demokratisasi sekaligus menjadi indikator keberhasilan implementasi sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

Konsep Pilkada secara langsung hal ini merupakan amanat dari Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya muncul sebuah ide untuk melakukan setralisasi (penyatuan) pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional. Konsep ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tepatnya Pasal 201 yang mengatur secara limitatif jadwal pelaksanaan Pilkada serentak. Penyelenggaraan Pilkada serentak yang dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahun 2015, kemudian tahap kedua



dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk Kepala Daerah yang masa jabatanya berakhir pada semester kedua tahun 2016 dan yang berakhir pada 2017. Selanjutnya secara bertahap gelombang ketiga dilaksanakan pada Juni 2018, berikutnya tahun 2020, hingga Pilkada serentak nasional pada tahun 2024 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia

Berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, pemungutan suara serentak nasional untuk pilkada di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pada November 2024. Selanjutnya dalam Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Pendanaan kegiatan Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 memperhatikan beberapa hal antara lain:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024.
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi NTT sampai tahun 2025.
3. Hasil Evaluasi capaian indikator kinerja Daerah RPJMD Provinsi NTT dan perubahannya Tahun 2018-2023
4. Isu-isu strategis yang berkembang
5. Kebijakan nasional; dan
6. Regulasi yang berlaku.

5.1. PENYELARASAN TARGET INDIKATOR MAKRO DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DALAM RPJMN 2020-2024

Dalam RPJMN 2020-2024, Prioritas pembangunan wilayah Nusa Tenggara tahun 2020-2024 difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah berbasis hilirisasi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata dengan memperhatikan lokasi prioritas berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan.

Dalam tahun 2020-2024, pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mencakup kegiatan prioritas: (1) Pengembangan sektor unggulan; (2) Pengembangan kawasan strategis; (3) Pengembangan kawasan perkotaan; (4) Pembangunan desa, kawasan perdesaan dan transmigrasi, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan; (5) Penataan kelembagaan dan keuangan daerah.

Penetapan target pembangunan indikator makro diharapkan selaras dengan target makro dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, dengan tetap mempertimbangkan trend capaian indikator makro, kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Sehingga target pembangunan indikator makro tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

AE

Tabel 5.1. Target Indikator Makro dalam RPJMN 2020-2024 dengan RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026

No	Indikator Makro	RPJMN	RPD 2024-2026		
			2024	2024	2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	7,50	4,55-5,35	4,75-5,65	5,15-6,01
2	Tingkat Kemiskinan (%)	12,35	20-19,63	19,35-18,85	18,50-17,03
3	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	2,00	2,66-3,37	2,51-2,35	2,25-2,05

5.2. KESESUAIAN SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN RPJPD NTT TAHUN 2005-2025

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi dan misi RPJPD Provinsi NTT tahun 2005-2025 dan Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Tahap keempat dan isu strategis actual.

Visi RPJPD NTT Tahun 2005-2025 adalah: “NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT 2005-2025 sebagai berikut:

1. Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global
2. Mewujudkan masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum
3. Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketeraan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan
4. Mewujudkan NTT wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan
5. Mewujudkan posisi dan peran NTT dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat
6. Mewujudkan NTT sebagai Provinsi kepulauan dan masyarakat maritim

Arah Kebijakan RPJPD tahap ke- 4:

Berlandaskan evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi NTT 2013 – 2018 menjadi rujukan dalam pelaksanaan RPJPD tahapan ke-4 secara menyeluruh dalam aspek kehidupan dan penghidupan manusia NTT yang maju, mandiri adil dan makmur melalui percepatan pembangunan daerah di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan produk daerah yang kompetitif berdaya saing didukung oleh SDM berkualitas.

Masyarakat NTT yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta penyelenggaraan pemerintahan di bumi Republik Indonesia merupakan harapan bersama agar terwujudnya kemadirian, keadilan dan kemakmuran secara merata melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum secara adil dilaksanakan oleh aparatur yang profesional dan moral aparatur yang terpuji dalam memberikan layanan publik prima.

Sejalan dengan itu membutuhkan budaya dan pendidikan politik yang demokratis serta hubungan antar negara, daerah dan masyarakat di Provinsi NTT berjalan aman dan damai khususnya di daerah perbatasan Negara Timor Leste dan Australia agar terjadi peningkatan arus barang dan jasa dari provinsi NTT ke negara Timor Leste dan daerah tetangga; pelaksanaan Pilkada berjalan demokratis dan damai; penegakan supremasi hukum, penurunan konflik politik dan daerah dan penguatan peran masyarakat sipil dan kelembagaan politik serta pengarusutamaan gender pada bidang pembangunan dan peranserta kelembagaan agama dalam pembangunan.

Kemajuan Provinsi Nusa Tenggara Timur ditentukan pula dengan kualitas sumberdaya manusia dan berdaya saing global antara lain terus meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran; meningkatnya pendidikan masyarakat dan mutu pendidikan, relevansi pendidikan serta daya saing lulusan siap menciptakan lapangan kerja; meningkatnya derajat kesehatan dan perbaikan status gizi; peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak. Dengan harapan agar wilayah ini berketeraan ekonomi, sosial, politik dan keamanan didukung oleh pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat yang didukung dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan dan sumberdaya lainnya secara terencana dan terkoordinasi serta berkelanjutan; pembukaan daerah – daerah terisolasi dan terpencil; meningkatnya pengembangan IPTEKS yang ramah lingkungan; peningkatan jaringan infrastruktur transportasi; meningkatnya promosi wisata budaya, bahari dan alam melalui jaringan teknologi informatika.

Untuk mewujudkan NTT sebagai wilayah keseimbangan lingkungan membutuhkan rehabilitasi, konservasi dan pengendalian kawasan hutan – lahan kritis; pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam, merehabilitasi dan perbaikan daerah/kawasan sumberdaya alam yang telah dirusak oleh aktivitas manusia dan akibat alam untuk menjamin terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan; Sumberdaya air dan DAS; Akses air bersih dan tata kelola pemukiman yang baik,



Untuk mewujudkan NTT provinsi kepulauan dan masyarakat maritim perlu didukung dengan proses penyadaran masyarakat melalui Gemala; peningkatan sarana dan prasarana perikanan; peningkatan sumberdaya manusia nelayan, perlindungan dan pengawasan habitat laut; kebijakan fiskal daerah berdasarkan luas darat dan laut; regulasi perikanan dan kelautan yang berpihak pada daerah dan masyarakat; dan pemanfaatan potensi laut untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan sekolah kejuruan berdasarkan klasifikasi dan spesifik daerah kepulauan dalam menciptakan daya saing global.

Dengan harapan akan mencapai target kinerja rencana pembangunan dalam kurun waktu ini sebagai berikut :

1. IPM mencapai angka 80
2. Angka partisipasi kasar SD/MI 130, SMP/MTs 85 dan SMA/MA 80.
3. AKB 35/1000 Kelahiran Hidup dan AKI 200/100.000 KH.
4. Kemiskinan 12%
5. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,8%.
6. Pendapatan perkapita masyarakat NTT Rp. 9.500.000,-
7. Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat.
8. Good governance dan penegakan hukum dan HAM
9. Pembangunan yang responsif gender
10. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan pelestarian lingkungan

5.3. TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi sebagai mana amanat RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi pembangunan jangka panjang tersebut menyangkut tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Tujuan dan sasaran yang akan dijalankan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non-pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misidimaksud.

Tujuan adalah suatu kondisi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah

secara keseluruhan dan selanjutnya menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan NTT 2024-2026. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke dalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran RPD selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi RPJPD, analisa sasaran pokok RPJPD periode berkenaan, isu strategis actual serta mengacu pada RPJMN dan RPJPN. Sasaran pembangunan jangka menengah merupakan sarana untuk melaksanakan dan mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang 2005-2025 melalui RPD tahun 2024-2026. Pemetaan tujuan, sasaran dan indikator masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi pada akhir tahun Perencanaan
1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial	1. Meningkatnya produksi dan produktifitas serta pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah	Pertumbuhan PDRB (%)	2,51	3,1	4,55-5,35	4,75-5,65	5,15-6,01
	2. Meningkatnya peranan pariwisata untuk mendukung perekonomian	Kontribusi pariwisata pada PDRB (%)	6,46	7,59	7,77	7,79	7,79
		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif (Rp. Juta)	70.538,34	80.758,35	85.119,30	89.715,74	89.715,74
	3. Meningkatnya investasi dan neraca perdagangan	Realisasi Nilai investasi (Rp. Trilyun)	5,1	5,3	5,7	6,2	17,2
		Neraca perdagangan (Rp Triliun)	-33,88	-26,78	-27,64	-23,05	-23,05
	4. Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	3,77	2,66 – 3,37	2,51-2,35	2,25-2,05	2,25-2,05
	5. Meningkatkannya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp 000)	7.554	7.598	7.762	7.954	7.954
		Inflasi	2,91	3,5 ± 1	3,5 ± 1	3,5 ± 1	3,5 ± 1
	6. Menurunnya kemiskinan masyarakat	Persentase Penduduk di bawah garis kemiskinan (%)	20,99	20-19,63	19,35-18,85	18,50-17,03	18,50-17,03
	7. Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat	Indeks Gini (Poin)	0,339	0,336-0,338	0,337-0,335	0,332-0,330	0,332-0,330
	8. Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah	Ratio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	23,15	24,71	25,8	26,85	26,85

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi pada akhir tahun Perencanaan
	9. Terjaminnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, Disabilitas dan inklusi sosial	Indeks Pembangunan Gender (%)	92,63	93	94	94,56	94,56
	10. Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	67,9	68	68,25	68,5	68,5
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	1. Meningkatnya akses dan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Poin)	65,28	66,58-66,73	66,65-67	67,02-67,25	67,02-67,25
		Rata-rata lama sekolah (Poin)	7,69	7,75	7,93	8,2	8,2
		Harapan lama sekolah (Poin)	13,2	14,2	14,6	15	15
	2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup (Poin)	67,15	67,5	68	69	69
		Prevelensi Stunting (%)	20,1	12-Okt	10-9,5	9-8,5	9-8,5
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana	1. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Percentase panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	90	100	100	100	100
		Ratio Elektrifikasi (%)	89,01	93	94	95	95
	2. Meningkatnya kualitas tata ruang dan lingkungan hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	73,29	73,62	73,95	74,28	74,28
	3. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana (Poin)	142,52	140	138	135	135
4. Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis,	1. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis,	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	61,5	63-64	64-65	65,5-67	65,5-67
		OPINI BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

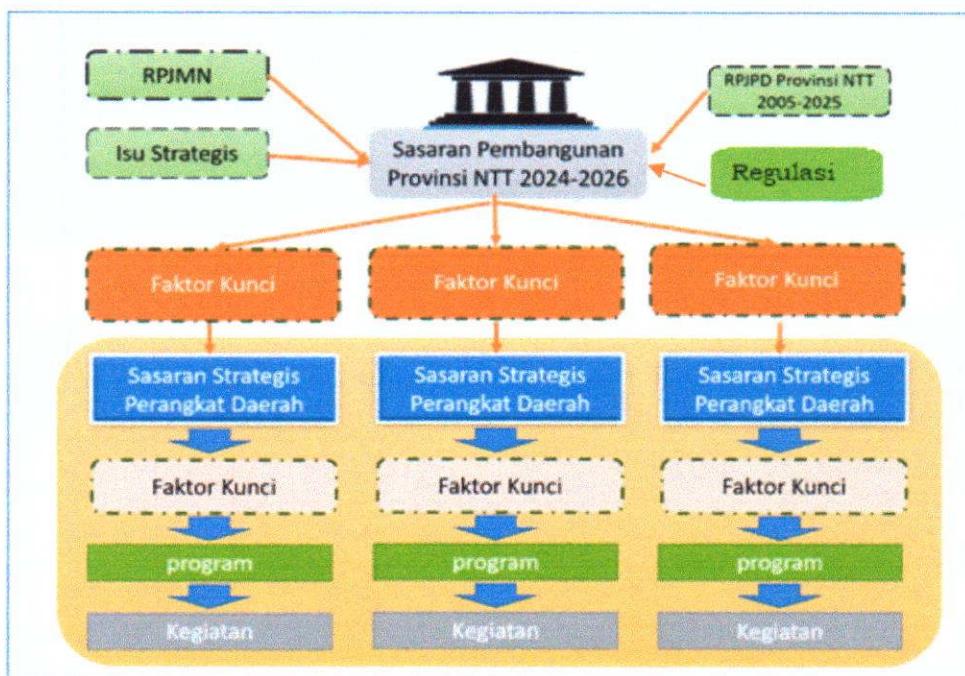
AP

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2021	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi pada akhir tahun Perencanaan
Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	NA	A	A	A	A
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	2,2	2,3	2,5	2,7	2,7
		Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (nilai)	88,38	85	90	95	95
		Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)	NA	85	90	90	90
		Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	NA	82,4	82,5	83	83

5.4. CASCADING KINERJA

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality), serta memiliki keterkaitan sinergitas (alignent).

Tahapan-tahapan dalam menetapkan cascading kinerja untuk Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 adalah sebagai mana pada gambar 5.1.



Gambar 5.1. Cascading Kinerja Pemerintah Provinsi NTT

Berdasarkan gambar 5.1 maka dapat dijelaskan terkait cascading kinerja Pemerintah Provinsi NTT dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai berikut:

1. Menetapkan Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi NTT yang berorientasi hasil (outcome) dengan memperhatikan RPJMN, RPJPD Provinsi, Isu Strategis, dan Regulasi.
2. Mengidentifikasi faktor kunci yang mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah;
3. Atas faktor kunci yang paling berpengaruh, dijadikan sasaran strategis pada level Perangkat Daerah Provinsi NTT
4. Mengidentifikasi faktor kunci yang mempengaruhi pencapaian sasaran strategis Perangkat Daerah, dan dijadikan program, kegiatan dan Sub Kegiatan

AP

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

Berdasarkan amanat Permendagri 86 Tahun 2017, strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Kemudian, arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Dengan demikian, fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD tertuang di dalam program – program prioritas pembangunan daerah dengan konsep dan cara baru (kreatif dan inovatif) untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan akan menjadi acuan bagi Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur di dalam berpartisipatif aktif untuk pelaksanaan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

6.1 STRATEGI

Strategi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 merupakan pernyataan yang menjelaskan langkah mencapai sasaran jangka menengah daerah yang akan diturunkan dalam sejumlah program pembangunan strategis.

Adapun strategi pembangunan Provinsi NTT dilaksanakan melalui analisis lingkungan strategis internal dan analisis lingkungan strategis eksternal dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*). Strategi akan memaksimalkan kekuatan dan peluang dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada.



Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPD Provinsi NTT Tahun 2024- 2026, maka dirumuskan Strategi pembangunan Provinsi NTT selama tiga tahun sebagaimana diuraikan pada Tabel 6.1. Sesuai dengan arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 maka Visi dan Misi yang digambarkan adalah Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 periodisasi keempat.



Tabel 6.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 :

“Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial	1.1 Meningkatnya produksi dan produktifitas serta pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah	<p>Meningkatkan Kapasitas Produksi, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan produksi pertanian melalui : Tanam tanaman pangan dan komoditi pangan lokal, Tanam Jagung (terintegrasi dengan sektor peternakan), dan Hortikultura. • Peningkatan produksi Peternakan melalui pengembangan Sapi, Babi, Kambing dan Unggas. • Pengendalian Alih Fungsi lahan pertanian. • Pengembangan Produk Hasil Hutan Bukan Kayu dan Perhutanan Sosial
	1.2 Meningkatnya peranan pariwisata untuk mendukung perekonomian	<p>Peningkatan Jumlah Kunjungan, lama tinggal dan belanja wisata</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan atraksi wisata • Peningkatan intensitas penyelenggaraan event kepariwisataan • Pengembangan pelaku ekonomi pada sektor hulu, antara dan hilir untuk meningkatkan nilai tambah
	1.3 Meningkatnya investasi dan neraca perdagangan	<p>1. Pemantapanan infrastruktur perdagangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dan pengembangan infrastruktur ekonomi digital untuk UMKM <p>2. Perbaikan sistem usaha dan investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penerapan sistem perijinan usaha dan investasi berbasis online
	1.4 Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesempatan kerja	<p>1. Perluasan Akses terhadap lapangan kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapanan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja. • Penyederhanaan regulasi terkait akses terhadap lapangan kerja.



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		<p>2. Peningkatan produktivitas angkatan kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan potensi SDM melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan. Perluasan kesempatan angkatan kerja untuk mengakses Program - program peningkatan keahlian. <p>3. Perlindungan terhadap pekerja</p> <ul style="list-style-type: none"> Perlindungan tenaga kerja terkait Keselamatan kerja maupun kesempatan untuk berorganisasi, perlindungan, pengupahan dan jaminan sosial sesuai ketentuan aturan yang berlaku.
	1.5 Meningkatkannya Daya Beli Masyarakat	<p>Perluasan akses Rumah Tangga terhadap Kesempatan kerja, berusaha dan pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi pemanfaatan skema pembiayaan untuk rumah tangga miskin. Perbaikan sistem pendataan kelompok usia lanjut dan anak - anak usia non produktif. Peningkatan pola pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan permodalan melalui peningkatan sarana prasarana produksi dan pemasaran yang berbasis masyarakat. Fasilitasi kelompok rumah tangga miskin untuk pemanfaatan skema pembiayaan usaha yang disediakan pemerintah.
	1.6 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	<p>Peningkatan Belanja Perkapita Rumah Tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin melalui kelembagaan ekonomi di tingkat masyarakat (Bumdes, Koperasi Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Kelembagaan ekonomi di Desa lainnya). Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG) yang adaptif dengan memperhatikan aspek lingkungan, budaya, sosial, politik dan ekonomi masyarakat. Penyediaan bantuan bagi kelompok masyarakat rentan /kelompok disabilitas.



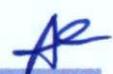
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	<p>1.7 Menurunkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan dana Bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan pendapatan Rumah Tangga. <p>1. Pengurangan gap ekonomi dan sosial antara kelompok masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan subsidi/jaminan sosial bagi kelompok masyarakat rentan (miskin dan miskin ekstrim). • Pengembangan wadah ekonomi untuk memberdayakan kelompok masyarakat rentan (miskin dan miskin ekstrim). <p>2. Pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat wilayah terpencil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kerjasama ekonomi dengan daerah (kabupaten) yang fokus pada usaha produktif sektor pertanian, peternakan, perikanan/kelautan dan industri mikro (RT). • Penguatan BUMDES pada wilayah terpencil untuk memfasilitasi usaha ekonomi masyarakat. <p>3. Pengembangan kawasan pedesaan untuk menjadi pusat pertumbuhan baru</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan fasilitasi kawasan pedesaan/penyangga untuk dikembangkan menjadi pusat pertumbuhan baru • Koordinasi pendanaan dengan Pusat untuk pengembangan pusat ekonomi baru
	<p>1.8 Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah</p>	<p>1. Pemantapan Sistem dan Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengintensifkan fasilitasi, sosialisasi dan penyuluhan mengenai pentingnya Pajak. • Perbaikan pada Kualitas SDM bagi petugas Pajak dan Distribusi. • Meningkatkan Pengawasan secara internal tentang kinerja Petugas Pajak. • Pengembangan Evaluasi Monitoring secara elektronik untuk pembayaran dari sumber pendapatan Retribusi. • Penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah secara berkala.



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		<p>2. Pemantapan Sistem Pemungutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inovasi - inovasi untuk peningkatan pajak melalui pembayaran secara online seperti melalui ATM, SMS Banking, Dompet elektronika, dan E-Payment. • Penerapan amnesti pajak/retribusi daerah secara terbatas untuk perluasan basis pajak dan retribusi. <p>3. Investasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Aset</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Investasi untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah. • Meningkatkan dukungan sektor pendapatan dari Retribusi • Melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Daerah yang sehat untuk pengembangan usaha dan menghasilkan keuntungan bagi PAD melalui Analisis Investasi secara komprehensif oleh Pemerintah Daerah • Optimalisasi sumber - sumber potensi pendapatan secara komprehensif.
	<p>1.9 Terjaminnya kesetaraan gender dan perlindungan Anak, Disabilitas dan Inklusi Sosial</p>	<p>1. Perluasan akses bagi kelompok perempuan dan disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesempatan memperoleh pendidikan yang layak. • Kesempatan mendapatkan layanan kesehatan yang layak. • Kesempatan mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak. • Kesempatan berusaha yang layak. • Kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. <p>2. Perlindungan hukum dan sosial bagi kelompok perempuan dan disabilitas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaminan advokasi dan pembelaan secara hukum. • Jaminan rehabilitasi akibat berbagai tindakan traumatis. • Penguatan kelembagaan perlindungan bagi kelompok perempuan. <p>3. Pemantapan perlindungan terhadap anak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan Kota dan Desa Ramah Anak. • Jaminan perlindungan/rehabilitasi anak korban tindakan traumatis.



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	1.10 Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kelembagaan perlindungan dan pelayanan terpadu bagi anak. <p>1. Peningkatan ketersediaan pangan dan diversifikasi pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Intensifikasi produksi pangan utama pada skala RT. Ekstensifikasi Pangan alternatif sebagai penyanggah pangan utama. <p>2. Peningkatan akses RT terhadap Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyiapan subsidi pangan bagi RT Miskin. Pemantapan stok pangan pada saat krisis. <p>3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kemampuan RT dalam pemanfaatan pangan secara tepat dan benar. Subsidi pangan bergizi bagi kelompok 1000 PHK (Ibu Hamil dan Ibu Menyusui dengan anak Baduta). <p>4. Dukungan Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan dan penetapan regulasi (Perda) Ketahanan dan Kedaulatan Pangan.
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing	2.1 Meningkatnya Akses dan Kualitas SDM NTT yang Tinggi dan Berdaya Saing	<p>1. Peningkatan kualitas dan layanan pendidikan yang merata</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan. Meningkatkan Budaya Baca masyarakat lewat Gerakan Membaca 1 jam sehari. Pembinaan dan Pendampingan Sekolah untuk menuju Akreditasi Minimal B bagi SMA, SMK dan SLB. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang memadai melalui berbagai Sumber Pembiayaan (DAK, CSR, APBD Provinsi dan APBN). Pengembangan kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam Membaca, Menulis, Berbicara, Berhitung dalam memecahkan masalah. Peningkatan Wawasan Kebangsaan melalui penyediaan Modul Pembelajaran Wawasan Kebangsaan bagi siswa/i SMA/SMK, Organisasi



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		<p>Kepemudaan, Perguruan Tinggi di wilayah NTT.</p> <p>2. Peningkatan keberpihakan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu Peningkatan Akses Pendidikan bagi Siswa Berprestasi dan tidak mampu melalui penyediaan Beasiswa.</p> <p>3. Peningkatan pendidikan vokasi dan entrepreneurship</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama pengembangan Keterampilan siswa SMK di Balai Latihan Kerja untuk menuju SDM unggul melalui Pendidikan Vokasi. • Meningkatkan Keterampilan Penduduk Usia Kerja. • Mengoptimalkan Lembaga-Lembaga Pelatihan dan Sekolah Kejuruan. <p>4. Peningkatan profesionalisme, Kualitas, Pengelolaan dan Penempatan Guru</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan dan distribusi Tenaga Guru Mata Pelajaran tertentu sesuai analisa kebutuhan di setiap Sekolah (SMA, SMK dan SLB). • Penyediaan insentif bagi tenaga guru tidak tetap pada SMK, SMA dan SLB. • Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik SMA, SMK dan SLB.
	<p>2.2 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan</p>	<p>1. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Laboratorium, sarana prasarana dan tenaga laboran untuk peningkatan ketahanan kesehatan daerah. • Pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan spesifik Lokal (obat herbal dan tradisional). • Pemenuhan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai standar dan kebutuhan masing-masing unit layanan rujukan. <p>2. Fasilitas dan Jaminan Kesehatan Nasional tertata dan berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan layanan kesehatan bergerak untuk mempermudah layanan kesehatan di destinasi wisata dan DTPK (Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan).



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		<ul style="list-style-type: none"> Memastikan dukungan pembiayaan untuk menuju cakupan layanan kesehatan yang menyeluruh 100% (UHC = Universal Health Care 100%). Meningkatkan Upaya Layanan Kesehatan. Penyediaan dan distribusi tenaga medis (Dokter, perawat, bidan dan tenaga gizi) untuk fasilitas layanan rujukan. Pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan yang memadai dalam jenis, jumlah, kualitas dan distribusi. Perbaikan sistem dan Peningkatan kualitas layanan kesehatan. Memastikan layanan kesehatan yang komprehensif bagi Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil dan Remaja Putri dalam rangka pencegahan dan penanganan Stunting, Gizi Kurang dan Gizi Buruk. Memastikan layanan kesehatan dan koordinasi penyediaan alat kontrasepsi bagi pasangan usia subur dalam rangka mengurangi angka kelahiran total. <p>3. Peningkatan Pemahaman dan Perilaku Hidup Sehat Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).</p> <p>4. Pencegahan Stunting</p> <ul style="list-style-type: none"> Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk pengarahan sumberdaya dalam pencegahan stunting secara berkelanjutan. Pencegahan dini melalui peningkatan derajat kesehatan kelompok ibu hamil, bayi dan balita yang terintegrasi dengan PAUD HI. Mendorong replikasi PAUD HI sebagai salah satu upaya pencegahan dan eradicasi stunting. Peningkatan asupan gizi kelompok keluarga miskin. Perbaikan perilaku hidup sehat. Pemantapan sistem informasi dan pengendalian stunting secara terpadu.



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<p>3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup, kewilayahan dan Mitigasi Bencana</p>	<p>3.1 Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar</p>	<p>1. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengairan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan sumber pembiayaan internal (APBD) dan eksternal secara terukur untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur pengairan. • Perluasan akses terhadap sumber pembiayaan Pemerintah Pusat (APBN) untuk percepatan pembangunan infrastruktur pengairan. <p>2. Optimalisasi pemanfaatan Infrastruktur Pengairan untuk mendukung Peningkatan Produksi Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan fungsi jaringan induk dan tersier untuk menjamin kelancaran distribusi air. • Penguatan fungsi kelembagaan pengelola irigasi aras provinsi dan kabupaten. • Dukungan pembiayaan untuk pemeliharaan secara berkelanjutan. • Peningkatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk menjamin terselenggaranya tata kelola air yang baik.
	<p>3.2 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Daerah</p>	<p>1. Pengelolaan Tata Ruang yang berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. • Peningkatan koordinasi tata ruang dengan pemerintah kabupaten/kota. • Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan kawasan strategis Provinsi. <p>2. Pengembangan Gerakan Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyebarluasan gerakan hemat energi, pengelolaan sampah organik dan non organik. • Peningkatan penggunaan EBT. • Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan dan Mangrove. • Pengelolaan DAS secara terpadu dan holistik antar berbagai sektor dan pemangku kepentingan.



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
	<p>3.3 Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim</p>	<p>1. Pengembangan sistem informasi risiko bencana dan edukasi kebencanaan bagi masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pendidikan dan pelatihan aparatur. • Penanggulangan Bencana di daerah serta masyarakat dalam Penanggulangan Bencana dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim. • Membangun budaya sadar terhadap Pengurangan Resiko Bencana melalui Pelatihan, Pendidikan, Simulasi serta Gladi secara berkala dan berkesinambungan. • Peningkatan Pengetahuan tentang Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana serta Adaptasi terhadap Perubahan Iklim seperti Peta dan Informasi Spasial, Teknologi terapan dan tepat guna yang berbasis kearifan lokal. • Peningkatan penggunaan Teknologi Internet sebagai media untuk Komunikasi, Publikasi, Informasi tentang Jalur Evakuasi, Lokasi Posko dan Pusat - Pusat Pelayanan terdekat. • Peningkatan informasi dari seluruh situs Perangkat Daerah (PD) tentang kegiatan yang terkait dengan rencana pembangunan yang terintegrasi dengan Badan Pengelolaan Bencana (BPB). • Peningkatan penggunaan Teknologi Seluler yang telah diintegrasikan pada Sistem Peringatan Tsunami, Banjir dan Gempa Bumi untuk meningkatkan kecepatan penyampaian pesan kepada masyarakat. <p>2. Penguatan Tatakelola Resiko Bencana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan Tata Ruang berbasis Mitigasi Bencana dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim. • Optimalisasi penerapan Standar Bangunan Tahan Gempa Bumi dan Tsunami terutama untuk Bangunan Publik dan Bangunan Vital.



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<p>4. Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif</p>	<p>4.1 Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif</p>	<p>1. Penyelenggaraan, Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Kinerja Pemerintahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerapan e-government, e-planning, e-budgeting secara terpadu. • Penerapan sistem pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kinerja secara terpadu. • Pemantapan sistem pendataan secara terpadu untuk mendukung perencanaan, penganggaran dan pelaporan pelaksanaan pembangunan secara terpadu. • Pemantapan protokol akses informasi dan pemasukan data secara terkendali. • Pemantapan pelaksanaan maintenance system secara teratur dan berkelanjutan. • Penyiapan SDM dengan kapasitas dan kapabilitas yang sesuai kebutuhan sistem. • Penyiapan infrastruktur penunjang untuk mendukung implementasi sistem secara berkelanjutan. <p>2. Reformasi Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan sesuai regulasi melalui aplikasi berbasis web. • Penyusunan standar pelayanan dan operasional prosedur untuk setiap alur kerja layanan pemerintahan. • Penetapan indikator kinerja dan target kinerja yang realistik dan terukur sebagai dasar penentuan pemberian tunjangan kinerja. <p>3. Peningkatan Kapasitas SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan Kapasitas dan Kapabilitas SDM Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. • Meningkatkan keselarasan, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		<p>perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan evaluasi pembangunan daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Tunjangan Kinerja bagi aparatur sipil negara dalam rangka peningkatan profesionalitas. • Rekrutmen pejabat melalui mekanisme <i>assessment centre</i>, seleksi terbuka dan manajemen <i>talent pool</i>. • Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi Aparatur Sipil Negara. Penerapan role model, agen perubahan dan budaya kerja. • Rekrutmen ASN berdasarkan analisa kebutuhan dan penempatan ASN pada jabatan sesuai hasil pemetaan kompetensi. • Mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi melalui peran serta dunia usaha. • Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan melalui ketersediaan dan penguatan kapasitas SDM yang handal serta sarana prasarana yang memadai. • Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD.

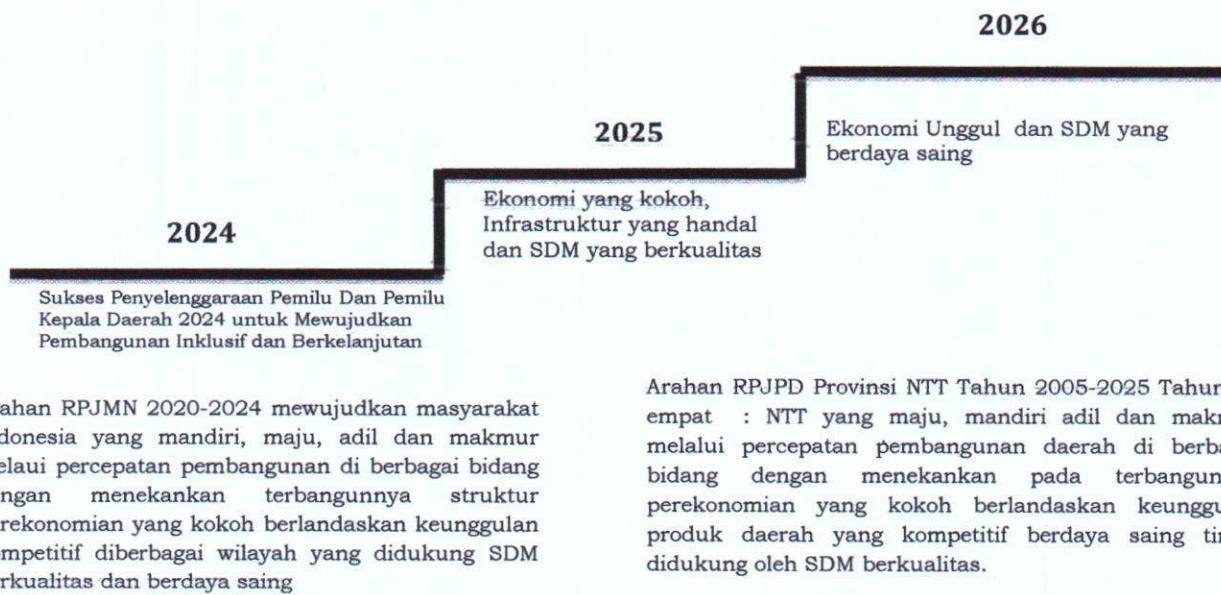


6.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan yang dilaksanakan selama tiga tahun dapat dilihat pada Gambar 6.1 dan Tabel 6.2 berikut.

Arahan RPJPN Visi Pembangunan 2005-2025 Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur

Visi RPJPD Provinsi NTT 2005-2025 "Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri, adil dan makmur dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia"



Gambar 6.1 Arah Kebijakan Provinsi NTT Tahun 2024-2026

Tabel 6.2
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur

ARAH KEBIJAKAN		
TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
SUKSES PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILU KEPALA DAERAH 2024 UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN	EKONOMI YANG KOKOH, INFRASTRUKTUR YANG HANDAL DAN SDM YANG BERKUALITAS	EKONOMI UNGGUL DAN SDM YANG BERDAYA SAING
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung peningkatan pendapatan ➤ Pengembangan dan penguatan potensi-potensi ekonomi lokal 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengembangan Rantai Nilai ekonomi lokal ➤ Penguatan system ekonomi masyarakat ➤ Sinergitas tujuan pembangunan dan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kerjasama lintas daerah dan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekonomi berkelanjutan

AB

ARAH KEBIJAKAN		
TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penuntasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan dasar ➤ Pencapaian dan pemenuhan SPM ➤ Sinergitas pencapaian tujuan dan pelaksanaan prioritas pembangunan dengan kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ pemangku kepentingan lainnya ➤ Peningkatan kualitas hidup masyarakat ➤ Ketersediaan dan pemantapan infrastruktur ➤ Pencapaian dan pemenuhan SPM 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan kualitas hidup masyarakat ➤ Pencapaian dan pemenuhan SPM

Arah kebijakan dari tahun 2024-2026 akan dijalankan untuk pelaksanaan prioritas pembangunan daerah yaitu :

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial;
2. Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana;
4. Reformasi birokrasi.

Keempat prioritas pembangunan daerah tersebut akan dijalankan melalui pelaksanaan program-program pembangunan daerah.

6.3 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi NTT Tahun 2024-2026, maka perumusan program pembangunan daerah harus mengakomodir program – program strategis Daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

Dengan memperhatikan keterkaitan antar bidang urusan pemerintah daerah, status Evaluasi P-RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023, pencapaian SDGs dan SPM maka di dalam merangkai program – program yang menjadi prioritas daerah juga merujuk pada penelaahan hasil dari Bab II,III,IV dan V, sehingga menghasilkan pemilihan program- program prioritas yang dapat dipedomani oleh Perangkat Daerah untuk menyusuna dokumen turunan selanjutnya.

Selain itu juga, dengan memperhatikan aspek regulasi dan kebijakan yang berlaku dari pusat sampai daerah, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan beberapa program unggulan/prioritas berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan periode Tahun 2024-2026 sebagaimana pada Tabel 6.3 di bawah ini.



Tabel 6.3
Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Pagu Indikatif
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah								
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)											
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)										
		1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial																			
		1.1 Meningkatnya produksi dan produktifitas serta pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah																			
3	25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan																			
3	25	2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL				2.975.098.000		2.845.133.963		2.944.796.539										
			Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Yang Dikelola	Ha	701.545	790.420		790.420		803.326		803.326	DKP								
3	25	3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				24.813.592.799		24.405.731.613		25.260.643.237										
			Produksi Perikanan Tangkap	Ton	186.364	200.000		205.000		210.000		210.000	DKP								
3	25	4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				2.339.624.019		1.902.709.379		1.969.359.640										
			Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.404.233	1.620.000		1.749.600		1.889.568		1.889.568	DKP								
3	25	5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.964.896.800		2.213.772.960		2.291.319.508										
			Persentase Penurunan Kasus IUU Fishing (Illegal, Unregulation, Unreported Fishing)	%	10,34	6,89		3,45		0		0	DKP								
3	25	6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				121.838.158		116.515.785		120.597.232										
			Angka Konsumsi Ikan	kg/perkapita/tahun	45,92	56.00.00		58.00.00		60.00.00		60.00.00	DKP								
3	26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata																			

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
3	26	4	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					363.452.443		355.203.150		367.645.608				
				Cakupan produk ekraf yang yang mendapatkan HKI	%	N/A	33,33		33,33		33,33		100	Disparekraf		
				Persentase produk ekraf yang dipasarkan melalui media digital	%	0,00	33,33		33,33		33,33		100	Disparekraf		
3	27		Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian													
3	27	2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					23.729.211.175		18.532.830.101		19.182.019.075				
				Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Besar	%	6,10	5,01		6,68		6,11		6,11	Dinas Peternakan		
				Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Kecil	%	11,00	11,32		11,37		11,48		11,48	Dinas Peternakan		
				Persentase Pertumbuhan Populasi Ternak Unggas	%	5,80	5,52		5,98		6,05		6,05	Dinas Peternakan		
				Persentase Konsumsi Daging	%	9,11	9,61		10,11		10,61		10,61	Dinas Peternakan		
				Persentase Konsumsi Telur	%	3,00	3,20		3,40		3,60		3,60	Dinas Peternakan		
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					18.808.734.165		23.369.160.838		24.005.704.824				
				Produksi Tanaman Padi	Ton	772.475	847.240,27		889.602,28		934.082,40		934.082,40	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
				Produksi Tanaman Jagung	Ton	654.921,04	869.618,32		913.099,23		958.754,20		958.754,20	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
				Produksi Tanaman Sorgum	Ton	3.274,95	3.610,63		3.791,16		3.980,72		3.980,72	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
					Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
		Produksi kedelai	Ton	1.030	2.654,43		2.787,16		2.926,51		2.926,51	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
		Produksi kacang hijau	Ton	7.470,00	12.126,12		12.732,43		13.369,05		13.369,05	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
		Produksi Tanaman Jeruk	Ton	46.474	65.770,46		69.058,99		72.511,94		72.511,94	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
		Produksi Tanaman Mangga	Ton	81.997	101.061,82		106.114,91		111.420,66		111.420,66	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
		Produksi Tanaman Bawang Merah	Ton	5.715	13.230,50		13.892,02		14.586,62		14.586,62	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
		Produksi Tanaman Cabe	Ton	8.359	6.269,70		6.583,18		6.912,34		6.912,34	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
		Produksi Tanaman Kelapa	Ton	67.857,00	71.065,97		73.197,95		75.393,89		75.393,89	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
		Produksi Tanaman Kopi	Ton	26.256,00	28.229,32		29.076,20		29.948,49		29.948,49	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
		Produksi Tanaman Kakao	Ton	20.787,00	22.502,89		23.177,97		23.873,31		23.873,31	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
		Produksi Tanaman Jambu Mete	Ton	53.007,00	57.382,95		59.104,44		60.877,57		60.877,57	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
		Produksi Tanaman	Ton	5.699,00	4.419,00		4.551,57		4.688,12		4.688,12	Dinas		

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)			Tahun-2 (2025)						
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			Cengkeh											Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
			Produksi Tanaman (daun basah)	Ton	3.000,00	3.713,15		3.824,54		3.939,28			3.939,28	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
			Cakupan penggunaan benih bersertifikat	%	100,00	100,00		100,00		100,00			100,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
			Cakupan Penggunaan Pupuk	%	13,00	17,00		19,00		21,00			21,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
			Rasio ketersediaan alsintan	%	13,00	13,79		14,20		14,63			14,63	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
3	27	3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				105.000.000		98.500.000		120.000.000				
			Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar	%	100,00	100,00		100,00		100,00			100,00	Dinas Peternakan	
			Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik	%	0,00	75,00		80,00		85,00			85,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	
3	27	4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				840.128.076		501.826.643		519.405.196				
			Persentase Ternak yang sehat	%	80,00	80,00		80,00		80,00			80,00	Dinas Peternakan	
			Persentase unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar	Unit	38,00	43,00		48,00		53,00			53,00	Dinas Peternakan	
3	27	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN				1.125.000.000		1.030.500.000		1.050.000.000				

AR

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
		PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN													
			Percentase areal serangan OPT yang dikendalikan	%	56,00	75,00		75,00		75,00		75,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
3	27	7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				1.450.000.000		1.295.500.000		1.450.000.000				
			Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Pemula)	%	71,45	86,45		4,03		100,00		100,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
			Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Lanjut)	%	70,67	78,01		89,00		100,00		100,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
			Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Madya)	%	51,75	64,91		3,45		100,00		100,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
			Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas (Kelas Utama)	%	30,00	33,33		66,67		100,00		100,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
3	28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan													
3	28	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN. PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				97.585.333		95.370.434		98.711.178				
			Percentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	%	15,39	15,43		15,47		15,51			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan		
3	30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan													
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				35.000.000		35.000.000		35.000.000				

Ar

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	%	45,00	45,00		49,00		51,00		51,00	Disperindag		
3	31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian													
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				270.561.372		264.420.431		273.682.849				
			Pertumbuhan industri pengolahan	%	1,25	1,50		1,75		2,00		2,00	Disperindag		
		1.2 Meningkatnya peranan Pariwisata untuk mendukung Perekonomian													
3	26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata													
3	26	2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				519.769.719		342.230.799		354.218.847				
			Persentase destinasi yang ditangani/ dipelihara	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Disparekraf		
			Persentase peningkatan destinasi pariwisata strategis Provinsi	%	NA	4,17		4,17		0,53		20,83	Disparekraf		
			Persentase ijin tanda daftar usaha pariwisata kewenangan provinsi yang difasilitasi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Disparekraf		
3	26	3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				900.000.000		1.045.314.358		1.081.930.814				
			Persentase destinasi wisata di NTT yang dipromosikan (2 destinasi di 7 Kabupaten/Kota per tahun)	%		31,82		31,82		36,36		100	Disparekraf		
		1.3. Meningkatnya Investasi dan Neraca Perdagangan													
3	30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan													
3	30	2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				35.000.000		35.000.000		35.000.000				

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			Cakupan Penerapan Sistem Perijinan Usaha dan Investasi berbasis Online	%	45,00	45,00		49,00		51,00		51,00		Disperindag		
3	30	5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				50.000.000		50.000.000		50.000.000					
			Persentase Peningkatan Jumlah Komoditas Eksport	%	16,67	28,57		11,11		20,20		20,20		Disperindag		
3	30	7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				899.916.614		956.316.048		989.814.970					
			Nilai transaksi produk yang dipasarkan	%	40,00	60,00		80,00		100,00		100,00		Disperindag		
3	31		Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian													
3	31	2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				270.561.372		264.420.431		273.682.849					
			Pertumbuhan industri pengolahan	%	1,25	1,50		1,75		2,00		2,00		Disperindag		
			1.4. Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Kesempatan Kerja													
2	7		Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja													
2	7	3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				150.000.000		150.000.000		150.000.000					
			Cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	%	70,00	90,00		92,00		95,00		95,00		Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
2	7	4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				519.662.000		519.662.000		550.000.000					
			Percentasi penempatan tenaga kerja di pasar kerja	%	70,00	75,00		78,00		78,00		78,00		Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
2	7	5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				365.000.000		334.708.000		350.061.000				
			Persentase Perusahaan yang membentuk Sarana Hubungan Industri	%	11,17	12,40		13,63		14,86		14,86	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
2	7	6	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				300.000.000		300.000.000		300.000.000			Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
			Persentase Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja	%	-	45,00		67,00		70,00		70,00	Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
2	19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga													
2	19	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				497.866.745		1.405.784.591		1.455.028.006				
			Jumlah wirausaha muda termasuk kelompok disabilitas dan Organisasi kepemudaan	orang	1438,00	250,00		250,00		250,00		750,00	Dinas Pemuda Dan Olahraga		
		1.5. Meningkatkannya Daya Beli Masyarakat													
2	17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah													
2	17	3	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				2.736.326.000		2.618.807.700		2.796.065.000				
			Persentase koperasi aktif	%	93,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
2	17	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				158.182.000		99.421.900		188.051.000				
			Persentase SDM koperasi yang dilatih	%	5,00	8,00		8,00		8,00		8,00	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga		



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah	
							Tahun-1 (2024)			Tahun-2 (2025)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target		
														Kerja Dan Transmigrasi	
2	17	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				418.428.000		404.391.700		425.563.000				
				Persentase kelompok UMKM yang dibina	%	54,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
2	17	8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				5.390.928.000		4.595.068.059		5.398.063.000				
				Persentase kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/ pengolahan	%	3,00	9,00		9,00		10,00		10,00	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	
3	26		Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata												
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				258.599.071		252.729.639		261.582.539				
				Persentase tenaga kerja pariwisata (restoran dan akomodasi) yang bersertifikasi	%		33,33		33,33		33,33		100	Disparekraf	
				Persentase tenaga kerja Ekonomi kreatif (Kriya dan Fashion) yang bersertifikat	%		33,33		33,33		33,33		100	Disparekraf	
3	30		Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan												
3	30	4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				138.615.068		23.907.614		24.745.077				
				Persentase rata-rata kenaikan barang pokok	%	3 s/d 10	3 s/d 10		3 s/d 10		3 s/d 10		3 s/d 10	Disperindag	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			per tahun												
			Persentase rata-rata kenaikan barang penting per tahun	%	3 s/d 10	3 s/d 10		3 s/d 10		3 s/d 10		3 s/d 10	Disperindag		
3	30	6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				500.341.666		838.519.141		867.891.740				
			Persentase peningkatan pelaku usaha yang memasarkan produk sesuai standar perlindungan konsumen	%	53,00	60,00		65,00		70,00		70,00	Disperindag		
			Persentase pelaku usaha yang wajib melakukan pengujian	%	17,65	20,00		25,00		30,00		30,00	Disperindag		
			1.6 Menurunnya Kemiskinan Masyarakat												
1	4		Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman												
1	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				840.000.000		96.630.839		98.980.705				
			Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena relokasi rumah program pemerintah provinsi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas PUPR		
			Persentase Ketersediaan rumah bagi warga yang terkena bencana tingkat provinsi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas PUPR		
1	4	3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN				2.112.500.000		2.112.500.000		2.112.500.000				
			Persentase Penurunan Tingkat Kekumuhan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	%	100,00	95,00		93,00		88,00		88,00	Dinas PUPR		
1	4	5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM				577.500.000		577.500.000		577.500.000				



AE

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			Makam Pahlawan Nasional Provinsi												
3	29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral													
3	29	5	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN												
			Cakupan Pemanfaatan Energi Listrik berbasis EBT setiap tahun	% (KW)	17,00	20,00	25.000.000	30,48	84.854.234.070	35,00	87.826.604.338	35,00	Dinas Esdm		
3	29	6	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				88.050.247.971		1.825.027.522		1.888.956.654				
			Presentase Cakupan Rumah Tangga yang terlayani listrik	Unit	89,01	93,00		94,00		95,00		95,00	Dinas ESDM		
3	32	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi													
3	32	2	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				275.000.000		225.000.000		275.000.000				
			Persentase Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	%	75,00	89,00		90,00		92,00		92,00	Dinas Koperasi, Nakertrans		
3	32	3	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				535.000.000		500.000.000		437.776.282				
			Persentase Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya	%	75,00	89,00		90,00		92,00		92,00	Dinas Koperasi, Nakertrans		
3	32	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				464.229.000		400.000.000		475.000.000				
			Persentase unit pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya	%	75,00	89,00		90,00		92,00		92,00	Dinas Koperasi, Nakertrans		
			1.7 Menurunkan Ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat												
2	13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa													
2	13	2	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya Penataan Pemerintahan dan Pelayanan			50.000.000		42.204.235		43.682.613				

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			Kemasyarakatan di Desa (Jumlah Desa Persiapan yang Memiliki Kode Register dan Jumlah Desa Berkembang)												
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Desa	111 Desa	32 Desa Persiapan		24 Desa Persiapan		20 Desa Persiapan		433 Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		
2	13	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Status Desa Minimal Berkembang, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Bumdes Aktif dan kerjasama desa dengan lembaga nonpemerintahan			585.000.000		544.199.890		563.262.741				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	141 Perpub	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1.454 BUMdes di 21 Kabupaten	21 Kabupaten	21 Kabupaten		21 Kabupaten		21 Kabupaten		21 Kabupaten	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		
2	13	5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah Bumdes Aktif, Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial, dan Adat (Bumdes, PKK, Posyandu, Posyantek, Alat TTG)			965.000.000		1.087.060.232		1.125.139.010				
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota	22 Kab/Kota		22 Kab/Kota		22 Kab/Kota		22 Kab/Kota	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa		



Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)			Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)				
						Target	Rp (Juta)	Target	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)			
			RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat/Hukum Adat												
			Jumlah alat TTG yang diproduksi	678 Unit	20 unit	20 unit		20 unit		20 unit		20 unit	738 Unit	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	
		1.8 Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah													
2	18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal													
	18	1	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				60.000.000		50.000.000		55.000.000				
			Percentase data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik	%	61,38	61,38		100,00		100,00		100,00	DPMTSP		
2	18	2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				200.463.142		23.907.901		24.745.374				
			Percentase Pertumbuhan Investor	%	30,00	35,00		40,00		45,00		45,00	DPMTSP		
2	18	3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				195.705.136		191.263.209		197.962.994				
			Percentase Pertumbuhan calon investor yang mengurus ijin setiap tahun	%	60,00	65,00		70,00		75,00		75,00	DPMTSP		
2	18	4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				212.583.763		110.028.445		113.882.646				
			Percentase ijin dan non ijin yang diterbitkan tepat waktu sesuai SO	%	100,00	100,00		100,00		100,00			DPMTSP		
2	18	5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				415.899.132		734.833.251		760.573.823				

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)			Tahun-2 (2025)						
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target			
			Percentase PMA dan PMDN yang taat pada ketentuan	%	100,00	100,00			100,00		100,00			100,00	DPMTSP	
5	2	KEUANGAN														
5	2	3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					2.255.000.000			1.616.172.783			1.672.785.914		
			Percentase penatausahaan Barang Milik Daerah	%	100,00	100,00			100,00		100,00			100,00	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	
			Percentase pemanfaatan aset	%	100,00	100,00			100,00		100,00			100,00	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	
			Percentase Pemindahtempahan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	%	100,00	100,00			100,00		100,00			100,00	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	
5	2	4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					15.025.000.000			13.803.062.032			14.286.571.331		
			Percentase Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	%	19,41 (2021, audited)	22,00			23,00		24,00			24,00	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	
			1.9 Terjaminnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, Disabilitas dan inklusi sosial													
2	8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak														
2	8	2	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					3.000.000			3.000.000			3.000.000		
			Cakupan OPD Provinsi NTT yang Melaksanakan PPRG	%	84,61	95,00			97,00		100,00			100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	
2	8	3	PROGRAM PERLINDUNGAN					448.681.400			369.334.326			382.271.787		

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
		PEREMPUAN													
			Persentase Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sesuai standar	%	80,00	90,00		95,00		100,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
2	8	4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				5.000.000		5.000.000		5.000.000				
			Cakupan Kabupaten / Kota yang melaksanakan tahapan Intervensi Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga (IKK)	%	27,00	64,00		82,00		100,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
2	8	5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				3.000.000		3.000.000		3.000.000				
			Cakupan ketersediaan data terpilih di OPD lingkup Provinsi	%	10,00	15,00		18,00		20,00		20,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
2	8	6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK				5.000.000		5.000.000		5.000.000				
			Peningkatan Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak	%	4,50	9,00		13,50		18,00		18,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		
2	8	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				83.788.000		80.127.809		82.934.616				
			Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sesuai standar	%	80,00	90,00		95,00		100,00		100,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)			Tahun-2 (2025)						
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
2	17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah													
2	17	7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Percentase kelompok UMKM yang dibina	%	54,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
2	17	8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Percentase kelompok UMKM yang difasilitasi dengan penggunaan teknologi produksi/ pengolahan	%	3,00	9,00		9,00		10,00		10,00	Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		
		1.10 Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan													
2	9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan													
2	9	3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Presentase peningkatan konsumsi pangan pokok non beras terhadap konsumsi pangan keseluruhan	%	13,00	20,00		25,00		30,00		30,00	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
2	9	4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Percentase daerah rentan rawan pangan	%	25,88	24,50		24,00		23,50		-	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan		
2	9	5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Percentase Produsen pangan segar terjamin	%	12,00	20,00		25,00		30,00		30,00	Dinas Pertanian Dan		

AE

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
					Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
		keamanan pangan											Ketahanan Pangan	
2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing														
2.1 Meningkatnya Akses dan Kualitas SDM NTT yang Tinggi dan Berdaya Saing														
1	1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan												
1	1	2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				1.038.874.781.169		1.045.701.881.196		1.082.331.911.686			
				Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah: APS kelompok 16 - 18 Tahun (SMA dan SMK) (Data Terpilih Gender)	%	76,00	80,00		82,00		85,00		87,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				Meningkatnya Persentase Partisipasi Sekolah APS SLB	%	74,85	76,85		78,00		80,00		82,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				Meningkatnya SMK yang direvitalisasi menjadi SMK Percontohan dengan kualitas lulusan yang bersaing (Jurusan Pariwisata, Kuliner, Fashion dan Maritim) 8 Unit	%	75,00	85,00		90,00		95,00		97,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1	1	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				7.000.000.000		23.907.901		24.745.374			
				1. Cakupan SMA berakreditasi B (554 Unit)	%	41,16	45,13		54,15		63,18		72.20.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				2. Cakupan SMK berakreditasi B (295 unit)	%	38,31	44,07		50,85		84,75		88.14.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				3. Cakupan SLB berakreditasi B (32 unit)	%	0,00	6,00		13,00		19,00		19	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			4. Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan Menengah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
			5. Cakupan Pemenuhan SPM Pendidikan Khusus	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
1	1	4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN										Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
			1. Cakupan Ketersediaan Guru SMA berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (16.164 orang)	%	1,10	27.44.00		28.06.00		28.67		29.08.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
			2. Cakupan Ketersediaan Guru SMK berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (8.024 orang)	%	27.94	28.60		29.22.00		29.91		30.53.00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
			3. Cakupan Ketersediaan Guru SLB berkompeten (bersertifikat) setiap tahun (847 orang)	%	0,80	20.07		0,879166667		21.25		0,917361111	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
1	1	5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PERIZINAN PENDIDIKAN					100					Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
			Jumlah Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh Masyarakat.	%	26.67	53		67		80		100	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
1	1	6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				230.452.640		230.452.640		230.452.640				
			Meningkatnya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturnannya Lintas	%	66,67	75,00		83,33		91,67		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (12 paket bahasa dan sastra)												
2	19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga													
2	19	3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				7.000.000.000		5.833.690.722		6.038.039.852				
			Peningkatan perolehan medali cabor prestasi dan Pendidikan											Dinas Pemuda Dan Olahraga	
			Medali	Medali	200,00	50,00		50,00		50,00		150,00		Dinas Pemuda Dan Olahraga	
			Cabor	Cabor	8,00	10,00		11,00		13,00		13,00		Dinas Pemuda Dan Olahraga	
			Peningkatan perolehan medali dari atlet paralympik												
			Medali	Medali	30,00	15,00		25,00		35,00		75,00		Dinas Pemuda Dan Olahraga	
			Cabor	Cabor Atletik	1,00	3,00		3,00		3,00		3,00		Dinas Pemuda Dan Olahraga	
			Cabor Tradisional	Medali	-	5,00		5,00		5,00		5,00		Dinas Pemuda Dan Olahraga	
			Cabor Rekreasi	Cabor	4,00	5,00		5,00		5,00		5,00		Dinas Pemuda Dan Olahraga	
2	19	4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			733.894.259		717.237.036		742.361.228				
			Organisasi (Kwarcab)			7,00		8,00		8,00		23,00		Dinas Pemuda Dan Olahraga	
2	22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan													
2	22	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				2.089.297.525		2.089.297.525		2.089.297.525				
			Meningkatnya Persentase Warisan Nilai Budaya yang dilestarikan (Budaya Tak Benda 20	%	89.77	92,05		95,45		98,86		100,00		Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			unit, Bahasa Daerah 68 unit)												
			Cakupan Kesenian Tradisional Ikonik/Langka pada setiap daerah yang dilestarikan	%	40,00	60,00		80,00		90,00		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
2	22	3	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				5.996.386.055		2.660.471.246		2.753.665.248				
			Cakupan Kesenian Tradisional Populer pada setiap daerah yang dikembangkan.	%	40,00	60,00		80,00		90,00		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
2	22	4	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				330.000.000		38.836.909		40.186.982				
			Cakupan Sejarah Lokal dari setiap daerah yang dipublikasi (Sanggar Budaya 25 Unit)	%	16,00	24,00		32,00		40,00		44,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
2	22	5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				1.477.293.620		697.728.188		722.169.002				
			Cakupan Cagar Budaya setiap daerah yang dilestarikan (Cagar Budaya 2 buah, Desa Adat 25 buah)	%	25,93	37,04		74,07		92,59		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
2	22	6	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				4.416.500.000		2.390.790.121		2.474.537.426				
			Meningkatnya Akses masyarakat terhadap Museum (4 unit) (Total per tahun 20.000 orang)	%	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		
2	23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan													
2	23	2	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				818.412.278		2.368.876.036		2.451.855.688				
			Prosentase cakupan perpustakaan aras provinsi dan kabupaten yang telah menerapkan	%	60,00	75		90		100		100	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)			Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)				
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target			
			e-library												
			Prosentase Jumlah Pengunjung fisik dan jejaring di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT	%	25,00	50		75		100			100	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			Jumlah Koleksi daerah yang dihimpun	%	100,00	100		100		100			100	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
2	23	3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				75.000.000		717.237.036		178.104.455				
			Jumlah Koleksi Naskah Kuno yang diidentifikasi/dilestarikan setiap tahun	%	45,50	50,00		60,00		70,00			70,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	
			2.2 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan												
1	2		Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan												
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				183.200.970.024		139.178.770.469		144.054.082.159				
			Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi KLB Provinsi	%	100,00	100,00		100,00		100,00			100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
			Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (SPM Kesehatan Provinsi)	%	100,00	100,00		100,00		100,00			100,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	
			Persentase Balita	Per센 (%)	17,70	15,70		13,50		11,50			11,50	Dinas	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah	
							Tahun-1 (2024)			Tahun-2 (2025)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target		
			Stunting											Kesehatan Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil	
			Percentase Balita Wasting	Per센 (%)	20,50	19,50			18,50			17,50		17,50	Dinas Kesehatan Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
			Percentase Balita Underweight	Per센 (%)	8,50	7,50			7,00			6,50		6,50	Dinas Kesehatan Kependuduka n Dan Rencatatan Sipil
			Angka Kematian Ibu	Kasus/100.0 00 KH	192/100.000 KH	172/100.000 KH			152/100.000 KH			132/100.000 KH		132/100.000 KH	Dinas Kesehatan Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
			Angka Kematian Bayi	Kasus/1000 KH	10/1.000 KH	9/1.000 KH			8/1.000 KH			7/1.000 KH		7/1.000 KH	Dinas Kesehatan Kependuduka n Dan Rencatatan Sipil
			Angka Kematian Balita	Kasus/1000 KH	12/1.000 KH	11/1.000 KH			10/1.000 KH			9/1.000 KH		9/1.000 KH	Dinas Kesehatan Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil
			Percentase Rumah Sakit Terakreditasi	%	83,90	100,00			100,00			100,00		100,00	Dinas Kesehatan, Kependuduka n Dan Pencatatan Sipil

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			Persentase Kab/Kota yang mencapai eliminasi Malaria	%	31,81	70,00		80,00		90,00		90,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Kab/Kota dengan Angka Keberhasilan pengobatan Succes Rate (SR) TBC >85%	%	89,00	85,00		85,00		85,00		85,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Persentasi Kasus HIV Yang diobati	%	56,00	58,00		60,00		62,00		62,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar	%	50,00	60,00		65,00		70,00		70,00	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Persentasi jumlah penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	% (Kab/Kota)	0,00	36 (8 Kab/Kota)		63 (14 Kab/Kota)		63 (14 Kab/Kota)		63 (14 Kab/Kota)	Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Presentasi Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	%	50,00	70,00		90,00		100,00		100,00	Rs Jiwa Naimata Kupang		
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					102.878.323.404		96.908.862.163		100.303.495.604				
			Meningkatnya pencapaian SPM Rumah Sakit	%	78,20	100,00		100,00		100,00		100,00	Rsud Prof. W.Z Johannes		



Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			Meningkatnya kemandirian BLUD RSU	%	45,00	52,00		52,00		52,00		52,00		Rsd Prof. W.Z Johannes		
1	2	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				7.922.452.800		24.239.264.875		25.088.345.313					
			Terlaksananya Binwas Mutu SDM Kesehatan	%	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				218.039.184		3.634.428.457		3.761.739.336					
			Meningkatnya Kapasitas SDM Rumah Sakit	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		Rsd Prof. W.Z Johannes		
1	2	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN DAN MINUMAN				199.860.000		199.860.000		199.860.000					
			Ketaatan dan Kepatuhan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
2	5		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				2.831.893.500		2.831.893.500		2.831.893.500					
			1. Persentase Kabupaten/Kota yang menerapkan kebijakan	%	1,30	1,50		1,60		1,65		1,65		Dinas Kesehatan, Kependudukan		



Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			gerakan masyarakat hidup sehat										n Dan Pencatatan Sipil		
			2. Presentase Kabupaten/Kota yang melakukan Pembinaan Posyandu Aktif	%	2,23	2,10		2,10		2,10			2,10		
			3. Presentase Kabupaten/Kota yang minimal melaksanakan Posyandu Aktif	%	3,40	3,50		3,65		3,75			3,75		
2	14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana													
1	2	2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
			Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata anak per Wanita	2,29 Rata-rata anak per Wanita	2,27 Rata-rata anak per Wanita		2,2					Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS	20 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	18 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun		18 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun					Dinas Kesehatan, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		
			3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup, kewilayahan dan Mitigasi Bencana												
			3.1 Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar												
1	3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang													
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				17.349.999.000		13.201.581.052		13.664.020.994				
			Jumlah ketersediaan air baku dalam menunjang ketahanan pangan	M3	10.438.220	125.720		625.720		627.600		11.817.260	Dinas PUPR		
			Cakupan Operasi	%	25,00	20,00		40,00		40,00		100,00	Dinas PUPR		

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			Pemeliharaan Bangunan Penyedia Air Baku												
			Cakupan Penanganan Tanggul Sungai/ Pengendali Banjir	%	0,00	33,33		33,33		33,33		33,33		Dinas PUPR	
			Luas Areal Irigasi Fungsional	Ha	35.246,21	1000		2000		3000		41.246,21		Dinas PUPR	
			Cakupan Operasi dan Pemeliharaan Daerah Irigasi	%	25,00	23,58		37,74		38,68		100,00		Dinas PUPR	
1	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				4.500.000.000		97.374.777		100.785.731				
			Persentase Cakupan Layanan Air Minum Lintas Kabupaten/ Kota	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas PUPR	
1	3	4	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				100.000.000		100.000.000		100.000.000				
			Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Pengelolaan Persampahan TPA/ TPST/ SPA Kewenangan Provinsi yang Disusun	%	0,00	20,00		60,00		20,00		100,00		Dinas PUPR	
1	3	5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				2.690.000.000		2.690.000.000		2.690.000.000				
			Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional yang Disusun	%	0,00	60,00		20,00		20,00		100,00		Dinas PUPR	
			Persentase Rumah Tangga Menurut Sanitasi Layak	%	80,00	100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas PUPR	



Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
1	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				25.000.000		25.000.000		25.000.000				
			Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	%	0,00	0,00	0,00	75,00		25,00		100,00	Dinas PUPR		
1	3	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				1.600.000.000		6.694.212.028		6.928.704.473				
			Jumlah Lokasi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman pada KSDP	Lokasi	26,00	1,00		2,00		2,00		5,00	Dinas PUPR		
1	3	8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				100.000.000		100.000.000		100.000.000				
			Persentase Layanan Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung dan Pengelolaan Rumah Negara	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas PUPR		
1	3	9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				100.000.000		100.000.000		100.000.000				
			Persentase Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di KSDP dan Lintas Kabupaten/ Kota yang disusun	%	0,00	33,33		33,33		33,33		100,00	Dinas PUPR		
1	3	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				128.855.427.591		134.835.814.402		139.558.996.105				
			Persentase Kemantapan Jalan Kewenangan Provinsi	%	86,86	86,86		86,86		86,86		86,86	Dinas PUPR		
1	3	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				100.000.000		100.000.000		100.000.000				
			Ratio Tenaga Kerja	%	60,73	63,84		66,94		70,04		70,04	Dinas PUPR		



Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			Konstruksi Terlatih yang telah tersertifikasi ahli												
1	3	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				200.000.000		765.052.838		791.851.976				
			Cakupan wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda RUTR dan RDTR	%	0,00	43,48		86,96		100,00		100,00	Dinas PUPR		
			Persentase Peningkatan Kesesuaian Program Pemanfaatan Ruang	%	0,00	30,00		60,00		100,00		100,00	Dinas PUPR		
2	10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian													
2	10	3	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM				45.000.000		45.000.000		45.000.000				
			Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang selesai tepat waktu	%	0,00	33,33		33,33		33,33		100,00	Dinas PUPR		
2	10	7	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT				135.000.000		135.000.000		135.000.000				
			Persentase Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi	%	13,64	18,18		18,18		18,18		68,18	Dinas PUPR		
2	15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan													
2	15	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				3.896.352.824		478.794.067		495.565.508				
			Peningkatan Cakupan layanan angkutan umum	%	9,00	17,00		23,00		17,00		15,00	Dinas Perhubungan		
2	15	3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN				2.226.719.000		5.441.141.857		5.631.740.340				
			Peningkatan layanan pemanfaatan wilayah laut	%	8,00	11,00		14,00		17,00		15,00	Dinas Perhubungan		



Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			Cakupan Operasi Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan	%	66,00	33,00		33,00		33,00		100,00	Dinas Perhubungan		
3	29	Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral													
3	29	2	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GELOGOLOGIAN				657.955.520		589.185.418		609.824.073				
			Cakupan Pengelolaan Zona konservasi air tanah pada CAT setiap tahun	%	30,00	40,00		60,00		100,00		100,00	Dinas ESDM		
			Cakupan Pengelolaan Air Tanah setiap tahun (Tahun 2019 = 41 Rekomendasi Teknis, Tahun 2023 = 59 Rekomendasi Teknis)	%	25,00	50,00		75,00		100,00		100,00	Dinas ESDM		
3	29	3	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			730.730.920		456.667.422		472.664.086					
			Persentase Potensi sumber daya mineral yang terkelola (Tahun 2019=12 Jenis, Tahun 2023=6 Jenis)	%	16,00	17,00		19,00		22,00		22,00	Dinas ESDM		
		3.2 Meningkatnya Kualitas Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Daerah													
2	11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup													
2	11	2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				24.463.142		23.907.901		24.745.374				
			Persentase Pemanfaatan Dokumen Perencanaan LH	%	-	50,00		75,00		100,00		100,00	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup		
2	11	3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			490.505.567		479.372.545		496.164.550					
			Persentase pelayanan pengujian laboratorium	%	-	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kehutanan		

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
													Dan Lingkungan Hidup		
2	11	5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				984.355.840		962.013.882		995.712.395				
			Percentase limbah B3 yang diolah	%	11,18	25,00		30,00		33,00		33,00	Dinas Kehutanan Dan Lingkungan Hidup		
3	28	Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan													
3	28	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				18.197.672.189		17.784.639.007		18.407.619.496				
			Percentase peningkatan cakupan lahan kritis yang tertangani setiap tahun	%	-	1,30		1,32		1,32		1,32	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan		
3	28	4	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA				17.363.057		16.968.967		17.563.375				
			Percentase perlindungan terhadap objek kawasan konservasi SDA	%	-	10,99		10,99		10,99		10,99	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan		
3	28	5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN				97.585.333		95.370.434		98.711.178				
			Percentase luasan hutan yang dimanfaatkan untuk Perhutanan Sosial dan Masyarakat Hukum Adat	%	15,39	15.43		15.47		15.51			Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan		



Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah								
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)											
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)										
3.3 Meningkatnya Ketangguhan Bencana Daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim																					
1 5 Urusan Ketenteraman. Ketenteraman Umum Dan Linmas																					
1	5	3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				1.419.687.500		1.357.669.940		1.405.227.941										
			Cakupan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang memiliki dokumen Kebencanaan	%	80 (4 Dokumen)	100,00		0,00		0,00		100 (5 Dokumen)	BPBD								
			Cakupan Pemasangan Rambu Peringatan dini pada daerah rawan bencana	%	60 (6 Lokasi)	80,00		100,00		0,00		100 (10 Lokasi)	BPBD								
			Cakupan Desa/Kelurahan tangguh bencana	%	87,5 (140 Desa/Kelurahan)	93,75		100,00		0,00		100 (160 Desa/Kelurahan)	BPBD								
			Persentase SDM Bidang kebencanaan yang terlatih	%	18,18 (40 orang)	45,45		72,73		100,00		100 (220 orang)	BPBD								
			Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki buffer stok logistik	%	100 (22 Kabupaten/Kota)	100,00		100,00		100,00		100 (22 Kabupaten/Kota)	BPBD								
1	5	4	PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				52.000.000		52.597.382		54.439.823										
			Presentase Pencegahan Daerah Berpotensi Rawan Kebakaran setiap Tahun	%	57,62	100,00		100,00		100,00		100,00	Satuan Polisi Pamong Praja								
1 6 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial																					
1	6	6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				100.000.000		23.984.406		24.824.559										
			Persentase korban bencana alam dan sosial	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Sosial								



Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			daerah provinsi yang tertangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya												
4. Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif															
4.1 Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif dan Kolaboratif															
1		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar													
1	5	2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.808.842.261		2.030.380.250		2.101.502.711				
			Presentase Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	91,49	100,00		100,00		100,00		100,00	Satuan Polisi Pamong Praja		
2	16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika													
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1.072.000.000		1.069.863.469		1.107.339.859				
			Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	88,38	85,00		90,00		95,00		95,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika		
2	16	3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				4.990.569.734		4.887.298.604		5.048.146.146				
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,28	2,50		2,70		3,00		3,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika		
			Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan Internet berkualitas yang dikelola Dinas KOMINFO	PD	5,00	34,00		34,00		34,00		34,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika		
2	20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik													
2	20	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				22.710.143		22.710.143		22.710.143				
			Percentase Pemanfaatan Layanan Pusat Data Statistik Sektoral	%	79,49	85,00		90,00		95,00		95,00	Dinas Komunikasi Dan Informatika		

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
														Informatika	
2	21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian				35.363.918		34.561.261		35.771.913					
2	21	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Level	II+	III		III +		III +		III +	Dinas Komunikasi Dan Informatika		
2	24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				761.500.000		353.989.594		366.389.543					
2	24	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya pengelolaan arsip daerah	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
			Meningkatnya Angka Pengawasan Kearsipan	Angka Pengawasan Arsip	0,00	60,00		70,00		80,00		80,00	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
2	24	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	%	100,00	100,00	108.500.000		57.378.771		59.388.700		Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan		
4	1	Sekretariat Daerah													
4,00	1,00	1, 00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												
			Cakupan pelayanan administrasi pimpinan	%	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Administrasi Pimpinan		
			Cakupan Pemenuhan Pelayanan Keprotokol	%	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Administrasi Pimpinan		

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			Cakupan Pemenuhan Layanan Administrasi Perencanaan, Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	%	85,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Administrasi Pimpinan		
4,00	1,00	1,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH												
			Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten	%	100 (180 kegiatan)	100 (180 kegiatan)		100,00		100,00		100,00	Biro Umum		
4	1	2	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI				632.137.500		617.789.845		639.430.488				
			Persentase Perangkat Daerah yang memiliki predikat RB "Istimewa" (Kategori AA/Nilai=80-90)	%	39,39	45,45		51,51		57,57		57,57 (19 PD)	Biro Organisasi		
			Level Maturitas Kelembagaan	Nilai	40,67	45,00		47,00		49,00		49,00	Biro Organisasi		
			Indeks Pelayanan Publik	Nilai	2,81 (Cukup)	2,85 (Cukup)		3,1 (Baik)		3,2 (Baik)		3,2 (Baik)	Biro Organisasi		
			Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan RB Tematik	%	0,00	15,15		30,30		45,45		45,45 (15 PD)	Biro Organisasi		
4	1	3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH				820.319.213		18.700.399		29.783.269				
			Persentase cakupan tugas-tugas administrasi kewilayahan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Pemerintahan		
			Persentase cakupan fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Pemerintahan		
			Persentase Kabupaten/Kota yang dilakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan otonomi daerah dan penataan urusan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Pemerintahan		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
					Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
				Persentase tingkat ketepatan waktu penyelesaian Laporan penyelenggaraan pemerintahan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Pemerintahan
				Persentase cakupan kerja sama daerah yang difasilitasi	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Pemerintahan
4	1	4	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				8.796.475.476			8.596.821.574			8.897.960.782	
				Persentase cakupan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Pemerintahan
4	1	5	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				782.820.540			765.052.838			791.851.976	
				Peningkatan persentase rancangan Peraturan Daerah yang diselesaikan setiap tahun	%	312,26	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Hukum
				Cakupan penanganan kasus Litigasi, Non-Litigasi dan HAM setiap tahun	%	526,60	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Hukum
4	1	6	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				562.652.782			549.882.053			569.143.944	
				Persentase cakupan kebijakan substansi perekonomian yang terkonsolidasi dengan baik (kebijakan ekonomi makro-mikro dan SDA)	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan
				Persentase Cakupan Pembinaan, koordinasi dan fasilitasi BUMD dan BLUD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tekonsolidasi dengan baik	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
4	1	7	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA					6.239.980.846			6.098.349.788			6.311.969.695		
				Percentase penyelesaian paket pengadaan barang dan jasa	%	85,00	100,00		100,00		100,00			100,00	Biro PBJ	
				Percentase jumlah paket pengadaan langsung yang dilakukan melalui e-Purchasing	%	90,00	100,00		100,00		100,00			100,00	Biro PBJ	
				Percentase JF Pengelola PBJ	%	44,00	64,00		84,00		100,00			100,00	Biro PBJ	
4	1	8	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN					97.852.345			95.631.356			98.981.239		
				Efektivitas peningkatan kinerja administrasi pembangunan	%	99,99	100,00		100,00		100,00			100,00	Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	
4	2		Sekretariat DPRD													
4	2	2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					74.676.943.331			67.501.647.751			69.866.171.961		
				Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	99,40	100,00		100,00		100,00			100,00	Sekretariat Dprd Provinsi Ntt	
5	1		Perencanaan													
5	1	2	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.997.630.556			1.952.290.268			2.020.677.304		
				Konsistensi penjabaran Program-Program RPD ke dalam Dokumen Perencanaan Lainnya	%	0,00	100,00		100,00		100,00			100,00	Bappelitbangda	
5	1	3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN					4.806.925.005			4.697.822.066			4.862.382.701		



Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
		PEMBANGUNAN DAERAH													
			Kesesuaian Dokumen perencanaan (RPD, RKPD, Renstra, Renja) Perangkat Daerah Provinsi, lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	%	0,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Bappelitbangda		
5	2	KEUANGAN													
5	2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					910.292.801.356		889.837.088.500		921.007.310.405				
			Percentase Penyampaian dan Penetapan Dokumen Keuangan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan perundangan – undangan	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Badan Keuangan Daerah		
			Percentase Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang difasilitasi tepat waktu	%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00	Badan Keuangan Daerah		
5	3	Kepegawaian													
5	3	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					3.824.047.207		3.737.252.677		3.868.165.399				
			Percentase formasi jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi	%	80,00	85,00		95,00		90,00			Badan Kepegawaian daerah		
			Presentase Penurunan indisipliner ASN	%	85,00	90,00		90,00		95,00			Badan Kepegawaian daerah		
			Presentase Capaian Kinerja "BAIK" ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT	%	90,00	95,00		95,00		95,00			Badan Kepegawaian daerah		
			Presentase Penurunan indisipliner ASN	%	85,00	90,00		95,00		95,00			Badan Kepegawaian daerah		



Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
						Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
						Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
														aerah	
5	4	Fendidikan Dan Pelatihan													
5	4	2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				20.034.920.941			20.265.994.542			20.975.894.765		
			Predikat akreditasi Lembaga Penyelenggara Pelatihan	Predikat Akreditasi	B	A		A		A		A		A BPSDM	
			Akreditasi Program Pelatihan Dasar CPNS	Predikat Akreditasi	B	A		A		A		A		A BPSDM	
			Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Predikat Akreditasi	B	B		A		A		A		A BPSDM	
			Akreditasi Program Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Predikat Akreditasi	B	B		A		A		A		A BPSDM	
			Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional	%	-	20,00		40,00		60,00			60,00	BPSDM	
			Pelatihan sesuai standar	%	60,00	100,00		100,00		100,00			100,00	BPSDM	
			Pelatihan sesuai kebutuhan	%	60,00	100,00		100,00		100,00			100,00	BPSDM	
			Tersertifikasinya tenaga pelatihan pada BPSDMD	%	90,00	100,00		100,00		100,00			100,00	BPSDM	
			Terisinya formasi jabatan fungisional widyaiswara sesuai formasi	%	-	100,00		100,00		100,00			100,00	BPSDM	
			Tersedianya tenaga ahli atau narasumber sesuai kebutuhan pelatihan	%	-	100,00		100,00		100,00			100,00	BPSDM	
5	5	Penelitian Dan Pengembangan													
5	5	2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				1.185.128.297			1.158.229.399			1.198.801.170		
			Percentase Rekomendasi Hasil Kelitbang dan Fasilitasi Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	%	0,00	100,00		96,55		100,00			100,00	Bappelitbangd a	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
					Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
					Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
5	6	Pengelolaan Perbatasan												
5	6	2	PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN				975.333.326		765.052.743		791.851.877		Badan Perbatasan Daerah	
			Meningkatnya Cakupan Layanan Pemerintah Daerah dan KL (Jumlah Layanan Pemerintah Daerah dan KL)	%	100,00	3 Dok		3 Dok		3 Dok		9 Dok	Badan Perbatasan Daerah	
			Meningkatnya Cakupan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan dan Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	%	100,00	4 Dok		4 Dok		4 Dok		12 Dok	Badan Perbatasan Daerah	
			Meningkatnya Cakupan Monitoring dan Evaluasi di Kawasan Perbatasan	%	100,00	4 Dok		4 Dok		4 Dok		12 Dok	Badan Perbatasan Daerah	
5	7	Pengelolaan Penghubung												
5	7	2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG				591.301.000		589.764.888		610.423.841		Badan Penghubung	
			Meningkatnya Cakupan Pembinaan Masyarakat	%	100,00	80,00		90,00		100,00		100	Badan Penghubung	
			Meningkatnya cakupan layanan Pemerintah Daerah	%	80,00	80,00		90,00		100,00		100	Badan Penghubung	
			Meningkatnya cakupan Promosi Daerah	%	100,00	80,00		90,00		100,00		100	Badan Penghubung	
6	1	Inspektorat Daerah												
6	1	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				5.767.233.792		5.637.588.831		5.835.068.681		Inspektorat Daerah	
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP	Inspektorat Daerah	
			Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pada PD di Provinsi dan Kabupaten/Kota	%	100,00	100		100		100		100	Inspektorat Daerah	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
6	1	3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.759.284.468		1.722.986.304		1.783.341.021				
			Percentase Pendampingan dan Asistensi pada PD di Provinsi	%	100,00	100			100		100		100	Inspektorat Daerah		
8	1		Kesatuan Bangsa Dan Politik													
8	1	2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					75.630.759		73.914.164		76.503.313				
			Presentase Peningkatan Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan bagi siswa/wi Tingkat SMA/SMU sederajat, Pengurus Parpol, Ormas dan FPK, FKUB, FKDM	%	100,00	70,00			80,00		87,00		100,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah		
8	1	3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					3.920.549.243		3.831.564.404		3.965.780.783				
			Presentase Peningkatan Pendidikan politik bagi siswa/wi tingkat SMA/SMU sederajat, Pemilih Perempuan, Ormas, Pengurus Parpol, FPK, FKUB, FKDM	%	3,60	73,00			81,00		88,00		100,00	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah		
8	1	4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					40.523.684		39.603.916		40.991.207				
			Presentase Peningkatan	%	65,30	70,00			75,00		81,00		100,00	Badan		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2022)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	Perangkat Daerah		
							Tahun-1 (2024)			Tahun-2 (2025)						
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)				
			Pengawasan dan Pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan Ijin penelitian.											Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah		
8	1	5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA				263.246.501		257.271.586		266.283.586					
			Presentase Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya Bagi Ormas	%	100,00	70,00		79,00		93,00		100,00		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah		
8	1	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				2.289.003.786		2.237.050.190		2.315.412.119					
			Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan meningkatnya Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	%	100,00	63,00		75,00		88,00		100,00		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah		

